

# KAJIAN TERHADAP SAJIAN INFORMASI MEDIA MASSA LOKAL MELALUI LIMA KATEGORI ISU

(GOOD GOVERNANCE,  
HAK ASASI MANUSIA, PEREMPUAN DAN/ATAU ANAK,  
KRIMINALITAS, DAN LINGKUNGAN HIDUP)

## DARI PERSPEKTIF AKUMASSA

Penyusun:

Manshur Zikri, Lulus Gita Samudra & Otty Widasari

Penyunting Bahasa:

Otty Widasari

**KAJIAN TERHADAP  
SAJIAN INFORMASI  
MEDIA MASSA LOKAL  
MELALUI LIMA KATEGORI ISU**

**(GOOD GOVERNANCE,  
HAK ASASI MANUSIA, PEREMPUAN DAN/ATAU ANAK,  
KRIMINALITAS, DAN LINGKUNGAN HIDUP)**

**DARI PERSPEKTIF AKUMASSA**

Penyusun:  
**Manshur Zikri, Lulus Gita Samudra & Otty Widasari**

Penyunting Bahasa:  
**Otty Widasari**

**KAJIAN TERHADAP  
SAJIAN INFORMASI  
MEDIA MASSA LOKAL  
MELALUI LIMA KATEGORI ISU**

**(GOOD GOVERNANCE,  
HAK ASASI MANUSIA, PEREMPUAN DAN/ATAU ANAK,  
KRIMINALITAS, DAN LINGKUNGAN HIDUP)**

**DARI PERSPEKTIF AKUMASSA**

**KAJIAN TERHADAP  
SAJIAN INFORMASI  
MEDIA MASSA LOKAL  
MELALUI LIMA KATEGORI ISU**

(GOOD GOVERNANCE,  
HAK ASASI MANUSIA, PEREMPUAN DAN/ATAU ANAK,  
KRIMINALITAS, DAN LINGKUNGAN HIDUP)

**DARI PERSPEKTIF AKUMASSA**

---

© AKUMASSA - Forum Lenteng

Jakarta, Indonesia

2013

Penyusun **Manshur Zikri, Lulus Gita Samudra & Otty Widasari**

Penyunting Bahasa **Otty Widasari**

Pusat Riset dan Data **akumassa** & **Komunitas Rekam Media**

Rancangan & Tata Letak Isi **Andang Kelana**

Diterbitkan oleh **AKUMASSA - Forum Lenteng**

Jl. Raya Lenteng Agung No. 34 RT.007/RW.02

Lenteng Agung, Jakarta Selatan - 12610

Indonesia

T/F. +62 7884 0373

E. [info@akumassa.org](mailto:info@akumassa.org)

W. [akumassa.org](http://akumassa.org) | [forumlenteng.org](http://forumlenteng.org)

F. [facebook.com/akumassa](https://facebook.com/akumassa) | [facebook.com/forumlenteng](https://facebook.com/forumlenteng)

T. [twitter.com/akumassa](https://twitter.com/akumassa) | [twitter.com/forumlenteng](https://twitter.com/forumlenteng)

# DAFTAR ISI

Colophon	iv
Pengantar	x
Daftar Isi	xi
Daftar Bagan	xi
Daftar Gambar	xi
Daftar Tabel	xi
Daftar Grafik	xi

-

## BAB I

<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>I.1. LATAR BELAKANG MASALAH</b>	<b>3</b>
I.1.1. Kondisi Bermedia	4
I.1.1.1. Penguasa-Penguasa Baru	4
I.1.1.2. Banjir Informasi	11
I.1.1.3. Pertarungan Politik untuk Tampuk Kekuasaan	14
I.1.2. Gambaran Lima Isu dalam Pemberitaan Media Massa: Sebuah Pratinjau	16
I.1.3. AKUMASSA	20
<b>I.2. RUMUSAN MASALAH</b>	<b>23</b>
I.2.1. Pertanyaan Penelitian	23
<b>I.3. TUJUAN PENELITIAN</b>	<b>23</b>
<b>I.4. MANFAAT PENELITIAN</b>	<b>24</b>

<b>BAB II</b>			<b>BAB IV</b>	
<b>KAJIAN TEORITIK</b>		25	<b>HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	75
II.1. BEBERAPA PERSPEKTIF TEORITIS		28	IV.1. TEMUAN DAN HASIL OLAHAN DATA	77
II.1.1. Literasi Media: perspektif untuk menafsirkan media		28	IV.1.1. Hasil Analisis Trend Linear	80
II.1.2. Jurnalisme Warga: masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek		31	IV.2. PEMBAHASAN	85
II.1.3. Kritisisme terhadap Media: demokrasi dan kesetaraan arus informasi		35	IV.2.1. Penyajian Berita Media Massa Lokal	86
II.2. DEFINISI KONSEPTUAL		40	<i>IU.2.1.1. Aceh Besar (Serambi Indonesia dan Prohaba)</i>	86
II.2.1. Media Massa Lokal		40	<i>IU.2.1.2. Tangerang Selatan (Tangsel Pos dan Suara Tangsel)</i>	<b>90</b>
II.2.2. Definisi Isu		44	<i>IU.2.1.3. Depok (Radar Depok, Monitor Depok, dan Jurnal Depok)</i>	99
II.2.2.1. Good Governance		45	<i>IU.2.1.4. Jakarta (Berita Kota dan Warta Kota)</i>	<b>109</b>
II.2.2.2. Hak Asasi Manusia		47	<i>IU.2.1.5. Jember (Radar Jember dan jemberpost.com)</i>	<b>116</b>
II.2.2.3. Perempuan dan/atau Anak		48	<i>IU.2.1.6. Banten (Kabar Banten dan Banten Raya Post)</i>	<b>122</b>
II.2.2.4. Kriminalitas		53	<i>IU.2.1.7. Lombok Utara (Radar Lombok dan Lombok Pos)</i>	<b>127</b>
II.2.2.5. Lingkungan Hidup		54	<i>IU.2.1.8. Surabaya (Radar Surabaya dan Surabaya Post)</i>	<b>132</b>
II.3. KERANGKA BERPIKIR		57	IV.2.2. Realitas Sosial dan Kebijakan Redaksi Media Massa Lokal	141
<b>BAB III</b>			<b>BAB V</b>	
<b>METODOLOGI PENELITIAN</b>		59	<b>KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	173
III.1. METODE PENELITIAN		61	 	
III.1.1. Tujuan Metode Penelitian		63	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	179
III.2. OBYEK PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS		64	 	
III.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN		65	<b>PROFIL PENELITI &amp; KONTRIBUTOR PROGRAM PEMANTAUAN MEDIA</b>	
III.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA		65	<b>BERBASIS KOMUNITAS REKAM MEDIA-AKUMASSA</b>	187
III.5. METODE ANALISIS		70		
III.5.1. Analisis Data Kuantitatif		71		
III.5.2. Analisis Data Kualitatif		72		
III.6. KERANGKA KERJA PENELITIAN		73		

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian	57
Bagan 2. Metode Analisis, <i>embed the data</i> (Creswell, 2006: 7)	70
Bagan 3. Kerangka Kerja Penelitian	73

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Format Laporan Narasi Mingguan Pemantauan	69
---	----

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Kecenderungan isu good governance Serambi Indonesia	87
Grafik 2. Kecenderungan isu kriminalitas Prohaba	87
Grafik 3. Kecenderungan isu perempuan dan/atau anak Tangsel Pos	91
Grafik 4. Grafik 4 Kecenderungan isu kriminalitas Tangsel Pos	92
Grafik 5. Kecenderungan isu <i>good governance</i> Suara Tangsel	92
Grafik 6. Kecenderungan isu lingkungan hidup Suara Tangsel	93
Grafik 7. Kecenderungan isu kriminalitas Suara Tangsel	94
Grafik 8. Kecenderungan isu <i>good governance</i> Radar Depok	100
Grafik 9. Kecenderungan isu <i>good governance</i> Monitor Depok	100
Grafik 10. Kecenderungan isu <i>good governance</i> Jurnal Depok	101
Grafik 11. Kecenderungan isu kriminalitas Radar Depok	101
Grafik 12. Kecenderungan isu lingkungan hidup Radar Depok	102
Grafik 13. Kecenderungan isu kriminalitas Monitor Depok	102
Grafik 14. Kecenderungan isu lingkungan hidup Monitor Depok	103
Grafik 15. Kecenderungan isu HAM di Monitor Depok	104
Grafik 16. Kecenderungan isu kriminalitas di Berita Kota	109
Grafik 17. Kecenderungan isu lingkungan hidup Berita Kota	110
Grafik 18. Kecenderungan isu perempuan dan/atau anak Warta Kota	110

Grafik 19. Kecenderungan isu perempuan/atau anak Radar Jember	116
Grafik 20. Kecenderungan isu kriminalitas Radar Jember	117
Grafik 21. Kecenderungan isu <i>good governance</i> Banten Raya Post	122
Grafik 22. Kecenderungan isu kriminalitas Kabar Banten	123
Grafik 23. Kecenderungan isu lingkungan hidup Kabar Banten	125
Grafik 24. Kecenderungan isu lingkungan hidup Banten Raya Post	126
Grafik 25. Kecenderungan isu <i>good governance</i> Radar Lombok	128
Grafik 26. Kecenderungan isu <i>good governance</i> Lombok Post	128
Grafik 27. Kecenderungan isu HAM Radar Lombok	129
Grafik 28. Kecenderungan isu lingkungan hidup Radar Lombok	129
Grafik 29. Kecenderungan isu perempuan dan/atau anak Lombok Post	130
Grafik 30. Kecenderungan isu <i>good governance</i> Radar Surabaya	133
Grafik 31. Kecenderungan isu good governance Surabaya Post	134
Grafik 32. Kecenderungan isu kriminalitas Radar Surabaya	134
Grafik 33. Kecenderungan isu kriminalitas Surabaya Post	135
Grafik 34. Kecenderungan isu perempuan dan/atau anak Surabaya Post	135

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk Tabel Laporan Harian Pemantau	67
Tabel 2. Bentuk Tabel Laporan Mingguan Pemantauan	68
Tabel 3. Jumlah artikel berita yang dipantau selama periode 13 Februari – 3 Juni 2012	78
Tabel 4. Rata-rata frekuensi isu dalam satu hari di setiap media massa lokal yang dipantau	79
Tabel 5. Uji regresi isu <i>good governance</i>	81
Tabel 6. Uji regresi isu hak asasi manusia	81
Tabel 7. Uji regresi isu perempuan dan/atau anak	82
Tabel 8. Uji regresi isu kriminalitas	82
Tabel 9. Uji regresi isu lingkungan hidup	84
Tabel 10. Rangkuman dari kecenderungan garis linear masing-masing isu pada setiap media massa lokal	84

# PENGANTAR

BUKU HASIL penelitian Rekam Media—AKUMASSA ini merupakan buku pertama yang dihasilkan oleh program pemberdayaan komunitas berbasis komunitas, AKUMASSA, yang merupakan agenda Forum Lenteng tahun 2012-2013 dalam kerangka kerja pemberdayaan media oleh masyarakat. Program AKUMASSA sendiri telah dimulai sejak 2008 dengan melibatkan kerja jaringan dengan berbagai komunitas di berbagai daerah di Indonesia dalam hal produksi informasi dan distribusi pengetahuan mandiri melalui media.

Setelah menggiatkan program keaksaraan media di kalangan masyarakat melalui komunitas, di tahun 2012 ini AKUMASSA mulai melangkah ke tahap kritisisme media dengan melakukan kerja pemantauan media massa lokal oleh komunitas. Pemantauan kinerja media massa lokal oleh warga ini merupakan sebuah aksi mendorong masyarakat untuk bisa melihat media massa secara obyektif.

Penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu satu tahun, sejak Pebruari 2012 sampai Pebruari 2013, dengan melibatkan pemantau dari 10 kota di Indonesia. Latar belakang para pemantau yang berasal dari komunitas aktif yang telah bekerja di bidang pemberdayaan media selama kurang lebih 5 tahun terakhir. Hal tersebut yang menjadikan penelitian ini menjadi khas, di mana aksi kritisisme media tidak hanya dilakukan oleh sebuah organisasi atau lembaga, melainkan oleh komunitas akar rumput, yang ikut berperan serta dalam demokratisasi media.

Buku ini merupakan rangkuman dan analisa hasil riset selama rentang waktu yang disebutkan di atas dan akan diterbitkan dalam bentuk yang lebih populer. Hal ini dimaksudkan untuk mengemas informasi penelitian Rekam

Media kepada masyarakat yang lebih luas dan mendapat gambaran bagaimana situasi bermedia di Indonesia, khususnya di lokasi-lokasi penelitian ini.

Forum Lenteng mengucapkan terimakasih kepada Cipta Media Bersama dan Ford Foundation atas dukungan pada proyek ini. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna bagi penggiat media, komunitas, mahasiswa dan masyarakat umum untuk dapat digunakan sebagai wawasan tentang kondisi bermedia di beberapa daerah di Indonesia.

Jakarta, April 2013,

**Otty Widasari**  
Koordinator Program AKUMASSA

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**



### I.1. LATAR BELAKANG MASALAH

ERA REFORMASI di Indonesia, yang dimulai sejak tahun 1998, adalah era yang, pada masa awalnya, digambarkan sebagai sebuah era keterbukaan informasi dan kebebasan bermedia. Aksi bermedia tidak lagi berada di bawah represi pemerintah atau negara sebagaimana yang terjadi di masa pemerintahan sebelumnya. Setiap orang memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan dan mengelola informasi sendiri. Pada masa ini, kehadiran berbagai media massa tiba-tiba mengalami peningkatan jumlah yang besar.<sup>1</sup> Hal ini didorong oleh euforia semangat keterbukaan dan kebebasan yang diusung dalam gerakan Reformasi tersebut.

---

1. Berdasarkan sumber data dari Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika, tahun 1998, jumlah media massa di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 1991 hingga 1998. Surat kabar harian mengalami peningkatan dari jumlah 69 menjadi 92 surat kabar; surat kabar mingguan meningkat dari jumlah 89 menjadi 122 surat kabar; total seluruh media cetak (termasuk surat kabar harian, mingguan, majalah bulanan, dwibulanan, tribulanan, serta buletin) meningkat dari jumlah 270 menjadi 370 media cetak [lihat Agus Sachar, *Budaya Visual Indonesia* (Penerbit Erlangga, 2007) hlm. 132 [Diakses dari <http://books.google.co.id/books?id=PoDI8Fn6GNcC&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&cf=false>, tanggal 31 Oktober 2012]. Sementara itu, data lainnya, dari Direktori Pers Indonesia, tahun 2002-2003, menyebutkan bahwa jumlah penerbitan yang masuk daftar Departemen Penerangan di Indonesia mengalami lonjakan dari 282 penerbitan pada tahun 1997 menjadi 1675 penerbitan pada akhir tahun 1999. Sedangkan Dewan Pers, pada tahun 2001, menunjukkan jumlah penerbitan media cetak terus mengalami peningkatan lagi menjadi 2033 penerbitan. Fenomena ini semakin ditegaskan dalam Laporan Tahunan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tahun 2000-2001, yang menunjukkan bahwa muncul dan berkembangnya media-media dalam lingkup lokal di sejumlah daerah pasca kebebasan pers tersebut [Lihat di Iwan Awaluddin Yusuf, "Memotret Industri Majalah Bersegmen di Indonesia" (*Bincang Media*, 27 Mei 2010) [Diakses dari <http://bincangmedia.wordpress.com/2010/05/27/memotret-industri-majalah-bersegmen-di-indonesia/>, tanggal 31 Oktober 2012].

Namun pada kenyataannya, situasi yang fleksibel dalam industri dan distribusi informasi ini lebih banyak dimanfaatkan oleh para pemilik modal yang berasal dari kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar dan lain sebagainya. Semangat reformasi yang seharusnya membawa angin demokrasi yang diimpi-impikan oleh segenap masyarakat Indonesia tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat itu sendiri. Lebih jauh tentang kebebasan bermedia, informasi yang seharusnya jadi milik masyarakat seutuhnya justru dikuasai oleh sebagian kecil lembaga atau perusahaan-perusahaan media.

### I.1.1. Kondisi Bermedia

Secara ringkas, terdapat tiga keadaan utama yang menggambarkan situasi bermedia di Indonesia belakangan ini. Pertama, penguasaan informasi oleh pemilik modal (lembaga komersil) yang mengutamakan kepentingan bisnis dan memunculkan gagasan *sinergi media*. Kedua, limpahan jutaan informasi tiap detik seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi baik media massa cetak, siar maupun *online* dalam percepatan arus informasi, dan munculnya fenomena persaingan antar media. Ketiga, nuansa kompetisi yang semakin menguat dari masing-masing perusahaan media karena faktor kepentingan politis untuk tampuk kekuasaan.

#### I.1.1.1. Penguasa-Penguasa Baru

Situasi dalam kancah industri media berubah drastis setelah Orde Baru runtuh. Dimulai dari pemusatan informasi, yang semula bernafas pembangunan yang menjadi kedok program pemerintah otoriter, menjadi semangat Reformasi di segala bidang dengan mengusung semangat demokrasi, keterbukaan dan kebebasan berpendapat. Semua pihak bersemangat untuk ikut ambil bagian dalam euforia kebebasan itu, dan hal ini mendapat respon hangat dari masyarakat yang memiliki semangat yang sama. Opini publik pun terbentuk, rakyat menjadi semakin kritis dan merasa harus mengeluarkan pendapatnya untuk selalu menjaga demokrasi tersebut.

Beberapa pihak tertentu melihat peluang ini, terutama kalangan pebisnis—selain kalangan jurnalis dan media sendiri—juga di kalangan intelektual yang lahir di kampus-kampus melalui buletin-buletinnya, para aktivis, dan pihak-pihak lain. Semua pihak berlomba-lomba untuk menyumbangkan keterlibatannya sebagai bukti dukungan terhadap sebuah perubahan demokrasi. Hal inilah yang kemudian justru memicu kompetisi industri media.

Kebijakan-kebijakan dari para pelaku media berubah seiring naiknya B.J. Habibie menjadi Presiden Republik Indonesia, pasca kejatuhan kekuasaan Orde Baru di tahun 1998. Pada masa itu, Muhammad Yunus Yosfiah, yang ditunjuk sebagai Menteri Penerangan, mengambil satu kebijakan untuk membatalkan Peraturan Menteri Penerangan 1984 (Permenpen 01/1984) yang memberikan otoritas bagi pemerintah untuk mencabut izin penerbitan media cetak, dan lantas menggantinya dengan Permenpen 01/1998. Hal ini menyebabkan diterbitkannya hampir 500 izin baru penerbitan dalam kurun waktu 6 bulan pertama jabatannya, yang mendorong satu keadaan kompetisi industri yang belum pernah terjadi sebelumnya.<sup>2</sup>

Menguatnya iklim kompetisi perusahaan media ini, menurut Sen & Hill (2000), salah satunya didorong oleh krisis finansial yang terjadi pada masa itu. Kebijakan baru tentang aksi bermedia yang digagas oleh Menteri akhirnya meningkatkan kepemilikan oleh modal asing hingga 25% (pada saat itu) dan menawarkan harapan baru bagi beberapa perusahaan media yang terperangkap krisis finansial. Selain itu, agenda Reformasi yang semakin populer di kalangan masyarakat memunculkan tuntutan akan kebebasan pers: para jurnalis berhak mengeluarkan aspirasinya secara bebas. Kecenderungan untuk tidak mau memisahkan diri dari para pembaca, yang umumnya dari kalangan menengah dan anti pemerintah, mempengaruhi pers untuk setidaknya terlihat bebas dari pengaruh pemerintah dalam rangka mempertahankan status sebagai surat kabar utama. Hal ini memicu langkah-langkah baru dari para pelaku media, seperti melepaskan diri dari pengaruh partai, membuka akses komunikasi berbasis satelit dan digital bagi seluruh wilayah di Indonesia, serta memungkinkan munculnya kalangan konglomerat dan lingkungan konglomerasi di ranah pers.<sup>3</sup>

Pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid, reformasi dalam hal kebebasan berpendapat semakin memuncak. Dengan tujuan baik saat itu, Keputusan Presiden (Keppres) No. 136/1999 menghapus keberadaan 'senjata utama' rezim Soeharto, yakni Departemen Penerangan, yang dulunya menguasai media melalui sensor. Sebagai penggantinya, melalui Keppres No. 153/1999, dibentuk Badan Komunikasi dan Informasi Nasional pada tanggal 7 Desember 1999. Bergulirnya waktu, badan tersebut sekarang menjadi Kementerian Komunikasi dan Informasi.

2. Krishna Sen dan David T. Hill, *Media, Culture, and Politics in Indonesia* (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 69-70.

3. Krishna Sen dan David T. Hill, *ibid.*, hlm. 70-71

Namun, lembaga tersebut belakangan ini akhirnya kembali mewujudkan layaknya Departemen Penerangan—yang menjadi lembaga kontrol wilayah komunikasi massa di masa lalu—versi masa kini dengan kemasan yang berbeda. Pembatasan terhadap penggunaan internet bagi masyarakat bahkan dirasa berlebihan. Jika di zaman Orde Baru, segala larangan dibungkus rapi dengan slogan ‘menjaga stabilitas nasional’, maka saat ini, slogan-slogan moral yang menyerahkan pendampingan pengawasan kepada ideologi keagamaanlah yang menjadi kemasannya.

Kemudian pada implementasinya, langkah demokratis yang telah dilakukan oleh dua masa pemerintahan setelah Reformasi tersebut malah seolah-olah menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi, dua masa tersebut berkontribusi untuk membuka semangat demokrasi dalam hal kebebasan berekspresi dan berpendapat, khususnya dalam hal bermedia. Namun, di sisi lain, justru menjadi pemusatan kekuasaan baru terhadap putaran arus distribusi informasi yang dilakukan oleh pemilik modal.

Perpindahan penguasaan terhadap arus informasi dari tangan negara ke tangan para pemilik modal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan produksi dan arus informasi di tingkat bawah. Kita memang sedang merayakan pembebasan masyarakat dari dominasi pemaknaan realitas yang dilakukan oleh penguasa. Namun sebagaimana argumen Dedi N. Hidayat (2001), nyatanya kedekatan masyarakat terhadap situasi komunikasi yang bebas dari dominasi penguasa itu pun harus kembali dipertanyakan. Hidayat menjelaskan lebih lanjut:

*“Memang ada sesuatu yang baru dalam diri pers di tanah air beserta realitas simbolik yang diproduksi. Adapula sesuatu yang tidak lagi seperti dulu dalam diri publik konsumen industri media kita. Dan sebagian dari perubahan itu adalah yang sah untuk dirayakan. Namun ada banyak hal lain, hal-hal yang tidak perlu dirayakan, yang tetap seperti tempo hari, bahkan semakin kuat dan telanjang. Basis sistem produksi yang melahirkan teks-teks isi media kita tetap yang dulu juga, yakni yang digerakkan oleh dinamika never-ending circuit of capital accumulation (atau sirkuit money-commodity-more money)...”*<sup>4</sup>

Pada kenyataannya, situasi perubahan yang digembar-gemborkan dalam pergantian masa pemerintahan ini berjalan dengan timpang. Kebebasan berekspresi dan berpendapat serta keterbukaan media memang terjadi. Namun, hal ini hanya bisa

4. Dedy N. Hidayat. ‘Pengantar’ Dalam Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. (Yogyakarta: LkiS, 2001), hlm. vii-viii

dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan modal dan dekat dengan kekuasaan. Wacana yang bergulir dalam putaran arus distribusi informasi dikuasai oleh berbagai kepentingan-kepemilikan yang lebih banyak mengutamakan keuntungan komersil. Masyarakat, pada akhirnya, kehilangan kesempatan yang seharusnya menjadi milik mereka juga sebagai bagian dari sistem demokrasi. Narasi-narasi kecil yang tersebar di masyarakat, yang mungkin merupakan hal penting bagi warga lokal di lingkungan tertentu menjadi tenggelam oleh wacana-wacana besar yang disusun melalui permainan *agenda setting* para pelaku media. Hal ini sulit dihindari dalam situasi demokrasi tertentu di mana sistem terbentuk sedemikian rupa yang kemudian lebih memihak pada kaum pemilik modal.

Tatanan masyarakat yang demokratis menuntut adanya prasyarat-prasyarat tertentu dalam media massa. Dalam era reformasi, salah satu indikasinya dapat terlihat pada lahirnya *plurality of ownership*. Dalam disertasi berjudul “Dinamika Media Lokal dalam Mengkonstruksi Realitas Budaya Lokal Sebagai Sebuah Komoditas”, Widodo Muktiyo (2007) menjelaskan bahwa:

*“Kepemilikan media dapat dilakukan oleh siapapun warga negara Indonesia tanpa ada perbedaan sehingga dengan tidak adanya prosedur perijinan seperti SIUPP menjadikan semua media cetak yang berskala nasional seperti surat kabar tumbuh dalam jumlah yang sangat banyak dengan kepemilikan yang bervariasi. Pluralitas kepemilikan media membawa konsekuensi pada keragaman isi yang makin tinggi. Altschul (1984) dalam second law of journalism menyebutkan the content of the media always reflect the interest of these who toward them.”*<sup>5</sup>

Gambaran singkat tentang kilas balik awal kemunculan kompetisi industri pelaku-pelaku media di Indonesia itu, mengarahkan kita pada pemahaman tentang fenomena sekarang ini. Hampir seluruh media di Indonesia, baik tingkat nasional maupun lokal, dipegang oleh tokoh-tokoh kunci yang menjadi konglomerat media karena kesuksesannya memajukan perusahaan media yang mereka kelola. Perusahaan-perusahaan itu tidak lagi berkuat pada satu jenis media saja, tetapi merangkul segala bentuk dan jenis media massa, mulai dari media cetak, elektronik, *internet* hingga jaringan untuk piranti nirkabel. Selain itu, tokoh-tokoh kunci ini tidak hanya bergerak di bidang media. Dalam perkembangannya, perusahaan-

5. Widodo Muktiyo, “Dinamika Media Lokal dalam Mengkonstruksi Realitas Budaya Lokal Sebagai Sebuah Komoditas”, Disertasi (Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana, 2007), hlm. 28

perusahaan besar yang mengelola media juga memiliki badan usaha lain yang berada di luar ranah aktivitas bermedia.<sup>6</sup>

Situasi demokratis pasca Reformasi membuka peluang bagi masyarakat mana pun untuk terlibat dalam arus distribusi informasi dan industri media. Namun sayangnya, peluang ini direbut sepenuhnya oleh para konglomerat media yang memang sudah membangun kerajaannya sejak era Orde Baru.<sup>7</sup> Penelitian dari Yanuar Nugroho, di tahun 2012, menyatakan bahwa telah terjadi suatu kontradiksi dari sebuah kebijakan di Indonesia yang memunculkan dampak mengerikan. Mereka berpendapat, Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002 telah mendorong semangat keragaman konten dan kepemilikan media, tetapi di pihak lain, Peraturan Pemerintah No. 49-52 Tahun 2005 memungkinkan perusahaan-perusahaan atau kelompok pelaku media untuk beroperasi dengan cakupan yang menguasai sampai 75% dari total jumlah provinsi di Indonesia.<sup>8</sup> Di masa pasca Reformasi, kemudian mereka juga bersaing dengan para pebisnis yang tidak berlatar belakang jurnalis namun memiliki kekuatan modal untuk membangun kerajaan media juga.

Selain adanya keragaman kepemilikan—yang menjadi penunjang atau ditunjang oleh bisnis media—berbagai jenis media seperti televisi, surat kabar, hingga ke jenis non-media seperti perusahaan properti, pertambangan dan lain sebagainya, bisnis mereka juga melebar dan bercabang ke wilayah lokal di daerah-daerah di Indonesia.

Mosco (1996) menjelaskan fenomena ini dengan konsep *spasialisasi horizontal* dalam bisnis media, yang berkenaan dengan realitas kepemilikan yang bersifat silang terhadap institusi media. Konsep *spasialisasi horizontal* media ini menjelaskan bahwa sebuah korporasi media tidak berdiri dalam satu jenis media saja, tetapi berwujud suatu jaringan yang saling menunjang, yang akhirnya menjadikan korporasi tersebut sebagai sebuah bisnis terintegrasi dan bersifat

---

6. Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri dan Shita Laksmi. "Mapping The Landscap of The Media Industry in Contemporary Indonesia", Seri Laporan. *Engaging Media, Empowering Society: Assesing Media Policy and Governance in Indonesia through The Lens of Citizens' Rights*. Kolaborasi Penelitian dari Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Regional Office Southeast Asia, didanai oleh Ford Foundation (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), hlm. 37-40.

7. Krishna Sen dan David T. Hill, *op cit.*, hlm. 56-60

8. Yanuar Nugroho, Muhammad Fajri Siregar dan Shita Laksmi. "Mapping Media Policy in Indonesia", Seri Laporan. *Engaging Media, Empowering Society: Assesing Media Policy and Governance in Indonesia through The Lens of Citizens' Rights*. Kolaborasi Penelitian dari Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Regional Office Southeast Asia, didanai oleh Ford Foundation (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), hlm. 12.

konglomerasi.<sup>9</sup> Contohnya, Kelompok Kompas Gramedia, yang memiliki 10 TV, 12 radio dan 89 media cetak; Global Mediacomm (MNC), yang memiliki 20 TV, 22 radio dan 7 media cetak; atau Grup Jawa Pos, yang memiliki 20 TV dan 171 media cetak.<sup>10</sup>

Selain itu, adanya faktor kepemilikan serta keterikatannya dengan bidang usaha lain di luar ranah media (pers) sangat berdampak pada bentuk dan jenis informasi yang disampaikan ke masyarakat. Contoh paling nyata ialah bentuk penyimpangan terselubung yang dilakukan oleh stasiun televisi TVOne terkait dengan kasus Lumpur Lapindo. Sajian informasi yang diberikan kepada masyarakat menjadi bias karena adanya indikasi-indikasi yang menegaskan bahwa TVOne membentuk opini publik untuk membenarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan yang dikelola Bakrie Group tersebut. Dengan kata lain kehadiran media bukan lagi sebagai pelayan masyarakat, melainkan sebagai pendukung kepentingan perusahaan.

Contoh lainnya ialah pemilik saham *Kelompok Lippo* yang hanya mengedepankan informasi atau berita yang bersinggungan dengan kepentingan bisnisnya, seperti jasa kesehatan dan properti. Topik-topik itu akan diberitakan oleh *Beritasatu Media Holding* dengan gaya yang cenderung subyektif, sementara informasi atau berita dengan topik lain disajikan dengan lebih obyektif.<sup>11</sup>

Hasrat para penguasa media ini juga berlangsung secara vertikal. Mereka tetap ingin merambah ke bisnis surat kabar dengan mengenyampingkan ketertinggalan surat kabar cetak dalam percepatan informasi dibandingkan dengan teknologi internet. Hal ini tentu saja disebabkan oleh alasan bahwa media massa cetak, secara fisik, hadir di lokasi tertentu demi menjangkau warga masyarakat secara lokal. Sampai saat ini, hal itu masih berlangsung karena tidak semua masyarakat mendapatkan akses informasi yang lokal tersebut melalui internet yang bersifat lebih global. Namun, ada hal lain yang patut dicurigai berdasar hasrat pengusaha yang tetap mempertahankan media massa cetak sebagai salah satu penunjang bisnis media mereka. Memanfaatkan euforia Reformasi, dengan memosisikan diri sebagai pelopor keterbukaan informasi dan pendukung demokrasi, para pengusaha media mulai merambah ke ranah kekuasaan. Dan

---

9. Widodo Muktiyo, *op cit.*, hlm. 35-36.

10. Yanuar Nugroho, Dinita Andriani Putri dan Shita Laksmi, *op cit.*, hlm 39.

11. Lihat artikel yang ditulis oleh Yanuar Nugroho, "Media, Budaya, dan Upaya Merawat Cita-cita Hidup Bersama", disampaikan pada resepsi 18 tahun Aliansi Jurnalis Independen (Jakarta, 7 Agustus 2012), hlm. 11. [Diakses dari <http://www.slideshare.net/caruban/refleksi-yanuar-nugroho-pada-18-tahun-aji>, tanggal 31 Oktober 2012].

dalam sebuah situasi demokrasi yang memiliki kemungkinan bablas, tampuk kekuasaan dipegang oleh orang-orang atau kelompok-kelompok pemilik modal.

Kembali ke penjelasan sebelumnya saat pasca era Reformasi, setelah runtuhnya rezim otoriter di tahun 1998, euforia kesadaran berpolitik di tengah-tengah masyarakat berjalan beriringan. Dalam situasi tertentu, hal ini ada kaitannya dengan kepemilikan modal. Para pengusaha bermodal besar itulah yang paling mampu membuat dirinya memiliki posisi penting di perpolitikan dalam negeri dengan memperluas pengaruhnya dengan berperan sebagai raja media. Sebab, dengan menguasai media massa, para pengusaha itu bisa meraih kekuasaan tertinggi dalam politik dengan mengatur arus informasi. Maka, bisa jadi, atensi masyarakat lokal yang tersebar di seluruh Indonesia bisa diraih melalui perluasan pengaruh melalui realitas pemaknaan yang dikemas dalam informasi yang dituangkan dalam pemberitaan surat kabar lokal.

Jika demokrasi berjalan dengan cara atau arah yang demikian, maka arus informasi dan pembentukan opini publik kembali menjadi terpusat pada beberapa kepentingan tertentu yang dekat dengan wilayah bisnis politik praktis atau lobi politik. Di titik ini, keadaan menjadi terbalik di mana demokrasi menjadi bumerang bagi cita-cita awalnya sendiri: terancam. Arus informasi kembali diatur oleh tiran kekuasaan, yang dulunya adalah negara, sedangkan sekarang adalah pemodal (penguasa baru).

Keharusan untuk melindungi kepentingan bisnis inilah yang menyebabkan terjadinya pengejawantahan dari gagasan *sinergi media*. Werner J. Severin dan James W. Tankard, dalam *Communication Theories: Origins, Methods & Uses in the Mass Media* (2001), menjelaskan bahwa *sinergi media* adalah *ide yang menumbuhkan interaksi antara kegiatan tambahan yang diperoleh atau bagian dari perusahaan yang di-merger yang menimbulkan peningkatan efek gabungan*. Konglomerat media menggabungkan staf administratif, pemasaran, penjualan, pembelian dan distribusi dalam satu tatanan terintegrasi secara vertikal untuk tujuan penghematan: sedikit pengeluaran dan banyak pemasukan (keuntungan). Satu materi dari penerbitan dapat didistribusikan ke pihak penyiaran dalam satu jaringan; satu artikel dalam surat kabar dapat dikembangkan menjadi acara siaran televisi. Lebih jauh, materi-materi itu dapat ditransformasikan menjadi beragam bentuk produk dan *merchandise* untuk dijual pada perusahaan lain, yang umumnya juga berada di bawah atap yang sama.<sup>12</sup>

---

12. Werner J. Severin dan James W. Tankard, *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, & Terapan di Dalam Media Massa*. Edisi Kelima. Terj. Sugeng Hariyanto (Jakarta: Kecana, 2008), hlm. 433.

Apa yang dijelaskan oleh Werner J. Severin dan James W. Tankard ini sangat relevan dengan kondisi yang terjadi di Indonesia sekarang. Berjayanya Group Jawa Pos, yang dikelola oleh Dahlan Iskan, dengan pelbagai terbitan surat kabar (umumnya dengan awalan kata 'Radar', seperti Radar Depok, Radar Banten, Radar Lampung, Radar Banyuwangi, Radar Tarakan, Radar Sulteng, dan sebagainya) dan jaringan siaran televisi yang menggurita di hampir seluruh wilayah Indonesia di tingkat lokal, merupakan salah satu contoh konkret. Di tambah lagi keberadaan perusahaan-perusahaan media besar yang bermain di cakupan nasional, seperti PT Global Mediacom, Tbk. (memiliki surat kabar harian Koran Sindo yang sebelumnya bernama Harian Seputar Indonesia, dan stasiun televisi swasta RCTI, GlobalTV dan MNCTV), PT. Bakrie & Brothers, Tbk. (memiliki media *online* VivaNews dan stasiun televisi swasta TVOne), CT Corp (memiliki stasiun televisi swasta TransTV dan Trans7, serta media *online* DetikCom), dan Kompas Gramedia (memiliki media seperti Harian Kompas, Warta Kota, KompasTV, dan badan pers di tingkat daerah yang umumnya berawal 'Tribun'). Dan perlu pula diingat bahwa beberapa dari konglomerat media ini memiliki badan usaha-badan usaha yang sangat berpengaruh bagi perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia.

Kondisi seperti ini kemudian menjadi masalah karena ketika media menjadi bagian dari konglomerat, kredibilitasnya sebagai lembaga pelayanan publik yang bersifat netral dan independen menjadi diragukan. Sejumlah pakar media menyebutkan bahwa kepemilikan media menentukan kontrol media, yang pada gilirannya menentukan isi media, dan berdampak pada sajian informasi yang tidak akurat, utuh dan menyeluruh sehingga merugikan masyarakat.<sup>13</sup>

#### ***1.1.1.2. Banjir Informasi***

Dengan berkembangnya dan mudahnya akses teknologi informasi oleh masyarakat, telah memberi peluang bagi siapa saja untuk terlibat aktif dalam aksi bermedia. Semakin canggihnya perkembangan teknologi *internet*, masyarakat juga memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan sekaligus memaknai semua informasi yang disajikan oleh media lokal, nasional, maupun internasional. Akan tetapi, keadaan melimpahnya berjuta-juta informasi itu bukan berarti telah memuaskan hak masyarakat dalam mengkonsumsi apa yang seharusnya mereka dapatkan.

Setiap detik, setiap hari, masyarakat dihadapkan oleh banyak informasi dan berita serta hiburan, tanpa tahu dan sadar bagaimana memilah dan mengkonsumsi

---

13. Werner J. Severin dan James W. Tankard, *ibid.*, hlm. 434-437.

sajian media yang benar-benar dapat dipercaya. Satu informasi berpindah ke informasi lain dengan begitu cepat; satu isu tenggelam oleh isu lain dengan mudahnya. Kesemua itu terjadi di lingkungan media sekarang ini sebagai satu hal yang dianggap wajar oleh khalayak, tanpa kecurigaan tentang adanya permainan politik, uang dan konflik kepentingan di baliknya. Masyarakat terlenakan dengan harta karun informasi dan pengetahuan yang berlebihan, tetapi tidak mengerti bagaimana menyikapi dan mendayagunakan informasi dan pengetahuan tersebut.

Tentu saja situasi acuh tak acuh menjadikan masyarakat semakin tidak cerdas dan tidak peka. Masyarakat berada di dalam posisi mengikuti perkembangan kemajuan dunia, namun tidak memiliki daya kritis. Hal ini sangat mungkin terjadi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Robert K. Merton, dalam teorinya, *narcotizing dysfunction*. Teori itu menjelaskan bahwa adanya kemungkinan masyarakat menjadi apatis ketika diasupi oleh banyak informasi secara terus menerus sehingga mereka memiliki pengetahuan yang luas akan berbagai isu, dan memiliki keyakinan bahwa mereka telah membantu memberikan solusi. Masyarakat seolah-olah memiliki perhatian yang tinggi serta dekat dengan berbagai isu, namun sesungguhnya, masyarakat telah dibingungkan dengan deretan isu itu sendiri. Lingkungan aktivitas bermedia telah menjadi lingkungan *overexposure* dari pesan-pesan atau informasi-informasi yang mengakibatkan melemahnya keterlibatan masyarakat dalam proses dan aktivitas politik.<sup>14</sup>

Di samping maraknya perkembangan informasi melalui teknologi internet, koran-koran lokal tetap bermunculan. Posisinya tidak lagi sepenuhnya berperan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat, namun lebih sebagai alat penggerak komersialisasi yang menguntungkan kaum pemilik modal. Bisa dibayangkan, keberadaan koran-koran lokal itu malah memperkeruh kondisi sosial di dalam masyarakat dengan fenomena penguasa-penguasa baru. Di satu sisi, ada kondisi di mana masyarakat acuh tak acuh, di sisi lain ada kemandulan fungsi koran lokal yang disebabkan oleh konglomerasi media. Ketika kedua hal ini bertemu, maka pada titik itulah keberadaan masyarakat, dalam hal ini haknya untuk mendapatkan informasi yang benar, menjadi lenyap. Hak tersebut tenggelam dalam kepentingan kepemilikan konglomerasi media.

14. Gejala seperti ini layaknya situasi yang digambarkan dalam konsep *narcotizing dysfunction* yang dirumuskan oleh Paul F. Lazarsfeld dan Robert K. Merton, pada artikel "Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action", dalam L. Bryson (ed.), *The Communication of Ideas*. (New York: Harper, 95-118. Dicitak ulang di: John Durham Peters and Peter Simonson (eds), *Mass Communication and American Social Thought: Key Texts, 1919-1968*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield, 2004, pp. 230-241). Artikel tersebut diakses dari <http://www.journalism.wisc.edu/~gdowney/courses/j201/pdf/readings/Lazarsfeld%20P%20et%20a%201948.pdf>, tanggal 31 Oktober 2012.

Seharusnya koran lokal memiliki peran besar dalam situasi dan kondisi semacam ini. Ide dasar dari sebuah surat kabar adalah mencerdaskan publik serta membangun kesadaran dan daya kritis masyarakat.<sup>15</sup>

Sebenarnya, situasi banjir media di Indonesia ini terjadi di wilayah *new media* melalui pesatnya perkembangan teknologi internet.<sup>16</sup> Halaman yang tersaji di dalam media berbasis internet, seringkali disisipi oleh iklan, berita-berita tambahan, dan juga mendorong pembaca untuk mengklik halaman-halaman baru untuk menyelesaikan bacaan atau berpindah ke bacaan lain. Informasi yang berasal dari internet, selain kualitasnya perlu dipertanyakan, memiliki lebih banyak aspek pengganggu (*distracting*) ketimbang surat kabar cetak.<sup>17</sup>

Sementara itu, surat kabar cetak tetap memiliki kedekatan tersendiri dengan warga, dalam ruang lingkup lokalnya, karena secara fisik berada di wilayah lokal tersebut.<sup>18</sup> Surat kabar cetak memiliki peluang besar menjadi alat pembelajaran bagi masyarakat melalui dapur redaksinya. Selain itu, surat kabar cetak memiliki pengaruh yang lebih signifikan, dibandingkan dengan media lainnya, terutama media internet, terhadap publik pembaca.<sup>19</sup> Selain sifat fisiknya, keterbatasan waktu terbit, yang bisa dilihat sebagai sebagai sebuah keunikan, yaitu harian (terbit pagi atau sore), atau mingguan, bulanan, dwibulanan dan triwulanan,

15. Ide ini merujuk pada "9 elemen jurnalisme" yang dikemukakan oleh Bill Kovach dan Tom Rosentiel (2003). Lihat dalam Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 97-119.

16. Kita dapat melihat contohnya pada fenomena kehadiran situs *online*, seperti DetikCom (<http://www.detik.com/>), yang menyajikan informasi dalam hitungan detik. Contoh lainnya, yaitu melimpahnya para *blogger* atau penulis lepas di dunia maya yang memiliki *website*, juga turut andil dalam membiaskan informasi-informasi yang seharusnya dapat tersaji dengan akurat. Di samping itu, sekarang ini, banyak dari pelaku media yang memanfaatkan situs jejaring sosial, seperti *facebook* dan *twitter* untuk mendistribusikan sajian berita dan hiburannya. Severin dan Tankard (2001) juga menjelaskan bahwa banyak dari para pelaku media juga membangun *website* sendiri, yang kemudian dipakai untuk menyalurkan berita, seperti WEB-TV atau *multimedia live streaming* (lihat Werner J. Severin dan James W. Tankard, *ibid.*, hlm. 443-465).

17. Ide ini berangkat dari opini yang ditulis oleh Jack Shafer, "Print vs. Online" (*Slate*, 19 Agustus 2011). [Diakses dari [http://www.slate.com/articles/news\\_and\\_politics/press\\_box/2011/08/print\\_vs\\_online.html](http://www.slate.com/articles/news_and_politics/press_box/2011/08/print_vs_online.html), tanggal 7 November 2012].

18. Lihat sebuah opini menarik terkait hal ini pada Vijay Verghese, "United They May Stand but Will Punters Pay?" (*Asian Conversation*, Oktober 2010). [Diakses dari <http://www.asianconversations.com/PrintVsWeb.php>, tanggal 7 November 2012].

19. Dalam penelitiannya, Arthur D. Santana, Randal Livingstone dan Yoon Cho menemukan bahwa subjek informasi dari media cetak lebih diingat oleh pembaca daripada informasi di media *online*, dan dengan demikian menyimpulkan bahwa perkembangan dinamis dari media internet memiliki pengaruh yang kecil terhadap 'impresionabilitas' pembaca dibandingkan media cetak. Lihat Arthur D. Santana, Randal Livingstone dan Yoon Cho, "Medium Matters: Newsreaders' Recall and Engagement with Online and Print Newspapers", Dipresentasikan pada pertemuan *Association for Education in Journalism and Mass Communication, Newspaper Division* (St. Louis, MO: *Slate*, 10 Agustus 2011). [Diakses dari [http://www.slate.com/content/dam/slate/archive/media/2011/08/66\\_mediummatters.pdf](http://www.slate.com/content/dam/slate/archive/media/2011/08/66_mediummatters.pdf), tanggal 7 November 2012].

bisa dijadikan sebagai kekuatan dalam mengolah dan memilah sebuah isu (selain perannya dalam menyampaikan berita dengan objektif) dalam fungsi idealnya sebagai media massa. Dengan kata lain, peran media cetak masih sangat penting.

### *1.1.1.3. Pertarungan Politik untuk Tampuk Kekuasaan*

Di awal era Reformasi, semangat independensi dan kecenderungan untuk terlihat bebas dari pengaruh politik melekat pada hampir seluruh pelaku media di Indonesia.<sup>20</sup> Seiring berjalannya waktu, ketika konglomerasi media semakin terlihat ampuh sebagai sesuatu yang dapat mengedepankan demokrasi, keberuntungan perusahaan media 'diserahkan' sepenuhnya oleh permainan pasar di lahan bisnis. Diberlakukannya UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menegaskan bahwa pers menjadi satu bentuk badan usaha dengan ketentuan hukum yang tak ada bedanya dengan korporasi-korporasi lainnya.

Berdirinya lembaga usaha berbadan hukum (PT), yang diatur dalam UU No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, harus memiliki kewajiban untuk setidaknya memiliki modal dasar sebesar Rp 50 juta (pasal 32) dan harus mampu terbit berulang-ulang selama 6 bulan tanpa jeda, serta memiliki kewajiban memberi upah kepada wartawan dan karyawan sesuai batas upah minimum provinsi, minimal 13 kali setahun.<sup>21</sup> Syarat ini mengarahkan persepsi bahwa perusahaan media tidak akan dapat berdiri tanpa kepemilikan modal yang memiliki kemampuan bertahan dalam menjalankan usaha. Dengan demikian, media beralih menjadi mesin penarik keuntungan sebesar-besarnya dari segala aktivitas bermedia.

Merupakan satu rahasia umum bahwa untuk melancarkan segala tujuan dan kepentingannya, seringkali korporasi melakukan 'perselingkuhan' dengan jajaran aparatus politik dan pemerintah. Dalam perkembangan dewasa ini, bahkan pelaku usaha itu sendiri yang kemudian menjadi aktor politik di dalam negeri, tidak terkecuali pelaku-pelaku di belakang perusahaan media, demi memperkuat posisi dan cakupan bisnis yang dimiliki. Semua itu dilakukan hanya semata-mata untuk peningkatan jumlah keuntungan yang berlipat ganda tanpa banyak pengeluaran. Pendirian partai politik atau sokongan dana kepada lembaga-lembaga politik menjadi salah satu strategi yang dilakukan oleh para pengusaha. Hal ini menyebabkan terjadinya perebutan kekuasaan antara politikus, pelaku bisnis dan

konglomerat media. Tali temali keterkaitan hubungan antara perusahaan media, perusahaan yang bergerak di bidang ekonomi, dan lembaga-lembaga politik, kemudian mempengaruhi bagaimana berjalannya aktivitas bermedia dari para pelaku media itu sendiri.

Keadaan yang pernah terjadi di tahun 1950, ketika banyak surat kabar yang berafiliasi dengan partai politik, kembali terjadi di era Reformasi yang sejatinya menuntut keindependenan media. Contoh nyata dari kondisi seperti ini ialah pertarungan para calon presiden dan calon wakil presiden, pada tahun 2004, yang menggunakan peran media dalam aktivitas kampanye (<http://www.tempo.co.id/>, 19 Juni 2004). Situasi ini kembali berulang hingga tahun 2011, bahkan dengan kemunculan wajah-wajah baru yang berasal dari kalangan pemilik bisnis media sendiri, seperti bergabungnya Hary Tanoesoedibjo, pemilik Media Nusantara Citra ke Partai Nasional Demokrat<sup>22</sup>, partai bentukan Surya Paloh dari Media Group, berhadapan dengan media-media yang dimiliki oleh Bakrie Group milik Aburizal Bakrie. Hal ini menjadi gambaran bagaimana 'perselingkuhan' antara pelaku media dengan para pelaku politik (<http://www.tempo.co/>, 13 Oktober 2011).

Surat kabar cetak yang terbit di ranah lokal jelas menjadi salah satu alat handal bagi para pemegang kekuasaan, yang didukung oleh berbagai aset seperti modal besar dan kekuatan media ini, untuk memperluas pengaruhnya ke tingkat lokal. Sedangkan bagi masyarakat sendiri hanya memiliki sedikit pilihan dalam penerimaan informasi. Lebih jauh, informasi yang diterima oleh masyarakat itu pun terarah sesuai dengan kepentingan kepemilikan konglomerat media yang bermain di ranah politik dan kekuasaan.

Cita-cita tentang media yang terlepas dari berbagai kepentingan menjadi wacana tanpa realisasi. Euforia kebebasan pers justru menghantarkan media-media di Indonesia ke satu titik independensi abu-abu. Muncul penguasa-penguasa baru yang memegang penuh kuasa terhadap arus informasi untuk kepentingan-kepentingan yang mereka miliki.

Dari penjabaran mengenai kondisi bermedia di Indonesia tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa ketimpangan distribusi informasi di Indonesia benar-benar terjadi dan semakin meruncing dengan menguatnya fenomena konglomerasi media.

20. Krishna Sen dan David T. Hill, *op cit.*, hlm. 71.

21. Ketentuan dalam Standar Perusahaan Pers oleh Dewan Pers. Diakses dari [http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com\\_content&view=article&id=675:standar-perusahaan-pers&catid=54:peraturan&Itemid=121](http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=675:standar-perusahaan-pers&catid=54:peraturan&Itemid=121), tanggal 31 Oktober 2012.

22. Dalam perkembangannya, Hary Tanoesoedibjo memutuskan untuk keluar dari Nasdem dengan alasan perbedaan prinsip dengan para politikus senior. Pada tanggal 17 Februari 2013, dia mengumumkan diri bergabung dengan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Lihat <http://www.tempo.co/read/news/2013/02/25/078463493/Alasan-Hary-Tanoesoedibjo-Keluar-NasDem-dan-Pilih-Hanura>, diakses tanggal 1 April 2013, 09:00 WIB.

### I.1.2. Gambaran Lima Isu dalam Pemberitaan Media Massa: Sebuah Pratinjau

Pada tanggal 4 Oktober 2012, *Surat Kabar Kompas*, memuat sebuah artikel berita berjudul "Perantara Alih Daya Dilarang: Proses Produksi Industri Lumpuh akibat Mogok Buruh". Pada artikel tersebut, *Kompas* memuat sejumlah data tentang perkiraan kerugian akibat demo buruh pada tanggal 3 Oktober 2012, dengan skala miliaran rupiah, di mana kawasan industri Pulogadung merupakan pihak yang mengalami kerugian terbesar akibat demonstrasi tersebut, yakni sebesar 400 miliar Rupiah.<sup>23</sup>

Apa yang kemudian menjadi menarik ialah pada diagram batang yang disajikan artikel tersebut. *Kompas* memberikan sebuah ilustrasi berupa kobaran api. Selain itu, 50% substansi artikel tersebut juga mengabarkan tentang keadaan industri yang lumpuh sebagai akibat dari mogok kerja yang dilakukan oleh buruh di kawasan industri. Hal ini, serta merta, menempatkan massa buruh menjadi pihak yang harus dipersalahkan, dan media massa melakukan justifikasi sesuai perspektif pebisnis, bahwa buruh adalah tukang pembuat kerusakan.

Artikel tersebut merupakan sebuah contoh dari penggambaran bagaimana sebuah isu dapat tenggelam oleh isu lain, yang sering terjadi di media massa. Alih-alih mengarahkan opini masyarakat ke persoalan yang sesungguhnya lebih penting, artikel tersebut justru mewacanakan sebuah isu lain yang dianggap penting bagi sebagian kalangan (industri), yakni bahwa buruh telah melakukan sebuah pelanggaran hukum dengan aksi brutal saat demonstrasi, dan kerugian-kerugian ekonomis yang dialami oleh pebisnis (hal ini terlihat pada data statistik kerugian yang dimuat dalam artikel tersebut, dengan ilustrasi api). Sementara itu, isu lain yang juga perlu diinformasikan ke publik, yakni tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM), tenggelam oleh proporsi isu dalam pemberitaan yang tidak seimbang. Perlu diketahui bahwa kemunculan demonstrasi buruh itu sendiri, sesungguhnya, dimotivasi oleh ketidakadilan sosial yang dialami oleh kaum buruh. Padahal, dalam ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan juga tercantum dalam UUD 1945, Pasal 27 (2), disebutkan bahwa hak mendapatkan pekerjaan dan jaminan sosial merupakan satu hak asasi manusia. Selain itu, persoalan tentang pungli, sogokan ke birokrasi dan lembaga penegak hukum, yang berkaitan erat dengan isu pelanggaran prinsip *good governance*, juga tidak terwacanakan.

Contoh yang dijabarkan di atas menjadi satu penghantar bagi kita untuk mulai melihat tentang pentingnya menaruh perhatian kepada isu-isu yang diangkat oleh media massa. Proporsi isu yang tidak seimbang, yang kemudian diberitakan

dengan intensitas tertentu, dengan sendirinya akan membentuk sebuah persepsi di kepala masyarakat yang melenceng dari persoalan sebenarnya yang semestinya harus mendapat perhatian.

Hal ini rawan terjadi karena selain sebagai sarana informasi, media massa juga merupakan sarana pelembar wacana sosial yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Media massa memiliki fungsinya sebagai alat komunikasi massa, yakni selain memberikan informasi dan hiburan, media massa juga memiliki fungsi 'mempengaruhi'. Dengan kata lain, melalui media massa, kalangan tertentu dapat menimbulkan, membangun atau mengkonstruksi, dan mengarahkan opini publik, kemudian menyebarkannya dan akhirnya membentuk satu opini publik yang lebih besar. Karena kekuatannya yang mampu mempengaruhi masyarakat secara massal ini, media massa menjadi alat bagi kalangan tertentu (kelompok kepentingan) untuk meloloskan tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, mulai dari kalangan birokrasi (pemerintahan) hingga dunia bisnis (penguasa modal).

Apa yang menjadi perhatian AKUMASSA sejauh ini ialah tentang keseimbangan sebuah informasi yang bergerak di masyarakat, baik dari segi penguasaannya maupun dari segi substansi informasinya sendiri. Sebuah informasi yang obyektif merupakan sebuah keharusan bagi setiap media massa, baik lokal, nasional maupun internasional.

Dalam keterkaitannya dengan wacana lokal, sebagai fokus kajian yang dilakukan oleh AKUMASSA sejak tahun 2008, obyektif yang dimaksud di sini, yakni yang berkaitan dengan aksi pemantauan media massa tingkat lokal, adalah informasi yang sesuai dengan kebutuhan warga lokal yang menjadi audiens media massa tersebut. Media massa lokal harus mampu memberikan informasi-informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat di wilayahnya. Nyatanya, akibat dari pengaruh kondisi bermedia yang terjadi di negeri ini, media massa lokal pun memiliki karakteristik yang tak jauh berbeda dengan karakteristik media massa nasional yang dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan. Ketimpangan arus dan substansi informasi, terkait dengan isu-isu yang penting bagi masyarakat lokalnya, menjadi satu fenomena yang umum kita temukan. Parsialisasi yang terjadi dalam konglomerasi media menjadikan sajian informasi media massa lokal masih bersifat terpusat. Artinya, media massa itu lebih sering menyajikan berita berskala nasional, dibanding lokal sehingga wacana kedaerahan yang dibutuhkan warga lokal itu sendiri kadang tidak terwakili, bahkan tenggelam.

AKUMASSA mencoba menegaskan bahwa media massa yang ideal adalah media massa yang mampu menyajikan berbagai macam persoalan sosial yang tengah berlangsung di masyarakat dengan kadar yang sepadan. Dengan kata lain, media massa bukan hanya fokus menyajikan satu isu saja atas persoalan tertentu, misalnya isu politik pada berita tentang kemenangan calon gubernur,

23. Litbang "Kompas"/BIM, *Kompas*, 4 Oktober 2012, hlm. 1

karena isu selain politik, kriminalitas, misalnya, juga memiliki kemungkinan-kemungkinannya sendiri untuk perlu dibahas dalam persoalan tersebut.

Kasus Mesuji di Sumatera Selatan, yang sempat mencuat pada tahun 2011, dapat menjadi satu contoh lain. Di penghujung Bulan Desember tahun itu, kasus Mesuji kembali mencuat karena beredarnya video rekaman tindakan kekerasan di Kecamatan Mesuji dalam konflik antara petugas pengamanan perkebunan dan warga di Sungai Sodong, Mesuji. Pada saat itu, media massa dengan semangat memberitakan tentang video tersebut, mencoba mempertarungkan opini publik, pendapat pakar, pernyataan dari pihak lembaga peradilan pidana, dan bahkan politikus terkait dengan beredarnya video kekerasan. Yang menjadi fokus pemberitaan ialah asli atau tidak aslinya video tersebut, pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum, serta perselingkungan antara perusahaan swasta dengan birokrasi. Hal ini menyebabkan satu isu penting lain, yakni lingkungan hidup, yang sangat berkaitan dengan sengketa lahan, tidak begitu banyak diangkat oleh media massa. Padahal, berdasarkan data dari WALHI<sup>24</sup>, dapat dilihat bahwa masalah tentang tanah warga, sebagai sumber penggarapan untuk menghasilkan kebutuhan masyarakat setempat, telah mengalami eksploitasi oleh perusahaan PT Silva Inhutani Lampung. Ironisnya, warga masyarakat menjadi pihak yang tertuduh karena seringkali melakukan penjarahan lahan dan ditangkap oleh polisi.

Sama halnya dengan kasus Bima, Nusa Tenggara Barat, di mana media massa lebih menyorot tentang isu brutalisme polisi terhadap masyarakat. Pengutipan narasumber dari pihak polisi mengaburkan kebenaran fakta karena ada indikasi untuk menyatakan bahwa kebrutalan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas tambang di daerah tersebut. Pembubaran yang dilakukan oleh polisi dinyatakan sebagai aksi tanggap terhadap tindakan para demonstran yang mengganggu ketertiban umum. Padahal, apa yang sesungguhnya terjadi tidak lepas dari pengelolaan Sumber Daya Alam yang mengalpakan kelestarian lingkungan, baik fisik maupun sosial. Para aktivis yang ada di Bima, bahkan, ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.<sup>25</sup>

Definisi atau stigma yang ditetapkan oleh penguasa terhadap masyarakat atau kelompok tertentu, secara tidak langsung mendiskreditkan mereka. Hal ini 'disosialisasikan' melalui media massa sehingga mempengaruhi bagaimana publik pembaca memandang persoalan tersebut. Contoh tentang kasus demonstrasi

24. Lihat "Kronologis Kasus Register 45 Mesuji Lampung", diakses dari <http://www.walhi.or.id/id/ruang-media/kumpulan-kronologis-kasus-sda/1802-kronologiskasus-register-45-mesuji-lampung.html>

25. Lihat contohnya pada berita "47 Aktivis Bima Jadi Tersangka", 25 Desember 2011, diakses dari [http://www.waspada.co.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=228293:47-aktivis-kasus-bima-jadi-tersangka&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91](http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=228293:47-aktivis-kasus-bima-jadi-tersangka&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid=91)

mahasiswa yang terjadi di Talabiu, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, menuntut percepatan respons terhadap kasus meninggalnya seorang warga setempat dalam proses pemadaman api kendaraan, sesungguhnya berkaitan dengan isu HAM dan kemanusiaan.<sup>26</sup> Namun demikian, media massa pun akhirnya mengikuti perspektif penguasa dengan mendefinisikan para pendemo sebagai para perusuh dan penyebab kemacetan. Pelaku demonstrasi tak ubahnya dengan pelaku kekerasan.<sup>27</sup>

Selain contoh-contoh di atas, kasus tentang tawuran pelajar tingkat SMA/SMK yang marak diberitakan pada kisaran Bulan September 2012, yang terjadi di kalangan pelajar Depok dan Bogor, oleh media massa lokal Depok juga mengindikasikan sudut pandang media massanya yang melihat bahwa persoalan tersebut masuk dalam kategori kriminalitas.<sup>28</sup> Padahal, yang menjadi persoalan sesungguhnya ialah tentang anak. Demikian juga dengan kasus baru yang mencuat di beberapa hari setelahnya, yakni kasus hilangnya Angelina Sumiarni Sihite karena diculik oleh pelaku yang mengenal korban di media sosial *facebook*.<sup>29</sup> Fokus pemberitaan ialah tentang kasus kejahatannya, yang mana media massa menegaskan maraknya penculikan melalui media sosial, sedangkan isu tentang perhatian terhadap pembinaan anak, atau tentang psikologis korban sebagai anak, tidak begitu dibahas oleh media massa tersebut.

Ketimpangan proporsi isu juga dapat terlihat pada contoh lain, seperti pemberitaan kebijakan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) yang menaikkan tarif KRL *commuter line* sebesar Rp 2.000 pada tanggal 1 Oktober 2012 lalu di berbagai media massa. Berbagai surat kabar memberitakan ketegasan PT KAI tersebut dengan menambahkan satu kebijakan baru tentang diberlakukannya KRL khusus perempuan. Namun demikian, isu tentang perempuan itu sendiri, yang rentan sebagai korban kejahatan di transportasi umum kota, tidak dibahas. Penempatan kereta khusus untuk perempuan justru menegaskan kesan marjinalisasi perempuan sebagai kaum yang tak bisa berbuat apa-apa.

Demikian serentetan contoh tentang bagaimana sebuah isu dapat tenggelam oleh isu yang lain, di dalam penyajian berita yang dilakukan oleh media massa,

26. Lihat contoh berita "Bom" di Talabiu", 18 September 2012, diakses dari <http://www.bimakini.com/index.php/dari-redaksi/item/2339-%E2%80%9Cbom%E2%80%9D-di-talabiu>

27. Lihat contoh berita "Antisipasi Demo Anarkis Dibahas di Talabiu", 18 September 2012, diakses dari <http://www.bimakini.com/index.php/hukum-kriminal/item/2330-antisipasi-demo-anarkis-dibahas-di-talabiu>.

28. Lihat berita-berita *headline* Radar Depok, Monitor Depok, dan Jurnal Depok, di pertengahan hingga penghujung Bulan September, 2012

29. Lihat Radar Depok, Monitor Depok, dan Jurnal Depok, 2 Oktober 2012

baik lokal maupun nasional. Hal ini merupakan sesuatu yang menarik dan sekaligus menjadi alasan mengapa perlu dilakukan penelaahan kritis terhadap kategorisasi isu-isu dalam sajian berita di media massa, dengan meneliti proporsi keseimbangan isu, demi memenuhi kebutuhan bagi masyarakat pembaca. Oleh sebab itu, penelitian ini perlu dilaksanakan.

### I.1.3. AKUMASSA

Kajian tentang bagaimana seharusnya masyarakat dapat memberdayakan diri mereka sendiri di tengah situasi dan kondisi bermedia yang tidak berpihak pada mereka telah dilakukan oleh para pakar komunikasi dan sosiologi sejak lama. Kajian-kajian secara empirik tentang pemanfaatan media-media tradisional dan posisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas bahkan telah dilakukan di Indonesia pada tahun 1980-an.

Salah satu hasil penelitian, yang dilakukan oleh Manfred Oepen di tahun 1985, tentang penggunaan media oleh pemerintah dan LSM, menunjukkan bahwa penggunaan media untuk menunjang pembangunan oleh LSM dan lembaga-lembaga pemerintah di Indonesia masih bersifat atas-bawah tanpa adanya pelibatan aktif dari pihak kelompok sasaran, yaitu masyarakat. Apa yang dilakukan oleh LSM untuk memberdayakan masyarakat tentang penggunaan media masih bersikap paternalistik, yang dalam praktiknya masih menggunakan struktur vertikal. Cita-cita tentang 'media rakyat' yang bersifat dua-arah dan partisipatif, pada praktiknya masih sama dengan media massa pada umumnya yang menjejalkan realitas yang diproduksi secara terpusat kepada khalayak yang pasif.<sup>30</sup>

Cara untuk menghadapi ketimpangan-ketimpangan informasi yang dialami oleh masyarakat memang tidak akan bisa lepas dari ketergantungan pada inisiatif masyarakatnya sendiri, atau dari komunitas yang mewakilinya. Namun demikian, harus ada kejelasan dan penegasan posisi dan keberpihakan dari komunitas-komunitas ini, yang idealnya harus berorientasi rakyat dan kemandirian, serta lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu yang merugikan masyarakatnya. Manfred Oepen, mengutip Snelzer (1980) mengajukan tujuh tolok ukur yang harus diikuti oleh setiap komunitas dalam mengembangkan pembangunan lingkungan masyarakatnya: (1) penghapusan ketimpangan, (2)

sehatnya ekonomi, (3) dapat diandalkan dari segi teknologi dan ekologi, (4) dapat diterima dari segi sosial budaya, (5) kemungkinannya untuk dapat dilaksanakan dari segi organisasi dan prasarana, (6) kemampuan mengadopsi secara individual, dan (7) mobilisasi dan partisipasi kelompok sasaran.<sup>31</sup>

Komunitas lokal, di lingkungan masyarakat dan warga lokal, adalah satu potensi besar yang dapat berperan dalam melibatkan masyarakat secara aktif dan kritis menghadapi situasi dan kondisi bermedia yang ada di Indonesia sekarang ini. Komunitas-komunitas ini memiliki peluang yang cukup besar untuk membangun tatanan sistem media komunikasi yang berlandaskan untuk kepentingan rakyat, khususnya masyarakat lokal di daerahnya, yang oleh Ruedi Hoffman diistilahkan sebagai 'media-kelompok'.<sup>32</sup>

'Media-kelompok' atau media alternatif harus memiliki ciri-ciri utama yang membedakannya dengan media massa pada umumnya yang dikelola oleh perusahaan media. Ciri-ciri itu antara lain adalah bersifat khusus untuk suatu kelompok masyarakat tertentu; mendorong terjadinya saling tukar pengalaman dan gagasan; memiliki tema, isi dan pesan yang menarik dan bernisbah; disajikan dalam cita rasa seni yang dapat dipahami anggota kelompok masyarakatnya; terjangkau; pesan yang singkat dan padat; dan menyediakan petunjuk penggunaan.<sup>33</sup> Gagasan 'media-kelompok' ini menjadi strategi untuk mewujudkan keadaan masyarakat yang dapat mengelola (produksi dan distribusi) informasi dan pengetahuan lokalnya secara mandiri untuk kepentingan-kepentingan yang mereka butuhkan.

Berhadapan dengan situasi seperti ini, masyarakat seharusnya dapat terlibat lebih aktif dalam menerima dan mengelola informasi yang mengandung nilai manfaat bagi mereka, mengingat semakin berkembangnya inovasi-inovasi dan mudahnya akses teknologi informasi dan komunikasi. Dengan memberdayakan potensi yang dimilikinya, masyarakat dapat memproduksi dan mendistribusikan informasi secara mandiri tanpa bergantung pada lembaga/perusahaan media besar. Oleh sebab itu, satu aksi konkret perlu dilakukan untuk mendorong warga lokal di lingkungan masyarakat tertentu untuk mau melakukan kegiatan pendokumentasian terhadap apa saja yang ada dan terjadi di sekitarnya, kemudian menyebarkanluaskannya sebagai satu informasi yang bermanfaat bagi anggota masyarakat lainnya. Aksi-aksi seperti ini dapat terealisasi apabila dilakukan

30. Manfred Oepen. "Benarkah Kita Tahu Persis Apa yang Baik bagi Rakyat?": Penggunaan Media Massa oleh Lembaga Pemerintah dan LSM". Dalam Manfred Oepen (Ed.). *Media Rakyat: Komunikasi Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1988). Hlm. 93-101.

31. Manfred Oepen. *Ibid.*, hlm. 106-107.

32. Ruedi Hoffman. "Media Murah Oleh Rakyat, Bukan Untuk Rakyat". Dalam Manfred Oepen (Ed.). *Media Rakyat: Komunikasi Pengembangan Masyarakat* (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1988). Hlm. 44-52.

33. Ruedi Hoffman. *Ibid.*, hlm. 46-47.

oleh komunitas-komunitas lokal yang menjadi perwakilan masyarakat lokal itu sendiri.

Gagasan ini juga menjadi pendorong untuk menciptakan AKUMASSA sebagai program pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas melalui media. Harapannya, melalui program AKUMASSA dan pemantauan media oleh komunitas, warga masyarakat mampu membangun dan mengembangkan daerahnya dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal pengetahuan dan kesadaran mereka terhadap media.

Pada era Reformasi ini, kehadiran komunitas-komunitas yang bergerak di wilayah lokal semakin banyak. Sebagian besar, mereka bergerak di wilayah literasi media demi mewujudkan generasi yang sadar akan media itu sendiri sebagai sebuah kekuatan untuk membangun negeri. Forum Lenteng, yang memiliki program utama, bernama AKUMASSA, adalah salah satu organisasi yang membawa semangat komunitas tersebut, dan telah lama berkecimpung, sejak tahun 2003, di dalam konstelasi pergerakan komunitas-komunitas di Indonesia yang memiliki perhatian lebih terhadap *community development*.

AKUMASSA adalah program pemberdayaan komunitas berbasis media, yang bekerja secara berjejaring dengan komunitas-komunitas lokal di Indonesia. Sejak tahun 2008, AKUMASSA telah berhasil menghidupkan dan mengembangkan komunitas-komunitas lokal yang tersebar di beberapa kota, di antaranya Jakarta, Depok, Rangkasbitung-Kabupaten Lebak-Banten, Cirebon, Randublatung-Kabupaten Blora, Serang-Banten, Surabaya, Pemenang-Kabupaten Lombok Utara-Nusa Tenggara Barat dan Padang Panjang, untuk berperan aktif di wilayahnya masing-masing dalam bidang media. Masyarakat, melalui kerja komunitas-komunitas ini, termotivasi untuk memproduksi informasinya sendiri dengan perspektif masyarakat atau warga dalam berbagai bentuk, diantaranya teks, foto, video maupun program. Informasi yang diproduksi oleh komunitas-komunitas jaringan AKUMASSA itu didistribusikan dalam sebuah jurnal *online* [www.akumassa.org](http://www.akumassa.org). Selama empat tahun ini AKUMASSA telah berhasil memproduksi lebih dari 600 artikel, 66 karya video, 3 film dokumenter dan mengaktifkan lebih dari 130 penulis lokal, yang berkontribusi dalam jurnal [www.akumassa.org](http://www.akumassa.org). Dengan memiliki lebih dari 700 pengunjung perhari, AKUMASSA telah berperan dalam membangun partisipasi masyarakat dalam hal bermedia secara aktif. Ini berarti AKUMASSA memiliki potensi dalam menanggulangi ketimpangan distribusi informasi yang terjadi di Indonesia.

Program kelanjutan dari AKUMASSA adalah program Rekam Media, yaitu sebuah program di mana partisipan AKUMASSA yang terdiri dari jaringan komunitas-komunitas lokal di beberapa daerah di Indonesia melakukan kerja pemantauan media massa lokal (surat kabar harian lokal umumnya), dalam

rangka mengkritisi kinerja media massa *mainstream*. Hasil pemantauan inilah yang dijadikan metode bagi AKUMASSA untuk melihat kondisi bermedia di Indonesia.

## I.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, dapat dilihat sebuah permasalahan bahwa tiga kondisi utama yang terjadi di lingkungan aktivitas bermedia sekarang ini menjadikan masyarakat sebagai korban dari ketidakadilan. Sebab, potensi masyarakat (warga lokal) untuk terlibat aktif dalam proses dinamika dan aktivitas sosial, politik, dan budaya semakin meredup karena wacana-wacana yang dikonstruksi oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingannya sendiri. Selain itu, pemuatan berita di media massa lokal memiliki proporsi isu yang tidak seimbang, baik dari konteks pemilahan isu lokal dan nasional, maupun kategori-kategori isu besar, seperti *good governance*, hak asasi manusia (HAM), perempuan dan/atau anak, kriminalitas, dan lingkungan hidup.

### I.2.1. Pertanyaan Penelitian

Berangkat dari perumusan masalah tersebut, dan ditambah adanya hasrat untuk mendorong aksi sadar media pada masyarakat di tingkat lokal, AKUMASSA merasa perlu melakukan penelitian mendalam tentang media massa lokal dan konteks sosial-masyarakat yang ada di dalam ruang lingkup wilayah lokalnya. Dalam melakukan penelitian tersebut, AKUMASSA mengajukan pertanyaan penelitian untuk membatasi secara jelas fokus kajian yang akan dilakukan, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana media massa lokal mengangkat dan menyajikan lima isu (*good governance*, kriminalitas, perempuan dan/atau anak, lingkungan hidup dan hak asasi manusia) menjadi sebuah informasi?
2. Bagaimana tanggapan komunitas lokal terhadap sajian informasi tersebut dan apa ekspektasi-ekspektasi mereka terhadap fenomena sosial yang ada di wilayah lokalnya yang berhubungan dengan kinerja media massa lokal tersebut?

## I.3. TUJUAN PENELITIAN

Pada penelitian ini, AKUMASSA bertujuan menyajikan penjelasan berdasarkan studi empirik tentang kinerja media massa lokal di Indonesia dalam menyajikan

informasinya, melalui penelaahan dan analisa terhadap sajian informasi yang terbagi ke dalam lima kateogori isu: *good governance*, hak asasi manusia (HAM), perempuan dan/atau anak, kriminalitas, dan lingkungan hidup.

Dengan melakukan penelitian ini pula, AKUMASSA berusaha menghadirkan—sekaligus mendayagunakannya sebagai pisau analisis—tanggapan masyarakat sendiri (diwakili oleh komunitas lokal) terhadap sajian media massa lokal. Usaha ini memiliki tujuan untuk menjelaskan perspektif lokal dalam melihat, membaca dan menilai kinerja media massa yang bekerja dalam ruang lingkup wilayah lokalnya.

Penjelasan secara menyeluruh atas dua hal tersebut, tidak lain, ialah untuk mencapai tujuan penelitian ini, yakni menjawab dan menjelaskan serta membutuhkan bagaimana fenomena kondisi bermedia sekarang di Indonesia, yang tidak lepas dari konglomerasi media, memiliki pengaruh yang besar terhadap aktivitas konsumsi informasi dan pengetahuan di kalangan masyarakat, terutama di tingkat wilayah lokal.

#### I.4. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mengharapkan sebuah signifikansi yang bersifat positif, baik dari segi akademis maupun praktis.

Dari segi signifikansi akademis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan akademik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam disiplin ilmu sosial, khususnya bidang kajian media yang berhubungan dengan pengembangan komunitas (*community development*) dan keaksaraan media (*media literacy*).

Dari segi signifikansi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pelaku media massa yang ada di Indonesia, serta rekomendasi bagi pemangku kebijakan untuk menetapkan sebuah kebijakan yang mengakomodir kebutuhan masyarakat akan pendidikan dan informasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat mendorong komunitas/masyarakat agar lebih kritis dan berperan aktif dalam menjaga kondisi demokrasi bermedia.



## BAB II KAJIAN TEORITIK



STUDI DAN ANALISIS media merupakan salah satu bidang studi utama yang menjadi perhatian kalangan intelektual dewasa ini, khususnya di bidang ilmu-ilmu sosial dan humaniora.<sup>34</sup> Melihat perkembangan kondisi bermedia di Indonesia, tak dapat dielakkan bahwa kajian tentang fenomena bermedia di Indonesia menjadi satu bahasan menarik, terlebih fokus masalah pada media massa lokal seiring dengan mencuatnya gagasan tentang ‘konvergensi media’ dan ‘konglomerasi media’. Usaha-usaha yang dilakukan untuk memahami fenomena ini, tentunya, tidak mungkin dapat maksimal dilakukan tanpa mengikutsertakan pemikiran-pemikiran teoritis dari ruang lingkup kajian ilmiah untuk menemukan penjelasan-penjelasan yang dapat diandalkan bagi perkembangan wacana pengetahuan itu sendiri.

Oleh karenanya, Bab ini akan menjelaskan tiga pemikiran utama yang melandasi AKUMASSA: (1) literasi media; (2) jurnalisme warga atau *citizen journalism*; dan (3) kritisisme terhadap media. Ke tiga pemikiran ini menjadi satu kesatuan kerangka pemikiran yang mendasari AKUMASSA untuk melakukan kajian terhadap media massa, khususnya di tingkat lokal. Selanjutnya, akan dijabarkan pula lima kategori isu yang menjadi batasan fokus analisis AKUMASSA untuk memahami kinerja dan kualitas isi media massa lokal, berupa tinjauan

---

34. Yanuar Nugroho, Muhammad Fajri Siregar dan Shita Laksmi. “Mapping Media Policy in Indonesia”, Seri Laporan. *Engaging Media, Empowering Society: Assessing Media Policy and Governance in Indonesia through The Lens of Citizens’ Rights*. Kolaborasi Penelitian dari Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Regional Office Southeast Asia, didanai oleh Ford Foundation (Jakarta: CIPG dan HIVOS, 2012), hlm. 19

literatur tentang gambaran umum isu-isu yang ada dalam sajian informasi di media massa, dan definisi konseptual yang menjadi batasan dalam penelitian ini.

## II.1. BEBERAPA PERSPEKTIF TEORITIS

Sejak awal kemunculannya, AKUMASSA menjadi sebuah tatanan ide yang mengedepankan cara-cara strategis untuk melawan dominasi media arus utama yang makin hari makin muncul dalam beragam bentuk komunikasi massa berbasis teknologi (cetak, siar dan *online*). Asumsi dasar yang melihat bahwa tidak berjalannya fungsi-fungsi ideal media massa dewasa ini, mendorong inisiatif untuk mengimplementasikan tatanan ide tersebut menjadi sebuah program kerja dan kerangka berpikir dalam melakukan berbagai penelitian, dan juga aksi-aksi literasi media pada masyarakat.

Penelitian ini, pada dasarnya, bukanlah sebuah kajian ilmiah murni melainkan sebuah studi lapangan yang mencoba melihat kinerja media massa lokal dalam menyajikan informasi—dalam penelitian ini, sajian informasi tersebut dikategorikan menjadi 5 isu, yakni *good governance*, hak asasi manusia (HAM), perempuan dan/atau anak, kriminalitas, dan lingkungan hidup—kepada masyarakat serta sekaligus mengkaji konteks sosiokultural wilayah lokal tempat media massa tersebut berjalan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menghidupkan nuansa pemahaman dan kritisisme masyarakat mengenai kinerja pelaku media massa, dan harapannya mampu mencapai apa yang kita cita-citakan sebagai tatanan masyarakat ‘melek media’.

Oleh sebab itu, perlu kiranya di dalam makalah penelitian ini kami menyediakan landasan-landasan teoritis yang menjadi basis gagasan AKUMASSA sebagai sebuah kerangka pemikiran dalam melakukan penelitian ini, agar membantu menjelaskan upaya AKUMASSA itu sendiri untuk memahami seluk-beluk dan kompleksitas seputar kinerja media massa lokal dan sajian informasinya.

### II.1.1. Literasi Media: perspektif untuk menafsirkan media

Sebagai sebuah hak asasi, pendidikan merupakan salah satu poin yang tercantum dalam pasal 28C (1), Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Hal ini menegaskan pula bahwa terdapat sebuah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya demi mendapatkan tatanan kehidupan yang lebih baik,

seiring dengan perkembangan teknologi yang sudah tidak dapat dielakkan lagi keberhinggapannya di setiap aspek kehidupan manusia.

Media adalah sebuah produk dari peradaban manusia yang merepresentasikan secara jelas titik temu antara sifat dasar manusia, sebagai makhluk sosial, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya, pendidikan tentang media (*media literacy*) menjadi penting dalam rangka menata perkembangan masyarakat menuju kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Di samping Negara, yang memiliki kewajiban untuk menjamin, mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan nasional (UUD 1945, pasal 31), diperlukan pula inisiatif lain yang berasal dari masyarakat untuk menggalakkan pendidikan alternatif, khususnya pengetahuan atau wawasan media, mengingat kemajuan pesat dari penciptaan dan penemuan beragam bentuk teknologi media dewasa ini. Inisiatif seperti ini dibutuhkan karena, seperti misalnya yang terjadi di Inggris, meskipun media sekarang telah menjadi sebuah pusat perkembangan budaya intelektual dan sumber daya manusia (*United Kingdom Government, Department for Children, Schools & Families*, 2007), pembuatan kebijakan, perencanaan dan penyediaan fasilitas terkait pendidikan media tidak konsisten dan terfragmentasi, dan umumnya memiliki standar rendah (Kirwan, *et al*, 2003).<sup>35</sup>

Dalam konteks Indonesia, perkembangan pendidikan tentang media (*media literacy*) berjalan dengan lambat. Menurut Guntarto dalam *website* <http://www.kidia.org/>, hal ini disebabkan oleh sedikitnya jumlah forum ilmiah yang membahas tentang literasi media.<sup>36</sup> Sedangkan Syukri (“Peran Pendidikan Nonformal untuk Pemasarakatan Literasi Mesia”, n.d.) menjelaskan bahwa pesatnya perkembangan media massa di Indonesia tidak diikuti oleh kesiapan masyarakat, di mana kontrol publik terhadap media massa sangat rendah, dan hanya menempatkan diri sebagai konsumen.<sup>37</sup>

Menanggapi situasi yang demikian, AKUMASSA hadir sebagai salah satu cara untuk memasyarakatkan literasi media melalui pendidikan alternatif berbasis komunitas lokal. Dengan basis dan tolakan sebagai sebuah wadah pendidikan

35. Lihat Grant Strudley. 2008. *The Media Literacy of Primary School Children: How far do Primary School children have the knowledge and skills to access media, make sense of the representations and images produced and to create their own?*. “Bab Introduction”, hlm. 1. [Diakses dari <http://gdstrudley3.webs.com/>, tanggal 18 Oktober 2012].

36. B. Guntarto. 9 Februari 2011. “Perkembangan Literasi Media di Indonesia”. *Kidia: Media untuk Anak*. [Diakses dari <http://www.kidia.org/news/tahun/2011/bulan/02/tanggal/09/id/187/>, tanggal 18 Oktober 2012].

37. M. Syukri. Tidak ada tahun terbit. “Peran Pendidikan Nonformal untuk Pemasarakatan Literasi Media”. [Diakses dari <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jgmm/article/download/319/325>, tanggal 18 Oktober 2012].

alternatif, AKUMASSA menjadikan kerangka berpikir literasi media dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Buckingham (2003: 3) mendefinisikan *media literacy* sebagai “sesuatu yang kita gunakan ketika kita ingin berkomunikasi dengan orang lain secara tidak langsung, bukan secara pribadi.” Selain itu, lebih jauh ia menjelaskan, pendidikan tentang media juga dilihat sebagai proses pembelajaran tentang kombinasi antara bahasa lisan dan tulisan, suara (*sounds*), gambar (*images*) dan simbol-simbol yang digunakan oleh bentuk-bentuk komunikasi. Hasil dari proses ini ialah “pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan buat menggunakan dan menafsirkan media”.<sup>38</sup>

Sementara itu, Potter (2005), mengartikan literasi media, atau melek media, sebagai satu perspektif yang digunakan secara aktif untuk membuka diri kepada media dalam rangka menafsirkan pesan yang diterima. Bangunan perspektif berasal dari struktur pengetahuan, sedangkan struktur pengetahuan tersebut berasal dari alat (keterampilan) dan bahan baku (informasi, baik dari media maupun dunia nyata). Keaktifan dalam mendayagunakan perspektif ini dipahami sebagai kesadaran akan pesan-pesan dari media, dan aksi berinteraksi dengan pesan-pesan itu secara sadar.<sup>39</sup>

Sementara itu, Strudley (2008: 4), mengutip Bazalgette (1991), Craggs (1992) dan Silvestone (1999, dalam Buckingham, 2003), menjelaskan bahwa pendidikan tentang media “seharusnya lebih dari sekedar memberikan keaskraan fungsional”, tetapi juga harus “mencakup pemahaman kritis terhadap struktur, ekonomi, konteks politik dan sosial dari lembaga-lembaga yang memproduksi dan mengirimkan media, serta audiens yang menerimanya”. Sedangkan Buckingham (2004, dalam Strudley, 2008) berpendapat bahwa literasi media terdiri dari tiga hal, yakni: *accessing*, *understanding*, dan *creating*. Pemahaman yang lebih jauh tentang literasi media, menurut Strudley (mengutip Masterman & Mariet, 1994; Emerson, 1993), ialah literasi media menjadi sangat penting karena masyarakat “harus benar-benar memahami apa yang mereka lihat dan dengar di media dan harus diberdayakan untuk menantang representasi realitas yang diberikan kepada mereka.” Oleh sebab itu, pendidikan tentang media harus berusaha memperluas pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan media melalui serangkaian

analisis kritis dan kerja praktek sehingga masyarakat dapat menjadi masyarakat yang melek media.<sup>40</sup>

AKUMASSA melalui program pemberdayaan masyarakat (*workshop* AKUMASSA di beberapa kota) dan Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas atau Rekam Media-AKUMASSA, berusaha melakukan usaha-usaha pengembangan literasi media di masyarakat, demi mencapai apa yang oleh Marsh (2006: 4; Kress, 2003) disebut sebagai *the development of media literacy*: “jenis baru dari pembaca dan penulis yang muncul [...] di mana anak-anak, orang muda dan orang dewasa membaca dan menulis dengan menggunakan berbagai teknologi.”<sup>41</sup> Selain itu, AKUMASSA juga melandaskan diri pada pemikiran yang dinyatakan oleh Buckingham (2004: 41) bahwa pendidikan media bukan hanya tentang akses ke media itu, tetapi merupakan sebuah “masalah konteks sosial dan pedagogik di mana ia disituasikan”.<sup>42</sup>

Dengan demikian, AKUMASSA tidak hanya bertujuan untuk mengatasi ‘kesenjangan akses informasi’ terhadap media, tetapi juga mengusahakan dan mengembangkan kesadaran dan kemelekan terhadap media itu sendiri di seluruh lapisan masyarakat.

### II.1.2. Jurnalisme Warga: masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek

*Citizen journalism* atau jurnalisme warga merupakan sebuah *genre* yang menggejala pada masyarakat digital saat ini.<sup>43</sup> Perkembangan teknologi komunikasi, terutama yang berbasis *social media*, semakin menegaskan kebebasan setiap elemen di dalam masyarakat untuk dapat merekam dan mengolah setiap kejadian, pemikiran, data dan fakta menjadi sebuah sajian informasi yang dapat dikonsumsi publik. Dengan kata lain, setiap orang bisa menjadi ‘wartawan’. Ini menjadi poin utama yang membedakannya dengan *civic journalism* (jurnalisme publik).

40. Grant Strudley, *ibid.*

41. Grant Strudley, *ibid.* hlm. 6

42. Grant Strudley, *ibid.* hlm. 7. Penelitian yang dilakukan oleh Grant Strudley memiliki fokus pada literasi media di lingkungan anak-anak sekolah. Argumen Buckingham, terkait dengan kata “pedagogic” (pendidikan anak) menjadi penting bagi *akumassa* karena meskipun segmentasi literasi media yang dilakukan oleh *akumassa* adalah kalangan berusia 18 tahun ke atas, dalam prakteknya aksi belajar-mengajar oleh *akumassa* terhadap masyarakat/komunitas lokal dilakukan dari tingkatan paling dasar tentang media. Hal yang menjadi alasan argumentasi ini ialah pendidikan tentang media ini dirasa kurang difasilitasi oleh Pemerintah sehingga kata “pedagogik” menjadi kata kunci untuk menggambarkan situasi di mana kesadaran masyarakat tentang media itu terbilang sangat minim.

43. Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada. Hlm. 215

38. Lihat Grant Strudley. *Op. cit.* “Bab I Literature Review”, hlm. 4. Diakses dari <http://gdstrudley3.webs.com/>, tanggal 18 Oktober 2012.

39. Potter, W.J. (2005). *Media Literacy*. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. (Hlm. 23-41). Sumber kutipan diakses dari <http://medialiterasiindonesia.blogspot.com/>, dan <http://sadedadilila.wordpress.com/2010/03/20/media-literasi/>, tanggal 18 Oktober 2012.

*Citizen journalism* melihat bahwa tanpa memandang latar belakang pendidikan, seseorang dapat melakukan aksi-aksi perencanaan, penggalian, pencarian, pengolahan dan pelaporan informasi.<sup>44</sup> Sama halnya dengan pengertian dari Shayne Bowman dan Chris Willis (2003), yaitu tindakan seorang atau sekelompok warga yang berperan aktif dalam proses pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran berita dan informasi.<sup>45</sup> Sementara itu, *civic journalism* merupakan domain jurnalis profesional. Karsten (2004) menjelaskan *civic journalism* memiliki kewajiban untuk mengangkat derajat warga menjadi pemegang peran potensial dalam masalah publik dan bukan sekadar korban, menggerakkan orang-orang untuk meningkatkan diskusi publik dalam rangka menyelesaikan masalahnya.<sup>46</sup>

Namun, pada kenyataannya, pengertian dari *civic journalism* tersebut justru patut dipertanyakan seiring dengan perkembangan kondisi bermedia, di mana media massa di lingkungan domain profesional itu dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang melembaga, persoalan kepemilikan, dan politisasi media. Selain itu, pernyataan Iwan Awaludin Yusuf menunjukkan keraguan dalam bentuk lain dari esensi *civic journalism*, dan karenanya dihadapkan pada wacana baru tentang *citizen journalism*, yakni:

*“Bila dibandingkan dengan jurnalisisme media mainstream yang memaknai berita sebagai konstruksi atas realitas sosial yang dianggap penting dan menarik bagi banyak pembaca, citizen journalism lebih menekankan pada aspek participation (partisipasi), proximity (kedekatan), dan humanity (kemanusiaan).”<sup>47</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *citizen journalism* muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap wacana media arus utama yang lebih membangun secara sengaja satu konstruksi realitas melalui sebuah berita dan mengabaikan keterlibatan warga masyarakat yang menjadi sasaran dari berita tersebut. Seringkali, perspektif dari media arus utama tersebut alpa atau kurang memperhatikan kebutuhan masyarakat di lingkungan tertentu dan hanya menyajikan informasi-informasi berdasarkan asumsinya sebagai pengelola media massa yang memiliki jarak

44. Nurudin. *Ibid.*

45. Imam FR Kusumaningati. 2012. *Jadi Jurnalis Itu Gampang!!! Serba-serbi Ringkas Tentang Citizen Journalism dan Panduan Praktis Menjadi Citizen Journalist Untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hlm. 5

46. Nurudin. *Op. cit.*

47. Imam FR Kusumaningati. *Op. cit.*, hlm. 6

dengan objek masalah yang sesungguhnya. Kondisi demikian terlihat jelas pada berbagai contoh stasiun televisi swasta dan media cetak yang tema penyajiannya berkisar tentang isu-isu pusat (ibukota), baik dari segi informasi (berita) maupun hiburan. Wacana-wacana lokal menjadi terabaikan.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Nurudin yang melihat bahwa sementara *citizen journalism* lebih memiliki aturan bebas dan sajian isi beragam, *civic journalism* tunduk pada aturan dari media di mana wartawan bekerja, dan isinya juga tergantung pada kebijakan perusahaan media. Motivasinya pun berbeda: *citizen journalism* mengusung semangat independensi, sedangkan *civic journalism* berada di bawah tuntutan penugasan.<sup>48</sup>

Sayangnya, perspektif media *mainstream* ini juga terjadi di lingkungan media massa lokal. Sajian informasi yang dihadirkan oleh media massa lokal masih merujuk pada isu-isu global dan nasional. Tak jarang pula, media massa lokal berafiliasi dengan perusahaan media yang lebih besar yang berada di wilayah pusat sehingga soal kepemilikan dan citra perusahaan media menjadi faktor penyebab tereduksinya semangat lokal dan independensi dari media tersebut. Oleh sebab itu, AKUMASSA melandaskan salah satu kerangka pemikirannya pada perspektif *citizen journalism* karena memiliki potensi kekuatan untuk mengangkat lokalitas. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi subjek dari informasi yang disajikan. Selain itu, sudut pandang *citizen journalism* diamini oleh AKUMASSA karena cita-cita akan keberagaman (keberbhinnekaan) informasi. Idealnya, media massa lokal harus memosisikan dirinya pada perspektif ini ketimbang mengikuti perspektif media arus utama (*mainstream*) yang sudah ada.

Tolak dasar dari pemahaman *citizen journalism* ialah perlunya langkah-langkah atau cara-cara dan wadah alternatif bagi masyarakat untuk dapat mengakses informasi secara beragam.<sup>49</sup> Dengan melandaskan cara pandang pada perspektif ini, AKUMASSA melihat bahwa sesungguhnya masyarakat, khususnya masyarakat lokal, mampu memproduksi informasinya sendiri, atau bahkan melakukan kritik terhadap media arus utama. Sebagaimana pendapat Glaser, sesungguhnya masyarakat itu mampu memeriksa fakta-fakta pada sebuah artikel koran dari media *mainstream* dan menunjukkan kesalahan faktual atau bias yang terdapat di dalamnya—mempublikasikannya di dalam sebuah media

48. Nurudin. *Op. cit.*, hlm. 216

49. Imam FR Kusumaningati. *Op. cit.*, hlm. 14.

alternatif, *online* misalnya, merupakan langkah lanjut yang konkret dari *citizen journalism* itu sendiri.<sup>50</sup>

AKUMASSA memandang *citizen journalism* merupakan suatu solusi untuk menjawab persoalan warga yang selama ini dianggap belum terwakili suaranya di media arus utama yang masih sering mengangkat hal-hal besar sementara narasi-narasi kecil yang ada di tengah masyarakat tersebut terabaikan. Dengan diterapkannya konsep *citizen journalism* di benak masyarakat, akan dapat mendorong iklim demokrasi yang dicita-citakan reformasi. Lebih jauh dari itu, AKUMASSA juga beranggapan bahwa dengan menerapkan konsep *citizen journalism*, masyarakat dapat mendorong lingkungannya sendiri untuk menulis dan membaca dengan saling mendistribusikan informasi lokal dari suatu daerah ke daerah lain dengan berjejaring, sekaligus menjadi pengoreksi fakta yang muncul di media massa. Hal ini sejalan dengan penjabaran Nurudin tentang kelebihan *citizen journalism*, yakni mendorong iklim demokrasi, memupuk budaya tulis dan baca masyarakat, menciptakan *public sphere* dan juga sebagai manifestasi fungsi *watch dog* (kontrol sosial) media.<sup>51</sup>

Dari penjelasan di atas, perspektif *citizen journalism*, kemudian, dapat dimengerti menjadi penting bagi kerangka teoritis pada penelitian ini dan menegaskan posisi AKUMASSA dalam menelaah kemungkinan-kemungkinan yang ada di masyarakat lokal, yang mana masyarakat harus berhadapan dengan sajian media massa lokal di daerah tempat tinggalnya, serta menariknya ke dalam konteks sosiokultural setempat. Karena, pada dasarnya AKUMASSA melaksanakan penelitiannya dengan mengikutsertakan secara aktif warga masyarakat lokal dalam rangka mengkritisi, menandingi, sekaligus mengolah ulang wacana-wacana dan informasi-informasi yang diproduksi oleh media arus utama.

Posisi ini, secara tidak langsung, menunjukkan perspektif lain yang menjadi tonggak AKUMASSA sebagai sebuah kerangka pemikiran atau gagasan ide-ide tentang media dan media massa: kritisisme media.

**II.1.3. Kritisisme terhadap Media: demokrasi dan kesetaraan arus informasi**  
Sebelum memasuki penjelasan konseptual tentang kritisisme terhadap media dan beberapa prinsipnya, terlebih dahulu kami merasa perlu menjelaskan paradigma kritis, yakni satu paradigma yang merupakan poin penting dalam memahami AKUMASSA.

Paradigma kritis merupakan salah satu cara pandang dan cara berpikir yang dewasa ini sering dipakai oleh pengamat media dalam memahami seluk-beluk dan kompleksitas permasalahan media dan para pelakunya. Eriyanto, mengutip Stuart Hall (dalam Brenda Dervins, *et al*, 1986), menjelaskan bahwa

*“...media modern tidak dapat lagi dikonseptualisasikan sebagai faktor eksternal, karena dalam praktiknya ia begitu dekat, mendasari kehidupan manusia. Media secara relatif ikut mendefinisikan realitas, membantu mendasari politik, transaksi diskusi publik, relasi ekonomi, dan sebagainya. Sehingga sukar lagi diberi batasan yang jelas kalau dipisahkan [...] berhubungan dengan alasan eksternal, yakni relasi dengan sistem yang lebih besar: sosial, politik, struktur ekonomi ke dalam formasi sosial secara keseluruhan.”*<sup>52</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pengamatan terhadap media tidak bisa lagi dilihat sebagai sesuatu yang netral, melainkan perlu ada langkah kritis dalam menafsirkan hal-hal yang terdapat di balik proses produksi dan distribusi informasi yang dilakukan oleh media tersebut.

Dalam melihat pola kerja media massa, paradigma kritis tidak bisa tidak melihat keterkaitan antara media dan penguasa. Berdasarkan tinjauan historis, perkembangan paradigma kritis tidak lepas pada prasangka, retorika, propaganda yang memenuhi media pada masa itu. Pemikiran ini terutama bersumber dari pemikiran Mazhab Frankfurt, yang melihat bahwa “media menjadi alat dari pemerintah untuk mengontrol publik, menjadi sarana pemerintah untuk mengobarkan semangat perang.”<sup>53</sup>

Eriyanto menjelaskan bahwa paradigma kritis memiliki pandangan tersendiri terhadap berita, yang tidak lepas dari bagaimana proses produksinya, kedudukan wartawan, dan media massa yang melakukan keseluruhan proses produksi tersebut. Berikut akan dijabar pandangan paradigma kritis terhadap

50. Lihat Mark Glaser. September 27, 2006. “Your Guide to Citizen Journalism”. *Public Broadcasting Service: Media Shift*. Diakses dari <http://www.pbs.org/mediashift/2006/09/your-guide-to-citizen-journalism270.html>, tanggal 18 Oktober 2012.

51. Nurudin. *Op cit.*, hlm. 219-220.

52. Lihat Eriyanto. 2001. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKIS. Hlm. 23, catatan kaki 5.

53. Eriyanto. *Ibid.* hlm 23. Lebih jauh, Eriyanto mengutip Stuart Hall, menjelaskan bahwa “pertanyaan utama dari paradigma kritis adalah adanya kekuatan-kekuatan yang berbeda dalam masyarakat yang mengontrol proses komunikasi.”

keseluruhan proses sebuah berita (informasi) pada media massa<sup>54</sup>, yakni sebagai berikut:

1. Pandangan kritis melihat bahwa fakta merupakan hasil dari proses pertarungan antara kekuatan ekonomi, politik, dan sosial yang ada dalam masyarakat. Berita bukanlah cerminan dari realitas, melainkan cerminan dari kepentingan kekuatan dominan.
2. Media, khususnya media massa, memiliki posisi yang hanya dikuasai oleh kelompok dominan dan menjadi sarana untuk menekan kelompok lain yang tidak dominan. Dengan kata lain, media massa tersebut hanya menjadi alat kelompok dominan.
3. Nilai-nilai dan ideologi wartawan tidak dapat dipisahkan dari proses peliputan dan pelaporan peristiwa, dan memiliki tujuan untuk memihak kepada kelompok tertentu. Landasan wartawan bukanlah landasan etis, melainkan landasan ideologis, dan menjadikan profesionalisme sebagai kontrol serta profesinya sebagai pekerja mempunyai posisi berbeda dalam kelas sosial.
4. Hasil liputan dari media massa mencerminkan ideologi wartawan yang tidak lepas dari kepentingan sosial, ekonomi dan politik tertentu sehingga informasinya tidak objektif karena wartawan itu sendiri merupakan bagian dari kelompok atau struktur sosial tertentu yang lebih besar. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menunjukkan bagaimana kelompoknya sendiri diunggulkan dan memarjinalkan kelompok lain.

Melalui paradigma ini, AKUMASSA melakukan kritik terhadap media. Sebagai sebuah gagasan ide yang menggunakan paradigma kritis, AKUMASSA secara aktif melakukan penafsiran media melalui pendekatan dan perspektif kritisisme terhadap media (*media criticism*).

*Media criticism*, menurut Naomi Rockler-Gladen (dari Colorado State University) dalam sebuah esainya di *website* <http://suite101.com/>, ialah sebuah analisis kritis terhadap aspek-spek teks budaya populer, siaran berita, atau teks media lainnya. Kritik media membuat sebuah argumen tentang sebuah teks media atau serangkaian teks media, di mana kritik media selalu menyajikan sebuah pendapat tentang informasi yang didukung dengan bukti yang kuat.<sup>55</sup> Sementara

itu, Davis Foulger (dari Brooklyn College), mengartikan *media criticism* sebagai pemeriksaan sistematis terhadap cara kerja dan efek dari media komunikasi, yang memungkinkan berbagai metode, umumnya “kualitatif” untuk menelaah media, pesan-pesan yang disajikan oleh pelaku-pelaku media, cara-cara pesan itu diproduksi, cara-cara bagaimana pesan itu dikonsumsi, serta efek (terutama efek sosial) yang dapat dikaitkan dengan penggunaan medium.<sup>56</sup>

Sebagaimana paradigma kritis melihat media, *media criticism* muncul akibat adanya kecurigaan tentang media yang tidak lagi netral. Media berada pada sebuah sistem yang menegaskan perbedaan antara kelas penguasa dan kelas yang termarjinalkan. Media menjadi alat penguasa dan demikian juga para pelaku media itu sendiri (jurnalis). Akibat adanya fenomena penguasaan media oleh kelompok tertentu, media massa dan jurnalis rentan berada dalam sebuah lingkaran kekerasan simbolik dan fisik, korupsi dan manipulasi informasi yang membentuk hubungan kekuasaan di dalam masyarakat. Ken Sanes, seorang penulis dan pengelola *website* bernama *Transparency* (<http://www.transparencynow.com/>), dalam sebuah esai berjudul “The News Media’s Effort to Hide from Significant Truth”, menjelaskan pelaku media sendiri tenggelam dalam sistem yang tidak benar. Mereka terlibat dalam kekerasan simbolik terhadap reputasi; mereka memanipulasi informasi untuk mencapai berbagai tujuan; dan menawarkan kepada publik beragam bentuk ketidakbenaran yang disamarkan menjadi kebenaran. Lebih jauh, Ken Sanes, menyatakan:

*[...] Hari ini, pengambilan keputusan skala besar di Amerika (dan bangsa-bangsa lain), hingga batas tertentu, berada di bawah kontrol sebuah “oligarki” virtual, terdiri dari perusahaan, kelompok politik, dan media. Semuanya memanipulasi pemerintahan untuk mencapai tujuannya dan semuanya menggunakan televisi dan bentuk-bentuk media massa lain untuk membentuk opini publik.”<sup>57</sup>*

Menurut Sanes, situasi yang demikian akan mengancam demokrasi dan kesetaraan informasi. Salah satu untuk menangkalnya ialah dengan mewujudkan media massa yang independen dengan “keberanian dan integritas untuk mengekspos sistem dengan terang, sehingga kekuatan opini publik, rasa malu, dan hukum bisa memunculkan koreksi”. Media, alih-alih hanya meliput cara-cara kekuasaan

54. Semua poin tersebut dikutip dari Eriyanto. *Ibid.*, hlm 32-34.

55. Lihat Naomi Rockler-Gladen. 9 Mei 2008. “What is Media Criticism?”. *Suite101*. Diakses dari <http://suite101.com/article/how-to-write-media-criticism-a53411>, tanggal 20 Oktober 2012.

56. Lihat Davis Foulger. 2010. “An Introduction to Media Criticism”. *Evolutionary Media*. Diakses dari <http://evolutionarymedia.com/cgi-bin/wiki.cgi?IntroductionToMediaCriticism>, tanggal 20 Oktober 2012.

57. Ken Sanes. Tidak ada tahun. “The News Media’s Effort to Hide from Significant Truth”. *Transparency*. Diakses dari <http://www.transparencynow.com/news/preface.htm>, tanggal 20 Oktober 2012.

itu digunakan dan disalahgunakan, organisasi media telah menjadi bagian dari sistem kekuasaan itu sendiri. Oleh sebab itu, sebagaimana yang Sanes anjurkan, *media criticism* menjadi demikian penting untuk menjaga demokrasi.<sup>58</sup>

Dalam usaha melakukan kritik media itu, Ken Sanes menjabarkan beberapa prinsip yang harus dipahami dalam *media criticism*, berupa karakteristik dari budaya dan masyarakat kontemporer, dengan menawarkan pengenalan lapangan yang akan memungkinkan pembaca melihat tren yang lebih besar yang mendefinisikan banyak media<sup>59</sup>, yakni sebagai berikut:

1. Segala pusat kekuasaan hari ini bergantung pada media. Semua penggunaan manipulasi sensorik dan simulasi, bersamaan dengan alur cerita, retorika, dan pertunjukan bertujuan untuk menjual (menawarkan) produk-produk, kandidat-kandidat, dan ide-ide kepada audiens.
2. Sebagian besar media hari ini, dari berita hingga hiburan, melandaskan diri pada tontonan, penyederhanaan dan pernyataan yang berlebihan untuk meraih dan mempertahankan audiens.
3. Media massa telah menjadi bagian dari sistem kekuasaan dan ekonomi yang seharusnya dilaporkan secara objektif. Alih-alih berada pada posisi yang berjarak demi menyajikan informasi yang akurat, seringkali media massa hanyalah pemain dalam yang memanipulasi informasi untuk tujuannya sendiri. Hal ini bukannya hanya berarti perusahaan media memiliki konflik kepentingan, tetapi juga berarti bahwa jurnalis yang seharusnya jujur akhirnya sampai tunduk pada mereka yang berkuasa dalam organisasi media tersebut.
4. Banyak media yang dilanda oleh idealisasi dan demonisasi di mana manipulator media menggambarkan diri mereka sendiri dan kelompoknya sebagai pahlawan dan orang-orang suci, dan lawan atau target mereka sebagai penjahat, karakter bodoh dan pengganggu, baik untuk mengemas berita agar menarik atau untuk memenangkan pertarungan.
5. Media massa hari ini dipenuhi oleh informasi yang hilang. Informasi hilang yang dimaksud ialah informasi yang dapat mendiskreditkan sistem dan menghasilkan reformasi yang akan mengunci para pelaku yang menggerakkan sistem untuk keuntungannya sendiri.

---

58. Ken Sanes. *Ibid.*

59. Semua poin tersebut dikutip dari tulisan yang dibuat oleh Ken Sanes. 1997. "Principles of Media Criticism". *Transparency*. Diakses dari <http://www.transparencynow.com/mediacrit.htm>, tanggal 20 Oktober 2012.

6. Semua media hari ini adalah sebuah bentuk aksi. Cerita-cerita, retorika, gambar-gambar dan impresi yang dimanipulasi merupakan semua usaha-usaha untuk mempengaruhi persepsi dan aksi orang-orang, membangkitkan rasa takut dan keinginan, dan bermain untuk nilai. Penghilangan informasi dari media merupakan salah satu bentuk aksi itu juga.
7. Media hari ini juga penuh dengan upaya untuk mendapatkan kebenaran, yang sering disamarkan atau dibatasi dengan berbagai cara. Banyak dari upaya untuk menceritakan kebenaran pada publik dapat ditemukan dalam film dan televisi yang secara terbuka menggambarkan budaya penipu dimana kita sekarang hidup dan korupsi media itu.

Ketujuh poin tersebut menunjukkan celah-celah untuk melakukan kritik terhadap media guna mencapai tujuannya. Penjelasan Eriyanto tentang paradigma kritis terhadap media dalam *Analisis Wacana* (2001), secara tidak langsung, menegaskan bahwa dalam melakukan kritik media, harus ada usaha untuk menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dalam rangka membongkar 'lingkaran setan' yang mengelilingi media massa dewasa ini yang dikuasai oleh kelompok tertentu (terutama pemilik modal). Eriyanto menjelaskan tujuan-tujuan dari paradigma kritis dalam melakukan analisis terhadap media massa, antara lain bertujuan untuk melakukan kritik sosial, transformasi, emansipasi, dan penguatan sosial, di mana peneliti menempatkan diri sebagai aktivis, advokat, dan *intellectual transformative*. Paradigma kritis menaruh perhatian analisisnya pada penafsiran subjektif peneliti dengan mengutamakan analisis komperhensif, kontekstual, dan multi-level analisis yang dilakukan melalui penempatan diri sebagai partisipan dalam proses transformasi sosial.<sup>60</sup>

Posisi peneliti dalam pandangan kritis bukanlah subjek yang bebas nilai, tetapi beranjak pada pandangan atau nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti. Peneliti harus secara jelas menunjukkan keberpihakannya pada etika atau moral tertentu.<sup>61</sup> Dalam hal ini, AKUMASSA melakukan kritik sosial dengan menempatkan posisinya untuk membela dan mengedepankan kepentingan masyarakat umum, dan kelompok yang termajinalkan khususnya, mengutamakan kebutuhan warga masyarakat serta perhatian pada wacana-wacana atau narasi-narasi kecil yang terabaikan oleh media arus utama. AKUMASSA menyadari konstruksi realitas yang dibangun perusahaan media massa untuk merealisasikan kepentingan komersil maupun politis yang melatarbelakangi sajian informasi

---

60. Eriyanto. *Op cit.*, hlm. 50-60.

61. Eriyanto. *Op cit.*, hlm. 60

media itu menyebabkan adanya ketimpangan arus informasi, terlebih dengan adanya penguasaan media dalam ‘konvergensi media’ dan ‘konglomerasi media’, sehingga informasi yang dikonsumsi masyarakat tidak sehat.

## II.2. DEFINISI KONSEPTUAL

Pada sub bab ini, akan dipaparkan beberapa jenis konsep yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya untuk memberi batasan-batasan yang sesuai dengan kebutuhan konsep penelitian, di antaranya:

1. Media massa lokal
2. Definisi isu dalam berita media massa lokal
  - a. Good Governance
  - b. Hak Asasi Manusia (HAM)
  - c. Perempuan dan/atau Anak
  - d. Kriminalitas
  - e. Lingkungan Hidup

### II.2.1. Media Massa Lokal

Sebelum dapat dijelaskan pengertian media massa lokal ada baiknya kita memecah pengertian media massa dan lokal sesuai dengan pendapat-pendapat ahli. Karena konsep tentang media lokal bisa dibilang cukup luas dan tidak bisa dijelaskan dengan ala kadarnya. Terlebih di era teknologi informatika ini, perkembangan medium komunikasi semakin meluas, salah satunya dengan keberadaan media *online* yang saat ini sudah tidak asing dan biasa digunakan banyak orang.

Secara pengertian, Effendy (1986)<sup>62</sup> mendefinisikan, “Komunikasi Massa (*mass communication*) adalah komunikasi melalui media massa.”

Selanjutnya Defleur/Dennis (1985)<sup>63</sup> secara konvensional memaparkan, “Media massa seperti surat kabar dan majalah termasuk media massa cetak. Di Amerika Serikat, surat kabar dibagi menjadi surat kabar umum yaitu yang ditujukan pada masyarakat luas, dan surat kabar khusus yang ditujukan pada kelas sosial tertentu atau kelompok tertentu.

Hoeta Soehoet (2002)<sup>64</sup> mengatakan, “*Mass media* artinya alat-alat perantara yang digunakan untuk menyampaikan isi pernyataan kepada banyak orang.”

Sedangkan menurut Nurudin (2009)<sup>65</sup>, “Media massa (cetak dan elektronik) atau pers yakni alat untuk menyebarkan informasi yang sudah dicari oleh jurnalis. Media massa ini juga termasuk berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan eksistensinya. Berkaitan dengan media massa juga tidak bisa dilepaskan dengan tulisan.”

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas jelas bisa ditarik kesimpulan yang pada intinya media massa merupakan suatu alat komunikasi massa untuk menyebarkan informasi yang sudah dicari oleh jurnalis. Bentuknya bisa seperti cetak atau elektronik. Media massa ini juga termasuk berbagai macam kebijakan yang berkaitan dengan eksistensinya.

Untuk menjelaskan pengertian jurnalistik, Rosihan Anwar (1974)<sup>66</sup> menceritakan di AS ada orang-orang yang mengatakan bahwa, *jurnalism is not a game*, kewartawanan itu bukan suatu permainan. Ia mempunyai suatu tujuan sosial yang serius. Dengan menggunakan kemerdekaannya, pers di AS merupakan senjata yang paling berkuasa untuk menjaga dan melindungi kebebasan rakyat, mengabarkan apa yang salah dan tidak adil, serta memerangi kejahatan. Sejak tahun 1917 masyarakat pers di AS memberikan hadiah Pulitzer kepada mereka yang menulis berita-berita atau cerita-cerita yang memberikan inspirasi dalam membongkar korupsi, membela orang-orang yang tidak bersalah, dan mempertahankan hak asasi manusia (HAM).

Kemudian Suhandang (2004)<sup>67</sup> menerjemahkan, “Jurnalistik adalah seni dan/atau keterampilan mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita tentang peristiwa sehari-hari secara indah, dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hati nurani khalayaknya.

Pengertian jurnalistik jika merujuk Nurudin (2009)<sup>68</sup> yang mengutip kamus *Longman Dictionary of Contemporary English* (1982) didefinisikan sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan menulis, mengedit, dan menerbitkan. Sementara itu, jurnalistik diartikan sebagai kata sifat dari jurnalistik atau karakteristik dari

62. Onong Uchjana Effendy. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. 1986. Bandung. Remaja Karya CV. Hlm. 204

63. DeFleur/Dennis. *Understanding Mass Communication*. 1985, Second ed. Boston. Houghton Mifflin Company. Hlm. 166

64. Hoeta Soehoet. (2002). *Manajemen Media Massa*. Jakarta. Yayasan Kampus Tercinta. Hlm. 5

65. Nurudin. (2009). *Jurnalistik Masa Kini*. Jakarta. Rajawali Pers. Hlm. 9

66. Rosihan Anwar. (1974). *Ihwal Jurnalistik*. Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia. hlm. 10

67. Kustadi Suhandang. (2004). *Pengantar Jurnalistik*. Bandung. Yayasan Nuansa Cendekia. Hlm. 21

68. Nurudin. (2009). *Ibid.*, Hlm. 7

jurnalisme. Dengan demikian bisa dikatakan jurnalistik sebagai kata sifat adalah ciri khas dari jurnalisme.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat ditarik satu kesimpulan di mana jurnalistik dianggap sebagai kegiatan dan keterampilan seni mencari, mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan menyajikan berita dengan indah. Pekerjaan sebagai jurnalis itu sendiri juga dianggap memiliki suatu tujuan yang serius, karena dengan kebebasannya pers dianggap merupakan senjata yang paling efektif untuk melindungi masyarakat. Atas dasar itu, jauh sebelum Indonesia merdeka, di AS sejak tahun 1917 paguyuban pers di sana memberikan hadiah tahunan berupa Pulitzer kepada para jurnalis yang menulis berita dan cerita yang memberikan inspirasi dalam membongkar korupsi, membela orang-orang yang tidak bersalah, dan mempertahankan hak asasi manusia (HAM).

Kemudian jika melihat bentuk yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi, Nurudin (2009)<sup>69</sup> memaparkan beberapa ruang lingkup kerja jurnalistik, di antaranya:

### 1. Jurnalisme Cetak

Ruang lingkup, jurnalisme ini berkaitan dengan media cetak. Jurnalisme Cetak ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yakni surat kabar, majalah berita, majalah khusus, majalah perdagangan, majalah hobi, *newsletter*, dan lain-lain. Masing-masing jenis itu berbeda satu sama lain dalam penyajian tulisan dan rubriknya.

### 2. Jurnalisme Siaran

Jurnalisme siaran ini banyak tertuju pada berita televisi dan radio (meskipun juga ada yang menyatakan tertuju pula pada berita *online*) dalam siarannya. Khusus untuk televisi, karya jurnalistik ini bersandar pada informasi visual dalam mengilustrasikan laporannya. Termasuk di sini wawancara kamera dengan orang-orang yang sengaja dilibatkan dan berkaitan dengan objek yang diwawancarai. Grafis juga bisa digunakan untuk mendukungnya.

### 3. Jurnalisme Online

Penemuan *World Web Wide* (WWW) membuat revolusi besar-besaran di bidang jurnalisme dengan munculnya *online* (*cyber journalism*). Revolusi ini berkaitan dengan kecepatan penyebaran pesannya. Sebuah kejadian yang ditulis di internet beberapa detik kemudian tersebar ke seluruh dunia. Di samping itu, dengan peralatan yang canggih memungkinkan munculnya variasi pemberitaan disertai gambar-gambar yang menarik.

69. Nurudin. *Ibid.*, hlm. 13

Gambar yang disajikan bisa jernih seperti orang-orang melihat gambar-gambarnya di komputer.

Selanjutnya, untuk dapat menjelaskan konsep tentang lokalitas, dalam Kaloh (2007) yang mengutip Undang-Undang Republik Indonesia, menjelaskan, “Dalam UU No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah disebutkan secara eksplisit bahwa unit pemerintahan yang melaksanakan otonomi di daerah adalah tingkat kabupaten/kota. Namun pemerintah menggunakan masa transisi untuk mengalihkan kewenangan pemerintahannya secara bertahap, agar pada waktunya asas desentralisasi dan dekonsentrasi bisa terlaksana penuh. Ini tercermin dalam peraturan pemerintah mengenai kewenangan, yang didefinisikan dalam bentuk kewenangan pemerintahan oleh pusat, provinsi dan kabupaten/kota.”<sup>70</sup>

Dijelaskan Romli (2007) yang mengutip M.A. Mithalib dan Ali Khan, dikatakan dalam Bahasa Inggris tentang konsep lokal, “*Conceptually, local otonomy tends to become a synonym of freedom of locality for self determination or local democracy.*”<sup>71</sup>

Dalam artikel yang berjudul *Lokalitas Dalam Sastra Indonesia* karya Maman S Mahayana, dijelaskan bahwa “Lokalitas (*locality*) sebagai konsep umum berkaitan dengan tempat atau wilayah tertentu yang terbatas atau dibatasi oleh wilayah lain. Lokalitas mengasumsikan adanya sejumlah garis pembatas yang bersifat permanen, tegas, dan mutlak yang mengelilingi satu wilayah atau ruang tertentu.”<sup>72</sup>

Dari penjelasan-penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan lokalitas adalah suatu konsep yang berkaitan dengan tempat atau wilayah tertentu yang dibatasi wilayah lain. Lokalitas yang bisa juga diterjemahkan sebagai otonomi daerah secara politik dapat ditangakap bahwa lokalitas merupakan suatu bentuk baku yang sudah ditetapkan dalam UU sebagai desentralisasi dan dekonsentrasi dari pemerintah pusat. Atau juga merupakan sinonim kebebasan lokal untuk penentuan nasib sendiri atau demokrasi lokal.

Setelah terpaparkannya definisi dan konsep tentang media massa dan lokal, dapat terjelaskan tentang apa yang dimaksud media massa lokal. Secara garis besar, media massa lokal berarti suatu bentuk atau alat komunikasi massa—khususnya karya jurnalistik—yang terbit khusus di wilayah tertentu, menyajikan informasi

70. J. Kaloh. (2007). *MENCARI BENTUK OTONOMI DAERAH SUATU SOLUSI DALAM MENJAWAB KEBUTUHAN LOKAL DAN TANTANGAN GLOBAL*. Jakarta. PT Rineka Cipta. Hlm. 51

71. Lili Romli. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hlm. 7

72. Mahayana, Maman S. (2012). *Lokalitas Dalam Sastra Indonesia* Diakses dari <http://kem.ami.or.id/2012/01/membangun-bangsa-melalui-pendidikan-multikultural/>, tanggal 4 September 2012.

seputar persoalan wilayah tertentu, dan untuk kepentingan masyarakat tertentu. Tujuannya untuk menunjang pembangunan wilayah otonomi daerah di mana media massa tersebut itu bekerja. Bentuknya bisa berupa cetak, siaran, dan *online*.

Ungkapan di atas senada dengan penjelasan Tim LSPP (2005) terkait peran media lokal, “Setelah kebijakan otonomi daerah digelindingkan pada awal tahun 2000, tidak bisa tidak keberadaan media cetak di tingkat lokal provinsi akhirnya turut menjadi bagian dalam kebijakan otonomi daerah. Dalam hal ini ada pergeseran-pergeseran yang berarti dalam kalangan swasta, pemerintah, dan masyarakat yang bisa menjadi ukuran bagi terciptanya *good local governance*.”<sup>73</sup>

Namun, media lokal menurut Hanif dan Dicky (2002)<sup>74</sup> mengutip Ken Mink, redaktur pelaksana Daily News-Record di Harrisonburg sebuah kota kecil di Negara Bagian Virginia, Amerika Serikat, mengatakan bahwa surat kabar lokal (*community newspaper*) hendaknya berusaha agar masyarakat merasa seperti menjadi bagian dalam berita. Demikian pula sebaliknya, hendaknya diusahakan agar surat kabar menjadi bagian dari masyarakatnya. Harian itu memang hanya bertiras 32.000 eksemplar, tetapi beredar di daerah yang hanya berpenduduk sekira 40.000 jiwa.

## II.2.2. Definisi Isu

Perlu diketahui bahwa setiap karya-karya jurnalistik umumnya dikategorikan sesuai dengan isu yang diangkat. Isu-isu tersebut akan disajikan secara umum oleh rapat redaksi sesuai dengan rubriknya masing-masing. Maka dari itu, pada sub bab ini akan dijelaskan pengertian-pengertian tentang kategori isu dalam berita yang menjadi fokus penelitian AKUMASSA. Terlebih dahulu, akan dipaparkan batasan definisi tentang berita.

Pengertian berita menurut Kovach (2006) ialah “bagian dari komunikasi yang membuat kita terus memperoleh informasi tentang pergantian peristiwa, isu, dan tokoh di luar dunia.”<sup>75</sup>

Sedangkan menurut Kusumaningrat (2006) yang mengutip Mitchell V. Charnley, “Berita adalah laporan aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik

atau penting, atau keduanya, bagi sejumlah besar orang.”<sup>76</sup> Sedangkan Asep Syamsul M.R. (2009) mendefinisikan berita sebagai sebuah “laporan peristiwa yang dimuat atau disiarkan di media massa berupa fakta atau gagasan, terdiri dari unsur 5W+1H, dan mengandung nilai-nilai berita atau nilai-nilai jurnalistik.”<sup>77</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, sudah terjelaskan bahwa yang dimaksud dengan berita adalah bagian karya jurnalistik yang membuat masyarakat memperoleh informasi atau laporan yang aktual tentang fakta atau opini penting dan menarik yang tampil di media massa. Jadi dalam penelitian ini yang dimaksud dengan berita adalah laporan atau hasil karya jurnalistik yang disajikan media lokal di kota-kota yang menjadi wilayah penelitian.

Selanjutnya, untuk pembatasan kategori isu, berdasarkan latar belakang masalah yang dibahas pada Bab I, AKUMASSA menaruh perhatian pada persebaran kategori berita secara umum, yaitu berita yang mengandung isu *good governance*, Hak Asasi Manusia (HAM), perempuan dan/atau anak, kriminalitas, dan lingkungan hidup. Atas dasar itu, penelitian ini akan fokus pada sejauh mana media massa lokal di daerah-daerah yang menjadi lokasi penelitian menetapkan kebijakan redaksi dalam persebaran isu-isu tersebut.

### II.2.2.1. Good Governance

Gunawan Sudomoningrat (1999) menyatakan, “*Good governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan *good governance* pemerintahan perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.”<sup>78</sup>

Kemudian Mardiasmo (2002) mengutip *World Bank* (Bank Dunia) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.<sup>79</sup>

76. Kusumaningrat, Purnama dan Hikmat. (2006). *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 39

77. Romli, Asep, Syamsul M. (2008). *Kamus Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. Hlm. 19

78. Gunawan Sudomoningrat. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat & JPS*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm. 251

79. Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi. Hlm. 18

73. LSPP, TIM. (2005). *Media Lokal Mewartakan Korupsi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: LSPP. Hlm. 4

74. Suranto, Hanif, Dicky Lopulalan. (2002). *Menjadi Wartawan Lokal*. Jakarta. LSPP. Hal. Viii.

75. Kovach, Bill & Tom Rosentiel. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisisme, Terjemahan Yusi A. Pareanom*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 16

Selanjutnya, konsep *good governance* dipaparkan Mushtaq Husain Khan (2004) diartikan sebagai model untuk membandingkan kebijakan politik dan ekonomi yang tidak efektif dengan kebijakan politik dan ekonomi yang layak.<sup>80</sup>

Dari pengertian-pengertian itu dapat ditarik kesimpulan, secara sederhana bahwa *good governance* adalah suatu istilah yang mewacanakan bagaimana terwujudnya satu tatanan pemerintahan yang baik, di mana negara bekerjasama dengan pemilik modal dan pemangku kepentingan lainnya (termasuk media) dan juga masyarakat, untuk menciptakan kesejahteraan bagi semuanya (masyarakat).

Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan berita *good governance* adalah laporan hasil kumpulan fakta-fakta, baik peristiwa maupun pendapat yang menyangkut dengan wacana perwujudan satu tatanan pemerintahan yang baik. Suatu informasi yang menyajikan wacana kerjasama antara negara, pemilik modal, pemangku kepentingan, dan juga masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peran penting media massa melontarkan isu *good governance* dijelaskan Ashadi<sup>81</sup> dalam artikelnya, yakni “Landasan akuntabilitas sosial sering dibicarakan dalam kaitan dengan fungsi institusi negara. Kaidah akuntabilitas merupakan implikasi dari pengurusan kelembagaan secara baik (*good governance*), merupakan landasan keberadaan dari setiap institusi yang berada dan menjalankan fungsi dalam ruang publik. Dengan begitu akan mengikat lembaga-lembaga swadaya masyarakat/non-pemerintah (LSM/NGO). Institusi media pers yang menjalankan fungsi imperatif untuk memenuhi hak publik, dengan sendirinya berkewajiban pula menjalankan kaidah *good governance* dan *public accountability*.”

Selanjutnya, dalam artikel yang diterbitkan *website* wapresri.go.id, dikatakan bahwa:

*“hubungan media massa dan good local governance dalam konteks demokratisasi dan otonomi daerah menjadi sangat penting. Media menjadi sarana komunikasi yang strategis dalam menampung aspirasi grassroots, mengawal pembuatan dan implementasi kebijakan oleh pemerintah. Kesadaran media massa lokal untuk menjadi agen pembangunan, pendorong demokrasi, serta bagian dari*

*pembuat solusi, turut memberikan kontribusi positif bagi terciptanya suasana politik yang kondusif.”<sup>82</sup>*

Dari kedua artikel tersebut dapat dijelaskan bahwa media massa memiliki peran penting untuk menyajikan isu *good governance*. Karena, dalam hal ini media massa yang dianggap memiliki fungsi imperatif untuk memenuhi hak publik, berkewajiban menjalankan (dengan menyajikan informasi) kaidah *good governance* dan *public accountability*. Selain itu, media sebagai sarana komunikasi yang strategis dalam menampung aspirasi *grassroot*, dianggap berkewajiban mengawal pembuatan dan implementasi kebijakan pemerintah. Dan kesadaran media massa khususnya yang lokal untuk menjadi agen pembangunan, pendorong demokrasi, serta bagian dari pembuat solusi, turut memberikan kontribusi positif bagi terciptanya suasana politik yang kondusif.

#### II.2.2.2. Hak Asasi Manusia

Dalam penjelasan konsep HAM yang dirumuskan PBB dikatakan bahwa “*Human right could generally be defined as those right which are inherent in our nature and without which we cannot live as human beings.*”<sup>83</sup>

Menurut John Locke, semua individu sejak lahir telah mendapatkan karunia berupa hak atas kehidupan, kebebasan, dan harta yang tidak dapat dicabut oleh negara. Agar hak-hak tersebut dapat terwujud, maka diperlukan sebuah pemerintahan. Sekalipun pemerintahan ini dibentuk oleh rakyat dan tidak dapat dicabut hak-hak tersebut.<sup>84</sup>

Manshur (*et. al.* 2010), mengutip Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, pada menimbang poin a menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.<sup>85</sup>

80. Mushtaq Husain Khan (2004). *State formation in Palestine: Viability and Governance During A Social Transformation: Volume 2 of Political Economy of The Middle East and North Africa*. Routledge.

81. Ashadi Siregar. “Pokok pikiran disampaikan pada Seminar Nasional Membangun Reputasi Pemerintahan pada Era Otonomi Daerah Melalui Aspek Komunikasi, Manajemen dan Administrasi”, Universitas Prof.Dr.Moestopo (Beragama), Jakarta 15 Februari 2003.

82. Redaksi. (2012). Strategi Komunikasi Politik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. (diakses dari <http://wapresri.go.id/index/preview/setpolitik/2037>, tanggal 17 November 2012).

83. *United Nations, Human Right, Question and Answer*, New York, hlm. 4

84. Scott Davidson (1994) *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Grafiti. Hal. 37

85. Manshur Efendi dan Taufani Sukmana Evandri. (2010). *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia. hlm, 310

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat diambil simpulan bahwa yang dimaksud dengan HAM adalah kodrat alami yang melekat pada diri setiap orang sejak lahir dan tidak dapat diganggu. Hak yang bersifat universal ini harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun apalagi negara.

Media yang profesional merupakan komponen penting untuk kestabilan negara demokrasi yang majemuk. Sebagai 'kekuatan ke empat' (*fourth estate*), media adalah pelindung demokrasi, pembela kepentingan umum, menyingkapkan penyelewengan wewenang pemerintah dan membela hak-hak demokratis warga negara.

Dalam artikel yang diterbitkan Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat (ELSAM), dikatakan bahwa media massa memiliki peran yang sangat strategis dan penting dalam pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia (HAM). Berangkat dari pengetahuan itu pula ELSAM menganjurkan Komnas HAM untuk menjalin kerja sama dengan pers, guna menyebarluaskan informasi mengenai nilai-nilai hak asasi manusia kepada seluruh lapisan masyarakat.<sup>86</sup>

Dari beberapa artikel yang diambil terkait pemahaman peran penting media massa untuk mewacanakan isu HAM, dapat disimpulkan bahwa secara profesional, media massa merupakan komponen penting untuk melindungi dan membela kepentingan umum yang bersifat hak-hak demokratis warga negara. Media massa juga memiliki peran strategis untuk mendukung proses belajar masyarakat dari informasi-informasi tentang HAM yang disajikan.

### II.2.2.3. Perempuan dan/atau Anak

Perkembangan ilmu sosial mulai menaruh perhatian terhadap isu perempuan dan anak sehubungan dengan bagaimana media massa melihat memandang posisi perempuan dan anak. Umumnya, perempuan dan anak hanya menjadi objek pemberitaan media massa tanpa ada keberpihakan terhadap kepentingan-kepentingan atau hak-hak perempuan dan anak.

#### A. Perempuan

Pada isu perempuan, ada kecenderungan dari media massa yang memanfaatkan "nuansa khas" dari seorang perempuan, misalnya mulai dari sisi keberhasilan karir dan jabatannya, ketegarannya menyikapi persoalan, kenekadannya dalam melakukan sesuatu serta keberaniannya memperlihatkan aurat. Tidak

86. ELSAM. Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007. Halaman 18.

jarang, pemberitaan di media massa, perempuan mengalami diskriminasi dan diskreditasi, serta sering muncul masalah berkenaan dengan bagaimana perempuan dicitrakan kepada publik (yang umumnya bias gender).

Bainar (1998) menjelaskan bahwa di Indonesia, secara hukum, perempuan dan laki-laki mempunyai kedudukan yang sama berdasarkan UUD 1945. Dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978, 1983, dan 197,8 Pemerintah dengan tegas mengakui perbedaan peran secara seksual antara laki-laki dan perempuan, dan menyatakan bahwa peran serta kaum perempuan dalam proses pembangunan harus berkembang selaras dengan peran mereka dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga pada umumnya, dan pendidikan generasi muda pada khususnya. Dengan kata lain, perempuan dianggap oleh negara memiliki peran dalam pembangunan bangsa tanpa melepas perannya dalam membangun rumah tangga. Akan tetapi ia beranggapan dalam kehidupan sehari-hari masih dijumpai kesulitan-kesulitan merealisasikan kesamaan hak tersebut.<sup>87</sup>

Hal ini juga menjadi isu yang sering muncul di media massa, sehubungan dengan bagaimana perempuan selalu ditempatkan pada posisi kedua. Sebagaimana dengan penjelasan Ibrahim dan Sutanto (1998) yang mengutip Herliany, disebutkan bahwa "perempuan begitu dekat dengan idiom-idiom seperti keterkurungan, ketertindasan, dan bahkan pada konsep yang terlanjur diterima pada kultur masyarakat kita bahwa mereka adalah 'objek' dan bukan subjek."<sup>88</sup>

Sementara itu, Sjamsiah (2005) menjelaskan bahwa status perempuan tertera tegas dalam sub komisi dari Komisi HAM PBB, yaitu *Commission on the Status of Women* (CSW) yang dibentuk tahun 1986. Pada CSW dipaparkan bahwa rekomendasi untuk negara-negara yang tergabung dalam PBB untuk segera memberikan hak-hak perempuan yang setara dengan laki-laki, termasuk dalam bidang politik.<sup>89</sup>

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan, perempuan adalah manusia yang memiliki perbedaan seksual dengan laki-laki. Dalam proses pembangunan juga dianggap memiliki peran penting. Tapi di lain sisi seringkali perempuan menjadi idiom ketertindasan, keterkurungan,

87. Bainar (1998). Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO dan UII. Hlm. 241-242

88. Idi Ibrahim Subandy dan Hanif Susanto. (1998). *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender Dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Hlm. 56

89. Achmad, Sjamsiah. (2005). *Kejahatan Berbasis Gender serta Dampak Gender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002*. Jakarta. Komnas Perempuan. Hlm. 119

dan hal-hal lain yang sudah terlanjur membudaya di tengah-tengah masyarakat yang bersifat memarjinalkan perempuan.

Selanjutnya, dari pengertian perempuan di atas, perlu diketahui lebih lanjut, sejauh ini bagaimana kerja media massa yang berfungsi sebagai alat pembelajaran bagi masyarakat dalam mengangkat isu perempuan. Untuk menjelaskan hal itu, dalam membangun wacana perempuan Direktur LP3Y, Ashadi Siregar<sup>90</sup> memaparkan sebagai berikut:

- a. Orientasi jurnalisme Indonesia dari segi ini maupun institusinya sangat bias gender. Materi pemberitaan media massa cenderung menempatkan wanita sebagai obyek tertawaan, atau sebaliknya karena alasan kecantikan yang bersangkutan. Secara kelembagaan, praktik institusi jurnalistik tak pernah memberi posisi strategis kepada jurnalis wanita, setara dengan prestasi jurnalis pria.
- b. Orientasi jurnalisme di Indonesia yang sangat *patriarchal* dalam praktiknya telah menyebabkan proses marjinalisasi perempuan dan kehidupan perempuan. Sayangnya, masyarakat – termasuk masyarakat pers – kurang sensitif pada proses dan fenomena tersebut.
- c. Alasan bias gender pada media massa bisa bersumber pada pribadi jurnalis (pria) bersangkutan, tetapi sering pula akibat konstruksi sosial (fakta sosial) yang dipungut media massa bersangkutan dan dijadikan informasi tertentu.

Selanjutnya, dalam membangun wacana perempuan, Burhan (2003) mengatakan:

*“Berhubungan dengan eksploitasi perempuan, seks, pornografi menjadi ladang pemberitaan media kapitalis, karena isu ini menjadi sangat menarik dan laku di masyarakat, dalam dunia jurnalisme kapitalis di Indonesia. Ada tiga isu abadi, yaitu harta, tahta dan wanita., ketiga isu ini menjadi realitas sosial yang direkonstruksikan secara bergantian menjadi realitas media.”*<sup>91</sup>

Sedangkan Nila (2009) dalam skripsinya mengatakan bahwa:

*“Media massa mempunyai peranan penting dalam menyebarkan informasi. Penyebaran informasi mengenai perempuan membuat mitos-mitos yang selama ini berkembang mulai mengalami perubahan. Posisi perempuan tidak lagi termarjinalkan. Namun dengan adanya pemberitaan pada media yang merepresentasikan perempuan membuat pandangan mengenai perempuan berubah.”*<sup>92</sup>

Dari pendapat-pendapat tersebut, bisa dikatakan bahwa sejauh ini media massa yang dianggap memiliki peranan penting dalam menyebarkan informasi memiliki peranan untuk menyajikan berita yang mendorong pandangan intelektual sehingga keyakinan pada mitos-mitos lama kian berubah, dan posisi perempuan tidak lagi termarjinalkan.

## B. Anak

Demikian juga dengan anak, kelompok ini mengalami hal yang sama. Anak selalu menjadi objek yang menarik dalam berita di media massa. Segala hal yang berkaitan dengan anak adalah satu hal yang tidak biasa: prestasi, kriminalitas, penyimpangan, kenakalan dan sebagainya. Dengan kata lain, dalam media massa, anak juga hanya menjadi objek eksploitasi. Terkait batasan pengertian anak, penelitian ini merujuk pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Ahmadi (1989) dalam bukunya berjudul Ilmu Jiwa Anak mengutip J.A. Comenius mengatakan, “Anak bukanlah manusia dewasa yang sedang tumbuh kembang.”<sup>93</sup>

Sedangkan Makmur (2012) mengatakan bahwa:

*“Anak adalah aset bangsa yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. Ketika anak-anak dipelihara (hak-haknya) dan diperhatikan serta dikembangkan maka tidak heran jika kehidupan masa depan akan lebih cerah, dan sebaliknya jika hak-hak anak diabaikan maka kehancuran bangsa sudah di depan mata.”*<sup>94</sup>

90. Kompas. *Orientasi Jurnalisme Indonesia Sangat Bias Gender*. 20 Desember 1997, Hlm. 10.

91. Burhan Bungin. (2003). *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta. Prenada Media. Hlm. 143-144

92. Nila Kurnia sari. (2009). *Representasi Kuasa Perempuan Dalam Teks Pada Majalah Cosmopolitan*. Jakarta. Yayasan Kampus Tercinta. Hal. 116

93. Abu Ahmadi. (1989). *Ilmu Jiwa Anak*. Bandung: CV Armico. Hlm. 24

94. Makmur Sunusi. (2012). *Anak & Negara Perspektif Indonesia Abad XXI*. Jakarta. Jaspres. Hlm.7

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah manusia yang berumur di bawah 18 tahun dan belum dewasa atau sedang tumbuh kembang, serta dianggap kelompok yang harus dipelihara, diperhatikan, dan dikembangkan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih cerah.

Peran media massa dalam tumbuh kembang anak dijelaskan oleh Tatang, dalam teori perkembangan anak sebagaimana disampaikan Bronfenbrenner (Bapennas 2008), yakni tumbuh kembang anak tidak akan terpisahkan dari kelima sistem interaksi. Pada proses interaksi inilah banyak institusi yang akan mensosialisasikan nilai-nilai dan pengetahuan kepada anak. Oleh karena itu, orangtua tidak dapat dengan sempurna menginginkan anaknya menjadi seperti apa yang ia inginkan, karena banyak institusi yang turut berperan dalam proses sosialisasi, salah satunya yang paling berpengaruh di era global ini adalah media massa, yang oleh McLuhan (1964) dijelaskan bahwa kehadiran mediana saja telah membawa pesan, *the medium is message*.<sup>95</sup> Dalam penelitian peran media cetak membentuk budaya konsumtif terhadap anak, Kusmindarti, yang mengutip Ibrahim, mengatakan,

*“Media memiliki fungsi sebagai sumber rujukan dan wahana peniruan bagi anak-anak yang langsung atau tidak, menjadikan mereka sebagai konsumen media. Karena apa yang disajikan media, hal itu pula yang menjadi gambaran realitas yang menempel dalam benak anak-anak.”*<sup>96</sup>

Selanjutnya, dalam sebuah artikel di website KPI (Komisi Perlindungan Anak) tertulis sebagai berikut:

*“Media penyiaran mempunyai peran penting dalam membentuk karakter anak. Hal ini diungkapkan oleh Mulyono Rustam, Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Tengah, saat membuka seminar dalam rangka peringatan 78 tahun Hari Penyiaran Nasional, Rabu (30/03) di Solo. Tema seminar ini adalah Media dan Pembentukan Karakter Anak, Refleksi Surakarta menuju Kota Layak Anak.”*<sup>97</sup>

95. Mutaqin, Tatang. 2010. Jurnal Perencanaan Pembangunan Edisi 02/Tahun XVI/2010. Televisi Ramah Anak. Halaman 21.

96. Kusmindarti, Novarini Ardi. (2006). Pembentukan Budaya Konsumtif Terhadap Anak-anak Melalui Rubrik Toyz Dalam Majalah XY KIDS!. Jakarta. Yayasan Kampus Tercinta. Hlm. 7

97. RG. (2011). Peran Media Bagi Anak. [Diakses dari <http://www.kpi.go.id/component/content/article/14-dalam-negeri-umum/2930-peran-media-bagi-anak>, tanggal 7 September 2012.]

Dari paparan beberapa sumber di atas, dapat dilihat bahwa media massa juga memiliki tanggung jawab untuk membentuk karakter anak. Artinya sajian informasi yang mengkspos anak dengan berlebihan menjadi berita dianggap menyalahi aturan kode etik jurnalistik. Apalagi jika sajian berita tersebut mengacu pada sikap diskriminasi pada anak. Hal ini di atur oleh KEJ pasal 8 yang dikeluarkan Dewan Pers.

#### II.2.2.4. *Kriminalitas*

Ketika kita berbicara tentang berita isu kriminalitas, kita tidak bisa lepas dari hakikat kejahatan sebagai gejala sosial. Oleh sebab itu, terlebih dahulu dipaparkan definisi dari kejahatan itu sendiri. Mustofa (2010), secara sosiologis menjelaskan definisi kejahatan sebagai berikut:

*“a. pola tingkah laku yang dilakukan oleh individu-individu, atau sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non formal) dalam masyarakat yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik maupun psikologis). Beberapa tingkah laku yang merugikan tersebut, melalui suatu proses politik oleh lembaga legislatif dapat dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran hukum (pidana) dan kepada pelakunya diberikan sanksi pidana;*

*b.pola tingkah laku individu-individu, sekelompok individu, maupun suatu organisasi dalam masyarakat yang bertentangan dengan perasaan moral masyarakat, dan kepada pelakunya masyarakat memberikan reaksi non formal.”*<sup>98</sup>

Dari definisi yang tersaji di atas, penelitian ini mengambil definisi kejahatan yang pertama, yakni pelanggaran hukum (pidana). Hal ini sejalan dengan definisi dari Agus, pada artikelnya yang mengutip Hurwitz (1982: 25) bahwa “kriminalitas atau kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).<sup>99</sup>

Sehubungan dengan berita di media massa, isu tentang kriminalitas atau kejahatan, tidak bisa lepas dari persoalan tentang bagaimana media massa

98. Muhammad Mustofa. (2010). “Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum”. Edisi Kedua. Jakarta: Penerbit Sari Ilmu Pratam (SIP). Hlm. 23.

99. Agus. (2006). *Majalah Ilmiah “Jurnal Kampus Tercinta”*. Jakarta: IISIP Jakarta. Hal. 43.

itu melakukan pembentukan 'realitas'. Dalam kajian *news-making criminology*, terdapat sebuah pandangan bahwa dalam membentuk 'realitas' itu, media massa sering mengalami mistifikasi atau tidak proporsional dengan realitas sebenarnya. Isu-isu kriminalitas dalam pemberitaan media massa, sebagaimana dijelaskan Iqraq Sulihin (2007), berhubungan dengan pemberitaan yang tidak mengungkap realitas sesungguhnya tentang keseriusan sebuah kejahatan, tipologi kejahatan yang paling banyak terjadi di masyarakat, penciptaan *image* yang tidak tepat tentang kejahatan dan penjahat, penggunaan terminologi yang tidak tepat, serta pemberitaan yang melanggar hukum dan etika pers.<sup>100</sup>

Selain itu, menurut Dadan dalam Jurnal IISIP yang mengutip Assegaf (1983), dikatakan bahwa berita-berita kejahatan ialah berita-berita yang di dalamnya termasuk segala kejadian yang melanggar peraturan dan undang-undang negara, di antaranya: pencopetan, pencurian, perampokan, penodongan, perkosaan, dan pembunuhan.<sup>101</sup>

Dari paparan di atas, dapat diambil sebuah pengertian tentang berita kejahatan yakni sebuah artikel berita yang menyajikan satu peristiwa tindakan kejahatan atau melanggar hukum (pidana), yang di dalamnya terdapat unsur pelaku, korban, serta reaksi masyarakat dan reaksi formal dari lembaga hukum terhadap kejahatan itu.

#### II.2.2.5. Lingkungan Hidup

Jika merujuk pada UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada Bab I pasal 1 dijelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berbicara tentang lingkungan, tidak dapat dilepaskan dari persoalan tentang 'pencemaran lingkungan'. Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy dan/atau komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air/udara menjadi kurang

100. Iqraq Sulhin. (2007). *News-making Criminology: Sebuah Penafsiran Antara Kritik dan AKsi*. [Diakses dari <http://kriminologi.files.wordpress.com/2007/03/newsmakingcriminologi.pdf>, tanggal 17 November 2012.

101. Dadan Iskandar. (2006). *Jurnal IISIP*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta. Hal. 32)

atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya (definisi menurut SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/1988).

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan, lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi termasuk makhluk hidup di dalamnya atau suatu ruang tempat bagi tiap-tiap makhluk hidup yang berada di dalamnya dan dapat mempengaruhi makhluk hidup lainnya.

Kemudian untuk mendapat pemahaman lebih dalam tentang berita lingkungan hidup dan untuk lebih mempertegas batasannya, Abrar (1993) menjelaskan bahwa:

*"Pada hakekatnya berita lingkungan hidup sama saja dengan jenis berita lainnya seperti berita kriminal, berita politik dan sebagainya. Yang membendakannya adalah realitas yang menjadi bahan bakunya. Bahan baku berita lingkungan hidup adalah realitas lingkungan hidup, seperti polusi udara dan suara, penggundulan hutan, pencemaran sampah, kerusakan akibat penggunaan pupuk yang berlebihan, pencemaran industri, dan sebagainya."*<sup>102</sup>

Sementara itu, Surya (2004) dalam skripsinya menjelaskan:

*"Berita lingkungan hidup adalah laporan terbaru atau termasa mengenai fakta peristiwa, atau fakta pendapat yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat atau disiarkan melalui media massa tentang semua makhluk hidup dan tidak hidup (termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya) dalam satu ruang yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya."*<sup>103</sup>

Selanjutnya untuk menjelaskan masalah-masalah pokok terkait berita lingkungan hidup, M. S. Kismadi yang dikutip Atmakusumah (1996), memaparkan beberapa unsur pokok tentang ekosistem bumi<sup>104</sup>:

102. Ana Nadhya Abrar. (1993). *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. Halaman 7.

103. Wirati Surya. (2004). *Berita Lingkungan Hidup Pada Surat kabar Media Indonesia Edisi Juli-September 2003 Dilihat Dari Jenis Masalah, Sumber Berita, dan Arah Isu Berita*. Jakarta. Yayasan Kampus Tercinta. Halaman 21.

104. Atmakusumah. (1996). *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta. Lembaga Pers dr. Soetomo (LPDS) dan Yayasan Obor Indonesia. Halaman 66-67.

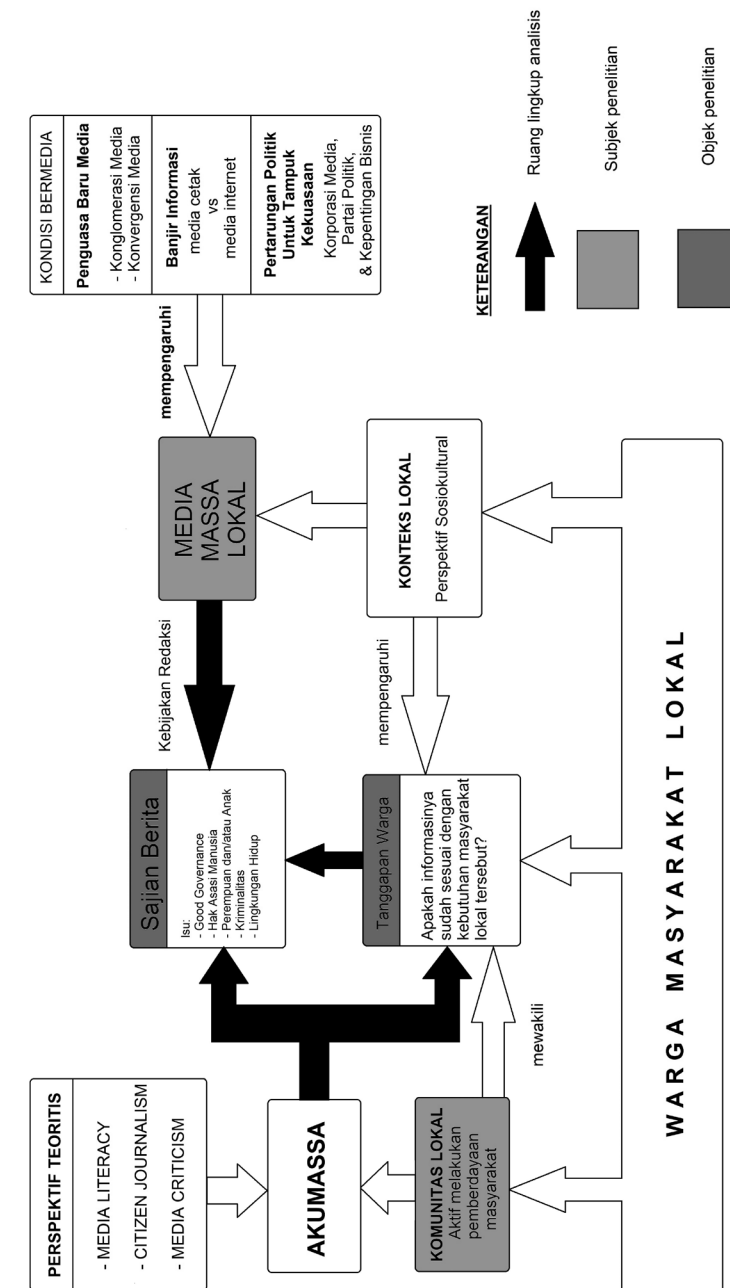
1. **Udara**
  - Kualitas Udara dan atmosfer
  - Perubahan cuaca, pemanasan global, efek rumah kaca
  - Pengrusakan lapisan ozon
  - Polusi udara pada umumnya
2. **Tanah**
  - Kualitas tanah dan degradasi tanah
  - Hutan
  - Suaka alam dan pemanfaatan lahan
3. **Air**
  - Kualitas dan kuantitas
  - Salinisasi
  - Pencemaran
4. **Kehidupan di bumi**
  - Spesies langka dan ancaman kepunahan
  - Biodiversitas
5. **Unsur Perubahan Lingkungan**
  - Kependudukan
  - Produksi dan konsumsi
  - Pemanfaatan sumber daya alam
6. **Masalah-masalah Khusus**
  - Energi
  - Limbah
  - Bahan beracun dan berbahaya
  - Pencemaran kimiawi
  - Kesehatan lingkungan

Merujuk pada pendapat-pendapat di atas, terlihat jelas batasan-batasan yang dimaksud sebagai berita lingkungan hidup, yaitu laporan aktual dengan bahan baku berupa fakta peristiwa atau fakta pendapat yang menyangkut realitas lingkungan alamiah. Hal ini berupa informasi tentang keberadaan air, tanah, udara, kehidupan di bumi, unsur perubahan lingkungan, dan masalah-masalah khusus lainnya seperti kerusakan hutan, pencemaran lingkungan, energi dan lain-lain.

### II.3. KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan jabaran kerangka teoritik dan definisi konseptual yang telah dilakukan tersebut, penelitian ini mengajukan sebuah kerangka berpikir yang tersaji dalam bagan berikut ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir Penelitian



Pada **Bagan 1** dapat dilihat bahwa penelitian ini melakukan kajian terhadap sajian berita di media massa lokal dan tanggapan warga (diwakili oleh komunitas lokal yang aktif melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat) terhadap sajian berita media massa lokal tersebut.

Kondisi bermedia, yang telah dijabarkan pada BAB I, mempengaruhi bagaimana media massa lokal bekerja. Kebijakan redaksi media massa dalam memproduksi informasi mempengaruhi isu-isu yang tersajikan kepada masyarakat. Konteks lokal dari wilayah lokal tersebut mempengaruhi pula bagaimana media massa memproduksi beritanya dan bagaimana warga masyarakat lokal melihat dan menilainya.

Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang telah disusun pada BAB I, sajian berita informasi yang masuk dalam lima cakupan isu (*good governance*, hak asasi manusia, perempuan dan/atau anak, kriminalitas, dan lingkungan hidup) dan tanggapan komunitas lokal menjadi ruang lingkup masalah yang akan dianalisis oleh AKUMASSA dengan menggunakan pisau bedah berupa kerangka atau perspektif teoritis yang telah disusun pada BAB II sub-BAB 2.1.



## BAB III METODOLOGI PENELITIAN



### III.1. METODE PENELITIAN

ADA PUN DALAM penelitian ini, AKUMASSA menggunakan metode campuran (*mixed method*). Secara sederhana, metode campuran, oleh Johson, Onwuegbuzie, dan Turner (2007), diartikan sebagai berikut:

*Mixed methods research is a research design where researchers incorporate components of quantitative and qualitative research to achieve a comprehensive understanding of evidence together with human experience (Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007).<sup>105</sup>*

Metode campuran ialah sebuah rancangan penelitian dimana peneliti menggabungkan komponen penelitian kuantitatif dan kualitatif untuk mencapai pemahaman menyeluruh terhadap bukti bersamaan dengan pengalaman manusia. Pengertian ini sejajar dengan yang dijelaskan oleh Creswell (2006), yakni sebagai berikut:

*Mixed methods research is a research design with philosophical assumptions as well as methods of inquiry. As a methodology, it involves philosophical assumptions that guide the direction of the collection and analysis of data and*

---

105. Lihat Michele Whitney. "Mixed Method Research in Social Science". *Suite101.com*. 7 September 2010. [Diakses dari <http://suite101.com/article/mixed-methods-research-in-the-social-sciences-a283411>, tanggal 18 November 2012].

*the mixture of qualitative and quantitative approaches in many phases in the research process. As a method, it focuses on collecting, analyzing, and mixing both quantitative and qualitative data in a single study or series of studies. Its central premise is that the use of quantitative and qualitative approaches in combination provides a better understanding of research problems than either approach alone.*<sup>106</sup>

Creswell menyebutkan bahwa penelitian yang menggunakan metode campuran ialah sebuah rancangan penelitian dengan asumsi filosofis serta metode-metode penyelidikan. Sebagai sebuah metodologi, ia melibatkan asumsi filosofis yang memandu arah pengumpulan dan analisis data melalui campuran dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam berbagai tahapan proses penelitiannya. Sebagai sebuah metode, ia berfokus pada pengumpulan, analisis, dan pencampuran kedua data kuantitatif dan kualitatif, baik dalam sebuah penelitian tunggal maupun serangkaian penelitian. Premis utamanya adalah penggunaan kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif memberikan pemahaman yang lebih baik dari masalah penelitian daripada menggunakan salah satu pendekatan saja.

Merujuk pada proses penelitian yang telah dilakukan AKUMASSA dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas Rekam Media, terdapat dua jenis data dalam penelitian ini: data kuantitatif dan data kualitatif.

Creswell (2006) menjelaskan bahwa dalam penelitian yang menggunakan metode campuran, data kuantitatif mencakup 'informasi tertutup' (*closed-ended information*) seperti yang ditemukan pada informasi tentang sikap (*attitude*), perilaku (*behavior*) dan instrument kinerja (*performance instrument*). Terkadang juga, data kuantitatif didapat dari dokumen-dokumen seperti data sensus atau catatan kehadiran. Analisis yang dilakukan ialah berupa telaah statistik untuk menakar nilai dari data yang telah dikumpulkan. Sebaliknya, data kualitatif mencakup informasi terbuka (*open-ended information*) yang dikumpulkan melalui wawancara. Data kualitatif juga dapat berasal dari pengamatan terhadap subjek atau situs penelitian, dari pengumpulan dokumen sebagai sumber data, atau dari bahan audiovisual. Analisis data kualitatif dilakukan dengan menggabungkan (*aggregating*) kata-kata atau gambar (*image*) ke dalam kategori informasi dan menyajikan keragaman ide-ide yang dikumpulkan selama proses pengumpulan data.<sup>107</sup>

106. Lihat Creswell. (2006). Chapter I Understanding Mixed Methods Research. Hlm. 5 [Diakses dari [http://www.sagepub.com/upm-data/10981\\_Chapter\\_1.pdf](http://www.sagepub.com/upm-data/10981_Chapter_1.pdf), tanggal 18 November 2012].

107. Creswell. *Ibid.*, hlm. 6

Dalam penelitian yang dilakukan AKUMASSA, data yang termasuk dalam kategori data kuantitatif ialah jumlah hitungan dari masing-masing isu (*good governance*, Hak Asasi Manusia, perempuan dan/atau anak, kriminalitas, dan lingkungan hidup) dalam artikel berita di setiap terbitan harian surat kabar cetak. Hitungan jumlah isu yang muncul dalam surat kabar ini direkapitulasi ke dalam bentuk tabel dengan menunjukkan frekuensi isu yang muncul dalam sehari.

Sedangkan data kualitatif dalam penelitian ini, yang menjadi data pelengkap, terdiri dari dua jenis, yakni data laporan (dokumen) mingguan yang ditulis sebagai rangkuman dari kegiatan survei frekuensi isu (dalam bentuk narasi sebanyak lebih kurang tiga ratus kata); dan hasil wawancara dengan narasumber penelitian.

### III.1.1. Tujuan Metode Penelitian

Rauscher dan Greenfield (2009) menjelaskan bahwa metode campuran membuka kemungkinan bagi peneliti untuk mengungkap hal-hal yang lebih mendalam tentang masalah yang sedang diteliti.<sup>108</sup> Lebih jauh, Johnson, Onwuegbuzie dan Turner (2007) mengajukan tiga alasan yang mendasari pentingnya bagi peneliti untuk memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu strategi metode campuran<sup>109</sup>, yakni sebagai berikut:

1. Metode campuran memberikan peneliti peluang untuk mendukung sebuah hipotesis atau teori dengan bukti dari metode kuantitatif dan kualitatif.
2. Menggabungkan analisis kuantitatif dan kualitatif melalui metode campuran dapat menghasilkan sebuah analisis data yang lebih produktif.
3. Menggunakan metode campuran memungkinkan cara-cara baru untuk berpikir yang terwujud dari dua jenis data yang berbeda.

Creswell (2006) juga memberikan beberapa alasan mengapa penelitian metode campuran menjadi penting<sup>110</sup>, yakni sebagai berikut:

108. Michele Whitney. *Op cit.*

109. Ketiga poin (alasan) tersebut dikutip dari Michele Whitney. *Op cit.*

110. Creswell. *Op cit.*, hlm. 9-10

1. Metode campuran memberikan kekuatan yang mengimbangi kelemahan penelitian kuantitatif dan kualitatif.
2. Metode campuran memberikan bukti yang lebih komprehensif untuk mempelajari masalah penelitian, baik dari penelitian kuantitatif maupun kualitatif saja.
3. Metode campuran membantu peneliti menjawab pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh pendekatan kualitatif atau kuantitatif saja.
4. Metode campuran mendorong peneliti untuk berkolaborasi dalam hubungan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif.
5. Metode campuran mendorong penggunaan pandangan atau paradigma ganda ketimbang asosiasi yang khas dari paradigma tertentu.
6. Metode campuran itu “praktis”, dalam arti bahwa peneliti bebas untuk menggunakan semua metode yang mungkin untuk mengatasi masalah penelitian.

Berangkat dari dua argumentasi di atas, tujuan dari AKUMASSA menggunakan metode campuran (menggabungkan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif) dalam penelitian ini ialah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan seksama terhadap masalah yang ingin dikaji.

### III.2. OBYEK PENELITIAN DAN UNIT ANALISIS

Yang menjadi obyek dari penelitian ini ialah sajian berita dari media massa lokal dan tanggapan warga masyarakat terhadap sajian tersebut. Dengan kata lain, yang menjadi subjek penelitian ialah media massa lokal, sebagai penyaji berita kepada masyarakat, dan komunitas lokal, sebagai perwakilan suara dari masyarakat lokal.

Unit analisis, atau hal yang menjadi cakupan analisis, di dalam penelitian ini ialah isi (*content*) informasi yang terkandung di dalam sajian berita media massa lokal. Dalam penelitian ini, AKUMASSA memiliki fokus analisis terhadap lima isu besar, yakni *good governance*, hak asasi manusia (HAM), perempuan dan/atau anak, kriminalitas, dan lingkungan hidup. Kelima isu ini, kami pandang secara umum memiliki kandungan nilai dengan peringkat tertinggi untuk diangkat oleh media massa dalam menyajikan informasi tentang segala aspek kehidupan sosial yang ada di masyarakat.

### III.3. RUANG LINGKUP PENELITIAN

Penelitian ini memiliki cakupan di delapan kota yang ada di Indonesia. AKUMASSA mengambil dua hingga 3 media massa lokal untuk diteliti. Berikut cakupan wilayah penelitian AKUMASSA beserta media massa lokal yang menjadi subjek penelitian, yaitu:

- Lebak, Banten: *Kabar Banten* dan *Banten Raya Pos*
- Ciputat, Tangerang Selatan: *Tangsel Pos* dan *Suara Tangsel*
- Jakarta, DKI Jakarta: *Berita Kota* dan *Warta Kota*
- Surabaya, Jawa Timur: *Radar Surabaya* dan *Surabaya Pos*
- Pemenang, Lombok Utara, NTB: *Radar Lombok* dan *Lombok Pos*
- Depok, Jawa Barat: *Radar Depok*, *Monitor Depok* dan *Jurnal Depok*
- Aceh Besar, NAD: *Serambi Indonesia* dan *Prohaba*
- Jember, Jawa Timur: *Radar Jember* dan *jemberpost.com*

Penelitian ini dilakukan selama lebih kurang satu tahun, yakni dari Bulan Februari 2012 hingga Bulan Januari 2013, sebagaimana durasi kerja Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media, AKUMASSA. Untuk kepentingan penelitian, bahan yang dijadikan sebagai data penelitian ialah semua terbitan media massa lokal yang berada dalam rentang waktu antara tanggal 13 Februari hingga 3 Juni 2012. Alasan pemilihan data yang terbatas ini berdasarkan pertimbangan kelengkapan data yang dikirimkan oleh para pemantau di lokasi kepada Tim AKUMASSA selama program Rekam Media tersebut berjalan.

### III.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Strategi yang digunakan oleh AKUMASSA dalam melaksanakan pengumpulan data untuk penelitian ini ialah dengan menyelenggarakan sebuah program bernama Pemantauan Media Berbasis Komunitas atau Rekam Media.

Program ini berlangsung sejak Bulan Februari 2012, dan masih berlangsung hingga saat ini. Dalam program tersebut, AKUMASSA mengajak partisipasi komunitas-komunitas lokal yang sebelumnya telah terlibat dalam program *workshop* AKUMASSA yang diselenggarakan oleh Forum Lenteng. Selain komunitas-komunitas tersebut, Forum Lenteng juga melibatkan jaringannya dengan mengajak beberapa komunitas atau individu di luar jaringan program AKUMASSA. Para partisipan yang terlibat dalam program ini adalah warga lokal asli di lokasi yang bersangkutan dan dalam masa produktif (usia 19-30 tahun). Jaringan kerja Forum Lenteng ini terlibat aktif melakukan pemantauan terhadap media massa lokal di daerahnya masing-masing.

Dari masing-masing komunitas yang ikut serta dalam program ini, dipilih seorang pemantau (yang bekerja aktif bersama komunitasnya), dan memberikan laporan setiap minggu kepada AKUMASSA, berupa laporan naratif yang merupakan hasil dari rangkuman kegiatan pemantauan selama seminggu.

Pada awal program ini dijalankan, jaringan komunitas yang terlibat ialah berjumlah sepuluh komunitas, yakni Jakarta, Depok, Padangpanjang, Aceh Besar, Jember, Lebak, Surabaya, Lombok Utara, Tangerang Selatan, dan Yogyakarta. Namun, seiring berjalannya program, dua lokasi, yaitu Yogyakarta dan Padangpanjang terpaksa berhenti melakukan kegiatan pemantauan media massa lokal karena kendala teknis. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini, hanya delapan lokasi yang dijadikan sebagai ruang lingkup penelitiannya. Para pemantau yang melakukan pemantauan media massa lokal, yakni:

- Lebak, Banten: Firmansyah (Komunitas Saidjah Forum)
- Ciputat, Tangerang Selatan: Renal Rinoza (Komunitas Djuanda)
- Jakarta, DKI Jakarta: Lulus Gita Samudra (Forum Lenteng)
- Surabaya, Jawa Timur: Juventius Sandy Setyawan (Komunitas Kinetik)
- Pemenang, Lombok Utara, NTB: Lalu Maldi (Komunitas Pasir Putih)
- Depok, Jawa Barat: Manshur Zikri (Komunitas Suburbia)
- Aceh Besar, NAD: Maina Sari
- Jember, Jawa Timur: Muhammad Qomarudin (Komunitas Tikungan)

Dari delapan lokasi tersebut, terdapat dua orang pemantau yang bukan termasuk dalam jaringan program AKUMASSA, yakni Aceh Besar yang diwakili oleh Maina Sari, dan Jember yang diwakili oleh Muhammad Qomarudin (Komunitas Tikungan). Keterlibatan dua lokasi ini didukung oleh akses yang dimiliki oleh Forum Lenteng karena memiliki jaringan ke dua lokasi tersebut. Khusus untuk Maina Sari, dia memang tidak memiliki atau mewakili komunitas lokal yang resmi, namun dia terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan komunitas dan radio lokal di Aceh Besar, dan juga merupakan warga lokal asli daerah tersebut. Hal ini menjadi pertimbangan AKUMASSA bahwa Maina Sari dapat mewakili daerah lokalnya untuk berpartisipasi dalam program Rekam Media ini.

Komunitas-komunitas lokal dan/atau individu yang mewakili daerah lokalnya tersebut membaca, secara kritis, sajian berita di media massa lokal tempat komunitas/individu itu berada, lalu menghitung jumlah masing-masing isu yang tersaji setiap harinya (teknik sensus). Hasil hitungan ini dimasukkan ke dalam sebuah rangkuman tabel, yang kemudian disebut sebagai “tabel frekuensi isu”. Berikut ini disajikan bentuk tabel yang digunakan untuk menghitung jumlah frekuensi isu dalam sajian berita media massa tersebut:

Tabel 1. Bentuk Tabel Laporan Harian Pemantau

ISU-ISU	MEDIA	RADAR DEPOK		
		Jumlah Artikel	Judul Artikel	Ringkasan Artikel
GOOD GOVERNANCE	Headline			
	Rubrik lain			
	Jumlah			
HAM	Headline			
	Rubrik lain			
	Jumlah			
PEREMPUAN DAN/ATAU ANAK	Headline			
	Rubrik lain			
	Jumlah			
KRIMINALITAS	Headline			
	Rubrik lain			
	Jumlah			
LINGKUNGAN HIDUP	Headline			
	Rubrik lain			
	Jumlah			



Pada setiap minggu itu pula, para pemantau dari masing-masing komunitas mengirimkan data tabel frekuensi isu dan laporan naratif kepada tim AKUMASSA di Jakarta melalui surat elektronik. Tim AKUMASSA kemudian mentransformasi hasil hitungan jumlah isu tersebut ke perangkat lunak statistik, untuk dihitung persentasenya.

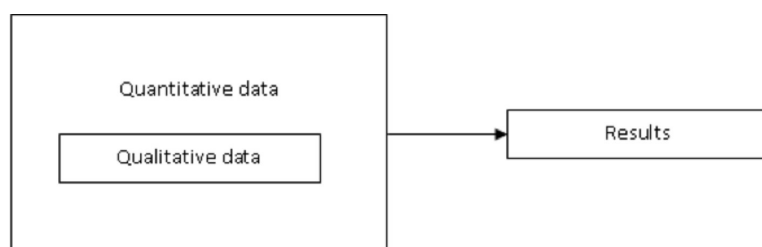
Selain melakukan pengumpulan data dalam program Rekam Media, AKUMASSA juga melakukan wawancara mendalam dengan komunitas-komunitas lokal tersebut untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi lokal tempat media massa-media massa bekerja. Kemudian, AKUMASSA juga melakukan wawancara mendalam kepada redaksi media massa lokal yang bersangkutan untuk mendapatkan data tentang pemahaman, sudut pandang, serta kinerja mereka sebagai media massa, dalam menanggapi persoalan-persoalan lokal dari daerah yang bersangkutan.

### III.5. METODE ANALISIS

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini ialah analisis data kuantitatif yang diperkuat dengan dukungan data kualitatif. Fokus analisis ialah mencari kecenderungan masing-masing isu di dalam setiap terbitan media massa lokal yang diteliti.

Metode memadukan data kuantitatif dan kualitatif yang digunakan oleh AKUMASSA ialah mengikuti metode yang digagas oleh Creswell (2006). Creswell menjelaskan bahwa untuk mendapatkan hasil yang baik, ada tiga cara mengaduk data kuantitatif dengan kualitatif, yakni *merge*, *connect*, dan *embed*.<sup>111</sup> Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mengolah data kuantitatif dan kualitatif ialah *embed the data*, yakni menjadikan data yang satu sebagai pendukung data yang lain. AKUMASSA menjadikan data kualitatif sebagai data pendukung untuk melakukan analisis data kuantitatif, dengan gambaran sebagai berikut:

Bagan 2. Metode Analisis, *embed the data* (Creswell, 2006: 7)



111. Creswell, *op cit.*, hlm. 7

Sedangkan studi atau kajian kecenderungan (*trend studies*), menurut Sulisty-Basuki (2010) ialah pengukuran atau penilaian pada tahap tertentu pada berbagai interval waktu untuk menentukan laju dan arah perubahan. Dalam penelitian ini, AKUMASSA akan melakukan kajian kecenderungan isu-isu berita di media massa dengan menelaah data hasil hitungan jumlah isu melalui analisis statistika (dengan menggunakan perangkat lunak statistik, SPSS). Hasil dari hitungan kecenderungan ini kemudian akan dibedah dengan menggunakan kerangka teoritik yang telah dijabarkan pada BAB II untuk menjelaskan fenomena-fenomena bermedia di wilayah lokal.

#### III.5.1. Analisis Data Kuantitatif

Dalam mengolah dan menganalisa data kuantitatif, AKUMASSA dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif menggunakan perangkat lunak SPSS. Penekanan fokus analisis ialah rata-rata frekuensi masing-masing isu dalam satu hari di setiap terbitan media massa lokal. Dengan mengetahui jumlah rata-rata frekuensi masing-masing isu ini, akan diketahui isu mana yang paling mendominasi dan isu mana yang paling sedikit mendapatkan perhatian dari media massa lokal yang bersangkutan.

Selanjutnya, untuk pendalaman lebih jauh, data kuantitatif juga dianalisis untuk mengetahui kecenderungan isu (*trend analysis*) melalui uji regresi linear sederhana. Analisis kecenderungan yang dimaksudkan di sini ialah data berkala (*time series*) dengan Metode Kuadrat Terkecil.

Muhammad Iqbal (2010), mengutip Sutrisno (1995: 432) dan Hamdani, dkk (2007: 189-198) menjelaskan bahwa analisis terhadap data berkala merupakan “serangkaian pengamatan terhadap suatu peristiwa, kejadian, gejala, ataupun variabel yang diambil dari waktu ke waktu,” dan analisis kecenderungan linear (*trend linear*) menjadi salah satu cara untuk mengetahui “gerakan (kecenderungan) naik atau turun dalam jangka panjang seperti diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu”.<sup>112</sup>

Uji kecenderungan linear ini akan menghasilkan persamaan garis lurus, yakni  $Y = a + bX$ , di mana  $Y$  adalah data berkala atau nilai *trend* untuk periode

112. Muhammad Iqbal (2010). *Analisis Trend Linear Dengan Metode Kuadrat Terkecil Untuk Meramalkan Perkembangan Banyaknya Siswa*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Diakses dari <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/04510038-m-iqbal.ps>, tanggal 20 Februari 2013.

tertentu;  $\mathcal{X}$  adalah periode waktu (hari, minggu, bulan, tahun);  $a$  adalah konstanta nilai  $\mathcal{Y}$  jika  $\mathcal{X} = 0$ ; dan  $b$  adalah koefisien  $\mathcal{X}$  atau kemiringan garis tren (slope).<sup>113</sup>

Dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, akan dilakukan langkah-langkah interpretasi, sebagai berikut:

- a. Uji  $F$ , untuk mengetahui ketepatan model: apakah persamaan regresi dapat dipakai untuk memprediksi  $Y$  atau tidak.
- b. Interpretasi koefisien regresi melalui Uji  $t$ , untuk mengetahui signifikansi konstanta dan variabel bebas, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Jika NILAI ALPHA/angka signifikansi hasil riset  $< 0,05$ , maka koefisien regresi signifikan
  - Jika NILAI ALPHA/angka signifikansi hasil riset  $> 0,05$ , maka koefisien regresi tidak signifikan.

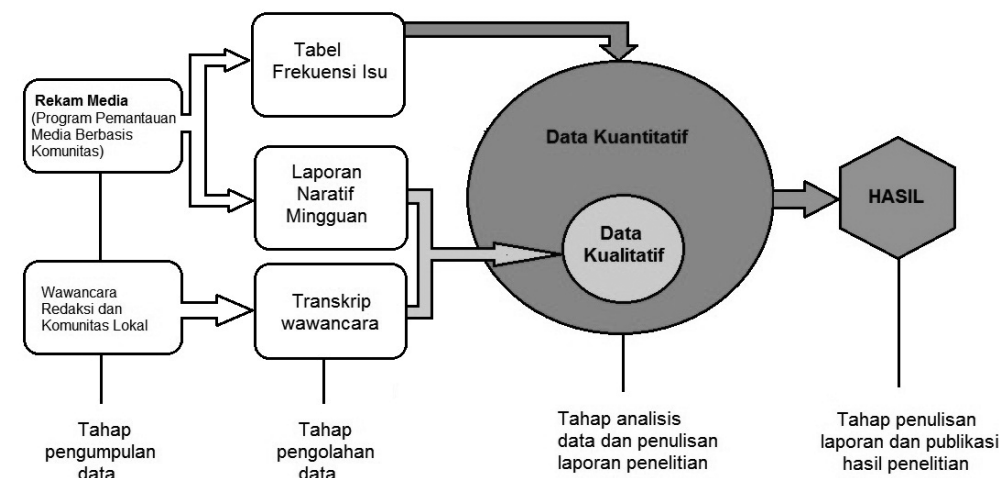
### III.5.2. Analisis Data Kualitatif

Hasil dari analisis data kuantitatif kemudian akan menjadi acuan utama untuk membaca perkembangan lima kategori isu di dalam sajian berita media massa lokal, yang akan dibedah berdasarkan data kualitatif (laporan narasi para pemantau) dan hasil wawancara dengan komunitas lokal dan redaksi media massa lokal yang bersangkutan. Pemahaman peneliti berdasarkan data kualitatif (laporan narsi mingguan pemantau dan data wawancara) terkait dengan situasi dan kondisi sosiokultural wilayah lokal tempat media massa lokal bekerja, akan membantu dalam menjelaskan mengapa satu isu tertentu lebih dominan dibandingkan dengan isu yang lain, serta mengapa isu tertentu mengalami bentuk kecenderungan yang tertentu pula.

### III.6. KERANGKA KERJA PENELITIAN

Kerangka kerja penelitian yang dilakukan oleh AKUMASSA ialah sebagai berikut:

Bagan 3. Kerangka Kerja Penelitian



Penelitian AKUMASSA tentang kinerja media massa lokal dan tanggapan warga masyarakat lokal (yang diwakili oleh komunitas lokal) berangkat dari Program Media Berbasis Komunitas, Rekam Media. Program ini masuk dalam tahap pengumpulan data, berbarengan dengan aksi wawancara dengan narasumber (redaksi media massa lokal dan komunitas lokal). Pengolahan data kuantitatif dilakukan selama program berjalan, demikian juga dengan pengolahan data kualitatif. Semua data ini kemudian menjadi bahan untuk dianalisis dan akhirnya ditulis dalam sebuah laporan penelitian yang nantinya akan diproduksi menjadi sebuah buku.



113. *Ibid.*

**BAB IV**  
**HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**



#### IV.1. TEMUAN DAN HASIL OLAHAN DATA

DALAM PROGRAM Rekam Media, atau Pemantauan Media Berbasis Komunitas, kerja pemantauan terhadap media massa lokal dilakukan untuk rentang waktu satu tahun. Bahan atau data yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini ialah data yang terkumpul selama rentang waktu empat bulan pertama berjalannya Program Rekam Media. Hasil olahan data yang disajikan dalam penelitian ini ialah data yang dikumpulkan selama periode tanggal 13 Februari hingga 3 Juni 2012.

Rentang waktu selama empat bulan tersebut berjumlah 112 hari (16 minggu). Selama rentang waktu tersebut, terdapat 15 Hari Minggu, dan 4 hari yang merupakan tanggal merah. Berdasarkan ketentuan tersebut, berikut ini akan dijabarkan data deskripsi statistik dari setiap media massa lokal dari masing-masing lokasi.

Berdasarkan gambaran pada **Tabel 3**, dapat dilihat bahwa total seluruh artikel berita dari semua media massa lokal yang masuk dalam lima kategori isu (*good governance*, HAM, perempuan dan/atau anak, kriminalitas, dan lingkungan hidup) ialah 12.772 artikel. Dapat dilihat pula bahwa, isu *good governance* menjadi isu yang paling dominan di antara isu yang lainnya, kecuali pada Surat Kabar *Prohaba*, kriminalitas adalah kategori isu yang paling banyak ditemukan dalam rentang waktu empat bulan tersebut.

Tabel 3. Jumlah artikel berita yang dipantau selama periode 13 Februari – 3 Juni 2012

Lokasi Pemantauan	Surat Kabar	Isu										Total Artikel	
		Good governance	%	HAM	%	Perempuan dan/atau Anak	%	Kriminalitas	%	Lingkungan hidup	%		
Aceh Besar	Serambi Indonesia	647	47%	47	3%	294	21%	380	28%	8	1%	1376	100%
	Prohaba	3	1%	16	5%	30	8%	297	84%	8	2%	354	100%
Tangerang Selatan	Tangsel Post	297	49%	28	5%	158	26%	84	14%	40	7%	607	100%
	Suara Tangsel	182	55%	11	3%	19	6%	79	24%	40	12%	331	100%
Depok	Radar Depok	486	53%	20	2%	65	7%	161	18%	184	20%	916	100%
	Monitor Depok	332	40%	32	4%	55	7%	206	25%	198	24%	823	100%
	Jurnal Depok	255	56%	16	4%	30	7%	65	14%	88	19%	454	100%
Jakarta	Berita Kota	588	65%	67	7%	30	3%	192	21%	23	3%	900	100%
	Warta Kota	466	53%	68	8%	44	5%	253	29%	50	6%	881	100%
Jember	Radar Jember	286	45%	8	1%	44	7%	228	36%	63	10%	629	100%
	jemberpost.com	43	86%	1	2%	2	4%	4	8%	0	0%	50	100%
Lebak (Banten)	Kabar Banten	637	55%	38	3%	65	6%	176	15%	249	21%	1165	100%
	Banten Raya Post	469	52%	29	3%	56	6%	135	15%	205	23%	894	100%
Lombok Utara	Radar Lombok	464	77%	32	5%	9	1%	39	6%	58	10%	602	100%
	Lombok Post	686	87%	16	2%	5	1%	45	6%	34	4%	786	100%
Surabaya	Radar Surabaya	863	88%	13	1%	10	1%	80	8%	12	1%	978	100%
	Surabaya Post	948	92%	8	1%	2	0%	50	5%	18	2%	1026	100%
Total Artikel Per Isu		7652		450		918		2474		1278		12772	

Tabel 4. Rata-rata frekuensi isu dalam satu hari di setiap media massa lokal yang dipantau

Lokasi	Media Massa Lokal	Jumlah Hari Pantauan		Good governance		Hak asasi manusia		Perempuan dan/atau anak		Kriminalitas		Lingkungan Hidup	
		Hari Terbit	Hari Tidak Terbit	HP	Total	HP	Total	HP	Total	HP	Total	HP	Total
Aceh	Serambi Indonesia	108	4	1,29	5,99	0,17	0,44	0,28	2,72	1,14	3,52	0,41	1,99
	Prohaba	108	4	0,02	0,03	0,12	0,15	0,19	0,28	1,93	2,75	0,07	0,07
Lebak	Kabar Banten	93	19	1,63	6,85	0,12	0,41	0,32	0,70	1,31	1,89	0,32	2,68
	Banten Raya Post	93	19	1,25	5,04	0,06	0,31	0,25	0,60	0,54	1,45	0,20	2,20
Depok	Radar Depok	108	4	1,94	4,50	0,12	0,19	0,38	0,60	0,99	1,49	0,27	1,70
	Monitor Depok	92	20	1,82	3,61	0,13	0,35	0,34	0,60	1,83	2,24	0,32	2,15
	Jurnal Depok*	106	6		2,41		0,15		0,28		0,61		0,83
Ciputat	Tangsel Pos	74	38	1,42	4,01	0,08	0,38	0,18	2,14	0,66	1,14	0,14	0,54
	Suara Tangsel	45	67	1,11	4,04	0,11	0,24	0,09	0,42	0,38	1,76	0,09	0,89
Jakarta	Berita Kota	108	4	3,37	5,44	0,47	0,62	0,09	0,28	0,99	1,78	0,10	0,21
	Warta Kota	108	4	2,19	4,31	0,41	0,63	0,23	0,41	1,25	2,34	0,16	0,46
Jember	Radar Jember	111	1***	1,94	2,58	0,05	0,07	0,29	0,40	0,71	2,05	0,40	0,57
	Jemberpost.com	111**	1***		0,39		0,01		0,02		0,04		0,00
Surabaya	Radar Surabaya	112	0	2,33	7,71	0,07	0,12	0,07	0,09	0,65	0,71	0,04	0,11
	Surabaya Post	108	4	2,28	8,78	0,00	0,07	0,00	0,02	0,04	0,46	0,06	0,17
Lombok	Radar Lombok	91	21	4,25	5,10	0,35	0,35	0,10	0,10	0,42	0,43	0,59	0,64
	Lombok Post	91	21	4,66	7,54	0,16	0,18	0,04	0,05	0,46	0,49	0,18	0,37

Keterangan: \* Hanya memiliki halaman pertama  
 \*\* Media online  
 \*\*\* Tidak ada laporan dari pemantau di lokasi

Pada **Tabel 4**, dapat dilihat pula bahwa, dari rata-rata frekuensi masing-masing isu setiap hari, baik pada halaman pertama maupun total seluruh artikel dari setiap rubrik media massa lokal tersebut, isu *good governance* merupakan isu yang mendominasi hampir di seluruh media massa lokal, kecuali Surat Kabar *Prohaba* yang lebih banyak memuat isu kriminalitas dibandingkan dengan isu lainnya. Perhatian media massa lokal sangat kecil terhadap isu hak asasi manusia (HAM), perempuan dan/atau anak serta lingkungan hidup. Hal ini terlihat dari angka rata-rata statistik yang umumnya berada di bawah angka 1.

#### IV.1.1. Hasil Analisis Trend Linear

Berdasarkan hasil pengolahan data kuantitatif dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, hasil Uji Regresi Linear untuk mengetahui kecenderungan masing-masing isu, dapat disajikan dalam tabel, yakni sebagai berikut:

##### A. Good Governance

Dari hasil pengolahan data kecenderungan masing-masing isu, diketahui bahwa media massa lokal (surat kabar dan *online*) yang mengalami kecenderungan isu *good governance* naik dengan persamaan regresi signifikan adalah *Suara Tangsel*, *Radar Depok*, *Monitor Depok*, *Jurnal Depok*, *Banten Raya Post* dan *Lombok Pos*. Sementara itu, surat kabar yang mengalami penurunan isu *good governance* dengan persamaan regresi signifikan adalah *Serambi Indonesia* dan *Radar Lombok*. Keterangan ini dapat dilihat pada **Tabel 5**.

##### B. Hak Asasi Manusia

Pada **Tabel 6**, dapat dilihat bahwa media massa lokal yang memiliki kecenderungan isu HAM naik dengan persamaan regresi yang signifikan adalah Surat Kabar *Monitor Depok* dan *Radar Lombok*. Sementara itu, media massa lokal yang memiliki kecenderungan isu HAM menurun dengan persamaan regresi yang signifikan adalah Surat Kabar *Serambi Indonesia*, dan *Kabar Banten*.

##### C. Perempuan dan/atau Anak

**Tabel 7**, dapat dilihat bahwa media massa lokal yang memiliki kecenderungan isu perempuan dan/atau anak naik dengan persamaan regresi yang signifikan adalah Surat Kabar *Lombok Post* dan *Surabaya Post*. Sementara itu, yang mengalami kecenderungan isu perempuan dan/atau anak menurun dengan persamaan regresi signifikan adalah *Tangsel Pos*, *Warta Kota*, *Radar Jember*, dan *Kabar Banten*.

##### D. Kriminalitas

Sedangkan untuk isu kriminalitas, media massa lokal yang memiliki kecenderungan isu naik dengan persamaan regresi signifikan adalah Surat Kabar *Kabar Banten*. Sementara itu, yang memiliki kecenderungan isu menurun dengan persamaan regresi signifikan adalah Surat Kabar *Tangsel Pos*, *Suara Tangsel*, *Radar Depok*, *Monitor Depok*, *Berita Kota*, *Radar Jember*, *Radar Surabaya*, dan *Surabaya Post*. Hal itu dapat dilihat pada **Tabel 8**.

Tabel 5. Uji regresi isu *good governance*

UJI REGRESI ISU <i>GOOD GOVERNANCE</i> (confidence interval 95% atau $\alpha = 0.05$ )										
LOKASI	SK	PROPORSI	Trend	R square	UJI REGRESI					
					Uji F			Uji Signifikansi		
					F (htg)	df(1),(2)	F tbl	a	Hasil Uji	Persamaan
Aceh Besar	SI	47.020%	Turun	0.110	13.123	1;106	3.93	0.000	Signifikan	$Y = -0.36x + 8.019$
	Pro	0.847%	Naik	0.006	0.670	1;106	3.93	0.415	Tidak signifikan	$Y = 0.0003x + 0.005$
Tangerang Selatan	TP	48.929%	Naik	0.003	0.228	1;72	3.97	0.634	Tidak signifikan	$Y = 0.003x + 3.858$
	ST	54.985%	Naik	0.260	15.140	1;43	4.07	0.000	Signifikan	$Y = 0.030x + 3.007$
Depok	RD	53.057%	Naik	0.084	9.758	1;106	3.93	0.002	Signifikan	$Y = 0.020x + 3.390$
	MD	40.340%	Naik	0.148	15.591	1;90	3.95	0.000	Signifikan	$Y = 0.021x + 2.417$
	JD	56.167%	Naik	0.089	10.134	1;104	3.93	0.002	Signifikan	$Y = 0.013x + 1.662$
Jakarta	BK	65.333%	Naik	0.001	0.136	1;106	3.93	0.713	Tidak signifikan	$Y = 0.002x + 5.330$
	WK	52.894%	Naik	0.000	0.003	1;106	3.93	0.855	Tidak signifikan	$Y = 0.001x + 4.264$
Jember	RJ	45.469%	Naik	0.021	2.352	1;109	3.93	0.128	Tidak signifikan	$Y = 0.006x + 2.212$
	JPC	86.000%	Naik	0.002	0.171	1;109	3.93	0.680	Tidak signifikan	$Y = 0.001x + 0.333$
Lebak (Banten)	KB	54.678%	Turun	0.016	1.523	1;91	3.95	0.220	Tidak signifikan	$Y = -0.010x + 7.390$
	BRP	52.461%	Naik	0.054	5.217	1;91	3.95	0.025	Signifikan	$Y = 0.013x + 4.338$
Lombok Utara	RL	77.076%	Turun	0.151	15.811	1;89	3.95	0.000	Signifikan	$Y = -0.028x + 6.669$
	LP	87.277%	Naik	0.427	66.345	1;89	3.95	0.000	Signifikan	$Y = 0.067x + 3.809$
Surabaya	RS	88.241%	Turun	0.001	0.072	1;110	3.93	0.789	Tidak signifikan	$Y = -0.002x + 7.802$
	SP	92.398%	Turun	0.001	0.145	1;106	3.93	0.740	Tidak signifikan	$Y = -0.003x + 8.945$

Tabel 6. Uji regresi isu hak asasi manusia

UJI REGRESI ISU HAM (confidence interval 95% atau $\alpha = 0.05$ )										
LOKASI	SK	PROPORSI	Trend	R square	UJI REGRESI					
					Uji F			Uji Signifikansi		
					F (htg)	df(1),(2)	F tbl	a	Hasil Uji	Persamaan
Aceh Besar	SI	3.416%	Turun	0.74	8.41	1;106	3.93	0.005	Signifikan	$Y = -0.006x + 0.779$
	Pro	4.520%	Naik	0.019	2.034	1;106	3.93	0.157	Tidak signifikan	$Y = 0.002x + 0.053$
Tangerang Selatan	TP	4.613%	Naik	0.001	0.060	1;72	3.97	0.634	Tidak signifikan	$Y = 0.001x + 0.342$
	ST	3.323%	Naik	0.000	0.005	1;43	4.07	0.947	Tidak signifikan	$Y = 0.00023x + 3.007$
Depok	RD	2.183%	Turun	0.010	1.034	1;106	3.93	0.311	Tidak signifikan	$Y = -0.001x + 0.255$
	MD	3.888%	Naik	0.044	4.114	1;90	3.95	0.045	Signifikan	$Y = 0.004x + 1.141$
	JD	3.524%	Naik	0.021	2.277	1;104	3.93	0.134	Tidak signifikan	$Y = 0.002x + 0.054$
Jakarta	BK	7.444%	Naik	0.000	0.001	1;106	3.93	0.976	Tidak signifikan	$Y = (6.686e-5)x + 0.617$
	WK	7.719%	Naik	0.017	1.837	1;106	3.93	0.178	Tidak signifikan	$Y = 0.003x + 0.455$
Jember	RJ	1.272%	Naik	0.007	0.732	1;109	3.93	0.394	Tidak signifikan	$Y = 0.001x + 0.026$
	JPC	2.000%	Naik	0.001	0.161	1;109	3.93	0.689	Tidak signifikan	$Y = 0.0001x + 0.675$
Lebak (Banten)	KB	3.262%	Turun	0.053	5.108	1;91	3.93	0.026	Signifikan	$Y = -0.005x + 0.676$
	BRP	3.244%	Turun	0.031	2.913	1;91	3.95	0.091	Tidak signifikan	$Y = -0.003x + 0.483$
Lombok Utara	RL	5.316%	Naik	0.123	12.477	1;89	3.95	0.001	Signifikan	$Y = 0.009x - 0.126$
	LP	2.036%	Naik	0.038	3.469	1;89	3.95	0.066	Tidak signifikan	$Y = 0.003x + 0.010$
Surabaya	RS	1.329%	Turun	0.000	0.005	1;110	3.93	0.944	Tidak signifikan	$Y = (-7.26e-5)x + 0.120$
	SP	0.780%	Turun	0.007	0.730	1;106	3.93	0.395	Tidak signifikan	$Y = -0.0008x + 0.120$

Tabel 7. Uji regresi isu perempuan dan/atau anak

UJI REGRESI ISU PEREMPUAN DAN/ATAU ANAK (confidence interval 95% atau $\alpha = 0.05$ )										
LOKASI	SK	PROPORSI	Trend	R square	UJI REGRESI					
					Uji F			Uji Signifikansi		
					F (htg)	df(1),(2)	F tbl	$\alpha$	Hasil Uji	Persamaan
Aceh Besar	SI	21.366%	Naik	0.007	0.793	1;106	3.93	0.375	Tidak signifikan	$Y = 0.004 x + 2.481$
	Pro	8.475%	Naik	0.048	2.437	1;106	3.93	0.623	Tidak signifikan	$Y = 0.001 x + 0.228$
Tangerang Selatan	TP	26.030%	Turun	0.068	5.240	1;72	3.97	0.025	Signifikan	$Y = -0.007 x + 2.499$
	ST	5.740%	Naik	0.066	3.033	1;43	4.07	0.089	Tidak signifikan	$Y = 0.009 x + 0.123$
Depok	RD	7.096%	Turun	0.014	1.498	1;106	3.93	0.224	Tidak signifikan	$Y = -0.003 x - 0.756$
	MD	6.683%	Turun	0.012	1.070	1;90	3.95	0.304	Tidak Signifikan	$Y = -0.003 x + 0.757$
Jakarta	JD	6.608%	Turun	0.023	2.483	1;104	3.93	0.118	Tidak signifikan	$Y = -0.002 x + 0.422$
	BK	3.333%	Turun	0.002	0.167	1;106	3.93	0.683	Tidak signifikan	$Y = -0.0006 x + 1.069$
Jember	WK	4.994%	Turun	0.057	6.426	1;106	3.93	0.013	Signifikan	$Y = -0.005 x + 0.693$
	RJ	6.995%	Turun	0.216	30.002	1;109	3.93	0.000	Signifikan	$Y = -0.011 + 1.033$
Lebak (Banten)	JPC	4.000%	Turun	0.007	0.785	1;109	3.93	0.375	Tidak signifikan	$Y = -0.003 x + 0.038$
	KB	5.579%	Turun	0.047	4.441	1;91	3.95	0.038	Signifikan	$Y = -0.006 x + 1.045$
Lombok Utara	BRP	6.264%	Turun	0.037	3.485	1;91	3.95	0.065	Tidak signifikan	$Y = -0.005 x + 0.892$
	RL	1.495%	Turun	0.031	2.815	1;89	3.95	0.097	Tidak signifikan	$Y = -0.002 + 0.187$
Surabaya	LP	0.636%	Naik	0.072	6.860	1;89	3.95	0.010	Signifikan	$Y = 0.002 x - 0.048$
	RS	1.022%	Turun	0.004	0.491	1;110	3.93	0.485	Tidak signifikan	$Y = -0.006 x + 0.126$
	SP	0.195%	Naik	0.046	5.130	1;106	3.93	0.026	Signifikan	$Y = 0.001 x - 0.031$

Tabel 8. Uji regresi isu kriminalitas

UJI REGRESI ISU KRIMINALITAS (confidence interval 95% atau $\alpha = 0.05$ )										
LOKASI	SK	PROPORSI	Trend	R square	UJI REGRESI					
					Uji F			Uji Signifikansi		
					F (htg)	df(1),(2)	F tbl	$\alpha$	Hasil Uji	Persamaan
Aceh Besar	SI	27.616%	Naik	0.002	0.258	1;106	3.93	0.375	Tidak signifikan	$Y = 0.003 x + 3.348$
	Pro	83.898%	Naik	0.001	0.130	1;106	3.93	0.719	Tidak signifikan	$Y = 0.002 x + 2.644$
Tangerang Selatan	TP	13.839%	Turun	0.079	6.219	1;72	3.97	0.015	Signifikan	$Y = -0.008 x + 1.591$
	ST	23.867%	Turun	0.304	18.794	1;43	4.07	0.000	Signifikan	$Y = -0.029 x + 2.779$
Depok	RD	17.576%	Turun	0.050	5.609	1;106	3.93	0.020	Signifikan	$Y = -0.008 x + 1.929$
	MD	25.030%	Turun	0.073	7.126	1;90	3.95	0.009	Signifikan	$Y = -0.010 x + 2.775$
Jakarta	JD	14.317%	Turun	0.010	1.022	1;104	3.93	0.314	Tidak signifikan	$Y = -0.002 x + 0.752$
	BK	21.333%	Turun	0.070	7.994	1;106	3.93	0.006	Signifikan	$Y = -0.011 x + 2.377$
Jember	WK	28.717%	Turun	0.032	3.545	1;106	3.93	0.062	Tidak signifikan	$Y = -0.006 x + 2.703$
	RJ	36.248%	Turun	0.067	7.775	1;109	3.93	0.006	Signifikan	$Y = -0.012 x + 2.701$
Lebak (Banten)	JPC	8.000%	Turun	0.000	0.003	1;109	3.93	0.959	Tidak signifikan	$Y = (-2.836e-5) x + 0.038$
	KB	15.107%	Naik	0.045	4.252	1;91	3.95	0.042	Signifikan	$Y = 0.008 x + 1.437$
Lombok Utara	BRP	15.101%	Naik	0.024	2.268	1;91	3.95	0.136	Tidak signifikan	$Y = 0.006 x + 1.139$
	RL	6.478%	Naik	0.018	1.656	1;89	3.95	0.202	Tidak signifikan	$Y = 0.003 x + 0.269$
Surabaya	LP	5.725%	Naik	0.001	0.053	1;89	3.95	0.231	Tidak Signifikan	$Y = 0.001 x + 0.460$
	RS	8.180%	Turun	0.077	9.166	1;110	3.93	0.003	Signifikan	$Y = -0.007 x + 1.111$
	SP	4.873%	Turun	0.043	4.772	1;106	3.93	0.031	Signifikan	$Y = -0.005 x + 0.718$

### E. Lingkungan Hidup

Untuk isu lingkungan hidup, media massa lokal yang memiliki kecenderungan isu naik dengan persamaan regresi signifikan adalah Surat Kabar *Suara Tangsel*. Sementara itu, media massa lokal yang memiliki kecenderungan isu menurun dengan persamaan regresi signifikan adalah Surat Kabar *Berita Kota*, *Radar Depok*, *Monitor Depok*, *Kabar Banten*, *Banten Raya Post*, dan *Radar Lombok*. Hal tersebut dapat dilihat pada **Tabel 9**.

Berdasarkan jabaran dari masing-masing kategori isu, terkait dengan kecenderungan di setiap media massa lokal, yang telah dilakukan tersebut, hasil olahan data dapat disajikan secara lebih sederhana dalam bentuk **Tabel 10**.

Ada dua jenis kolom pada **Tabel 10**, yakni kolom untuk arah kecenderungan isu yang positif (naik) dan arah kecenderungan isu yang negatif (turun). Arah kecenderungan dari masing-masing kategori isu di setiap media massa lokal ditunjukkan pada kolom yang diberi warna. Ada tiga warna, yakni merah, biru dan oranye. Kotak yang diberi tanda warna merah atau biru menunjukkan arah gerak kecenderungan isu yang memiliki persamaan regresi signifikan. Pada kolom kecenderungan isu yang arahnya positif (naik), diberi tanda warna biru, sedangkan pada kolom kecenderungan isu yang arahnya negatif (menurun), diberi tanda warna merah. Sementara itu, kotak yang diberi warna oranye menunjukkan arah kecenderungan dengan persamaan regresi yang tidak signifikan.

Pada **Tabel 10**, dapat kita lihat perbandingannya bahwa selama periode 13 Februari hingga 3 Juni 2012, pemuatan artikel berita yang mengandung isu *good governance* di media massa lokal umumnya cenderung mengalami peningkatan dari hari ke hari. Hal ini dapat diketahui dari hasil pemantauan terhadap 17 media massa lokal yang menjadi subjek penelitian ini, yakni pada kolom isu *good governance*, kita melihat bahwa **sub-kolom naik** terisi lebih banyak, dan terdapat enam media massa lokal (*Suara Tangsel*, *Radar Depok*, *Monitor Depok*, *Jurnal Depok* dan *Banten Raya Post* dan *Lombok Pos*) yang memiliki arah kecenderungan isu dengan persamaan regresi signifikan.

Sementara itu, dapat kita ketahui pula bahwa pemuatan artikel berita yang mengandung isu kriminalitas di media massa lokal umumnya mengalami penurunan. Dari 17 media massa lokal yang dipantau oleh AKUMASSA, delapan diantaranya (*Tangsel Pos*, *Suara Tangsel*, *Radar Depok*, *Monitor Depok*, *Berita Kota*, *Radar Jember*, *Radar Surabaya* dan *Surabaya Post*) memiliki arah kecenderungan isu kriminalitas yang negatif (menurun) dengan persamaan regresi yang signifikan.

Tabel 9. Uji regresi isu lingkungan hidup

UJI REGRESI ISU LINGKUNGAN HIDUP (confidence interval 95% atau $\alpha = 0.05$ )										
LOKASI	SK	PROPORSI	Trend	R square	UJI REGRESI					
					Uji Signifikansi			a	Hasil Uji	Persamaan
					Uji F					
F (htg)	df(1),(2)	F tbl								
Aceh Besar	SI	0.581%	Turun	0.022	2.437	1;106	3.93	0.122	Tidak signifikan	$Y = -0.009x + 2.498$
	Pro	2.260%	Naik	0.23	2.462	1;106	3.93	0.120	Tidak signifikan	$Y = 0.002x - 0.061$
Tangerang Selatan	TP	6.590%	Turun	0.011	0.836	1;72	3.97	0.363	Tidak signifikan	$Y = -0.003x + 0.687$
	ST	12.085%	Naik	0.341	22.247	1;43	4.07	0.000	Signifikan	$Y = 0.035x - 0.326$
Depok	RD	20.087%	Turun	0.091	10.587	1;106	3.93	0.002	Signifikan	$Y = -0.012x + 2.367$
	MD	24.058%	Turun	0.043	4.011	1;90	3.95	0.048	Signifikan	$Y = -0.008x + 2.609$
	JD	19.383%	Turun	0.023	2.398	1;104	3.93	0.125	Tidak signifikan	$Y = -0.004x + 1.069$
Jakarta	BK	2.556%	Turun	0.053	5.946	1;106	3.93	0.016	Signifikan	$Y = -0.003x + 0.408$
	WK	5.675%	Turun	0.020	2.139	1;106	3.93	0.147	Tidak signifikan	$Y = -0.004x + 0.675$
Jember	RJ	10.016%	Turun	0.023	2.614	1;109	3.93	0.109	Tidak signifikan	$Y = -0.004x + 0.775$
	JPC	0.000%	TIDAK ADA PERSAMAAN REGRESI							
Lebak (Banten)	KB	21.373%	Turun	0.81	8.015	1;91	3.95	0.006	Signifikan	$Y = -0.016x + 3.580$
	BRP	22.931%	Turun	0.064	6.213	1;91	3.95	0.014	Signifikan	$Y = -0.013x + 2.902$
Lombok Utara	RL	9.635%	Turun	0.126	12.802	1;89	3.95	0.001	Signifikan	$Y = -0.010x + 1.704$
	LP	4.326%	Naik	0.015	1.385	1;89	3.95	0.242	Tidak Signifikan	$Y = 0.002x + 0.243$
Surabaya	RS	1.227%	Turun	0.003	0.360	1;110	3.93	0.550	Tidak signifikan	$Y = -0.000x + 0.138$
	SP	1.754%	Turun	0.002	0.178	1;106	3.93	0.674	Tidak signifikan	$Y = -0.0004x + 0.195$

Tabel 10. Rangkuman dari kecenderungan garis linear masing-masing isu pada setiap media massa lokal

PERBANDINGAN KECENDERUNGAN (NAIK-TURUN) SETIAP ISU PADA SETIAP MEDIA MASSA LOKAL											
Lokasi Pemantauan	Surat Kabar	Isu									
		Good governance		HAM		Perempuan dan/atau Anak		Kriminalitas		Lingkungan hidup	
		Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun	Naik	Turun
Aceh Besar	SI										
	Pro										
Tangerang Selatan	TP										
	ST										
Depok	RD										
	MD										
	JD										
Jakarta	BK										
	WK										
Jember	RJ										
	JPC										
Lebak (Banten)	KB										
	BRP										
Lombok Utara	RL										
	LP										
Surabaya	RS										
	SP										

Jika kita kombinasikan dengan data yang tersaji pada **Tabel 3** (persentase masing-masing kategori isu selama empat bulan) dan **Tabel 4** (rata-rata frekuensi isu dalam satu hari di setiap media massa lokal selama empat bulan), dapat dikatakan bahwa perhatian media massa lokal terhadap isu *good governance* sangatlah tinggi, terlebih lagi dengan arah kecenderungan yang meningkat, dan lima dari ketujuhbelas media massa lokal yang dipantau memiliki kecenderungan isu dengan persamaan garis linear (regresi) yang signifikan. Proporsi isu kriminalitas yang juga tinggi di media massa-media massa lokal tersebut, berdasarkan hasil analisis kecenderungan isu, terlihat mengalami penurunan selama rentang waktu empat bulan tersebut.

Pada isu hak asasi manusia (HAM), umumnya arah kecenderungan isu mengalami kenaikan, tetapi dengan persamaan garis linear (regresi) yang tidak signifikan. Hal ini memperkuat data pada **Tabel 3** dan **Tabel 4** yang menunjukkan bahwa perhatian media massa lokal terhadap isu HAM memiliki proporsi yang sangat kecil. Namun, meskipun memiliki proporsi yang kecil, pada media massa lokal seperti *Monitor Depok* dan *Radar Lombok* (lihat **Tabel 10**) mengalami peningkatan dengan arah kecenderungan yang memiliki persamaan garis linear yang signifikan.

Demikian halnya dengan isu perempuan dan/atau anak serta isu lingkungan hidup, proporsi isu yang sangat sedikit mendapat perhatian dari 17 media massa lokal tersebut dipertegas dengan arah kecenderungan isu yang umumnya mengalami penurunan: 4 dari 17 media massa lokal yang dipantau oleh AKUMASSA menunjukkan arah kecenderungan isu perempuan dan/atau anak yang negatif (menurun), serta 6 dari 17 media massa lokal tersebut menunjukkan arah kecenderungan isu lingkungan hidup dengan arah yang negatif (menurun).

## IV.2. PEMBAHASAN

Untuk pembahasan mengenai kebijakan redaksi pada masing-masing media massa lokal dalam menyajikan informasi pada terbitannya, baik cetak maupun *online*, penelitian ini merujuk pada hasil olahan data kuantitatif yang telah disajikan sebelumnya, dengan didukung oleh data kualitatif. Gambaran umum tentang bagaimana proporsi setiap isu yang terkandung di dalam terbitan media massa lokal, termasuk juga bentuk kecenderungannya (*trend*), serta didukung oleh catatan-catatan lapangan dari para pemantau di lokasi (data laporan narasi mingguan), dan data wawancara terhadap redaksi serta komunitas pemantau, yang telah dikumpulkan selama periode 13 Februari hingga 3 Juni 2012, menjadi dasar argumentasi untuk menjelaskan bagaimana masing-masing media massa

lokal di setiap kota tersebut bekerja dalam rentang waktu selama empat bulan (durasi atau batasan waktu yang menjadi bahan penelitian ini).

#### IV.2.1. Penyajian Berita Media Massa Lokal

Berikut ini akan dibahas terlebih dahulu, secara satu per satu, bentuk kemasan pemberitaan masing-masing media massa. Setelah itu, akan dijabarkan analisa secara keseluruhan terkait kinerja media massa lokal di semua kota yang menjadi tempat penelitian ini, merujuk pada kerangka teoritis dan pemikiran yang telah disusun.

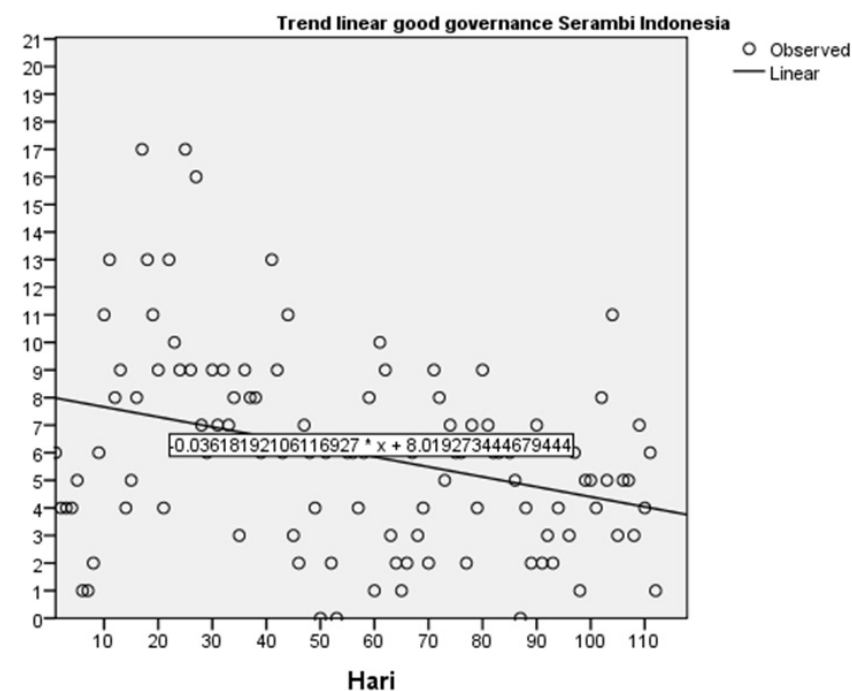
##### IV.2.1.1. Aceh Besar (Serambi Indonesia dan Prohaba)

Dalam rentang waktu empat bulan tersebut, isu *good governance* merupakan isu yang paling dominan di halaman-halaman Surat Kabar *Serambi Indonesia* (lihat **Tabel 3**), dengan persentase 47% dari total 1376 artikel yang terpantau. Namun demikian, kecenderungan isu *good governance* pada *Serambi Indonesia* mengalami penurunan, dengan persamaan regresi  $Y = 8,019 - 0,36 X$  yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa kemiringan garis kecenderungan adalah 0,36 (negatif), dan setiap harinya terjadi penurunan nilai data berkala pada kecenderungan tersebut, sebesar 0,36. Grafik kecenderungan isu *good governance* pada Surat Kabar *Serambi Indonesia* dapat dilihat pada **Grafik 1**.

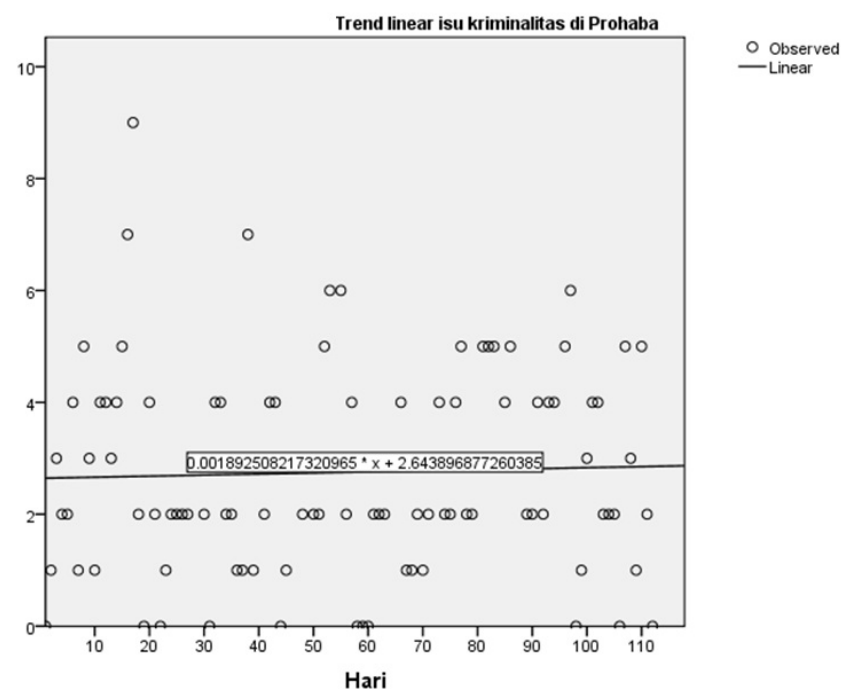
Persentase untuk isu yang lain pada Surat Kabar *Serambi Indonesia*, adalah 28% untuk kriminalitas, 21% untuk perempuan dan/atau anak, 3% untuk HAM dan 1% untuk lingkungan hidup (lihat **Tabel 1**).

Sedangkan pada Surat Kabar *Prohaba*, isu yang dominan adalah isu kriminalitas, dengan persentase sebesar 84% dari total 354 artikel yang terpantau (lihat **Tabel 1**). Kecenderungan isu kriminalitas pada surat kabar ini naik dari hari ke hari, tetapi memiliki persamaan garis lurus,  $Y = 2,644 + 0,002 X$ , yang tidak signifikan. Nilai kemiringan yang sangat kecil (sebesar 0,002) menunjukkan bahwa pergerakan kecenderungan yang meningkat pada isu kriminalitas di *Prohaba* tidak menonjol, atau dengan kata lain, isu tersebut tidak mengalami perubahan yang berarti dari hari ke hari. Keterangan ini tersajikan dalam **Grafik 2**.

Grafik 1. Kecenderungan isu good governance Serambi Indonesia



Grafik 2. Kecenderungan isu kriminalitas Prohaba



Kecenderungan isu kriminalitas yang konstan dan sangat dominan ini menegaskan bahwa perhatian redaksi *Prohaba* memang terfokus pada isu kriminalitas. Sementara itu, perhatiannya terhadap isu-isu lain terbilang sangat sedikit, yakni 8% isu perempuan dan/atau anak, 5% isu HAM, 2% isu lingkungan hidup, dan 1% isu *good governance*.

Menurut catatan atau laporan narasi yang dikirimkan oleh Maina Sari, pemantau yang media massa lokal yang berada di Aceh Besar, dalam rentang waktu empat bulan tersebut, warga masyarakat lokal di Aceh sedang menghadapi euforia pemilihan kepala daerah (Pemilukada). Namun, pada minggu-minggu awal, dapat terlihat perbedaan cara pandang antara *Serambi Indonesia* dan *Prohaba* ini ketika mengangkat topik tersebut dalam terbitan mereka. Untuk kasus Pemilukada, *Serambi Indonesia* melihatnya sebagai persoalan yang lekat dengan isu *good governance*, sedangkan *Prohaba* melihatnya sebagai persoalan yang lekat dengan isu kriminalitas.

Hal ini terlihat, misalnya, pada laporan Maina Sari, pada tanggal 4 Maret 2012, yang menyebutkan bagaimana *Prohaba* memberitakan topik tentang Pemilukada Aceh, dari sudut pandang isu kriminalitas:

*“Sementara itu, Prohaba didominasi oleh isu kriminalitas (29 berita, atau 49,152% dari jumlah total 59 berita dengan isu kriminalitas). Mulai dari kasus perampokan, pencurian, hingga masalah narkoba terus menjadi sorotan. Belakangan ini juga banyak terjadi kasus pembacokan, seperti yang terjadi di Aceh Utara terhadap tim sukses pasangan salah satu calon bupati di sana. Peneroran juga terjadi di Langsa terhadap tim sukses Irwandi/Muhyar, yang mana kasus ini belum diketahui mengarah kepada siapa pelakunya.”*<sup>114</sup>

Meskipun isu kriminalitas yang mendominasi di Surat Kabar *Prohaba* bukan saja berasal dari topik Pemilukada, tetapi keputusan redaksi *Prohaba*, yang mengemas kasus Pemilukada menjadi isu kriminalitas, cukup layak dijadikan dasar untuk melihat perbedaan cara pandang dari kedua surat kabar ini. Hal ini semakin ditegaskan oleh Maina Sari pada laporan narasinya untuk minggu ketujuh (26 Maret – 1 April 2012), yakni:

*Seperti itulah harian Serambi Indonesia yang halaman pemberitaannya diwarnai berita kampanye. Sementara itu, harian Prohaba masih diwarnai*

114. Maina Sari, “Good Governance Terlalu Dominan”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 03/Aceh Besar, NAD/4 Maret 2012.

*dengan berita kriminal. Seperti perampokan, pembunuhan, penjambratan, dan pemerkosaan. Dari berita ini dapat diambil kesimpulan kejahatan terjadi di mana-mana tanpa kita duga.*

*Kasus kriminal ini masih didominasi di daerah Meulaboh, Langsa dan Lhokseumawe. Ketiga daerah ini cukup sering terjadinya kasus kejahatan. Bahkan terkait isu Pilkada pun, kekerasan terhadap massa yang saling bentrok juga terjadi di wilayah tersebut.”*<sup>115</sup>

Selanjutnya, Surat Kabar *Serambi Indonesia* mulai mengangkat topik Pemilukada sebagai isu kriminalitas pada minggu berikutnya (2-8 April 2012) ketika persoalan kampanye di Aceh pada kala itu berjalan dengan diwarnai berbagai kerusuhan. Hal itu dapat terlihat pada laporan Maina Sari, yakni:

*“Dari hasil pemantauan berita terhadap harian Serambi Indonesia dan Prohaba, edisi 2-8 April 2012, menunjukkan bahwa berita tentang kriminal mendominasi harian tersebut. Dari total 82 berita, 39 di antaranya adalah berita kriminal, kemudian disusul good governance 20 berita. Kejahatan yang cukup sering terjadi mewarnai kejahatan yang terjadi di kalangan tim sukses para kandidat calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh 2012.”*<sup>116</sup>

Namun, data statistik dari frekuensi isu menunjukkan bahwa *good governance* tetap menjadi isu yang dominan di Surat Kabar *Serambi Indonesia*. Pada minggu-minggu selanjutnya, Maina Sari melaporkan bahwa isu kriminalitas menjadi isu yang lebih dominan dibandingkan isu *good governance* di wilayah Aceh. Hal ini disebabkan oleh perhatian *Prohaba* terhadap *good governance* hampir sama sekali tidak ada (lihat **Tabel 3**) sehingga jumlah frekuensi isu kriminalitas dari kedua surat kabar melampaui jumlah frekuensi isu *good governance* pada *Serambi Indonesia*.

Jika kita lihat dari jumlah total artikel yang terpantau di kedua surat kabar ini, antara *Serambi Indonesia* dan *Prohaba*, terpaut cukup jauh, yakni 4 banding 1 (lihat **Tabel 3**). Perbedaan yang cukup jauh ini dipengaruhi oleh banyaknya artikel-artikel dari rubrik di luar halaman pertama *Serambi Indonesia* yang masuk ke dalam lima kategori isu, terutama isu *good governance*, sedangkan pada

115. Maina Sari, “Kampanye Dimana-mana”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 007/Aceh Besar, NAD/1 April 2012.

116. Maina Sari, “Kampanye Masih Diwarnai Kecurangan”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 008/Aceh Besar, NAD/8 April 2012.

*Prohaba*, artikel-artikel yang masuk ke dalam kategori lima isu, sebagian besar, berasal dari rubrik di halaman pertama, dan umumnya adalah isu kriminalitas.

Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi ketidakseimbangan oleh kedua surat kabar dalam menyajikan proporsi isu. Surat Kabar *Serambi Indonesia* misalnya, oleh Maina Sari, dijelaskan sebagai berikut:

*Sangat disayangkan, dari semua isu yang di pantau isu Hak Asasi Manusia (HAM) jarang diangkat ke media. Para pelaku media lebih tertarik dengan isu pemerintahan dan kejahatan yang lebih dominan.*<sup>117</sup>

Sedangkan Surat Kabar *Prohaba*, dijelaskan sebagai harian yang

*...lebih minim terhadap isu lokal. Bahkan isu yang diangkat ke media melulu isu kejahatan yang lebih banyak mengambil berita dari luar wilayah Aceh. Secara keseluruhan media Prohaba masih belum bisa memenuhi kebutuhan warga lokal karena berita yang disajikan masih bukan berita yang penting untuk masyarakat Aceh. Seharusnya, media ini bisa mencakup isu yang belum bisa dipenuhi media lain. Bukan sebaliknya, malah mengabaikan kepentingan informasi pembaca lokal.*<sup>118</sup>

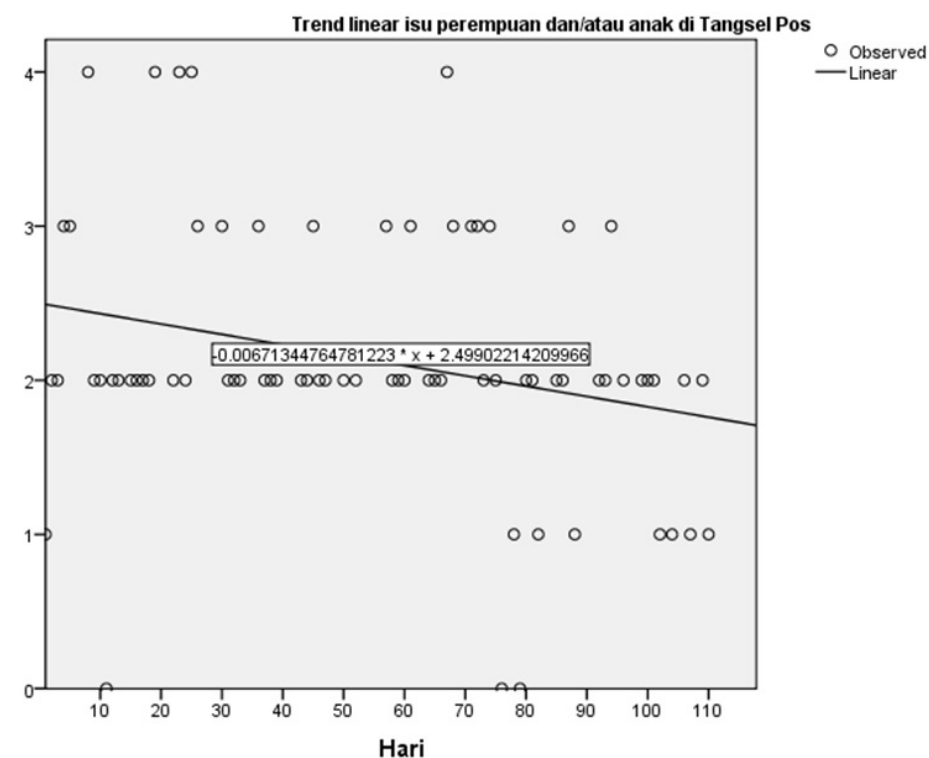
Khusus untuk *Prohaba*, penyajian artikel-artikel beritanya seringkali menggunakan “kalimat yang cukup ekstrim. Seperti bahasa-bahasa yang mampu membuat psikologis seseorang terbentuk menjadi psikologis yang psikopat”<sup>119</sup> dan “pemilihan kata-kata terkesan untuk membuat heboh sebuah berita”<sup>120</sup>

#### IV.2.1.2. Tangerang Selatan (Tangsel Pos dan Suara Tangsel)

Isu *good governance* juga merupakan isu dominan di Tangerang Selatan dalam rentang waktu empat bulan pemantauan. Pada Surat Kabar *Tangsel Pos*, isu *good governance* memiliki persentase sebesar 49% dari total 607 artikel yang berhasil terpantau. Persentase isu lainnya ialah 26% isu perempuan dan/atau anak,

14% isu kriminalitas, 7% isu lingkungan hidup, dan 5% isu HAM. Meskipun dominan, kecenderungan isu *good governance* memiliki arah positif (naik), tetapi dengan persamaan garis lurus yang tidak signifikan. Gerak grafik yang memiliki persamaan regresi yang signifikan justru dialami oleh isu perempuan dan/atau anak (arah negatif atau turun) dan isu kriminalitas (arah negatif atau turun). Persamaan regresi isu perempuan dan/atau anak *Tangsel Pos* adalah  $Y = 2,499 - 0,007 X$  (yang berarti bahwa setiap harinya, isu perempuan dan/atau anak pada *Tangsel Pos* mengalami penurunan nilai data berkala sebesar 0,007). Sedangkan persamaan regresi isu kriminalitas adalah  $Y = 1,591 - 0,008 X$  (yang berarti bahwa setiap harinya, isu kriminalitas pada *Tangsel Pos* mengalami penurunan nilai data berkala sebesar 0,008). Kecenderungannya dapat dilihat pada tampilan **Grafik 3** dan **Grafik 4** di bawah ini:

Grafik 3. Kecenderungan isu perempuan dan/atau anak Tangsel Pos



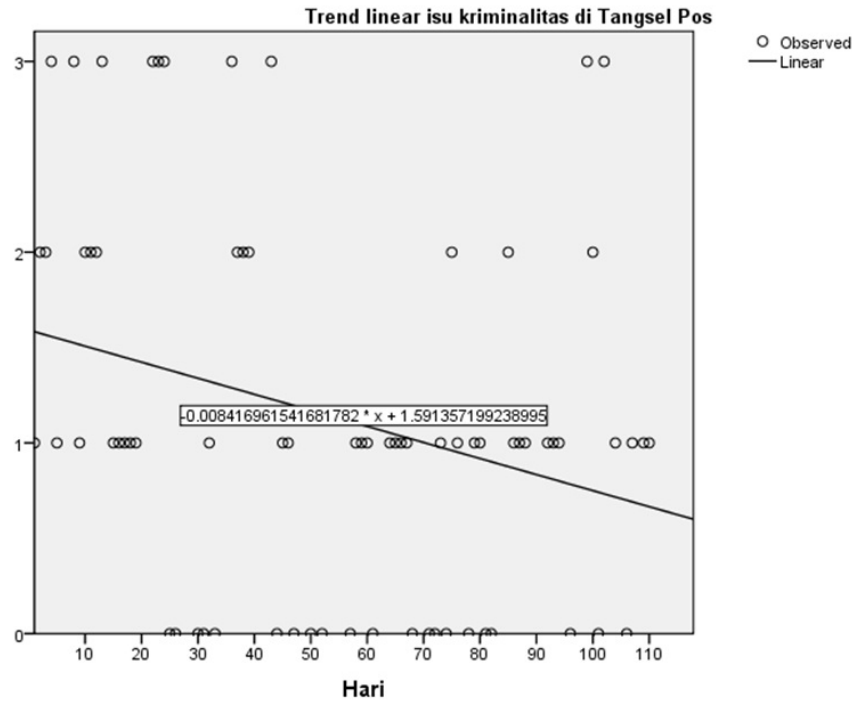
117. Maina Sari, “Pelantikan Tunggu Keputusan Mendagri”, *Laporan Narasi Mingguan Rekam Media*, 015/Aceh Besar, NAD/27 Mei 2012.

118. Maina Sari, *ibid.*

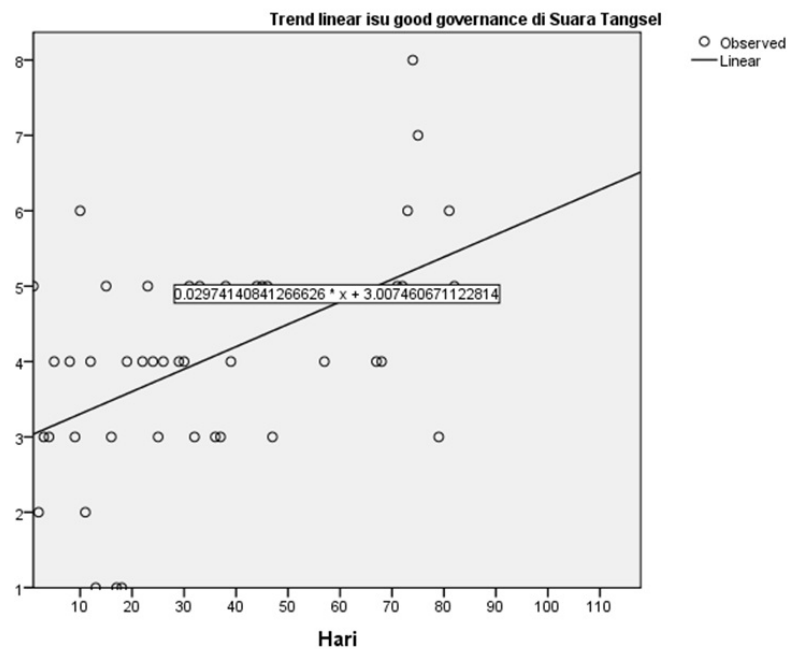
119. Maina Sari, “Gempa Menjelang Perolehan Hasil Pilkada”, *Laporan Narasi Mingguan Rekam Media*, 009/Aceh Besar, NAD/15 April 2012.

120. Maina Sari, “Ada Apa Dengan PTS Aceh?”, *Laporan Narasi Mingguan Rekam Media*, 011/Aceh Besar, NAD/29 April 2012.

Grafik 4. Grafik 4 Kecenderungan isu kriminalitas Tangsel Pos



Grafik 5. Kecenderungan isu *good governance* Suara Tangsel

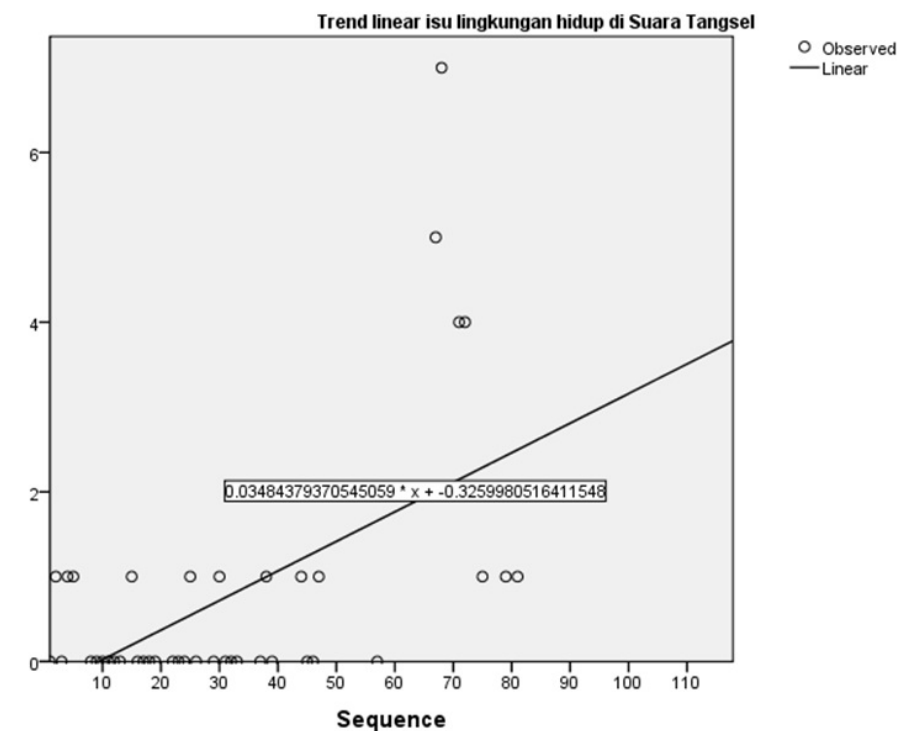


Dari dua grafik tersebut dapat kita pahami bahwa dengan persentase yang lebih kecil dan kecenderungan yang menurun, isu perempuan dan/atau anak dan kriminalitas memang tidak menjadi fokus perhatian bagi *Tangsel Pos*. Dominasi isu *good governance* dengan gerakan garis linear yang konstan semakin mempertegas bahwa setiap harinya, *Tangsel Pos* secara konsisten memuat artikel-artikel berita dengan isu tersebut.

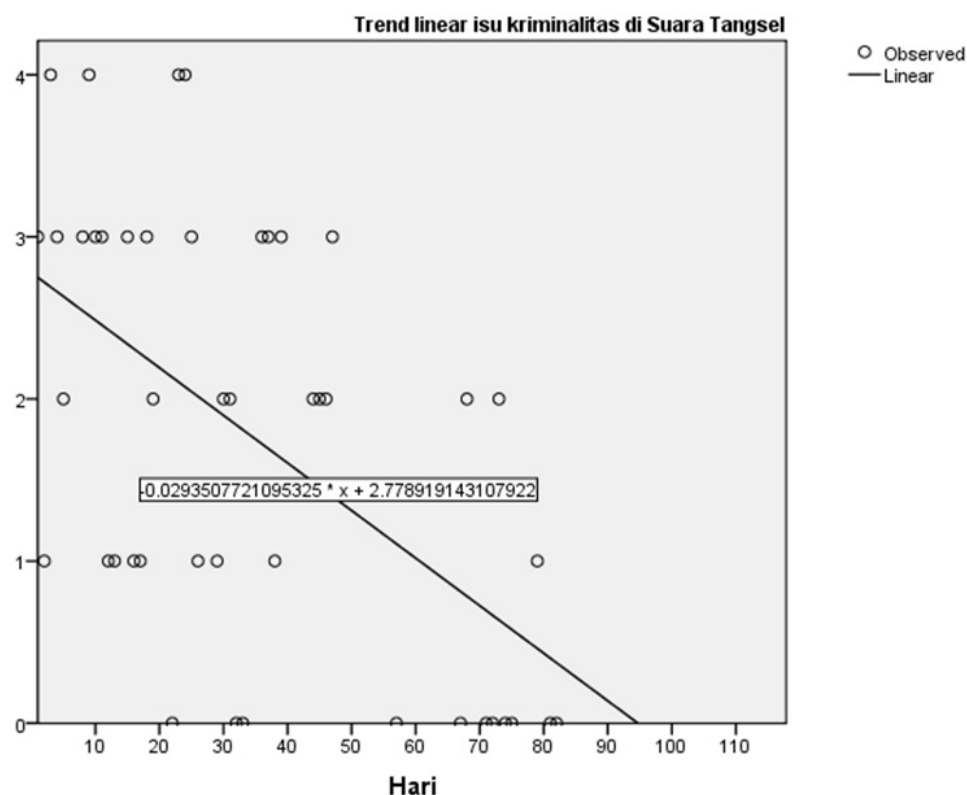
Sementara itu, pada Surat Kabar *Suara Tangsel*, isu *good governance* juga mendominasi dengan persentase 55% dari total 331 artikel yang berhasil terpantau, sedangkan persentase untuk isu lainnya ialah 24% isu kriminalitas, 12% isu lingkungan hidup, 6% isu perempuan dan/atau anak, dan 3% isu HAM. Isu *good governance* cenderung meningkat dalam rentang waktu empat bulan dengan persamaan regresi yang signifikan, yaitu  $Y = 3,007 + 0,03 X$  (yang berarti bahwa setiap harinya, isu *good governance* mengalami peningkatan nilai data berkala sebesar 0,03). Lihat **Grafik 5**.

Begitu juga dengan isu lingkungan hidup *Suara Tangsel*, dengan persamaan regresi yang signifikan,  $Y = -0,326 + 0,035 X$  (yang berarti bahwa setiap harinya, isu lingkungan hidup mengalami peningkatan nilai data berkala sebesar 0,035). Kecenderungannya ditampilkan pada **Grafik 6**.

Grafik 6. Kecenderungan isu lingkungan hidup Suara Tangsel



Grafik 7. Kecenderungan isu kriminalitas Suara Tangsel



Sedangkan isu kriminalitas *Suara Tangsel*, kecenderungannya menurun dengan persamaan regresi signifikan,  $Y = 2,779 - 0,029 X$  (yang berarti bahwa setiap harinya, isu kriminalitas mengalami penurunan nilai data berkala sebesar 0,029).

Berdasarkan laporan dari Rinal Rinoza Kasturi, pemantau dari Tangerang Selatan, perhatian kedua surat kabar (*Tangsel Pos* dan *Suara Tangsel*) sangat kecil terhadap dua isu, yakni isu HAM dan isu lingkungan hidup. Hal itu terlihat, misalnya pada laporan Rinal, tertanggal 27 Februari – 4 Maret 2012, yakni:

*Namun, dari data yang ditemukan dalam sepekan ini, pemberitaan mengenai lingkungan hidup tetap saja masih minim, bahkan dalam sepekan ini hanya*

*ada 3 pemberitaan lingkungan hidup di kedua media tersebut. Begitu juga berita seputar HAM.*<sup>121</sup>

Begitu juga dengan laporan pada tanggal 5-11 Maret 2012, yakni:

*Selebihnya dalam sepekan pemberitaan, isu mengenai HAM dan Lingkungan Hidup masih sangat sedikit dan disusul isu perempuan dan atau anak... Dalam kasus pembebasan lahan saya memasukkannya ke dalam domain good governance karena merupakan kebijakan yang masih dinegosiasikan belum sampai pada tindak pelanggaran HAM.*<sup>122</sup>

Khusus untuk isu HAM, media massa lokal di Tangerang Selatan tidak melihatnya sebagai persoalan yang penting untuk diangkat dan dikabarkan kepada masyarakat. Padahal, terdapat beberapa masalah yang seharusnya dapat diangkat berdasarkan perspektif HAM, tetapi tidak dilakukan oleh media massa lokal tersebut. Contohnya, itu terjadi pada Surat Kabar *Tangsel Pos* yang melihat beberapa kasus lebih lekat kepada isu *good governance*. Contoh tersebut dijelaskan oleh Rinal dalam laporannya, tanggal 12-18 Maret 2012, yakni:

*Dalam sepekan pemberitaan, yang amat disayangkan adalah porsi tentang lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia yang seakan luput dari pemberitaan. Kedua media seharusnya menampilkan kasus-kasus yang berhubungan dengan persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti pemberitaan penertiban PKL di Pasar Ciputat. Seharusnya, media dapat menelisik lebih dalam seputar keluhan dan tendensi apakah adanya pelanggaran HAM dengan dalih penataan kota. Memang, harian Tangsel Pos sudah menulis berdasarkan fakta di lapangan seputar keluhan-keluhan pedagang yang ditertibkan, namun keberpihakan media belum maksimal kepada para pedagang yang dilanggar haknya demi ketertiban dan keindahan kota. Justru yang ada sebaliknya, media terkesan mendukung program penilaian piala adipura ini*

121. Rinal Rinoza Kasturi, "Dari Uji Emisi Mobil Esemka Hingga Sidang Ajudikasi", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 003/Ciputat, Tangerang Selatan/4 Maret 2012.

122. Rinal Rinoza Kasturi, "Persoalan Sosialisasi Jam Operasional Truk dan Polemik Pembebasan Lahan untuk Jalan Tol", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 004/Ciputat, Tangerang Selatan/11 Maret 2012.

di mana yang disalahkan adalah para pedagang pasar yang menjadi penyebab kesemrawutan.<sup>123</sup>

Isu tentang lingkungan hidup baru mengalami peningkatan pada minggu ketujuh pemantauan (26 Maret – 1 April 2012). Persoalan sampah dan pengelolaan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) menjadi perhatian kedua surat kabar *Tangsel Pos* dan *Suara Tangsel*, dibarengi dengan merebaknya isu persebaran serangga tomat.<sup>124</sup> Isu ini terus meningkat di kedua surat kabar tersebut, seiring dengan perkembangan buruk cuaca di wilayah lokal Tangerang Selatan sehingga mengakibatkan banjir di beberapa tempat<sup>125</sup> dan berujung pada munculnya wabah penyakit.<sup>126</sup> Berdasarkan catatan dari Rinal tersebut, dapat dipahami pula bahwa penanggulangan masalah lingkungan oleh pemerintah, secara tidak langsung, meningkatkan pula jumlah frekuensi isu *good governance* di kedua surat kabar tersebut.

Jika kita melihat kinerja kedua media massa lokal ini dalam menerbitkan korannya, ada hal yang menarik untuk diperhatikan. Pada laporan tanggal 8 April 2012, Rinal mengabarkan bahwa kedua surat kabar tidak menerbitkan koran mereka tanpa alasan yang jelas:

*Dalam pekan ini, ada yang berbeda dari pekan sebelumnya yang biasa saya tulis, yakni, berupa kendala tidak beredarnya koran-koran yang biasa saya pantau. Ini sangat mengganggu kerja pemantauan yang saya lakukan. Kendala yang saya hadapi ialah tidak adanya koran-koran pada beberapa edisi, baik harian Tangsel Pos maupun harian Suara Tangsel. Khusus untuk harian Suara Tangsel, dalam sepekan ini saya tidak mendapatkan koran tersebut di tempat langganan yang biasa saya peroleh. Hal ini disebabkan kurir atau supplier koran yang biasa mengantar tidak men-supply koran tersebut di tempat agen koran dan pengecer atau lapak koran. Menurut penuturan penjaga lapak koran yang biasa saya berlangganan, ia juga tidak tahu dan mengerti kenapa*

123. Rinal Rinoza Kasturi, "Mencari Format Budaya Tangsel", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 005/Ciputat, Tangerang Selatan/18 Maret 2012.

124. Rinal Rinoza Kasturi, "Persoalan Lingkungan Hidup dan Informasi Aktivitas Publik Lainnya", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 007/Ciputat, Tangerang Selatan/1 April 2012.

125. Rinal Rinoza Kasturi, "Tentang Desa Jadi Kelurahan, Perwal dan Cuaca", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 008/Ciputat, Tangerang Selatan/8 April 2012.

126. Rinal Rinoza Kasturi, "Infrastruktur Jalan Yang Rusak Mendapat Sorotan", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 009/Ciputat, Tangerang Selatan/15 April 2012.

*kurir tidak mengantarnya seperti biasanya dan itu juga berlaku di tempat lapak lainnya.*<sup>127</sup>

Bahkan, Surat Kabar *Suara Tangsel* pernah terbit hanya satu kali dalam seminggu.<sup>128</sup> Naumun, jika kita melihat pada **Grafik 6** dan **Grafik 7**, terjadi lompatan kecenderungan isu yang tajam, di mana lingkungan hidup mengalami peningkatan sedangkan kriminalitas mengalami penurunan.

Kecenderungan isu yang mengalami perubahan secara tajam pada *Suara Tangsel* ini dapat dijelaskan oleh laporan dari Rinal pada minggu selanjutnya yang mengabarkan bahwa *Suara Tangsel* melakukan re-desain terhadap terbitan mereka. *Suara Tangsel* tampil dengan tambahan rubrikasi per wilayah, dan menurut Rinal, "Dalam tampilan barunya ini harian *Suara Tangsel* lebih banyak memberitakan seputar informasi mengenai lingkungan hidup, baik dalam *headline* maupun rubrik lainnya."<sup>129</sup> Sementara *Tangsel Pos* mulai mengurangi perhatiannya pada isu lingkungan hidup (meskipun gerak kecenderungannya tidak signifikan), Surat Kabar *Suara Tangsel* terus memberitakan isu tersebut secara intens. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Rinal tanggal 30 April – 6 Mei 2012, yakni:

*...dalam sepekan memberitaan isu yang mengemuka lebih terpecah dan tidak runut kecuali isu seputar banjir yang oleh harian Suara Tangsel benar-benar dipersoalkan dan diberitakan secara intens. Lain halnya harian Tangsel Pos yang hanya memuat persoalan banjir pada satu edisi saja yakni edisi Senin, 30 April 2012.*<sup>130</sup>

Namun demikian, pada minggu berikutnya *Suara Tangsel* kembali tidak terbit karena alasan pembenahan sementara *Tangsel Pos* terus memberitakan isu *good governance* secara konsisten.<sup>131</sup> Ketika isu *good governance* pada Surat Kabar *Tangsel Pos* terus mengalami peningkatan, Rinal tidak lagi memantau Surat Kabar *Suara*

127. Rinal Rinoza Kasturi, *op cit.*

128. Rinal Rinoza Kasturi, *op cit.*

129. Rinal Rinoza Kasturi, "Suara Tangsel Tampil Baru Seiring Munculnya Kasus Pembunuhan dan Banjir", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 010/Ciputat, Tangerang Selatan/22 April 2012.

130. Rinal Rinoza Kasturi, "Banjir Yang Mendapat Sorotan dan Dominannya Isu Good Governance", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 012/Ciputat, Tangerang Selatan/6 Mei 2012.

131. Rinal Rinoza Kasturi, "Berita Good Governance, Seputar Pembangunan Jalan, dan Masalah Sistem Perbaikan", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 013/Ciputat, Tangerang Selatan/7-13 Mei 2012.

Tangsel karena surat kabar tersebut tidak pernah lagi terbit. Rinal menuliskan dalam salah satu laporannya, yakni:

*Dalam pekan ini harian Suara Tangsel tidak terbit karena berbagai alasan. Saat saya konfirmasi menurut pihak harian Suara Tangsel pihaknya sedang melakukan “Konsolidasi”. Entahlah apa yang dimaksud dengan kata “Konsolidasi”. Saat tanyakan kapan akan kembali terbit pihak harian Suara Tangsel menjawab belum dipastikan tapi pasti akan terbit kembali.<sup>132</sup>*

Keadaan ini terus berlanjut hingga pada minggu keenambelas (minggu terakhir dalam rentang waktu empat bulan yang menjadi ruang lingkup data penelitian ini). Berdasarkan laporan dari Rinal ini, kita dapat melihat bahwa kinerja dari *Suara Tangsel* yang mengaku sebagai media massa lokal Tangerang Selatan tidak memenuhi kriteria yang ideal.

Meninjau bentuk kemasan kedua media massa ini, dapat kita lihat bahwa isu *good governance* menjadi perhatian yang utama. Namun, antara keduanya, *Tangsel Pos* dan *Suara Tangsel*, terdapat perbedaan untuk cara pembingkaiannya. Hal itu dijelaskan oleh Rinal dalam salah satu laporannya, tanggal 23-29 April 2012, yakni:

*Hal yang patut dicermati adalah bagaimana media membingkai suatu berita dan berita mana yang akan dipilih untuk dijadikan headline atau isu apa yang menjadi titik tekan media tersebut. Dalam hal ini, saya menemukan perbedaan yang mendasar. Terbukti dari data matriks rekapitulasi, saya temukan harian Tangsel Pos tetap konsisten mengawal dan menyoroti kasus dugaan korupsi pejabat dan mantan pejabat di lingkungan Dishubkominfo Kota Tangsel, begitu pun pada kasus pembunuhan mahasiswi UIN yang sangat mengejutkan pada pekan sebelumnya. Sementara, harian Suara Tangsel pada pekan ini mengambil stressing pemberitaan pada frame yang berbeda, yakni isu di seputar pemerintahan Kota Tangerang Selatan meskipun memuat pemberitaan tentang dugaan korupsi di Dishubkominfo dan pembunuhan mahasiswi UIN.<sup>133</sup>*

Perbedaan sudut pandang pada pemuatan konten berita pada media massa lokal merupakan hal yang wajar, tergantung pada kebijakan redaksional masing-masing

media massa lokal. Terlepas dari kinerja kedua media massa lokal di Tangerang Selatan yang belum maksimal (terutama dalam proporsi lima isu yang dibahas dalam penelitian ini), disparitas konten isu *good governance* ini, di satu sisi, justru akan mendukung keragaman sebuah informasi bagi wilayah lokal tersebut.

#### IV.2.1.3. Depok (Radar Depok, Monitor Depok, dan Jurnal Depok)

Isu *good governance* pada ketiga surat kabar lokal di Depok mengalami peningkatan dengan persamaan regresi yang signifikan. Proporsi isu *good governance* pada Surat Kabar *Radar Depok* ialah 53% dari total 916 artikel yang terpantau pada surat kabar tersebut. Persamaan garis lurus adalah  $Y = 3,390 + 0,02 X$  (yang berarti bahwa setiap harinya, nilai data berkala pada frekuensi isu *good governance* mengalami kenaikan sebesar 0,02). Sedangkan proporsi isu *good governance* pada Surat Kabar *Monitor Depok* ialah 40% dari total 823 artikel yang berhasil terpantau pada surat kabar tersebut. Persamaan garis lurus adalah  $Y = 2,417 + 0,021 X$  (yang berarti bahwa setiap harinya, nilai data berkala pada frekuensi isu *good governance* mengalami kenaikan sebesar 0,021). Sementara itu pada Surat Kabar *Jurnal Depok*, proporsi isu *good governance* adalah 56% dari total 454 artikel yang berhasil terpantau pada surat kabar tersebut. persamaan garis lurus adalah  $Y = 1,662 + 0,013 X$  (yang berarti bahwa setiap harinya, nilai data berkala frekuensi isu *good governance* mengalami kenaikan sebesar 0,013). Ketiga data ini tersaji pada **Grafik 8**, **Grafik 9** dan **Grafik 10**.

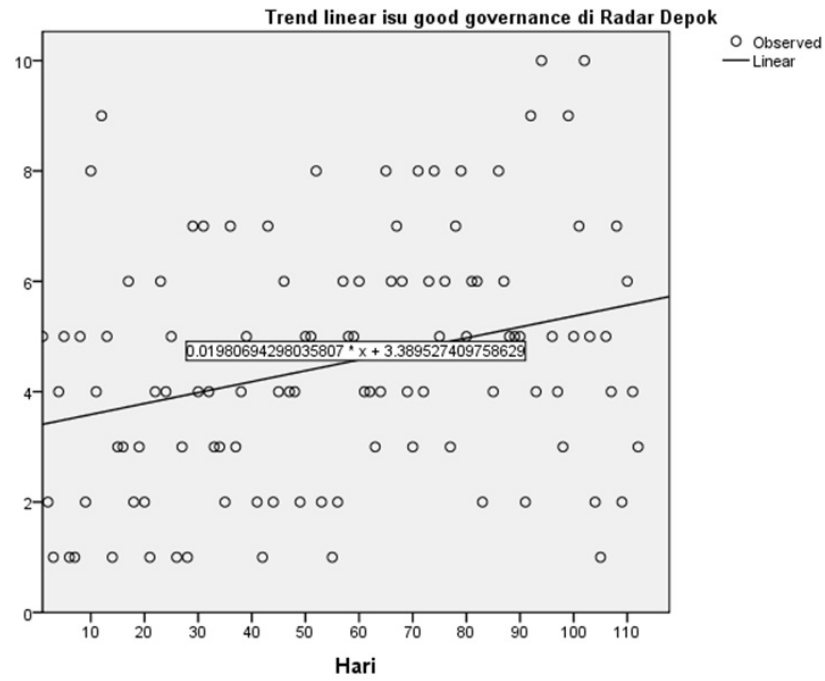
Isu kriminalitas dan isu lingkungan hidup pada Surat Kabar *Radar Depok* dan *Monitor Depok* memiliki kecenderungan berarah negatif (turun), dengan persamaan regresi yang signifikan.

Isu kriminalitas pada *Radar Depok* memiliki proporsi sebesar 18% dengan persamaan regresi garis kecenderungannya  $Y = 1,929 - 0,008 X$ , sedangkan isu lingkungan hidupnya memiliki proporsi sebesar 20% dengan persamaan regresi garis kecenderungannya  $Y = 2,367 + 0,012 X$ . Sementara itu, isu kriminalitas pada *Monitor Depok* memiliki proporsi sebesar 25% dengan persamaan regresi garis kecenderungannya  $Y = 2,775 - 0,01 X$ , sedangkan isu lingkungan hidupnya memiliki proporsi sebesar 24% dengan persamaan regresi garis kecenderungannya  $Y = 2,609 - 0,008 X$ . Gerak kecenderungannya tersaji pada **Grafik 11**.

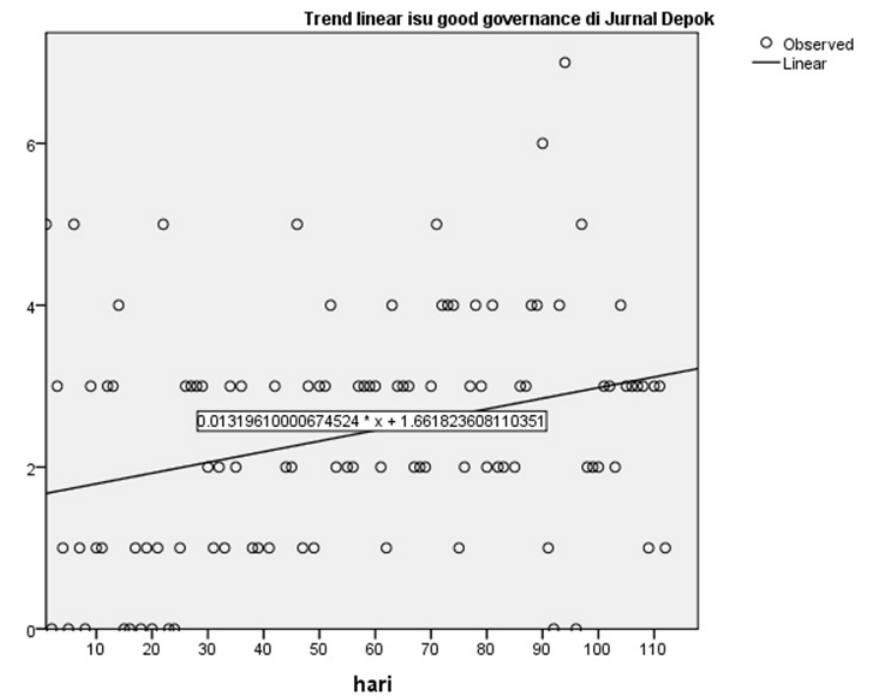
132. Rinal Rinoza Kasturi, “Akselerasi Pemkot Tangsel: Pencanaan Percepatan di Berbagai Lini”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 014/Ciputat, Tangerang Selatan/20 Mei 2012.

133. Rinal Rinoza Kasturi, “Wilayah Lokal Sama, Tapi Cara Saji Beda”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 011/Ciputat, Tangerang Selatan/29 April 2012.

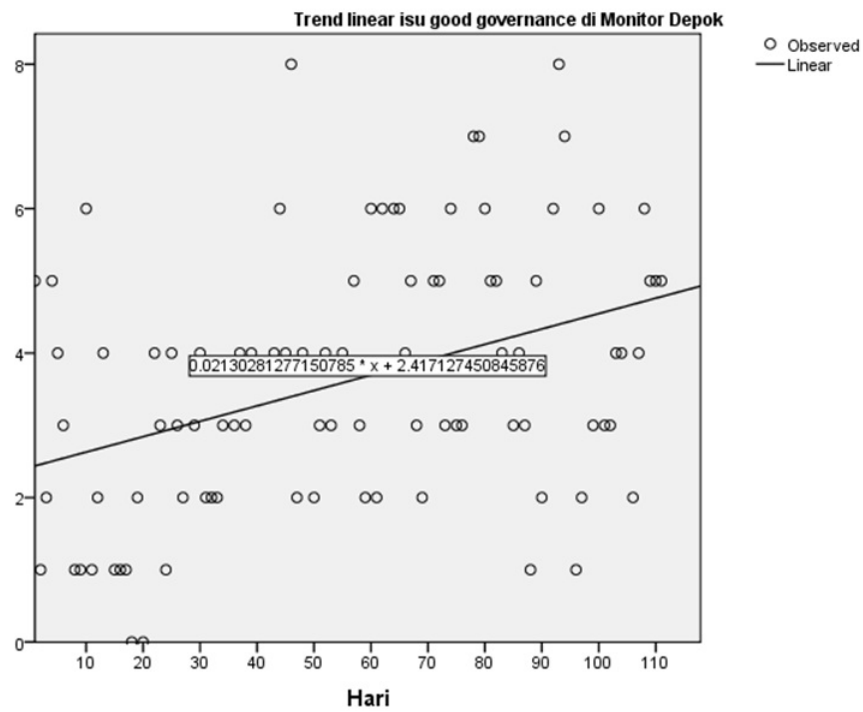
Grafik 8. Kecenderungan isu *good governance* Radar Depok



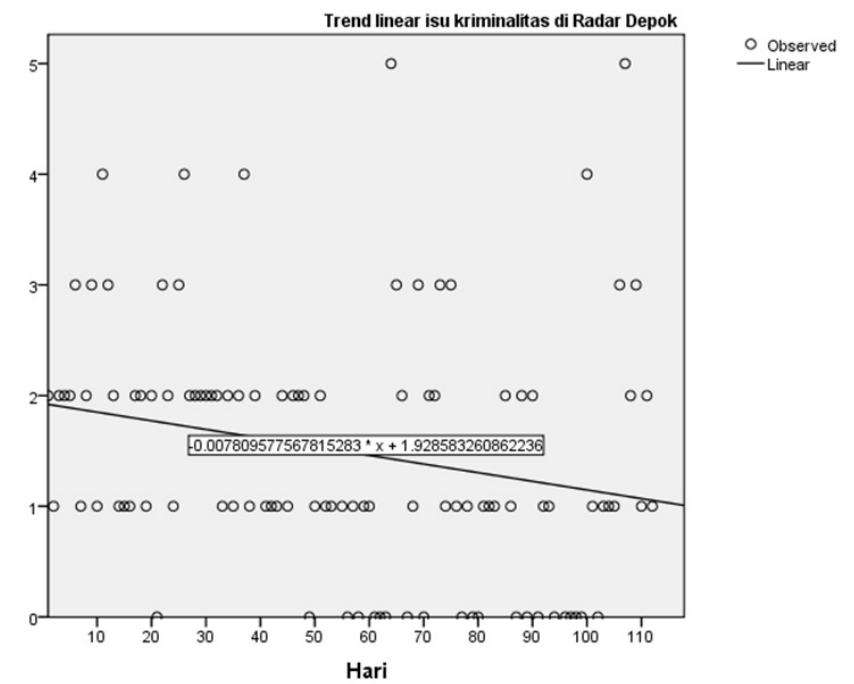
Grafik 10. Kecenderungan isu *good governance* Jurnal Depok



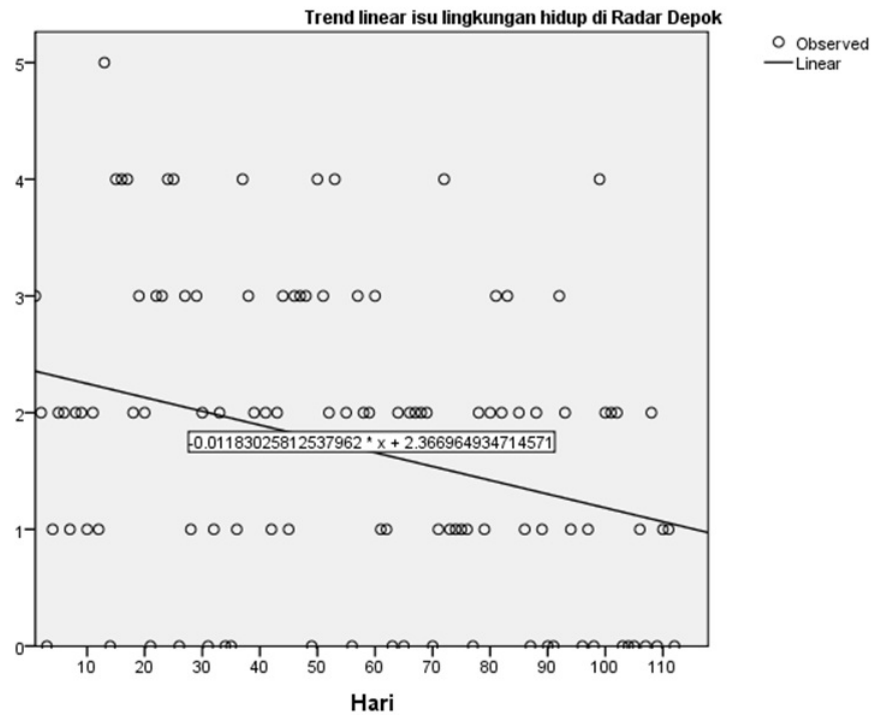
Grafik 9. Kecenderungan isu *good governance* Monitor Depok



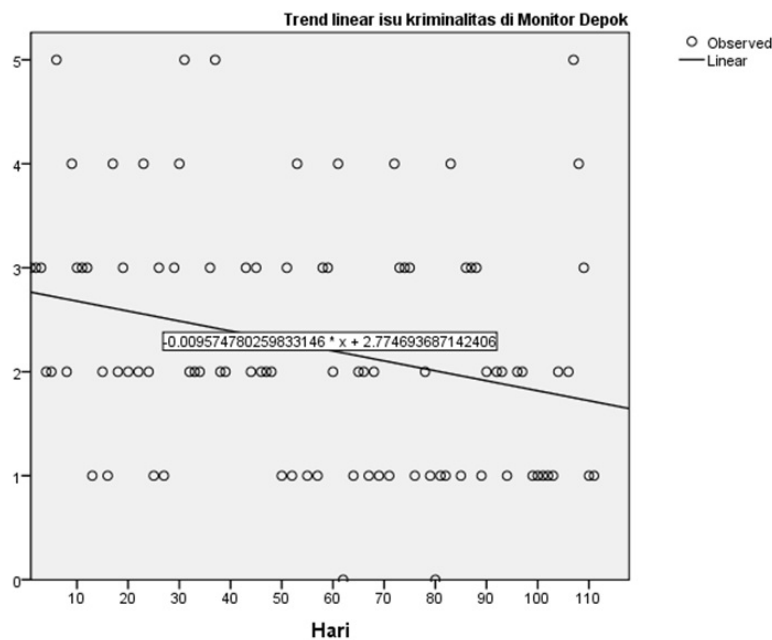
Grafik 11. Kecenderungan isu kriminalitas Radar Depok



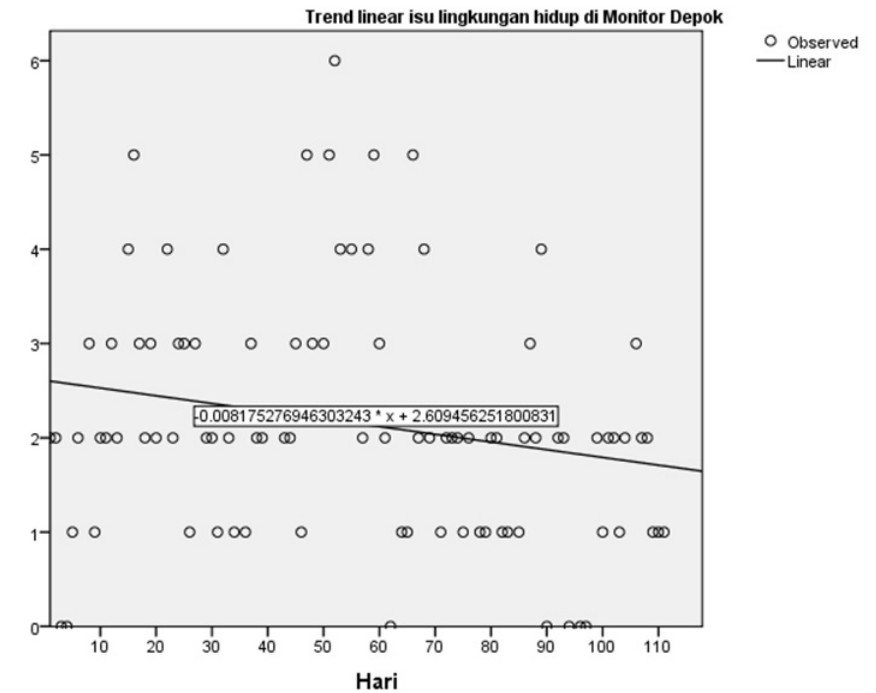
Grafik 12. Kecenderungan isu lingkungan hidup Radar Depok



Grafik 13. Kecenderungan isu kriminalitas Monitor Depok



Grafik 14. Kecenderungan isu lingkungan hidup Monitor Depok

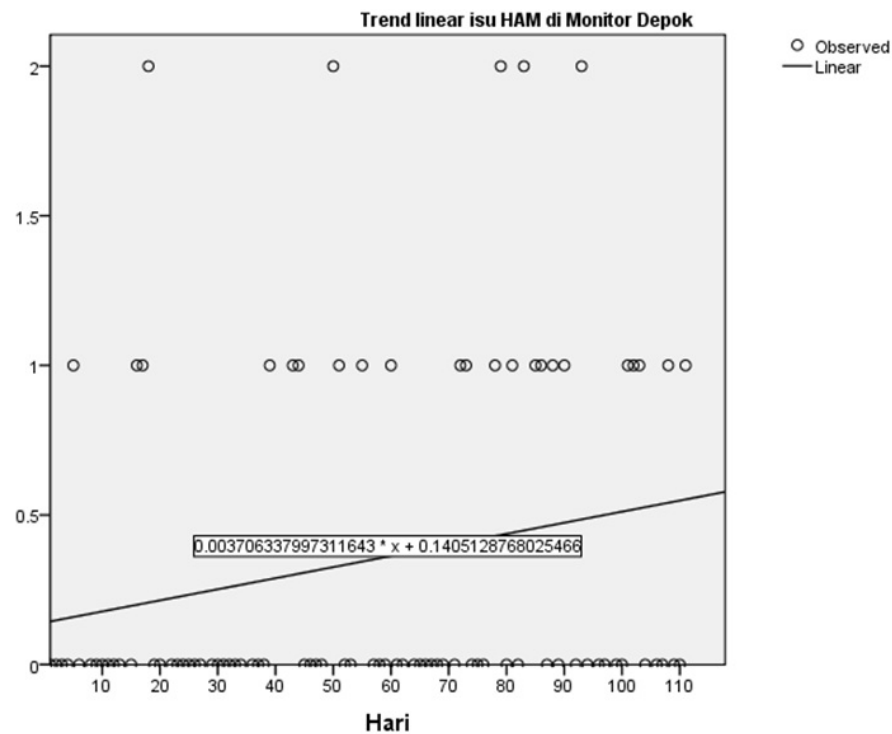


Untuk isu HAM, surat kabar yang memiliki kecenderungan isu meningkat hanyalah Surat Kabar *Monitor Depok*, dengan proporsi sebesar 4%. Persamaan garis lurus nya adalah  $Y = 1,141 + 0,004 X$ . Dengan proporsi yang kecil dalam rentang waktu empat bulan tersebut, secara statistik, isu HAM pada Surat Kabar *Monitor Depok* mengalami peningkatan nilai data berkala sebesar 0,004. Grafik kecenderungannya dapat dilihat pada **Grafik 15**.

Sementara itu, isu perempuan dan/atau anak pada ketiga surat kabar tidak mengalami pergerakan kecenderungan dengan persamaan regresi yang signifikan.

Berdasarkan laporan dari Manshur Zikri, pemantau di Depok, tingginya isu *good governance* pada pemberitaan media massa lokal di Depok terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah lokal di kota tersebut yang selalu mengundang perhatian, seperti misalnya kebijakan tentang Sehari Tanpa Nasi atau *One Day No Rice*, kebijakan Sehari Tanpa Mobil Dinas atau *One Day No Car*, serta juga terkait dengan beberapa kasus korupsi yang terjadi di lingkungan Pemerintahan Kota Depok, dan tata kelola fasilitas umum di Kota Depok. Isu kriminalitas tetap menjadi bahasan yang cukup banyak dimuat oleh ketiga media massa lokal Depok. Isu lingkungan hidup juga cukup mendapat perhatian terkait dengan banyaknya masalah sampah, pengelolaan TPA, kerusakan situ yang terjadi di beberapa lokasi di Depok.

Grafik 15. Kecenderungan isu HAM di Monitor Depok



Namun demikian, perhatian ketiga media massa lokal terhadap isu perempuan dan/atau anak serta isu HAM terbilang sangat sedikit. Hal ini, sejak laporan minggu pertama, telah ditulis oleh Manshur Zikri:

*Isu kriminalitas dan lingkungan hidup menempati urutan kedua dan ketiga. Sementara isu tentang 'perempuan dan/atau anak' dan isu HAM masih sangat jarang sekali diangkat dalam surat kabar harian tersebut.<sup>134</sup>*

Pada akhirnya, keberadaan isu HAM yang sangat minim ini menjadi bahasan Manshur Zikri dalam salah satu laporannya, tertanggal 23-29 April 2012, yakni:

*Apa yang menjadi perhatian pemantau ialah koran lokal Depok sangat jarang sekali mengangkat isu tentang HAM. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan.*

134. Manshur Zikri, "One Day No Rice", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 001/Depok, Jawa Barat/19 Februari 2012.

*Pada minggu ini saja, hanya ditemukan dua artikel yang dapat dianggap sebagai informasi tentang HAM, yakni tentang kasus penjualan organ dalam TKI di luar negeri, dan tentang hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit (Monitor Depok, edisi 24 dan 25 April 2012).<sup>135</sup>*

Jika kita melihat pada **Grafik 15**, peningkatan frekuensi isu HAM pada Surat Kabar *Monitor Depok*, yang memiliki persamaan garis lurus signifikan, tetap dalam proporsi yang sangat kecil. Umumnya, hanya terdapat 1 atau 2 artikel yang membahas HAM. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangkatan isu HAM oleh media massa lokal di Depok belum bersifat kontinu, melainkan pemberitaan berdasarkan momentum atau peristiwa.<sup>136</sup>

Lebih jauh, dalam laporannya, Manshur Zikri lebih menyoroti bagaimana media massa lokal di Depok menyajikan beritanya. Dari 16 minggu laporan tersebut, Manshur Zikri memberikan banyak catatan pada media massa lokal di Depok yang seringkali melakukan kesalahan dalam kemasan, seperti misalnya, ketiadaan tajuk dalam koran:

*Ada dua hal yang menarik perhatian pemantau pada minggu ini terhadap aktivitas media lokal di Kota Depok. Pertama, sejak kegiatan pemantauan ini dilakukan pada tanggal 13 Februari 2012, pemantau tidak menemukan artikel yang bisa dibilang sebagai Tajuk atau opini/refleksi dari media yang bersangkutan, atau artikel sejenisnya. Pada Radar Depok, misalnya, yang sudah cukup baik karena banyak menyajikan artikel yang berasal dari aspirasi atau unek-unek masyarakat pembaca, tetapi tidak menyajikan artikel yang bisa dilihat sebagai pernyataan sikap atau ideologi dari media yang bersangkutan. Bahkan, pada kolom opini pun tidak ditemukan artikel yang murni dari medianya. Monitor Depok juga demikian, banyak memuat keluhan warga yang didapatkan melalui SMS ponsel, tetapi tidak ditemukan artikel-artikel yang dapat dikatakan sebagai tajuk rencana dari Monitor Depok-nya sendiri. Apalagi Jurnal Depok, yang kontennya dimuat hanya pada satu atau dua halaman saja.<sup>137</sup>*

135. Manshur Zikri, "Ham oh Ham", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 011/Depok, Jawa Barat/29 April 2012.

136. Hal ini akan terjabarkan pada Sub-Bab berikutnya, dengan dukungan data wawancara kepada redaksi.

137. Manshur Zikri, "Tajuk Tak Ada, Lebay Iya", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 007/Depok, Jawa Barat/1 April 2012.

Selain persoalan tajuk, Manshur Zikri juga melaporkan tentang bagaimana media massa lokal di Depok yang melakukan labelisasi terhadap subjek pemberitaannya. Seperti yang terjadi pada Jurnal Depok, Manshur Zikri menuliskan pada laporan tanggal 20-26 Februari 2012, yakni:

*Yang perlu mendapat perhatian ialah tentang kasus penusukan terhadap Saiful Munif oleh teman sekelasnya, berinisial M.A.N. Pada perkembangannya, kasus ini menjadi isu tentang anak. Memang, tiga koran lokal itu menyajikan berita yang memuat tentang perkembangan kasus, baik dari pihak korban dan pelaku, pandangan pakar yang langsung terlibat, dan dari pemangku kebijakan. Namun, sejak awal pemberitaannya, media cenderung telah memberikan label kepada M.A.N sebagai contoh anak nakal... Terlebih lagi, pada artikel berita di Jurnal Depok (23 Februari 2012), terkesan jelas labelisasi terhadap M.A.N dengan mengatakan tindakannya sebagai 'kriminalitas yang amat sadis'. Ada kekhawatiran bagi saya hal ini akan membentuk opini publik yang negatif terhadap M.A.N.<sup>138</sup>*

Dan argumentasi yang cukup jelas beserta contoh, terkait dengan *angle* yang berbeda terhadap suatu kasus yang masuk dalam kategori isu perempuan dan/ atau anak, pada ketiga surat kabar lokal ini, menguatkan evaluasi Manshur Zikri terhadap media massa lokal Depok mengenai proses labelisasi terhadap subjek pemberitaan, yakni:

*Yang menarik, pada tanggal 14 April 2012, tiga koran tersebut membahas kasus yang sama, tetapi dengan menggunakan angle yang berbeda sehingga memberikan semacam persepsi yang berbeda pula terhadap siswi yang bersangkutan. Radar Depok, dengan judul "M.B.A, Siswa Cipayung Tak Bisa Ikut UN-Sik-asik Mesum Rja di Warnet", menyebutkan bahwa siswi melakukan perbuatan asusila dan menuntut untuk dinikahi oleh teman yang melakukan tindakan asusila tersebut. Pemantau mendapat kesan bahwa Radar Depok menstigma siswi sebagai anak yang nakal. Sedangkan Monitor Depok, dengan judul "2 Sejoli kepergok mesum di warnet", juga mendiskreditkan si siswi sebagai anak yang nakal karena berbuat mesum di toilet warnet. Hal yang berbeda terlihat pada Jurnal Depok, dengan judul "Supir Cabuli Siswi di Warnet",*

138. Manshur Zikri, "Media Cenderung Melabel dan Jadi Corong Pencitraan", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan rekam Media*, 002/Depok, Jawa Barat/26 Februari 2012.

*yang secara cukup jelas menempatkan si siswi sebagai korban dari tindakan asusila seorang supir angkutan kota.*

Contoh labelisasi oleh media massa lokal terhadap subjek pemberitaan lainnya juga terjadi pada isu perempuan dan/atau anak, yang oleh Manshur Zikri dijelaskan sebagai berikut:

*Terdapat satu artikel yang pemantau anggap sebagai bentuk kesalahan dari pelaku media dalam menyajikan beritanya. Berita itu pun pemantau kategorikan dalam isu perempuan dan/atau anak. Artikel yang dimaksud berjudul "SPG Seksi Dimarahi Nur" (Radar Depok, edisi 2 Mei 2012). Jika kita baca, substansi artikel itu sesungguhnya berbicara tentang kebijakan Pemkot yang melarang penjualan rokok di kawasan Balaikota, Depok, sehingga sang Walikota marah ketika mendapati agen perusahaan rokok menjual produk mereka di kawasan tersebut. Secara kebetulan, agen yang dijumpai oleh Walikota adalah perempuan. Namun, yang menjadi masalah ialah pemilihan judul dan ilustrasi yang disajikan oleh pihak Radar Depok yang justru melabel atau mendiskreditkan pihak perempuan dan juga berpotensi memberikan semacam sesat informasi kepada pembaca.<sup>139</sup>*

Catatan lainnya dari Manshur Zikri ialah terkait dengan penempatan sebuah artikel berita. Manshur Zikri mencatat pada salah satu laporannya bahwa artikel-artikel berita yang berhubungan dengan pemerintahan atau pejabat kota ditempatkan di halaman-halaman depan sementara artikel berita yang berhubungan dengan warga masyarakat umumnya terletak pada halaman-halaman belakang.<sup>140</sup> Hal ini mengindikasikan bahwa media massa lokal di Depok memiliki segmentasi pembaca khusus, yakni masyarakat pembaca di lingkungan pemerintahan.<sup>141</sup>

Terkait dengan kinerja media massa yang lainnya, Manshur Zikri melaporkan tentang etos kerja pelaku media massa lokal di Depok. Seperti misalnya, pada laporan tertanggal 19-25 Maret 2012, yakni:

139. Manshur Zikri, "Judul dan Ilustrasi yang Tak Bijak", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 012/Depok, Jawa Barat/6 Mei 2012.

140. Manshur Zikri, "Pejabat di Halaman Utama, Warga, ya, di Halaman Belakang Saja!", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 003/Depok, Jawa Barat/3 Maret 2012.

141. Hal ini akan dijelaskan pada Sub-Bab berikutnya dengan dukungan data wawancara dengan redaksi.

Yang menarik dari hasil pemantauan minggu lalu tersebut ialah ditemukannya indikasi perilaku media yang menyimpang. Perilaku media yang ditemukan memang tidak terjadi di lapangan, tetapi dapat dinilai dari aktivitas pelaku media dengan terbitannya. Keanehan yang dimaksud ialah pada hari tertentu, dua koran lokal di Depok tidak terbit. Yang pertama ialah Jurnal Depok, yang tidak terbit pada Hari Selasa, tanggal 20 Maret. Saya menanyakan hal itu kepada para pedagang koran di berbagai tempat, semuanya menjawab bahwa pada hari itu Jurnal Depok memang tidak mengirimkan terbitannya untuk dijual. Mereka juga tidak tahu kenapa alasannya. Yang kedua adalah Monitor Depok, yang tidak terbit pada hari Sabtu, 24 Maret 2012. Pada Hari Kamis, 22 Maret 2012, ada pemberitahuan dari Redaksi Monitor Depok bahwa Monitor Depok memang berencana tidak terbit pada Hari Jumat sampai Sabtu (23-24 Maret 2012) sehubungan dengan respsi pernikahan Pemimpin Umum Monitor Depok.<sup>142</sup>

Contoh lainnya juga diberikan oleh Manshur Zikri, terkait dengan bagaimana wartawan mendapatkan informasi. Contoh kasus yang terpantau oleh Manshur Zikri ialah Radar Depok, yang dalam rentang empat bulan tersebut, kedapatan memuat informasi dengan nara sumber dari paranormal.<sup>143</sup> Untuk kasus ini, Manshur Zikri memberikan catatannya:

Seharusnya, sebagai media pencerdasan publik, koran lokal Depok berkewajiban memberikan informasi yang sesuai fakta dan analisa logis dari para pakar atau narasumber yang benar-benar terlibat. Memberikan keterangan dari paranormal dan mengedarkan isu-isu mistis justru akan memberikan kecemasan publik yang bisa saja berdampak tidak baik.<sup>144</sup>

Dari jabaran ini, dapat dilihat bagaimana kinerja media massa lokal di Depok, bahwa perhatian ketiga surat kabar tersebut ialah pada isu *good governance* (terindikasi dari kecenderungannya yang meningkat dengan persamaan garis lurus yang signifikan), sedangkan isu-isu yang lainnya memiliki proporsi yang sangat kecil dan tidak memiliki kecenderungan arah tertentu secara signifikan.

142. Manshur Zikri, "Tidak Terbit?", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 006/Depok, Jawa Barat/25 Maret 2012.

143. Manshur Zikri, "Kenapa Harus Paranormal?", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan rekam Media*, 013/Depok, Jawa Barat/13 Mei 2012.

144. Manshur Zikri, *ibid.*

Selain itu, perhatian terhadap isu *good governance* yang tinggi ini tidak dibarengi dengan kinerja para awak media massanya, terlihat dari laporan Manshur Zikri bahwa baik dari segi kemasan dan pencarian sumber berita, media massa lokal di Depok tidak memenuhi kriteria yang ideal dalam etika jurnalistik.

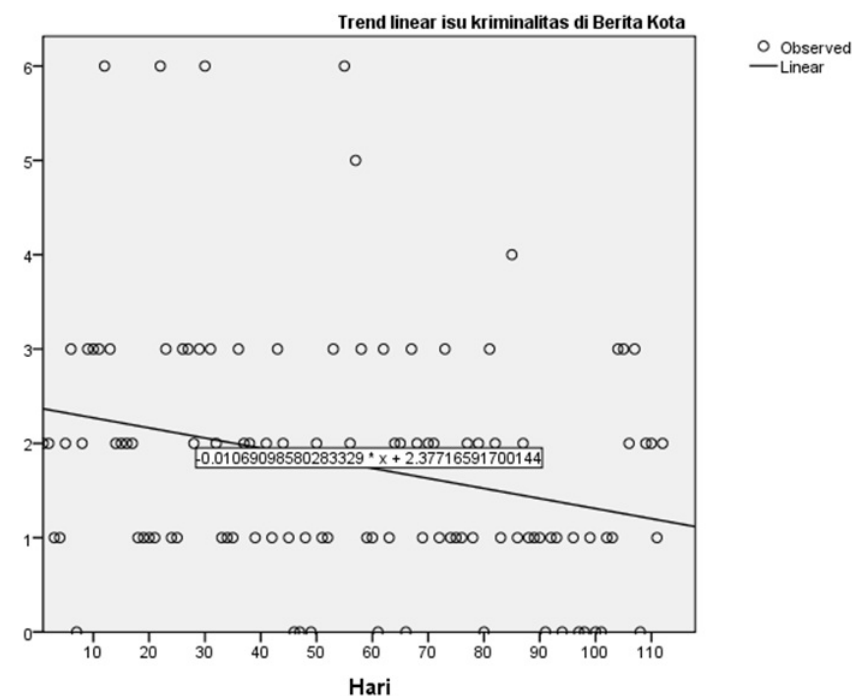
#### IV.2.1.4. Jakarta (Berita Kota dan Warta Kota)

Yang terjadi pada wilayah Jakarta cukup berbeda. Kecenderungan isu *good governance* pada kedua media massa lokal, Surat Kabar *Berita Kota* dan *Warta Kota*, tidak mengalami pergerakan grafik dengan persamaan regresi (garis lurus) yang signifikan. Namun begitu, proporsi kedua isu ini tetap mendominasi.

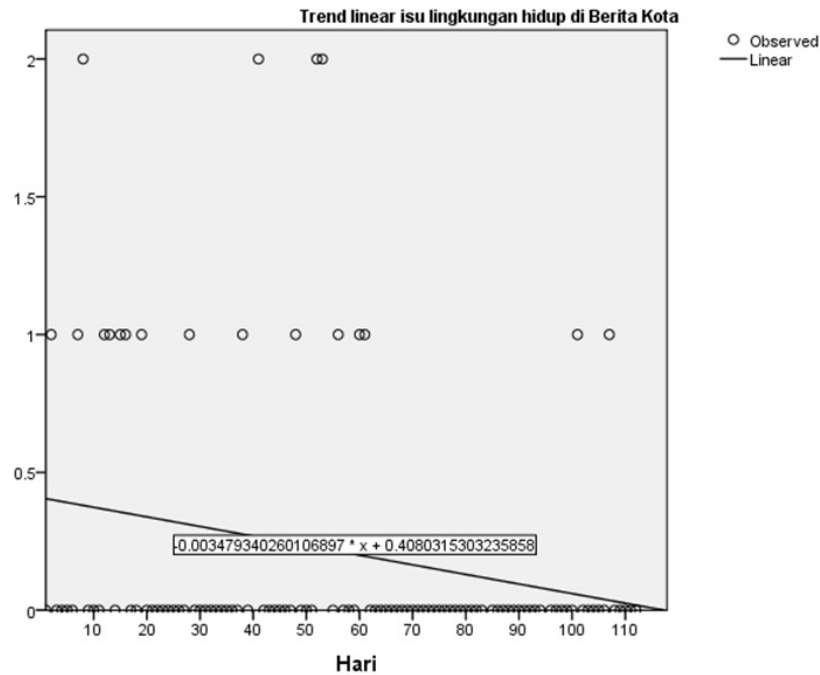
Proporsi isu *good governance* pada Surat Kabar *Berita Kota* ialah 65% dari total 900 artikel yang berhasil terpantau pada surat kabar tersebut. Untuk Surat Kabar *Warta Kota*, proporsi isu *good governance* adalah 53% dari total 881 artikel berita yang berhasil terpantau pada surat kabar tersebut.

Kecenderungan isu yang memiliki persamaan garis lurus signifikan terjadi pada isu lainnya, yakni pada *Berita Kota*, isu kriminalitas (21%) cenderung turun dengan persamaan regresi  $Y = 2,377 - 0,011 X$ ; isu lingkungan hidup (3%) yang juga cenderung turun dengan persamaan regresi  $Y = 0,408 - 0,003 X$ . Lihat **Grafik 16** dan **Grafik 17**.

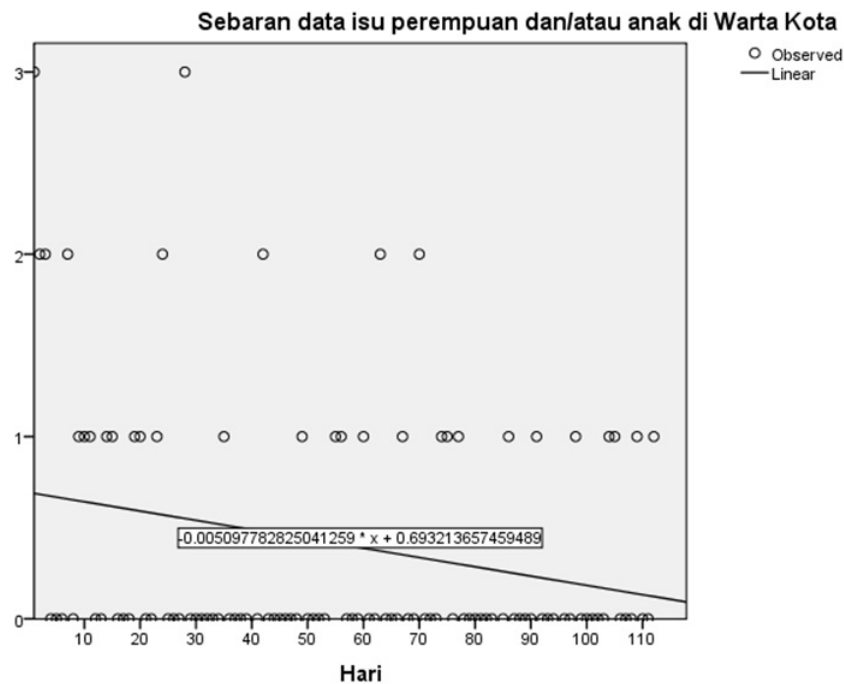
Grafik 16. Kecenderungan isu kriminalitas di Berita Kota



Grafik 17. Kecenderungan isu lingkungan hidup Berita Kota



Grafik 18. Kecenderungan isu perempuan dan/atau anak Warta Kota



Sementara itu, pada Surat Kabar *Warta Kota*, isu perempuan dan/atau anak (proporsinya 5%) memiliki kecenderungan yang menurun dengan persamaan regresi signifikan,  $Y = 0,693 - 0,005 X$ . Lihat **Grafik 18**.

Dari ketiga grafik tersebut, semakin jelaslah bahwa proporsi isu kriminalitas, lingkungan hidup, serta isu perempuan dan/atau anak yang memiliki proporsi sangat kecil mendapatkan perhatian yang minim dari dua surat kabar tersebut, terlebih lagi setiap harinya isu tersebut mengalami penurunan. Untuk isu HAM, tidak ada gerak kecenderungan yang signifikan pada kedua surat kabar. Hal ini menegaskan bahwa pemberitaan isu HAM tetap konstan dengan frekuensi yang kecil. Gerak konstan pada isu *good governance* pada kedua surat kabar menegaskan pula bahwa keduanya secara konsisten memuat berita dengan isu *good governance* dengan proporsi besar.

Berdasarkan laporan dari Lulus Gita Samudra dalam rentang waktu empat bulan tersebut, isu *good governance* dapat dipahami menjadi dominan, salah satunya disebabkan oleh euforia pemilihan kepala daerah (Pemilukada) DKI Jakarta tahun 2012.

Sehubungan dengan bagaimana kinerja wartawan dan bentuk penyajian informasi pada kedua surat kabar di Jakarta ini, Lulus Gita Samudra melaporkan bahwa informasi dari Surat Kabar *Berita Kota* dan *Warta Kota* masih terbilang tidak sehat. Pemantau ini bahkan sudah menyorotinya pada laporan minggu pertama, tanggal 13-19 Februari 2012, hal itu terlihat pada dua paragraph yang dikutip dari laporan Lulus Gita Samudra berikut ini:

*Dalam berita terkait proses sidang Angie masih diwarnai dengan informasi-informasi yang tidak perlu. Seperti yang terangkat pada headline harian Berita Kota tanggal 17 Februari 2012. Artikel berjudul 'Jelang Ajal Adjie, Angie Minta Cerai', lebih mirip berita gosip. Redaksi menginformasikan kisah rumah tangga Adjie dan Angie dengan cukup detail bahkan hingga dugaan adanya hubungan gelap antara Angie dan terdakwa kasus Wisma Atlet lainnya, M. Nazaruddin.*

*Lebih mengherankan lagi, pada koran yang sama di hari Minggu 19 Februari 2012, redaksi melanjutkan informasi tentang Angie dengan menggunakan pendapat paranormal terkenal, Ki Kusumo. Jelas-jelas pendapat yang diambil bukanlah orang yang memiliki kekuatan untuk dipergunakan sebagai acuan,*

*apalagi pendapat yang termuat hanya seputar hasil penerawangan kejujuran Angie.<sup>145</sup>*

Kasus wartawan mencari informasi dengan narasumber paranormal juga kembali terjadi di minggu kelima, tanggal 12-18 Maret 2012, yang mana hal ini berkaitan dengan pemuatan isu *good governance* dengan topik pemberitaan calon gubernur. Lulus Gita Samudra melaporkan:

*Cukup menarik untuk membahas persoalan situasi lobi Politik menjelang Pemilu Pilkada DKI Jakarta 2012. Karena informasi ini memang sebenarnya yang sedang sangat dibutuhkan oleh warga Jakarta. Namun menjadi bias dan tak bermakna bahkan cenderung anti tesis. Wartawan yang seharusnya memberikan informasi yang bisa menjadi salah satu alat pendidikan masyarakat, justru Berita Kota pada hari Kamis (15/3) menampilkan **headline** yang berisi informasi hasil penerawangan sejumlah paranormal terkait kemungkinan pasangan-pasangan bakal calon gubernur (Balongub) dan bakal calon wakil gubernur (Balonwagub) DKI Jakarta yang akan maju di Pemilu Pilkada nanti.<sup>146</sup>*

Sebagai anggota dari komunitas yang beroperasi di Jakarta, yang mengedepankan semangat literasi media dan fungsi media sebagai alat pencerdasan publik, Lulus Gita memberikan kritik terhadap redaksi, sebagaimana yang dituliskannya:

*Jika saya merujuk lagi pada pemahaman kejournalistikan yang saya pernah pelajari, berita tersebut bisa dikatakan sangat tidak bernilai. Karena seharusnya wartawan bisa menyajikan informasi tentang suatu peristiwa berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pertama (orang yang terlibat langsung dengan peristiwa). Jika dari pihak pertama informasi sulit didapat bisa menggunakan pihak kedua (orang yang terlibat langsung dengan pihak pertama). Jika masih sulit juga wartawan bisa menggunakan informasi dari pihak ketiga (pakar yang sedang menangani peristiwa tersebut), namun biasanya informasi dari pihak ketiga juga tidak terlalu bernilai. Lantas, dalam peristiwa situasi lobi politik*

145. Lulus Gita Samudra, "Antara Angie, Nazar dan Paranormal", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan rekam Media*, 001/DKI Jakarta/19 Februari 2012.

146. Lulus Gita Samudra, "Paranormal Itu Pihak Keberapa?", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 005/DKI Jakarta/18 Maret 2012.

*terkait Pemilu Pilkada DKI Jakarta nanti, dengan menggunakan informasi dari paranormal itu masuk dalam kategori pihak keberapa?<sup>147</sup>*

Masalah dengan pola yang sama ini kembali terulang dan Lulus Gita Samudra melaporkannya kembali pada laporan minggu ketigabelas, tanggal 7-13 Mei 2012, yakni sebagai berikut:

*Kemudian lebih ironis lagi ketika melihat terbitan di hari yang sama pada surat kabar Warta Kota. Media massa itu justru mengemas berita pada headline dengan informasi gaib terkait aktifitas politik di Jakarta. Berita berjudul, Paranormal: Foke-Alex Akan Bersaing Ketat jelas hanya menginformasikan ramalan Suhu Acai, Andi Hakim dan Iwan Tirta tentang calon yang bersaing sengit. Lebih lucunya lagi, berita tersebut menceritakan kejadian-kejadian unik saat pengundian nomor berlangsung yang sebenarnya bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Jelas, hal tersebut bukan bagian penting dalam proses demokrasi dan pembelajaran masyarakat untuk berpartisipasi pada Pemilu Pilkada DKI nanti.<sup>148</sup>*

Selanjutnya, terkait dengan pemuatan isu HAM, media massa lokal di Jakarta masih berprinsip pada *news by accident*. Hal ini diamati oleh Lulus Gita Samudra, dan melaporkan bahwa dalam pemuatan beritanya, media massa lokal di Jakarta terkesan terlalu melebih-lebihkan sehingga dikhawatirkan dapat memicu emosi massa. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Lulus Gita Samudra:

*Saya melihat kedua media yang diasuh Kompas Gramedia Grup ini mengemas berita dengan nada yang cukup provokatif dibanding memberikan informasi yang terjadi apa adanya di lapangan. Misalnya, pada Warta Kota hari Selasa, 27 Maret 2012, terdapat berita **headline** yang berjudul 'BBM Naik, Tangis Bayi Kian Nyaring.' Memang, hal ini terkesan memberikan dukungan kepada masyarakat kecil yang mungkin akan mengalami imbas yang serius dalam urusan ekonomi rumah tangganya. Namun, saya mengira secara tidak langsung hal ini juga bisa menjadi penyebab terbakarnya emosi massa, sehingga beberapa aksi di Jakarta kemarin bergitu membara. Meskipun saya juga mengetahui bahwa ada kemungkinan besar ulah provokator yang*

147. Lulus Gita Samudra, *ibid*.

148. Lulus Gita Samudra, "Masyarakat Belajar Dari Paranormal", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan rekam Media*, 013/DKI Jakarta/13 Mei 2012.

*melakukan hal itu. Akan tetapi sebaiknya media bukan ikut-ikutan menjadi kompor.<sup>149</sup>*

Lebih jauh, dalam laporan yang sama, Lulus memberikan pendapat bahwa pemuatan tentang kasus kenaikan BBM ini menyita tempat bagi pemberitaan terkait Pemilu. <sup>150</sup>

Euforia Pemilu di Jakarta seolah menjadi momentum bagi kedua surat kabar tersebut untuk menarik minat pembacanya. Hal itu dapat diindikasikan dari laporan Lulus Gita Samudra pada minggu kedelapan, bahwa:

*Untuk isu **good governance**, menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu) DKI Jakarta yang akan diselenggarakan bulan Juli nanti, kedua surat kabar ini sudah membuka rubrik khusus. Halaman yang diberi judul ‘Ayo Pilih Gubernur DKI’ banyak memaparkan informasi tentang janji-janji cagub dan cawagub, juga informasi yang berasal dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) DKI Jakarta.<sup>151</sup>*

Lulus Gita Samudra juga sempat melaporkan tentang penggunaan kata-kata pada judul-judul berita di kedua media massa tersebut yang terkesan melebih-lebihkan. <sup>152</sup>

Laporan lainnya, terkait dengan Pemilu, berdasarkan laporan Lulus Gita Samudra, terdapat keberpihakan media massa lokal di Jakarta kepada pasangan calon atau tokoh politik tertentu. Sebagaimana, contohnya, penuturan dari Lulus dalam laporan berikut ini:

*Untuk isu **good governance**, di wilayah lokal masih menarik untuk membahas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu) DKI Jakarta 2012. Selama sepekan ini, hampir seluruh berita di halaman muka terkait isu tersebut. Surat kabar Berita Kota memberikan ruang bicara untuk Fauzi Bowo dengan porsi yang dominan... Dari serangkaian berita-berita yang ada, saya menyimpulkan, selama seminggu kemarin surat kabar lokal di Jakarta, khususnya Berita Kota belum memberikan informasi yang lengkap dari kandidat-kandidat*

149. Lulus Gita Samudra, “Perihal HAM Meningkat Saat Demo BBM Tiba”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 007/DKI Jakarta/1 April 2012.

150. Lulus Gita Samudra, *ibid.*

151. Lulus Gita Samudra, “Jakarta Diserang Banjir, Politikus Ambil Kesempatan”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 008/DKI Jakarta/8 April 2012.

152. Lulus Gita Samudra, “Wartawan Bikin Pedes Geng Motor”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 009/DKI Jakarta/15 April 2012.

*Pemilu nanti. Mereka yang mendapat kesempatan bersuara hanya, Foke, Alex, Hidayat dan Jokowi. Itu pun di dominasi oleh Foke. Lantas, kemana informasi dari Faisal dan Hendarji?<sup>153</sup>*

Hal ini semakin ditegaskan pada laporan lainnya, yakni:

*Untuk isu **good governance**, terkait menjelang Pemilu DKI Jakarta, sepertinya surat kabar Berita Kota memang hanya memiliki fokus yang lebih untuk bakal calon gubernur (balogub) Alex Noerdin dan Fauzi Bowo (Foke). Misalkan pada Hari Senin, pada halaman muka, untuk isu politik lokal, hanya terdapat berita berjudul **Jokowi Tak Sabar Kenalan Dengan Foke**. Berita ini hanya memuat tentang rasa kagum Joko Widodo alias Jokowi yang juga mencalonkan sebagai gubernur DKI Jakarta nanti. Sedangkan sisanya berisi informasi tentang warga India di Jakarta yang memberikan apresiasi kepada Foke sebagai gubernur plural. Selanjutnya, pada Hari Rabu, muncul berita berjudul **Fauzi dan Alex Lebih Unggul**. Berita ini menginformasikan popularitas Alex Noerdin dan Fauzi Bowo yang lebih unggul dibanding kandidat lainnya.<sup>154</sup>*

Secara keseluruhan dari aksi pemantauan media lokal yang berlangsung di Jakarta terlihat jelas bahwa surat kabar lokal di Ibu Kota yang dibaca melalui Warta Kota dan Berita Kota sangat memberi perhatian terhadap isu perpolitikan (good governance). Perhatian berlebih terhadap isu itu juga yang mengindikasikan dengan gamblang bahwa isu-isu lain jadi tenggelam. Lebih disayangkan lagi, keberlimpahan isu good governance pun dianggap oleh Lulus Gita Samudra juga tidak berpotensi untuk menciptakan kehidupan politik yang lebih dinamis dan rasional. Karena wacana perpolitikan yang dimunculkan wartawan pun kerap diwarnai dengan tangkapan gaib dan sarat kepentingan. Bisa dibayangkan hampir tidak muncul eksplorasi wartawan dalam membangun perspektif politik yang sehat, melainkan hanya aksi bombastis yang bias informasi demi peningkatan oplah.

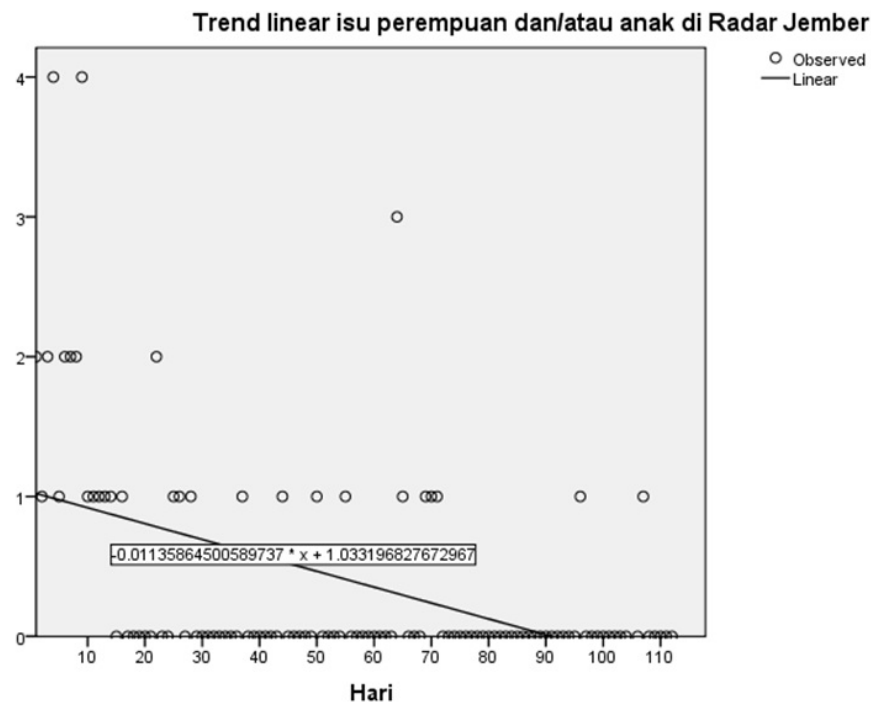
153. Lulus Gita Samudra, “Foke Punya Banyak Kesempatan”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 011/DKI Jakarta/29 April 2012.

154. Lulus Gita Samudra, “Persoalannya Alex dan Foke”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 012/DKI Jakarta/6 Mei 2012.

**IV.2.1.5. Jember (Radar Jember dan jemberpost.com)**

Di kota Jember, media massa lokal yang dipantau adalah Surat Kabar *Radar Jember* dan portal online *jemberpost.com*. Isu *good governance* pada *Radar Jember* mendominasi dengan proporsi 45% dari total 629 artikel yang berhasil terpantau di surat kabar tersebut. Namun, isu ini kecenderungannya tidak mengalami pergerakan dengan persamaan regresi (garis lurus) yang signifikan. Isu yang memiliki kecenderungan dengan persamaan regresi signifikan terjadi pada isu perempuan dan/atau anak serta isu kriminalitas. Isu perempuan dan/atau anak yang memiliki proporsi hanya 7% ini memiliki persamaan regresi yang signifikan  $Y = 1,033 - 0,011 X$  dan ditampilkan dengan grafik berikut:

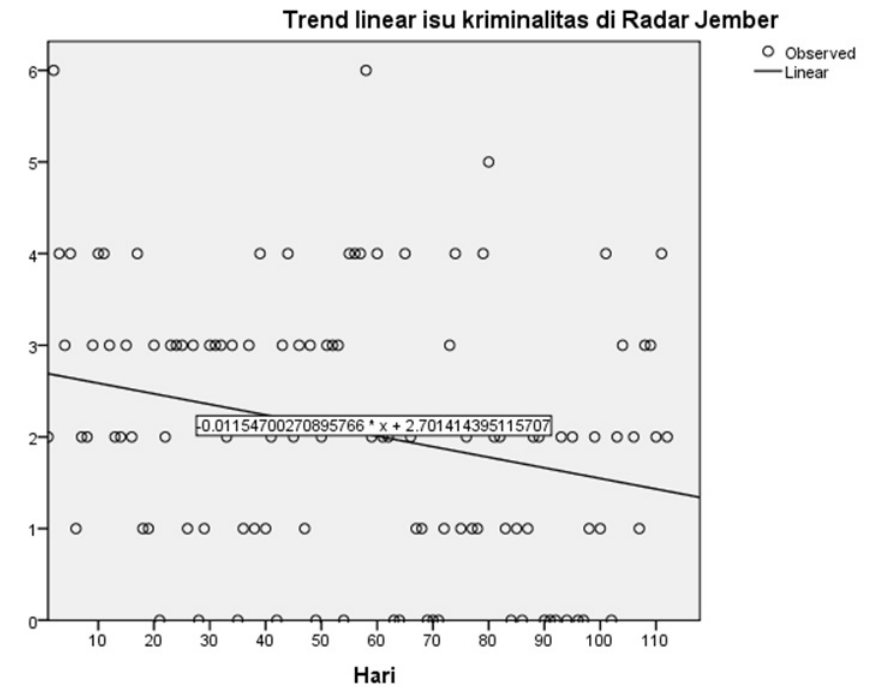
Grafik 19. Kecenderungan isu perempuan/atau anak Radar Jember



Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa pengangkatan isu perempuan dan/atau anak oleh Radar Jember sangat sedikit dan bahkan mengalami penurunan di penghujung bulan keempat.

Sedangkan isu kriminalitas Radar Jember, memiliki proporsi 36%, dengan garis kecenderungan yang negatif (turun), dan persamaan regresinya  $Y = 2,701 - 0,012 X$ .

Grafik 20. Kecenderungan isu kriminalitas Radar Jember



Dari dua grafik ini dapat kita pahami bahwa isu kriminalitas dan isu perempuan dan/atau anak bukan menjadi perhatian dari *Radar Jember*. Sementara itu, isu *good governance* yang tidak memiliki gerak garis kecenderungan yang signifikan, dapat diartikan bahwa isu *good governance* bergerak secara konstan dengan proporsi yang besar. Untuk isu HAM dan isu lingkungan hidup, *Radar Jember* memuatnya tanpa ada kecenderungan berarti.

Sedangkan pada portal online *jemberpost.com*, tidak ditemukan satupun isu yang memiliki kecenderungan ke arah tertentu. Hal ini dapat disebabkan pula karena jumlah artikel yang terpantau pada portal *online* tersebut terbilang sangat sedikit. Jumlah artikel yang masuk dalam kategori lima isu selama rentang waktu empat bulan tersebut, pada *jemberpost.com*, hanya berjumlah 50 artikel, dan 86% diantaranya adalah isu *good governance*.

Dalam laporannya, Muhammad Qomarudin, pemantau di Jember, mengabarkan bahwa *jemberpost.com* memang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan *tagline* yang mereka usung, yakni "portal berita terkini". Selama 16 minggu pemantauan, Muhammad Qomarudin mengabarkan bahwa tidak ada perkembangan yang berarti dari portal *online* tersebut. *jemberpost.com* tidak menjalankan tugasnya sebagai portal berita yang seharusnya memberikan informasi

ke publik secara berkala setiap harinya, dan oleh karenanya, sisi profesionalitas dari portal yang mengaku sebagai media massa lokal Jember ini pun jadi dipertanyakan.

Dalam salah satu laporannya, Qomar menyatakan:

*Khusus untuk Jemberpost.com, setidaknya hingga minggu ini, tampaknya ketidakjelasan kerja redaksi media ini sungguh tak bisa ditutup-tutupi. Ketidakjelasan intensitas pemberitaan Jemberpost.com mengukuhkan media ini sebagai media yang tidak diurus dengan 'profesional'.<sup>155</sup>*

Pembahasan untuk *Radar Jember*, berdasarkan dari laporan Muhammad Qomarudin, akan menuntun kita pada bagaimana surat kabar ini menyajikan artikel beritanya yang tidak memenuhi etika jurnalistik yang baik. Pada laporan minggu pertama, Muhammad Qomarudin menyorot ketidakbijakan *Radar Jember* dalam memuat berita berisikan perempuan dan/atau anak. *Radar Jember* “terkesan sangat vulgar (ciri fisik, tingkah polah keseharian, cara menggaet pelanggan, sampai tempat biasa mangkal pun disebutkan) memberitakannya.”<sup>156</sup>

Muhammad Qomarudin juga melaporkan bahwa Surat Kabar *Radar Jember* masih terbilang sebagai media massa lokal yang memberitakan kasus-kasus secara ringan tanpa ada penelusuran lebih jauh dan lebih mendalam. Hal ini dapat kita indikasi dari contoh yang diberikan oleh Muhammad Qomarudin tentang bagaimana *Radar Jember* menyajikan sebuah berita yang masuk dalam kategori isu *good governance*, yakni:

*Minggu ini, isu good governance diawali oleh berita dilantiknya Pembantu Rektor I Universitas Jember (Unej) Agus Subekti sebagai Direktur Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PD2M) Ditjen Dikti Kemendikbud. Pelantikan itu sepertinya bakal menutup persetujuan antara Agus Subekti dan Kemendikbud. Seperti yang kita ketahui bersama (warga Jember.red), Agus Subekti sempat mencalonkan diri sebagai rektor Unej, namun gagal. Kegagalan itu sempat disinyalir karena ada campur tangan langsung Mendikbud. Radar Jember belum sepenuhnya proaktif dalam pencarian fakta perihal konspirasi itu. Radar Jember memberitakannya dengan sangat ringan. Hanya*

155. Muhammad Qomarudin, “Isu Kriminal Meningkat, jemberpost.com Tak Begitu Jelas”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 004/Jember/11 Maret 2012.

156. Muhammad Qomarudin, “Ayam Abu-abu, Kisah yang Sangat Kontroversial”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 001/Jember/19 Februari 2012.

*menganalogikan Agus Subekti sebagai pihak yang pernah dirugikan, lalu Kemendikbud melunasi kerugian itu. Dan selesai sampai disitu.<sup>157</sup>*

Alih-alih menyajikan artikel berita yang mendalam dan komprehensif, *Radar Jember* terkesan menjadi corong suara pemerintah lokal. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Muhammad Qomarudin pada laporannya yang lain:

*Beriringan dengan masalah BBM, RJ kerap kali memberitakan setiap kegiatan Bupati. Tercatat hanya pada tanggal 17 Maret RJ absen memberitakan kegiatan Bupati. Hampir semua kegiatan Bupati selama sepekan diberitakan. Bupati menjadi pembicara disebuah diskusi kampus, diberitakan. Bupati pameri sebuah workshop kepemimpinan, diberitakan. Bahkan Bupati melakukan therapy ringan dalam rangka mencoba alat kesehatan baru di salah satu rumah sakitpun diberitakan. Dan diakhir pekan, RJ juga sangat bangga memberitakan perihal undangan langsung dari Dubai untuk sang Bupati. Isi pemberitaan menyebutkan Dubai mulai melirik Jember sebagai daerah sasaran investasi. Kemesraan antara RJ dan Bupati semakin terlihat jelas. Pembaca semakin sering disuguhi berita yang gak penting. Fujur, sebagai pembaca, saya mulai kesulitan mengkategorikan RJ. Sebenarnya RJ ini surat kabar atau buku catatan harian sih?<sup>158</sup>*

Kedekatan Surat Kabar *Radar Jember* dengan lingkungan pemerintah lokal di Jember, semakin ditegaskan oleh Muhammad Qomarudin pada minggu berikutnya:

*...isu good governance pada pekan ini masih dihiasi dengan aktivitas Bupati Jember, MZA Djalal, paling sering perihal kerjasama dengan Dubai, yang berencana membangun sebuah sekolah kesehatan di Jember, sekaligus investasi di Jember.*

*Meskipun kedekatan RJ dan bupati terlihat mencolok dalam banyak pemberitaan, pernah sekali beberapa kali RJ memberitakan kegagalan pemerintah daerah. Pekan ini, misalnya, RJ mengangkat data kemiskinan di Jember. Kritik lain RJ terhadap kebijakan MZA Dalal ialah perihal ketidakpedulian pemerintah daerah terhadap sekitar 31 pasar tradisional di*

157. Muhammad Qomarudin, “Awat, Ada Asam Sulfat di Sungai”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 003/Jember/4 Maret 2012.

158. Muhammad Qomarudin, “Catatan Harian Bupati”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 005/Jember/18 Maret 2012.

*Jember, disebabkan kelemahan pada payung hukum investasi yang terlalu membiarkan menjamurnya banyak minimarket. Sayangnya, berita-berita semacam tadi, tidak sering muncul di Rf. Ini mengkhawatirkan, mengingat Rf nyaris tanpa rival media lain yang terbit di Jember.<sup>159</sup>*

Kedekatan ini tidak hanya terbatas pada isu *good governance*, tetapi juga pada pemuatan isu lain, yakni isu perempuan dan/atau anak. Muhammad Qomarudin memberikan contohnya itu di laporannya, yakni:

*Sementara itu, isu perempuan dan/anak didominasi oleh peringatan Hari Kartini; kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh aktivis perempuan seperti donor darah oleh Solidaritas Perempuan Jember. Radar Jember juga mengangkat feature perihal 'perjuangan' Sri Wahyuni, istri Bupati Jember, MZA Djajal, sebagai Ketua PKK. Radar Jember 'mendalami' kebanggaan Sri Wahyuni dalam usahanya membangun sejumlah PAUD yang berlokasi di posyandu-posyandu di desa, ditambah dengan sedikit pandangannya tentang isu gender.<sup>160</sup>*

Selanjutnya, terkait dengan penyajian berita yang berimbang, Surat Kabar *Radar Jember* justru menyajikan informasi yang tidak berimbang, terutama untuk isu *good governance* dan kriminalitas. Selain terkesan menjadi corong Bupati, *Radar Jember* juga kerap memberitakan prestasi aparat kepolisian tanpa artikel penyeimbang yang mengkritik kinerja aparat tersebut. Hal ini dilaporkan oleh Qomar, sebagaimana pernyataannya:

*Radar Jember selalu memberitakan kinerja positif kepolisian, mulai dari penangkapan raja begal sampai pada pengungkapan kasus pencurian motor yang hanya butuh waktu kurang dari 24 jam. Apakah ini yang dimaksud dengan pemberitaan yang berimbang? Saya rasa tidak.<sup>161</sup>*

Terlepas dari kinerja para awak media massa lokal Surat Kabar *Radar Jember*, yang belum memenuhi kriteria yang ideal ini, penyajian isu-isu di surat kabar

---

159. Muhammad Qomarudin, "Radar Jember (Masih) Sahabat Baik Polisi dan Bupati", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 006/Jember/26 Maret 2012.

160. Muhammad Qomarudin, "Berita Kriminal di Radar Jember Menurun, Isu HAM Muncul Untuk Pertama Kalinya", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 010/Jember/22 April 2012.

161. Muhammad Qomarudin, "Kinerja Kepolisian yang Fluktuatif", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 008/Jember/8 April 2012.

tersebut pun jauh dari kata baik karena proporsi yang tidak seimbang. Laporan Muhammad Qomarudin, pada minggu ke-10 dan ke-11, di mana *Radar Jember* masih menyoroti masalah HAM berdasarkan peristiwa saja.<sup>162</sup>

Pada laporannya yang lain, Muhammad Qomarudin juga mengabarkan bahwa Surat Kabar *Radar Jember* masih melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil tapi fatal, seperti misalnya *miss*-informasi terkait data liputan. Salah satu contohnya, seperti yang diutarakan Qomar:

*Minggu ini, Radar Jember memuat berita besar. Berita itu bahkan sempat menjadi headline di Jawa Post. Sebuah berita tentang kecelakaan maut di jalur tengkorak Jember. Jika kita teliti membaca, kita akan menemukan kesimpangsiuran jumlah korban jiwa pada kecelakaan tersebut. Di hari pertama, Senin (9/4), Jawa Post dan Radar Jember menyebutkan ada 10 korban tewas. Lalu pada hari berikutnya, Selasa (10/4), jumlah korban tewas menyusut menjadi 9 orang. Siapa korban tewas yang hidup lagi? Sampai akhir pekan, angka korban tewas yang dipakai tetap 9 orang. Celaknya, Radar Jember tak pernah punya niat baik untuk mengklarifikasi perihal kesimpangsiuran itu. Sebuah bentuk pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik.<sup>163</sup>*

Dan pada contoh yang lainnya, Qomar menyebutkan bahwa di *Radar Jember* terdapat juga artikel-artikel berita yang sulit disamakan dengan artikel iklan. Berikut laporan Qomar mengenai hal itu:

*Khusus Hari Senin (23/4), pada Radar Jember, saya agak kesulitan membedakan antara berita dan iklan. Hasilnya, dari beberapa tulisan, yang saya anggap layak disebut berita, hanya terlibat pada tiga tulisan. Selebihnya saya masukkan dalam kategori iklan.<sup>164</sup>*

---

162. Muhammad Qomarudin, *op cit.*

163. Muhammad Qomarudin, "Tentang Kesimpangsiuran Jumlah Korban Jiwa", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 009/Jember/15 April 2012.

164. Muhammad Qomarudin, "Hati-hati dengan Iklan yang Mirip Berita", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 011/Jember/29 April 2012.

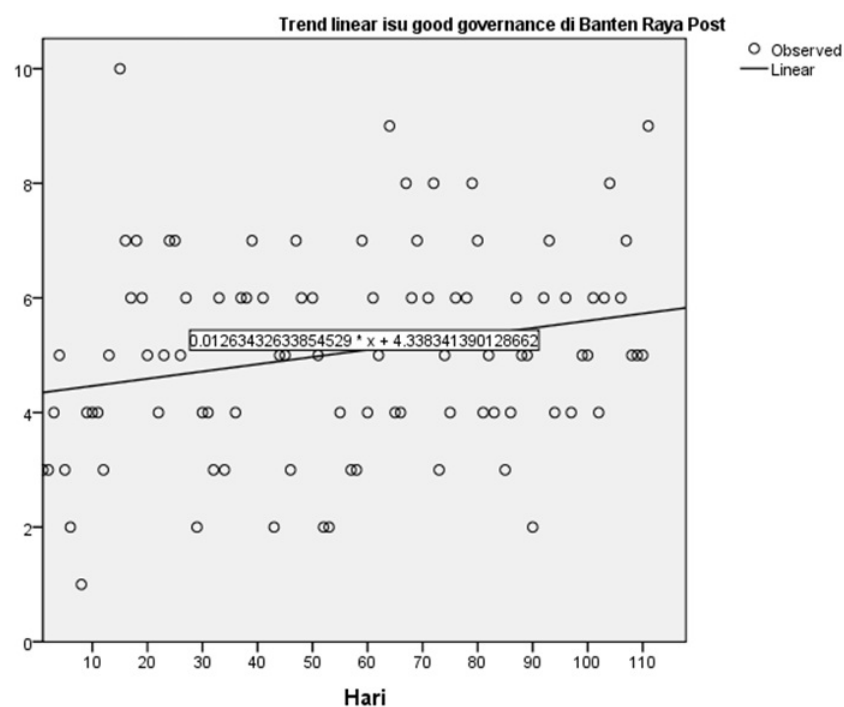
Jabaran tersebut akhirnya memberikan gambaran bahwa kinerja media massa lokal di Jember, baik dari segi penyajian maupun kinerja di lapangan dalam menghimpun informasi, masih belum dapat dikatakan baik.

#### IV.2.1.6. Banten (Kabar Banten dan Banten Raya Post)

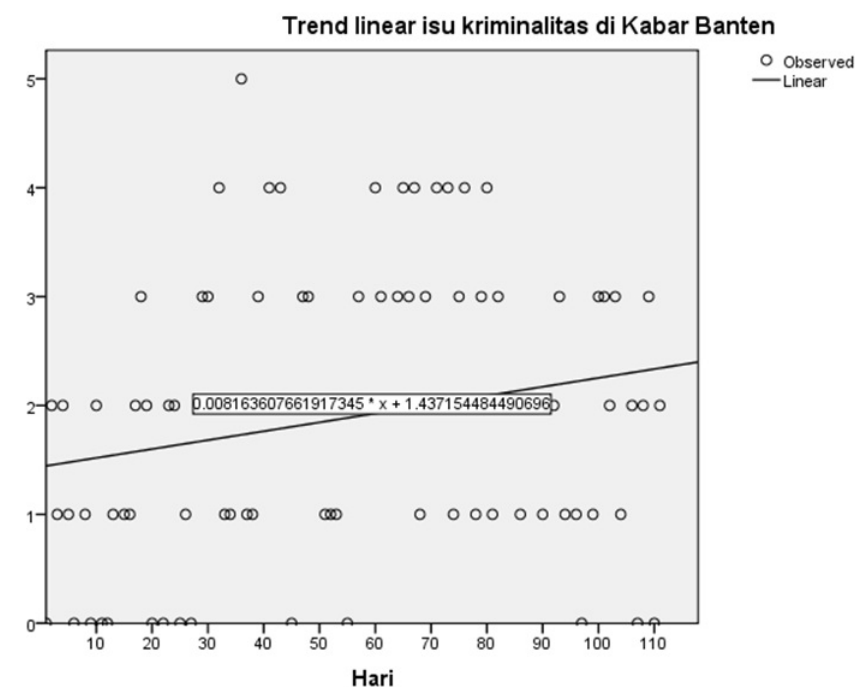
Pada wilayah Lebak, isu *good governance* juga dominan, tetapi yang memiliki kecenderungan naik dengan persamaan regresi signifikan adalah *Banten Raya Post*, yang mana persamaannya adalah  $Y = 4,338 + 0,013 X$ , dengan proporsinya 52% dari total 894 artikel yang berhasil terpantau pada surat kabar tersebut. Data ini tersaji pada **Grafik 21**.

Sedangkan pada *Kabar Banten*, isu *good governance* yang memiliki proporsi 55% dari total 1165 artikel yang berhasil terpantau pada surat kabar tersebut, tidak memiliki kecenderungan dengan persamaan regresi yang signifikan. Justru pada isu kriminalitas yang memiliki proporsi 15%, mengalami kecenderungan yang meningkat dengan persamaan regresi  $Y = 1,437 + 0,008 X$ . Data ini tersaji pada **Grafik 22**.

Grafik 21. Kecenderungan isu *good governance* Banten Raya Post



Grafik 22. Kecenderungan isu kriminalitas Kabar Banten



Untuk isu lainnya, pada *Kabar Banten*, isu HAM dan isu perempuan dan/atau anak yang memiliki proporsi kecil mengalami kecenderungan menurun dengan persamaan regresi signifikan. Isu lingkungan hidup pada kedua surat kabar, *Kabar Banten* dan *Banten Raya Post* mengalami kecenderungan yang menurun pula dengan persamaan regresi yang signifikan. Persamaan regresi isu lingkungan hidup pada *Kabar Banten* adalah  $Y = 3,580 - 0,016 X$ , sedangkan persamaan regresi lingkungan hidup pada *Banten Raya Post* adalah  $Y = 2,902 - 0,013 X$ . Grafiknya dapat dilihat pada **Grafik 23**.

Pada laporan yang dikabarkan oleh Firmansyah, pemantau di Lebak, isu *good governance* menjadi dominan di kedua surat kabar tersebut terkait dengan kasus korupsi, dan umumnya diletakkan di halaman pertama. Dan ini, menurut Firmansyah sebagai warga lokal dan anggota komunitas lokal di Lebak, menenggelamkan isu lingkungan hidup yang lebih penting.<sup>165</sup> Kehadiran pemilik modal atau pihak swasta yang mengekspansi Lebak dengan waralaba

165. Firmansyah, "Korupsi 'Borok' Lama Yang Belum Terobati", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 001/Lebak Banten/19 Februari 2012. Lihat haaman terlampir.

juga menyebabkan isu *good governance* menjadi dominan karena Firmansyah mendapati artikel-artikel berita yang tersaji berkaitan dengan negosiasi pihak swasta dengan pemerintah setempat.<sup>166</sup> Dan sama halnya dengan beberapa kota lain, isu *good governance* banyak menghiasi halaman surat kabar lokal karena euforia Pemilu. Sebagaimana laporan Firmansyah, yakni:

*Terkait dengan isu **good governance** yang banyak diberitakan oleh dua media lokal di Banten, baik Kabar Banten maupun Baraya Post, khususnya untuk pemberitaan isu lokal di Kabupaten Lebak, dalam hal ini pemilihan kepala daerah (Pemilukada) menjadi sesuatu yang hangat diberitakan. Seperti apa yang sudah dilayangkan oleh media, nampak sejumlah bakal calon bupati dan wakil bupati mulai bermunculan, baik ada yang dari kalangan anggota parpol maupun dari kalangan para pengusaha, seperti H. Ade Sumardi (PDI-P), H. Suparman SH MSi (Golkar), Sanuji SP (PKS), dan Hj. Iti Oktavia Jayabaya (Demokrat). Adapun untuk di kalangan para pengusahanya yaitu H. Sumantri Jayabaya, H. Irja, dan H. Tusnurochmat. Tersebut dikabarkan akan ikut meramaikan pemilukada yang akan dilaksanakan 2013 mendatang.*<sup>167</sup>

Selain itu, isu tentang pemekaran wilayah dan kenaikan harga BBM juga turut menjadi alasan mengapa isu *good governance* menjadi dominan di kedua surat kabar tersebut.<sup>168</sup>

Khusus pada *Banten Raya Post*, penyajian isu *good governance* tidak dapat dikatakan baik, mengingat jumlah halaman yang cukup banyak, surat kabar ini hanya memaparkan informasi yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat, berupa ekspos perilaku khusus tokoh-tokoh. Hal itu dilaporkan oleh Firmansyah:

*Khusus buat media lokal **Banten Raya**, dengan jumlah enam belas halaman yang tersedia, seharusnya media ini sudah cukup ideal untuk menjadi sebuah wadah informasi bagi masyarakat. Namun, jika melihat bagaimana dari pemberitaan-pemberitaan di setiap halamannya, saya rasa media **Banten Raya** kurang bisa memanfaatkan dari enam belas jumlah halaman tersebut.*

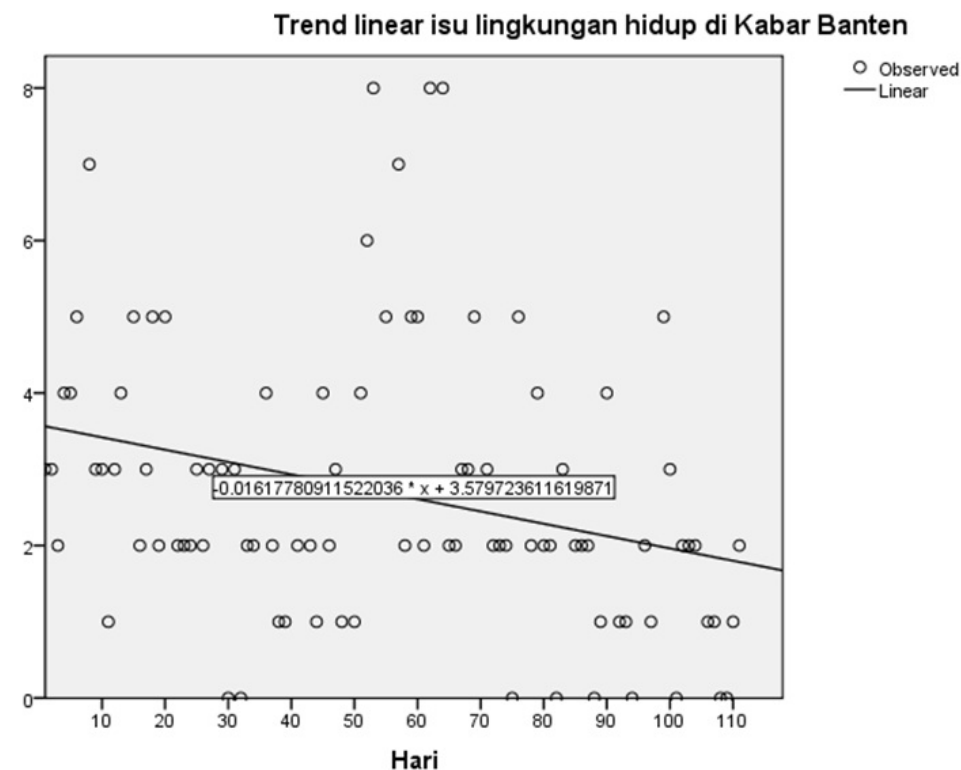
166. Firmansyah, "Ekspansi Waralaba", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 002/Rangkasbitung/26 Februari 2012.

167. Firmansyah, "jalan Pemilukada Kabupaten Lebak 2013", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 003/Lebak/4 Maret 2012.

168. Firmansyah, "Lo, Gue End", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 004/Lebak/11 Maret 2012; dan "katakana Tidak, Untuk Kenaikan BBM", *Laporan Narasi mingguan Pemantauan Rekam Media*, 005/Lebak/18 Maret 2012.

*Terlebih dengan banyaknya pemberitaan yang hanya mengulas seputar profil tokoh-tokoh dengan perilaku khusus.*<sup>169</sup>

Grafik 23. Kecenderungan isu lingkungan hidup Kabar Banten



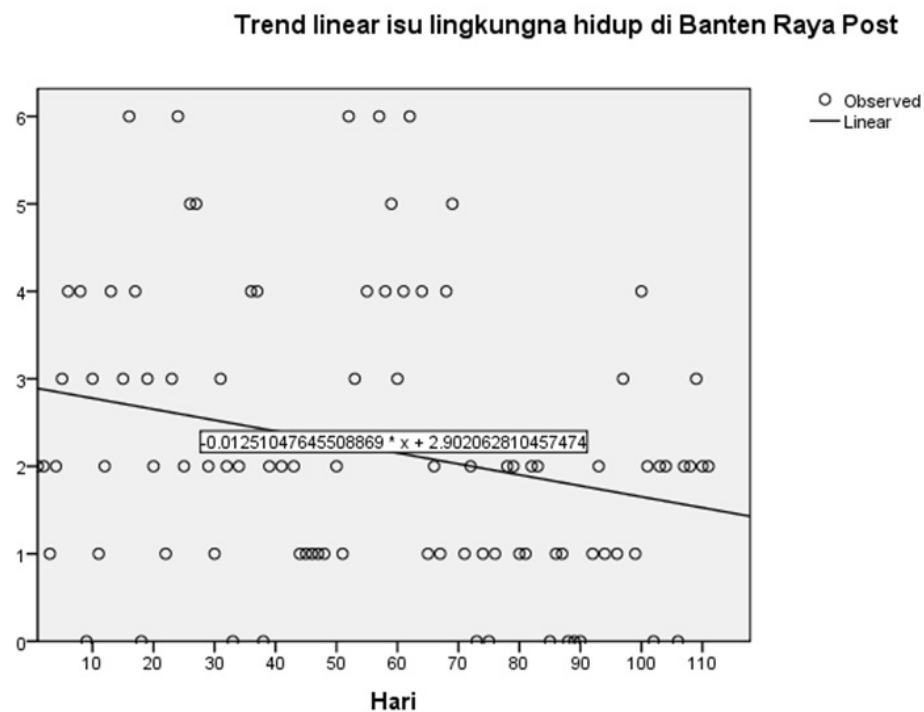
Ketidakseimbangan proporsi isu dalam penyajian kedua surat kabar ini mendapat sorotan oleh Firmansyah, terlebih karena jarang keduanya mengangkat isu perempuan dan/atau anak serta isu HAM. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Firmansyah:

*Selama hampir tiga bulan pemantau melakukan pemantauan, hingga memasuki Minggu ini, kedua media lokal Banten Raya dan Kabar Banten masih terfokus sama pemberitaan-pemberitaan yang terkait isu **good governance**. Sementara untuk isu yang lainnya seperti HAM dan isu perempuan dan/*

169. Firmansyah, "JB Dilaporkan ke Mendagri", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 011/Lebak/29 April 2012.

atau anak masih sangat minim. Selama sepekan melakukan pemantauan, tidak ditemukan indikasi perilaku wartawan yang menyimpang.<sup>170</sup>

Grafik 24. Kecenderungan isu lingkungan hidup Banten Raya Post



Selain tidak seimbang proporsi isu, kinerja media massa lokal di Banten juga perlu dipertanyakan karena adanya bias opini wartawan dalam berita. Hal ini ditemukan oleh Firmansyah, yang mana dalam salah satu laporannya, diberitahukan bahwa Kabar Banten pada satu waktu menyajikan artikel berita yang bias opini, yakni:

*Nampak ada yang timpang dalam isi artikel tersebut, dalam judul tertulis “Balondes Keluarga Demokrat Dicekal”. Setelah pemantau membaca secara menyeluruh isi dari artikel tersebut, tidak ditemukan satu kutipan pun yang menyebutkan bahwa pencekalan yang dilakukan oleh panitia pilkades Desa Sawarna terhadap Ade Teja, dikarenakan yang tercekal mempunyai suatu*

170. Firmansyah, “Pemilukada Makin Ramai”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 013/Lebak/13 Mei 2012.

*hubungan atau kerabat dengan partai politik (parpol) yakni Partai Demokrat, melainkan karena Ade Teja memiliki KTP Ganda. Terlebih dengan adanya kutipan yang membandingkan Ade Teja dengan dua bakal calon kepala desa dari keluarga Golkar, yang dinyatakan lolos persyaratan oleh pihak panitia tanpa harus menemui kendala alias ‘mulus-mulus’ saja. Dengan alih-alih memaparkan fakta, pemantau melihat dengan jelas adanya suatu opini wartawan yang diselipkan yang sifatnya menuju ke arah provokasi yang berpotensi dapat menimbulkan perseteruan antara pihak-pihak terkait. Terlebih dengan pemilihan judul. Dalam kasus ini seharusnya wartawan tidak usah beropini atau berpendapat, karena memang tugas utama seorang wartawan itu adalah melaporkan sebuah fakta bukan menulis opini.<sup>171</sup>*

Dari rangkuman laporan Firmansyah ini, jelaslah sudah bahwa kinerja dari kedua surat kabar di Banten belum memenuhi kriteria ideal dalam kode etik jurnalistik. Kebutuhan yang seharusnya diperlukan warga lokal, seperti lingkungan hidup, HAM dan perempuan dan/atau anak, tidak mendapat perhatian, baik dari *Kabar Banten* maupun *Banten Raya Post*. Sedangkan untuk penyajian isu *good governance*-nya pun, kedua surat kabar hanya berasas pada momentum besar seperti Pemilukada, tanpa sajian kritis terhadap kinerja pemerintah lokal Banten-nya sendiri.

#### IV.2.1.7. Lombok Utara (Radar Lombok dan Lombok Pos)

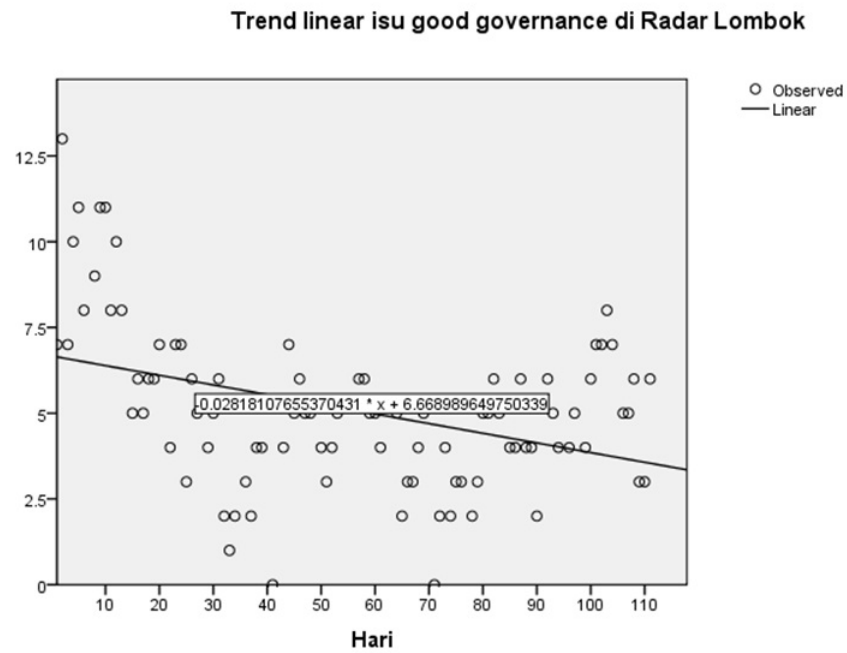
Pada wilayah lokal di Pemenang, Lombok Utara, isu *good governance* juga dominan pada kedua surat kabar, *Radar Lombok* dan *Lombok Pos*. Pada *Radar Lombok*, isu *good governance* yang memiliki proporsi sebesar 77% dari total 602 artikel yang berhasil terpantau pada surat kabar tersebut, persamaan regresinya naik, adalah  $Y = 6,669 - 0,028 X$ , sedangkan pada *Lombok Pos*, isu *good governance* yang proporsinya 87% dari total 786 artikel yang berhasil pada surat kabar tersebut, persamaan regresinya turun, adalah  $Y = 3,809 - 0,067 X$ .

Selain itu, pada *Radar Lombok*, isu HAM yang proporsinya hanya 5%, mengalami kecenderungan yang naik di mana persamaan regresinya yang signifikan adalah  $Y = -0,126 + 0,009 X$ , sedangkan isu lingkungan hidupnya (10%) mengalami kecenderungan menurun dengan persamaan regresi  $Y = 1,204 -$

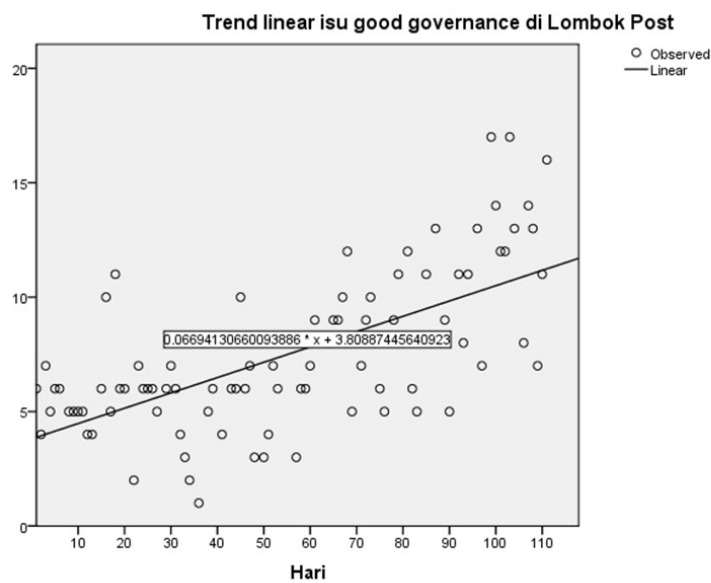
171. Firmansyah, “Pembahasan UU Pemilukada dan Menyoal Balondes di Desa Sawarna”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 014/Lebak/20 Mei 2012.

0,01 X. Sementara itu, isu perempuan dan/atau anak pada *Lombok Pos* mengalami kenaikan, dengan persamaan regresi  $Y = -0,048 + 0,002 X$ .

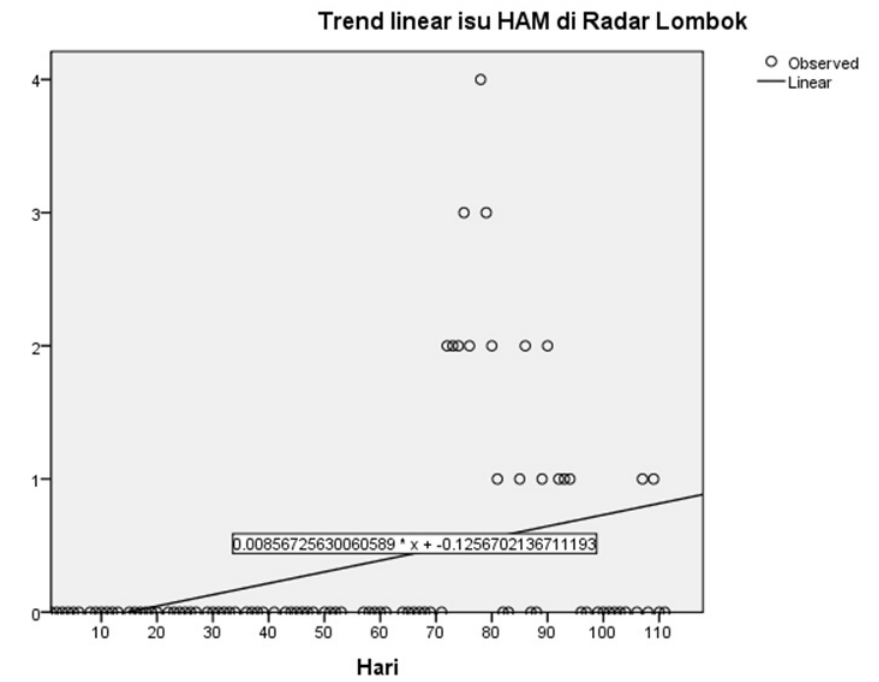
Grafik 25. Kecenderungan isu *good governance* Radar Lombok



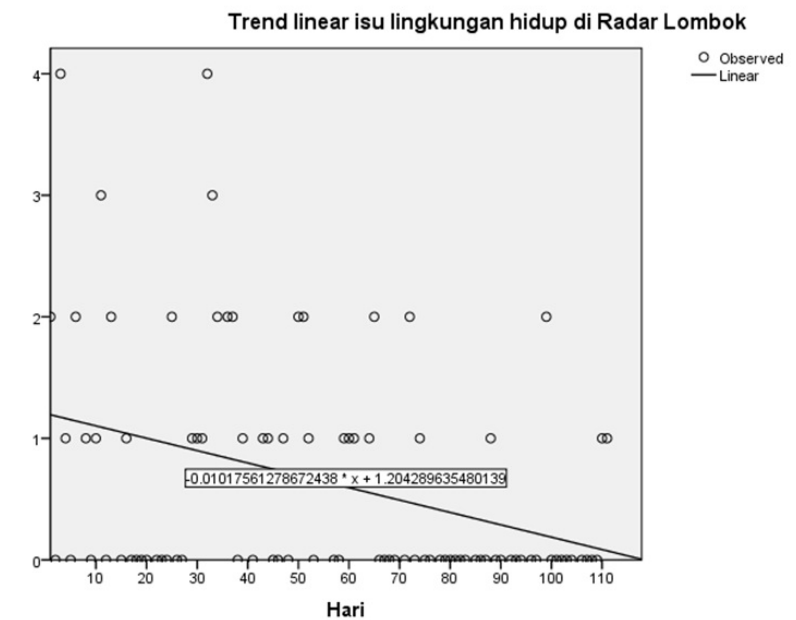
Grafik 26. Kecenderungan isu *good governance* Lombok Post



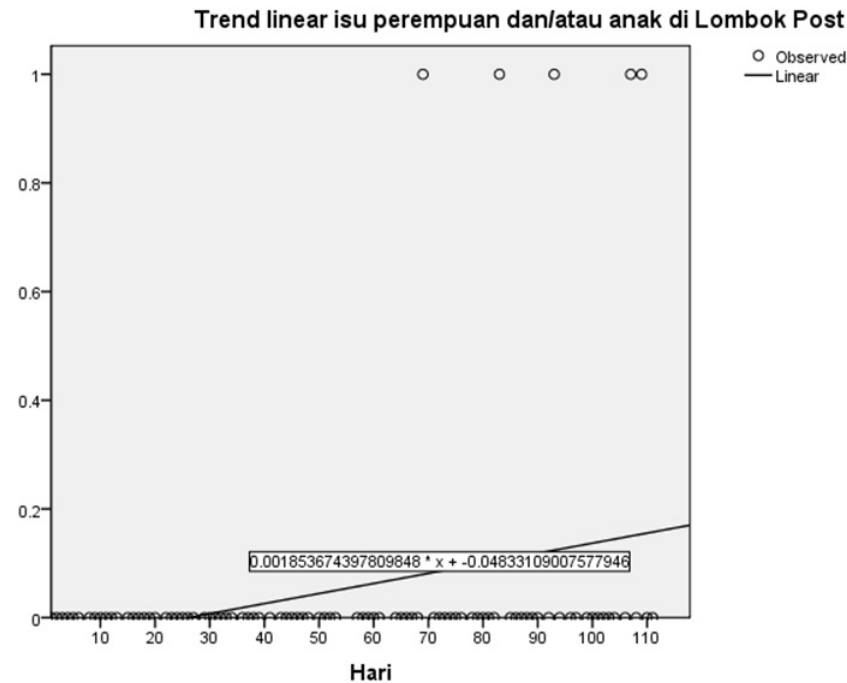
Grafik 27. Kecenderungan isu HAM Radar Lombok



Grafik 28. Kecenderungan isu lingkungan hidup Radar Lombok



Grafik 29. Kecenderungan isu perempuan dan/atau anak Lombok Post



Berdasarkan laporan dari Lalu Maldi, pemantau di Lombok, isu *good governance* yang mendominasi di kedua surat kabar disebabkan oleh situasi sosial-masyarakat yang menghadapi euforia Pemilu. Namun demikian, khusus untuk Surat Kabar *Lombok Post*, isu *good governance* lebih banyak yang berhubungan dengan isu nasional ketimbang isu lokal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lalu Maldi dalam salah satu laporannya, tertanggal 13-19 Februari 2012:

*kedua koran lokal di Lombok, terutama pada Koran Lombok Post, umumnya hanya memberitakan persoalan yang berkaitan dengan good governance, dan selain itu, yang mengisi halaman headline hanyalah isu-isu nasional.*

Sedangkan pada **Grafik 27**, kita melihat bahwa terjadi kenaikan yang cukup tajam pada isu HAM. Berdasarkan laporan Lalu Maldi, dapat diindikasikan bahwa

172. Lihat *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, oleh Lalu Maldi, pada minggu 1 hingga minggu 10, di halaman terlampir.

pemberitaan isu HAM ini berkaitan dengan peristiwa terbakarnya tiga TKI yang berasal dari Lombok. Sebagaimana laporan Lalu Maldi:

*Kedua media lokal itu banyak memberikan informasi-informasi yang beraneka ragam. Namun, dari kedua media lokal, terutama Radar Lombok, ada beberapa berita yang fokus pada satu persoalan, yakni berita tentang Tiga TKI Lotim Tewas Ditembak. Sedangkan Lombok Pos, ada satu berita yang memberitakan masalah tersebut.*<sup>173</sup>

Kasus ini cukup menyita perhatian kedua surat kabar tersebut hingga dua minggu berikutnya. Terlihat dari laporan Lalu Maldi, yakni:

*Hasil pemantauan dari 7 sampai dengan 12 Mei 2012 Radar Lombok masih menunjukkan keseriusannya memberitakan masalah tiga TKI yang mati di tembak di Malaysia, dan dari kedua media tidak ditemukan perilaku yang menyimpang.*<sup>174</sup>

Namun, dengan pengamatan intens Lalu Maldi terhadap kasus ini, pemantau justru menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh awak media pada kedua surat kabar tersebut, berupa pelanggaran etika jurnalistik, di mana kedua surat kabar tersebut, menurut Lalu Maldi, mengemas berita yang terkesan berlebihan dengan menggunakan pilihan kata yang ekstrim. Sebagaimana laporan Lalu Maldi:

*Dari 23 sampai dengan 28 April 2012, isu HAM yang berkaitan dengan Tiga TKI Tewas Ditembak dan Diduga Penjualan Organ Tubuh. Pada kalimat Saksi mata otopsi dari pihak keluarga ketiga TKI menyatakan, melihat mayat Herman tanpa bola mata. Organ bagian dalam dada dan perut korban dalam keadaan terpisah-pisah. Kedua media lokal tersebut terkesan mempropokasi dengan terlalu membesar-besarkan kejadian dan menggunakan kata-kata yang tidak berprikemanusiaan, seperti pada kalimat tanpa bola mata, dada dan perut korban dalam keadaan terpisah-pisah (Radar Lombok, edisi Jum'at, 27 April 2012; Lombok Post, edisi 27 April 2012). Sebagai masyarakat lokal, saya melihat kata-kata itu terlalu*

173. Lalu Maldi, "Tiga TKI Lotim Tewas Ditembak", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 010/Lombok NTB/22 April 2012.

174. Lalu Maldi, "Tiga TKI yang Tertembak Mati di Malaysia Banyak Mendapat Perhatian dari Berbagai Kalangan", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 013/Lombok NTB/13 Mei 2012.

sadis dan saya menyarankan agar kedua media menggunakan kalimat yang lebih sederhana dan tidak terkesan memprofokasi.<sup>175</sup>

Jika kita melihat bahwa kecenderungan isu lingkungan hidup menurun, terutama pada *Radar Lombok*, hal ini dijelaskan oleh laporan Lalu Maldi, yang menyiratkan bahwa media massa lokal di Lombok hanya berpegang pada prinsip *news by accident* untuk mengangkat isu lingkungan hidup. Dalam laporannya, Lalu Maldi mengatakan:

Walaupun isu *good governance* paling banyak, namun isu lokalnya selalu mengangkat berita yang berbeda-beda. Sedangkan isu lingkungan hidup, walaupun hanya 16,32653 %, ada beberapa berita lokal yang fokus pada satu persoalan yakni masalah banjir yang akhir-akhir ini masih menyelimuti Provinsi NTB.<sup>176</sup>

Dari laporan Maldi tersebut, dapat kita lihat bahwa isu lingkungan hidup yang diangkat hanya terfokus pada satu kasus atau persoalan, yakni tentang banjir, sementara persoalan-persoalan lainnya tidak diperhatikan oleh kedua surat kabar tersebut.

#### IV.2.1.8. Surabaya (Radar Surabaya dan Surabaya Post)

Pada lokasi pemantauan Surabaya, isu *good governance* juga mendominasi di kedua surat kabar, *Radar Surabaya* dan *Surabaya Post*. Proporsi isu *good governance* pada *Radar Surabaya* adalah 88% dari total 978 artikel berita yang berhasil terpantau dari surat kabar tersebut. Pada *Surabaya Post*, proporsi isu *good governance* adalah 92% dari total 1026 artikel yang berhasil terpantau pada surat kabar tersebut. Namun begitu, isu ini cenderung menurun, tetapi dengan persamaan regresi yang tidak signifikan.

Isu kriminalitas pada kedua surat kabar mengalami kecenderungan negatif (turun) dengan persamaan regresi yang signifikan. Pada *Radar Surabaya*, isu kriminalitas memiliki proporsi 8%, dan persamaan regresinya adalah  $Y = 1,111 - 0,007 X$ . sedangkan pada *Surabaya Post*, isu kriminalitasnya memiliki proporsi 5%, dan persamaan regresinya adalah  $Y = 0,718 - 0,005 X$ . Pada grafik

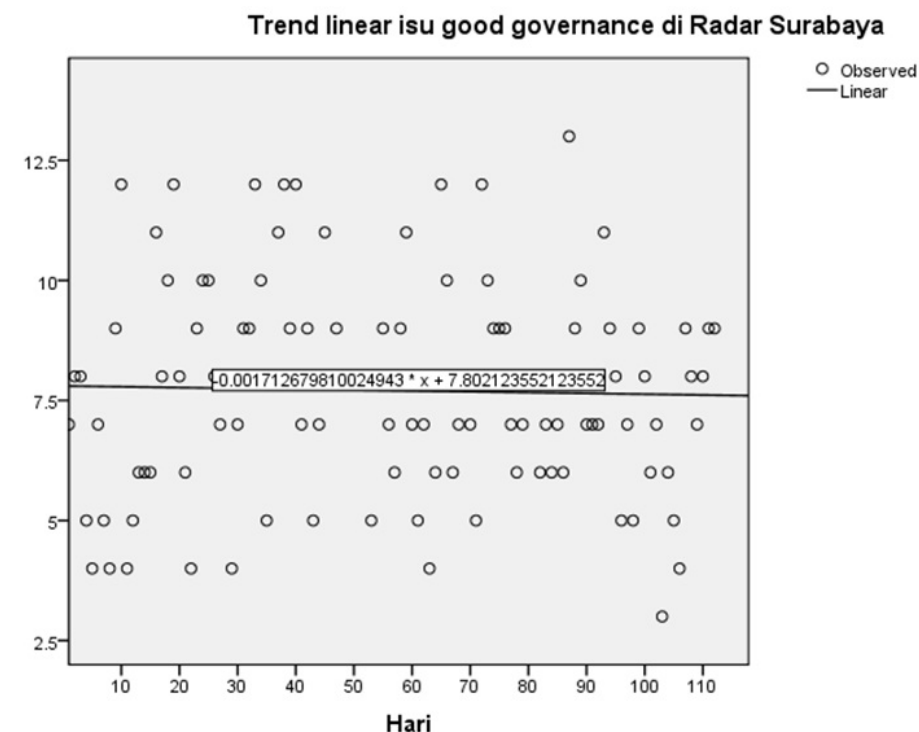
175. Lalu Maldi, "Tiga TKI Tewas Ditembak dan Diduga Penjualan Organ Tubuh, Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media, 011/Lombok NTB/29 April 2012.

176. Lalu Maldi, "Banjir", Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media, 008/Lombok/8 April 2012.

kecenderungannya, kita lihat bahwa isu kriminalitas ini sangat minim dan bergerak menurun, dan menegaskan bahwa memang kedua surat kabar tersebut tidak menjadikan isu kriminalitas sebagai perhatiannya.

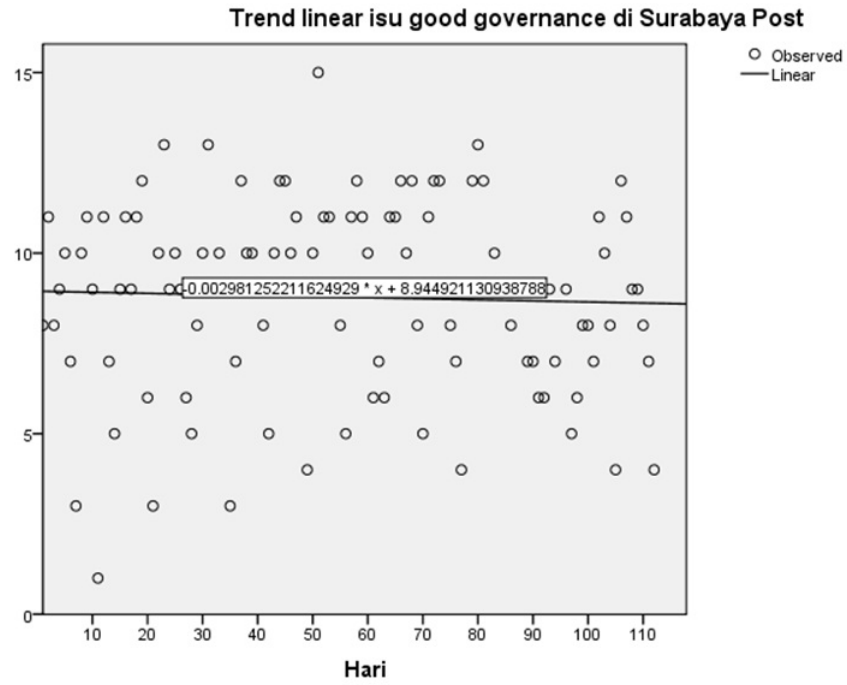
Isu perempuan dan/atau anak pada *Surabaya Post* mengalami kenaikan dengan persamaan garis kecenderungan yang signifikan ( $Y = -0,031 + 0,001 X$ ), tetapi proporsinya sangat kecil (hampir mendekati 0%).

Grafik 30. Kecenderungan isu *good governance* Radar Surabaya

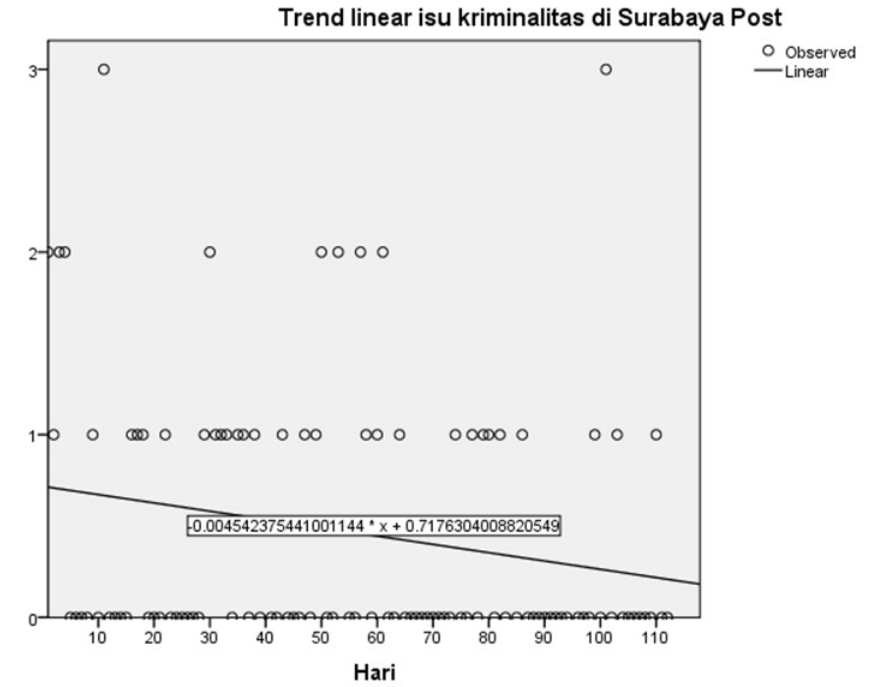


Berdasarkan tampilan grafik-grafik tersebut, terlihat jelaslah bahwa isu *good governance* di media massa lokal Surabaya sangat mendominasi. Kecenderungan yang tidak signifikan pada isu *good governance* menegaskan bahwa kedua surat kabar tersebut secara konsisten memuat isu *good governance* dengan proporsi yang banyak setiap harinya. Sedangkan pada isu perempuan dan/atau anak yang ada di *Surabaya Post*, garis kecenderungan yang meningkat dengan persamaan regresi signifikan tersebut bukan menunjukkan perhatian dari surat kabar yang bersangkutan, tetapi justru menegaskan bahwa dalam rentang waktu empat bulan, *Surabaya Post* hanya memuat 2 artikel saja, dan itu terletak di penghujung waktu dalam durasi empat bulan.

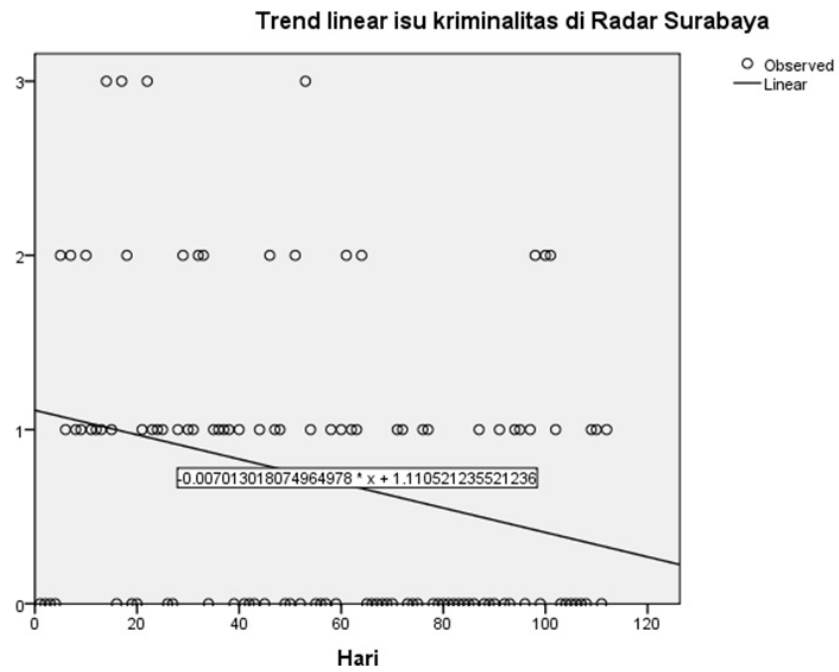
Grafik 31. Kecenderungan isu good governance Surabaya Post



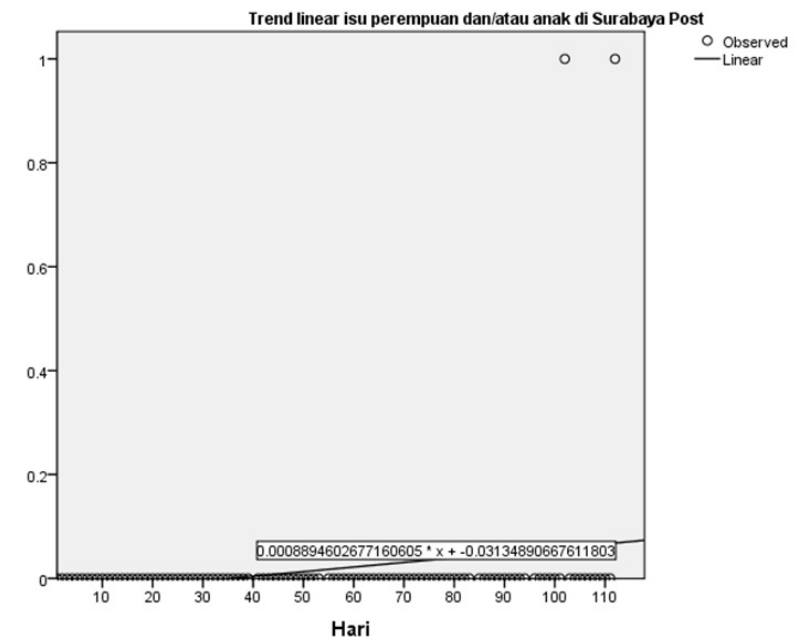
Grafik 33. Kecenderungan isu kriminalitas Surabaya Post



Grafik 32. Kecenderungan isu kriminalitas Radar Surabaya



Grafik 34. Kecenderungan isu perempuan dan/atau anak Surabaya Post



Berdasarkan laporan dari Juventius Sandy Setyawan, pemantau di Surabaya, penyajian berita di kedua surat kabar ini pun belum terbilang baik. Pada minggu pertama saja, Juventius Sandy Setyawan telah mengabarkan bahwa:

*Dilihat dari cara penulisan beritanya, ada kecenderungan penulisan yang berkesan **copy paste** dan modifikasi berita, seperti memindah susunan isi berita secara acak agar terlihat tidak begitu sama, menurut pandangan saya. Jika hal ini terjadi, sangat disayangkan bagi kerja penulis berita yang kurang baik dalam memproduksi informasinya secara jujur.<sup>177</sup>*

Berlanjut pada minggu selanjutnya, Juventius Sandy Setyawan melaporkan bahwa kedua surat kabar tersebut belum menyajikan berita yang kontinyu terhadap masalah yang penting yang harus diinformasikan ke masyarakat lokal di Surabaya, misalnya terkait pendidikan. Artikel-artikel tersebut justru menghilang ketika pernah satu kali muncul. Sebagaimana yang dilaporkan Juventius Sandy Setyawan:

*Dari dominasi isu Good Governance dalam pemberitaan selama sepekan, ada satu isu yang berkaitan masalah pendidikan, yang menurut saya pemberitaannya masih bisa berlanjut. Mengingat pendidikan adalah hak dari semua orang, maka isu ini menurut saya menjadi penting untuk dikembangkan...Tapi sayang, peran media disini masih belum maksimal. Ini terbukti, bahwa berita ini belum berkesempatan muncul kembali setelah pemberitaan pada 21 Pebruari 2012. Sepertinya isu ini masih belum memiliki nilai yang setara dibanding dengan isu-isu Good Governance lainnya.<sup>178</sup>*

Dan terkait dengan penyajian berita berisu good governance tersebut, Juventius Sandy Setyawan melihat terdapat dua perbedaan antara Radar Surabaya dan Surabaya Post. Pada contoh kasus matinya jerapah di Kebun Binatang Surabaya, Juventius Sandy Setyawan melaporkan bahwa “Pemberitaan yang dilakukan Surabaya Post cenderung singkat, tak begitu panjang. Berbeda dengan Radar Surabaya yang memerhatikan detail permasalahannya.”<sup>179</sup>

177. Juventius Sandy Setyawan, “Penulisan Berita Berkesan Copy Pastedan Modifikasi”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 001/Surabaya/19 Februari 2012.

178. Juventius Sandy Setyawan, “Kerjasama Pemerintah Warga dan Media”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 002/Surabaya/26 Februari 2012.

179. Juventius Sandy Setyawan, “Jerapah Mati Dramtis”, *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan rekam Media*, 003/Surabaya/4 Maret 2012.

Contoh lain yang lebih jelas memaparkan perbedaan antara dua surat kabar tersebut, khususnya dalam memuat artikel berita dengan isu *good governance*, dapat disimak pada 2 paragraf yang dikutip dari laporan Juventius Sandy Setyawan, tanggal 1 April 2012 ini:

*Untuk Isu Good Governance, yang menjadi bahan pemberitaan selama seminggu ini, isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 April 2012, menjadi sorotan yang secara rutin dihadirkan oleh Surabaya Post. Ini dapat dilihat, selama satu pekan ( 26 Maret – 01 April 2012), berita yang berkaitan dengan BBM, mulai dari dampak domino yang ditimbulkan (seperti kenaikan bahan pokok, sebelum putusan kenaikan harga BBM), hingga usaha-usaha penolakan kenaikan harga BBM, yang dilakukan lapisan masyarakat, buruh, maupun mahasiswa, dengan aksi demo, menjadi Headline selama sepekan. Lain halnya dengan Radar Surabaya, Headline selama sepekan ini memuat berita secara acak, tidak berfokus menghadirkan satu isu yang menempatkan di Headline secara berkala. Terhitung dari terbitan Kamis, 29 Maret hingga – 01 April, barulah isu mengenai aksi demo menolak kenaikan BBM yang dilakukan diberbagai wilayah di Surabaya, dengan membloke beberapa ruas jalan utama, diberitakan secara berturut-turut dengan menempatkan artikel pada Headline.*

*Sementara, usaha untuk melakukan pencitraan terhadap kepentingan partai politik, bisa dilihat dari pemberitaan yang dihadirkan Headline Surabaya Post, Minggu 01 April 2012, dalam judul “ARB: Polemik BBM Berakhir karena Golkar” – Permainan cantik di Parlemen soal BBM membuat partai berlambang beringin lebih ‘pede’ di 2014. Didalam pemberitaan ini, disertakan pula kutipan dari Aburizal Bakrie “Polarisasi opini dan pendapat sudah tajam, emosi tersulut. Hanya politisi yang tangguh, berpengalaman dan berakal yang dapat mencari jalan keluar. Dan itulah yang dilakukan Fraksi Golkar”.<sup>180</sup>*

Pada akhir tulisan laporan tersebut, Juventius Sandy Setyawan memberikan komentar, yakni:

*Seperti yang dilihat dalam berita ini, momen seperti ini, digunakan sebagai alat untuk pencitraan sebuah partai politik. Sangat disayangkan jika media*

180. Juventius Sandy Setyawan, “Polemik BBM Berakhir Karena Golkar”, *Laporan narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 007/Surabaya/1 April 2012.

akan terus dijadikan alat propaganda dan berkampanye, bukannya menjadi wadah suara rakyat.<sup>181</sup>

Cara penyajian berbeda yang didasari oleh kebijakan redaksi juga terlihat di kedua surat kabar ini, berdasarkan laporan dari Juventius Sandy yang memberitahukan bagaimana kedua surat kabar tersebut mengangkat kasus tindak pidana korupsi, yakni:

*Walau banyak kasus dan banyak nama tersangka yang terlibat, ada dua nama yang kemunculannya sering diberitakan. Pemantauan yang dilakukan pada kurun waktu sepekan lalu (30 April – 6 Mei 2012), data yang dapat dihimpun tentang pemberitaan tipikor pada halaman pertama adalah Radar Surabaya memuat total 4 artikel berita dengan 6 foto utama dan 1 grafis mengenai Musyafak Rouf selama sepekan. Berbeda dengan Surabaya Post, lebih memilih pemberitaan mengenai Angelina Sondakh sebagai tersangka kasus tipikor pada halaman pertama, dengan jumlah total 4 artikel berita beserta 2 foto utama dan 2 grafis selama sepekan.<sup>182</sup>*

Dan indikasi adanya pemanfaatan media massa oleh politikus kembali ditemukan oleh Juventius Sandy Setyawan, dan melaporkan pada minggu kesembilan, dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

*Salah satu artikel berita yang menarik mengenai isu good governance adalah Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, memberikan imbauan kepada pengguna jalan agar tertib berlalu lintas. Hal itu dilakukan dengan cara memutar rekaman suaranya di lampu traffic light (TL) perempatan Jl Kertajaya, di dekat GOR dan Samsat Manyar, seperti yang dipasang di perlintasan Kereta Api (KA) (Surabaya Post, 11 April 2012). Dari pemberitaan ini, banyak respon yang menganggap bahwa kegiatan ini berlebihan, kenapa himbauan untuk tertib lalu lintas disampaikan langsung oleh gubernur, tidak melalui pihak-pihak yang sesuai dengan kapasitasnya seperti pihak Kepolisian ataupun Dinas Perhubungan. Warga bisa saja menanggapi bahwa ini sebuah kegiatan strategi kampanye atau sosialisai Soekarwo untuk Pemilihan Gubernur tahun 2013. Walaupun pada pemberitaan tersebut, Humas Pemerintah Provinsi*

181. *Ibid.*

182. Juventius Sandy Setyawan, "Melihat Penyajian Berita pada Halaman Pertama", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 012/Surabaya/6 Mei 2012.

*Fatim, Anom Suroto membantah bahwa suara Soekarwo yang di Traffic Light merupakan strategi politik menjelang Pilgub 2013.<sup>183</sup>*

Dominannya pemberitaan kedua surat kabar pada isu *good governance* pada dasarnya menjadikan kebutuhan warga masyarakat lokal tidak terpenuhi. Hal ini disampaikan pula oleh Juventius Sandy Setyawan dalam laporannya untuk mengkritik kedua surat kabar di Surabaya, yakni:

*Sebenarnya kedua surat kabar lokal ini juga sudah mengutamakan berita di daerah dibandingkan dengan yang terpusat. Tapi, jika dilihat dari hasil prosentase yang dihimpun, sepertinya keberagaman berita lokal berdasarkan kategori isu sangatlah kurang dan selisihnya terlampau jauh. Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang beragam dan menyeluruh. Walaupun ini sudah menjadi kebijakan redaksional maupun kepentingan politik sebuah media, setidaknya media lokal ini dapat memaksimalkan fungsinya agar masyarakat dapat mengakses informasi yang sesuai dengan kebutuhan.<sup>184</sup>*

Sehubungan dengan soal kinerja awak media massa, dapat dinilai bahwa kedua surat kabar di Surabaya ini pun masih melakukan beberapa kesalahan. Seperti salah satunya yang ditemukan oleh Juventius Sandy Setyawan, terkait dengan berita kriminalitas, masih didapati informasi rancu yang membingungkan pembaca, termasuk juga keterangan dari narasumber yang kurang jelas.<sup>185</sup>

Dari sajian data statistik serta dukungan data dari laporan pemantau di lokasi, jelaslah sudah bahwa terdapat perbedaan yang jelas antara *Radar Surabaya* dan *Surabaya Post* dalam menyajikan berita mereka. Namun demikian, perbedaan ini pun tidak memenuhi harapan yang diinginkan karena beda yang dimaksud hanya berhenti pada sudut ambilan sebuah kasus, bukan pada beragamnya isu. Sebab, meskipun berbeda *angle*, isu dan topik yang diangkat pada dasarnya sama sehingga tidak memberikan pilihan informasi alternatif kepada masyarakat pembaca di Surabaya.

Berdasarkan pembahasan mengenai kemasan pemberitaan pada masing-masing media massa lokal di setiap daerah lokasi program Rekam Media tersebut,

183. Juventius Sandy Setyawan, "Suara Gubernur di Traffic Light", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 009/Surabaya/15 April 2012.

184. Juventius Sandy Setyawan, "Dominasi Good Governance", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 011/Surabaya/29 April 2012.

185. Juventius Sandy Setyawan, "Pemberitaan yang Membingungkan", *Laporan Narasi Mingguan Pemantauan Rekam Media*, 013/Surabaya/13 Mei 2012.

AKUMASSA melihat bahwa terdapat beberapa hal yang umumnya terjadi pada media massa lokal yang menjadi subjek penelitian ini, yakni sebagai berikut:

- 1) *Good governance* adalah kategori isu yang umumnya paling mendominasi artikel-artikel berita yang dimuat oleh media massa lokal, sementara HAM adalah isu yang umumnya paling sedikit diangkat oleh media massa lokal tersebut.
- 2) Pemuatan berita dengan isu *good governance* umumnya bertema pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang secara kebetulan akan atau sedang berlangsung di wilayah lokal tempat media massa tersebut bekerja, di samping pemuatan berita dengan tema-tema yang berhubungan dengan korupsi, kinerja pemerintah kota, dan pengelolaan fasilitas publik di daerah lokal tersebut.
- 3) Dari ketujuhbelas media massa lokal yang terpantau, masih banyak ditemukan bahwa umumnya pemuatan berita yang mengandung isu kriminalitas dan isu perempuan dan/atau anak, memiliki unsur stigmatisasi, labelisasi, *trial by the press*, serta dramatisasi yang berlebihan. Selain itu, penggunaan kata dan kalimat yang ekstrim, yang oleh para pemantau dianggap tidak etis, juga terjadi pada sebagian besar media massa lokal tersebut.
- 4) Media massa lokal yang menjadi subjek penelitian ini, umumnya, memuat berita berdasarkan peristiwa yang terjadi saja, terutama pada informasi-informasi yang berkaitan dengan isu HAM.
- 5) Media massa lokal yang menjadi subjek penelitian ini, umumnya, masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam memberikan data informasi, sumber, dan narasumber, sehingga berpotensi memunculkan kebingungan di benak para pembaca.
- 6) Berita-berita terkait dengan isu nasional, umumnya, masih menghiasi halaman-halaman media massa lokal, bahkan menenggelamkan isu-isu lokal yang sejatinya lebih dibutuhkan oleh masyarakat lokal itu sendiri.

Enam hal yang telah dirangkum berdasarkan data kuantitatif dan laporan narasi mingguan dari para pemantau ini, secara lebih jauh, akan kita tarik dalam pembahasan yang lebih umum sehubungan dengan bagaimana kebijakan sebuah redaksi mempengaruhi kemasan informasi yang mereka suguhkan kepada pembaca. Berangkat dari asumsi awal yang melatarbelakangi penelitian ini, yakni adanya tiga kondisi bermedia di Indonesia—konglomerasi media, limpahan banjir informasi, dan media yang dimanfaatkan sebagai alat pertarungan politik praktis—yang dilihat sebagai faktor utama penyebab tidak sehatnya kinerja media massa arus utama di tingkat lokal, AKUMASSA mengajukan argumentasi

bahwa hak-hak masyarakat atas kesetaraan arus informasi yang bebas dari kepentingan-kepentingan kelompok tertentu menjadi hilang; masyarakat tidak dapat mengakses informasi-informasi yang lebih dibutuhkannya sebagai warga lokal karena ketiadaan informasi yang plural.

Pada sub-bab selanjutnya, akan dibahas tentang realitas sosial dan kebijakan redaksi media massa, dengan menggunakan bantuan data wawancara dengan redaksi media massa lokal dan komunitas lokal. Kegiatan wawancara tidak dilakukan pada semua lokasi, tetapi pada beberapa lokasi saja. Harapannya, dengan penjelasan secara mendalam atas lokasi-lokasi yang dijadikan contoh ini, akan didapatkan semacam kesimpulan akhir yang layak digunakan untuk menjawab masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

#### IV.2.2. Realitas Sosial dan Kebijakan Redaksi Media Massa Lokal

Hadirnya para penguasa-penguasa baru dalam jaringan konglomerasi media memunculkan *spasialisasi horizontal*<sup>186</sup> dan *sinergi media*<sup>187</sup>, yang di satu sisi memberikan mereka kemudahan untuk mengontrol jalannya arus informasi di wilayah edarnya. Terdapat beberapa alasan bagi para pelaku media massa atau kalangan elit yang menjadi konglomerat media tersebut untuk menginvestasikan daya kontrol mereka terhadap informasi. Di antaranya, yang paling umum, dalam keterkaitannya dengan perusahaan media yang mereka kelola, ialah kepentingan untuk meningkatkan keuntungan dan akumulasi modal perusahaan, dan dalam beberapa kasus, juga didayagunakan sebagai penunjang untuk menguatkan pengaruh mereka di lingkungan elit politik praktis.

Hal ini lah, bagi AKUMASSA, yang dilihat sebagai alasan utama yang paling logis bagi kehadiran media massa lokal, yang bekerja di wilayah lokal, namun tidak berdiri secara independen bersama semangat lokal tersebut, melainkan berafiliasi (umumnya media massa lokal yang ada berdiri karena alokasi modal dari penguasa media di wilayah kota-kota besar) dengan media massa arus utama yang lebih besar dan lebih mapan. Para konglomerasi media ini tidak lagi melestarikan pengaruhnya melalui kerja satu media massa saja, tetapi tersebar dalam puluhan bahkan ratusan media massa dalam berbagai bentuk dengan kemasan lokal. Dengan kata lain, kebijakan dari media massa lokal itu pun menjadi diragukan karena sarat kepentingan komersil yang juga

186. Widodo Muktiyo, *op cit.*, hlm. 35-36.

187. Werner J. Severin dan James W. Tankard, *op cit.*, hlm. 433

bisa merujuk pada kepentingan politik praktis sehingga informasi yang disajikan kepada masyarakat menjadi bias.

Ilustrasinya seperti ini: kalangan elit konglomerasi media memperluas cakupan perusahaan media massa mereka dengan mendirikan semacam cabang perusahaan di wilayah lokal, dengan wajah media massa yang mengedepankan kepentingan lokalitas. Namun, sesungguhnya kehadiran dari media massa lokal itu sendiri hanyalah untuk memperbanyak kanal-kanal yang dapat meraup keuntungan dengan strategi berupa penyesuaian terhadap segmentasi para pembaca yang berbeda-beda tergantung karakteristik lokal cakupan edarnya. Melihat kepada tujuh belas media massa lokal yang dipantau oleh AKUMASSA, pengecualian terhadap *jemberpost.com*<sup>188</sup>, 80% diantaranya merupakan perusahaan atau anak perusahaan yang berada di bawah kepemilikan perusahaan media massa yang lebih mapan yang berdiri di kota-kota besar, atau di bawah kepemilikan pengusaha yang berafiliasi dengan golongan atau partai politik tertentu.

Berdasarkan hasil laporan para pemantau lokasi dan hasil wawancara AKUMASSA dengan redaksi-redaksi media massa lokal tersebut, diketahui bahwa media massa lokal di Aceh Besar (*Serambi Indonesia* dan *Prohaba*) dan Jakarta (*Berita Kota* dan *Warta Kota*) merupakan anak perusahaan dari Kompas Gramedia; Depok (*Radar Depok*), Tangerang Selatan (*Tangsel Pos*), Jember (*Radar Jember*), Banten (*Banten Raya Post*), Lombok Utara (*Radar Lombok* dan *Lombok Post*), dan Surabaya (*Radar Surabaya*) merupakan anak perusahaan dari Jawa Pos; Depok (*Jurnal Depok*) merupakan anak perusahaan dari Jurnal Bogor; Banten (*Kabar Banten*) merupakan anak perusahaan dari Pikiran Rakyat; Depok (*Monitor Depok*) merupakan milik pengusaha yang berafiliasi dengan Partai Politik Gerindra; dan Surabaya (*Surabaya Post*) berafiliasi dengan Partai Politik Golkar.

Tidak sehatnya isi informasi, baik dari proporsi isu dan kualitas penyajian, yang terdapat pada media massa lokal-media massa lokal tersebut menjadi semacam representasi dari kenyataan bahwa adanya unsur-unsur kepentingan yang mempengaruhi kebijakan redaksi, dan dengan demikian pula bersemayam dalam informasi yang disebarkan kepada masyarakat.

Berdasarkan penelitian AKUMASSA terhadap tujuh belas media massa lokal tersebut, tingginya perhatian media massa lokal terhadap isu-isu *good*

188. Sebagaimana yang dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, *jemberpost.com* merupakan portal *online*. Berdasarkan tinjauan terhadap laporan narasi mingguan dari pemantau di Jember, portal online ini tidak dapat dijadikan acuan contoh (subjek wawancara) mengingat pelaku medianya sendiri tidak aktif mengelola portal online tersebut. AKUMASSA melihat bahwa *jemberpost.com* merupakan contoh kasuistik yang mana matinya sebuah media massa disebabkan karena tak adanya keseriusan dan kredibilitas dari pelaku media massa itu sendiri.

*governance*, dapat dikatakan sebagai sebuah penegasan bahwa media massa lokal bekerja atas dasar kepentingan komersil. Potensi pangsa pasar dari wilayah lokal menjadi salah satu alasan utama bagi berdirinya sebuah media massa lokal. Pada beberapa contoh, beberapa redaksi media massa lokal mengaku bahwa segmentasi utama mereka adalah pembaca di lingkungan pegawai negeri sipil (PNS) yang membutuhkan informasi terkait dengan tata kelola pemerintahan lokal.

Sebagaimana misalnya terjadi di kota Depok, penjelasan dari redaksi *Radar Depok* menegaskan hal ini:

*“Ya, karena kita melihat pangsa pasar di Depok kan cukup bagus. Walaupun ya memang konsekuensi logis dari pemilihan sebuah media cetak di kota penyangga memang persaingan yang sangat ketat, karena kan pembaca mengira kita membeli koran lokal, ada berita nasionalnya apa ngga ... gitu kan, karena banyak pertimbangan dari para pembaca. Nah, kemudian, yang kedua, magnet di Depok ini cukup ini... dari sisi apa, ya?... konsekuensi politis, kan? Kan dekat dengan Jakarta, gitu, kan? Apa pun Depok jadi barometer. Saya pikir, seperti halnya sekarang, calon gubernur Jabar itu intensitas ke Depok itu lebih banyak ketimbang daerah lain. Kalau kalian ... padahal, penduduk kita hanya 1,8 juta, iya, kan? Secara nalar, mungkin ya ... apa sih ... cuma kita tetap Depok itu kan disorot... disorot... dekat dengan Jakarta ... itu yang membuat kita menambah menjadikan emm ... apa ... koran di sini. Kalau memang dari segi pertimbangan bisnis, kita memang emm ... sedikit ini, lah ... masih berkembangnya ... berkembangnya, sih, nggak terlalu pesat dibandingkan dengan koran yang di Sukabumi. Dia notabene nya single fighter di sana. Gak ada media lain yang masuk. Dan kultur masyarakat di sana menengah ke bawah. Beda. Maka di Sukabumi itu perkembangannya sangat pesat karena mereka tidak ada saingan. Kalau di kita jelas saingannya, ada Warta Kota. Iya, kan? Non Stop... maka segmentasi kita jelas... mungkin porsi terbesar pembaca kita lebih ke pegawai negeri sipil kalau untuk sekarang... mungkin... menengah ke atas lah... untuk grassroot masih kita proses. Inilah... emm... apa... lagi diusahakan untuk terus dibaca ulang...”<sup>189</sup>*

Dan juga penjelasan dari redaksi *Monitor Depok*:

*Ya, kalau segmentasi... bicara segmentasi, sih, kalangan PNS, ya... Kita banyak langganan di kalangan pemerintahan kota. Terus, kedua, masyarakat*

189. Data wawancara dengan redaksi *Radar Depok*.

*menengah... menengah dalam artian, ini, ya... kayak tenaga pendidik, guru-guru, ketua RT/RW... kalau pelajar, sih... terakhir survey, sih... gak begitu terlalu banyak, ya. Terus tapi, mahasiswa UI, juga... mereka sering baca Monitor Depok. Jadi segmentasinya, ya umum aja, sih. Tapi yang balik banyak berlangganan pemerintah kota, orang-orang pemerintahan... karena memang, mereka butuh informasi terkait kebijakan mereka juga, kan?*

Selain di Kota Depok, alasan yang serupa juga ada di wilayah Banten. Hasil wawancara AKUMASSA dengan redaksi *Banten Raya Post*, didapatkan sebuah penjelasan yang cukup menarik, yakni:

*"Kita sebenarnya umum. Kita koran umum. Tapi kebanyakan pembacanya sekitar umur, dewasa, sih. 20 tahun ke atas. Tapi kita juga bikin kayak Baraya Muda, terus lifestyle, untuk menciptakan pembaca masa depan..."<sup>190</sup>*

Ketika ditanya profesi rata-rata pembacanya, *Banten Raya Post* secara tegas dengan kalimat pendek menyatakan:

*"Rata-rata PNS, karyawan swasta... Malah, di sini kebanyakan PNS dan karyawan swasta."<sup>191</sup>*

Lebih jauh, redaksi *Banten Raya Post* menjelaskan:

*"Yah, memang pembacanya segitu, memang pembaca di situ. Minat membaca di sini, kan, boleh dikatakan gini, kalau dibilang masih kurang, ya, masih kurang, ya. Makanya, ada Baraya Muda. Harus dipaksain itu. Paling hanya beberapa orang di sini, kan, yang langganan koran. Prospeknya cerah, sih, di sini. Buktinya banyak koran-koran yang bermunculan. Hanya sebenarnya, kalau kita jeli, ya, industri itu, ya, belum tergarap. Umpamanya, ya, kalau orang-orang di situ jalin kerja sama untuk masukin koran, pastinya kan mau. Paling-paling berapa persen."<sup>192</sup>*

Sementara itu, penjelasan dari Kabar Banten ialah:

---

190. Data wawancara dengan redaksi *Banten Raya Post*.

191. *Ibid.*

192. *Ibid.*

*"Ya, kalau segmentasi, kebetulan kita memang belum pernah survey khusus. Kita, secara, mungkin secara lebih spesifik, belum pernah survey khusus. Tapi, ketika misalnya ada pelaksanaan Pilkada di daerah, itu kan banyak calon yang ingin mengetahui segmentasi koran ini di mana, begitu. Dan biasanya mereka melakukan survey... melakukan survey, emm... media apa saja yang paling banyak dibaca, misalkan gitu. Kemudian, media A. Nah, ini segmentasinya apa. Nah, menurut survei yang kami terima dari... dari apa... calon pemasang iklan, itu katanya Kabar Banten itu lebih... meskipun tidak sebanyak... mungkin... apa... mungkin, kalau dari sisi kuantitas, mungkin bisa saja kalah misalnya. Tapi dari sisi pemerataan, kita lebih merata, katanya. Jadi mulai dari A sampai Z, di Banten baca..."<sup>193</sup>*

Namun, dari data *presskit* yang AKUMASSA peroleh, segmentasi utama pembaca *Kabar Banten* adalah pegawai negeri sipil (21%) setelah wiraswasta (23%).

Pentingnya peran segmentasi pembaca dalam menarik keuntungan atau peningkatan oplah, dapat kita lihat ketegasannya dari penjelasan *Radar Depok* berikut ini:

*"Tapi memang, emm... kalaupun... emm... kalaupun ada yang memberitakan lebih begus soal kebijakan, itu pertama soal kebijakan pendidikan, yang kedua PNS. Itu yang memang mendominasi di halaman pertama. Setiap ada kebijakan PNS, kemudian pendidikan, kemudian... pendidikan itu termasuk sekolah ya... kalau PNS itu lebih ke pegawai-pegawai di luar dinas pendidikan... Tapi, kebijakan nasional ya, yang memang berdampak nanti ke lokal, kayak isu ke-PNS-an, kemudian isu Dinas Pendidikan... isu pendidikan, sori! Yang ketiga itu peristiwa... Itu yang tiga isu yang memang sangat laku dijual di masyarakat Kota Depok. karena memang porsi utama kita pembacanya sekarang PNS kebanyakan... dari guru... kayak misalkan, isu pengangkatan honorer K1, itu kita naik drastis... pengangkatan... dan ini memang nggak... nggak... nggak dicermati kompetitor... kompetitor tetap maksain yang peristiwa... kalau kita punya pandangan lain... ketika... makanya kita terus mantau Badan Kepegawaian Nasional, setiap ada kebijakan baru, kita ekspose habis-habisan di halaman satu. Itu memang laris... itu kan banyak... karena memang kita sadar pembaca kita... kita sekarang di dalam emm... masih menyasar PNS dan guru-guru... setiap ada kebijakan dari Kementerian Pendidikan Nasional, soal itu Dana Bos, pencairan dana Pakut,*

---

193. Data wawancara dengan redaksi *Kabar Banten*.

*kita naikkan di halaman satu, karena itu sangat laris dijual di masyarakat. Untuk yang peristiwa ya, kita punya ketiga lah... Pertama jelas soal PNC, kedua soal guru atau tentang kebijakan Kemendiknas, ketiga soal peristiwa. Untuk politik, kita kurang...*<sup>194</sup>

Pada dasarnya, keputusan sebuah perusahaan media untuk menentukan segmentasi pembacanya adalah hak bagi mereka dalam mengelola perusahaannya tersebut. Bagaimana pun, kebutuhan untuk dapat bertahan (survive) yang akhirnya mengacu pada peningkatan keuntungan bagi perusahaan merupakan logika yang tidak dapat terelakkan dalam ruang lingkup kerja industri. Akan tetapi, yang menjadi perhatian bagi AKUMASSA ialah apakah cara kerja yang mengutamakan keuntungan tersebut dapat beriringan secara seimbang bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat akan informasi yang sehat?

Pada kasus yang ditemukan dalam penelitian ini, AKUMASSA mendapati bahwa umumnya isu *good governance* menjadi perhatian utama media massa lokal karena berita-berita yang demikian cukup banyak diminati oleh para pembaca (terlebih lagi karena segmentasinya adalah lingkungan PNS). Namun kenyataan lainnya, berdasarkan wawancara AKUMASSA, kebutuhan kalangan PNS terhadap informasi tersebut dilatarbelakangi pula oleh kepentingan untuk kemas citra pejabat atau politikus di mata masyarakat, atau untuk menarik para pemasang iklan. Pada prakteknya, dominasi berita yang berbau *advertorial* atau berita pesanan menjadi tinggi. Ada semacam perselingkuhan antara pelaku media massa dengan para pejabat lokal atau politikus demi kepentingan komersil ini.

Sebagaimana yang kita tahu dari penjelasan beberapa redaksi, seperti *Banten Raya Post*:

*“Kalau menurut saya, sih oplah gak begitu... memang ada kadang pesen koran, tapi kita fokusnya lebih ke iklannya. Paling berapa peningkatannya. Paling pesen, kadang-kadang, dia pesen seratus-dua ratus. Memang, ya ada, tapi gak begitu. Kalau di kita oplah gak begitu menghasilkan, kalau iklan lebih gede. Memang kadang-kadang kita diharuskan karena dia juga jualan untuk konstituen. Tolong kasih koran untuk kenang-kenangan. Nah, biasanya mereka sebar-sebar, tapi gak begitu banyak. Nih, calon kan ngundang kita, nih dia ngundang masyarakat, dia, kan butuh publikasi, nah biasanya kita tawarin, ‘Pak, mau koran gak disebar untuk konstituen Bapak?’”*<sup>195</sup>

194. Data wawancara dengan redaksi *Radar Depok*.

195. Data wawancara dengan redaksi *Banten Raya Post*.

Pada pernyataan lain, *Banten Raya Post* mengakui lebih jauh:

*“...dan biasanya, memang di kita, selain jual koran, kan, kita jualan iklan. Kita sebenarnya kalau jualan koran itu, kalau menurut saya, koran itu, kan koran yang memenuhi keinginan pembaca, ya... kita ikuti aja, sih. Sebenarnya, trend-nya sekarang pemasang iklan mengarahnya ke sana. Nah, kalau sekarang, kalau politik, ya... kita perbanyak ini... politik itu, lho!”*<sup>196</sup>

Dan pada pernyataan berikutnya, yakni:

*“Pengamatan saya koran lokal itu penghidupannya masih bergantung pada pusat pemerintahan (pemerintah lokal-ed). Karena kalau dilihat kebanyakan pemasang iklan itu dari pemerintahan, kalo koran lokal. Gitu, kan, kalo dianalisis itu, gak bisa jauh jaraknya, iklannya masih berisi SKPD-SKPD, jarang iklan produk itu. Kalo produk-produk itu masih tertarik pasang iklan di koran nasional. Nah beda kalo Poskota di Jakarta, atau Lampu Merah karena mereka punya segment sendiri. Kalo kita koran umum memang susah nyari segmennya. Terus makanya saya bikinlah komunitas-komunitas, parade fot. Nah orang-orang sini masih suka. Karena saya punya pikiran, apa yang diinginkan pembaca, saya usahakan di koran itu ada.”*<sup>197</sup>

Berdasarkan jawaban dari redaksi *Banten Raya Post* tersebut, terlihat jelaslah alasan pemuatan berita atau informasi yang berhubungan dengan tema politik (isu *good governance*), di mana pelaku media massa mengikuti *trend* iklan, bukan berdasarkan pemahaman tentang kebutuhan masyarakat akan informasi yang semestinya.

Hal ini, secara eksplisit diakui pula oleh *Tangsel Pos* yang beroperasi di wilayah Tangerang Selatan, yang mana mereka menyatakan bahwa ada kontrak kerja antara mereka dengan pemerintah lokal:

*“Misalkan dalam setahun itu, pasti ada kontrak kerja sama iklan, dalam bentuk advertorial. Yang seperempat halaman atau setengah halaman, dan dari situ ada nilai komersilnya. Mungkin, dari situ lah diselipkan ada klausulnya,*

196. *Ibid.*

197. *Ibid.*

*pasti ada MoU-nya, tidak hanya kontrak kerja sama secara lisan saja, tapi juga ada dalam bentuk MoU untuk memperkuat ikatan itu.*<sup>198</sup>

*Pada contoh di kota lain, seperti Jakarta, misalnya, redaksi Warta Kota dan Berita Kota memeberikan penjelasan sebagai berikut:*

*“Kita ini beda, ada beberapa yang tidak bisa disebutin, bahwa koran itu semua kebijakan pemberitaannya hanya untuk satu calon. Kita tetap independen menyajikan berita yang seimbang. Pilkada bagi media sekarang, terutama print, tidak seperti dulu. Kalau dulu, bisa menaikkan oplah. Tahun 2007 itu. Tapi sekarang tidak sama sekali, tidak ada pengaruhnya apa pun. Makanya, dalam Pemilu pada di Jakarta kemarin, kita tidak terlalu bombastis menjadikan Pemilu pada ini sebagai momen untuk pemberitaan segala macam Pilkada. Karena, kita menyadari tidak ada apa-apanya sama sekali. Dari mulai putaran pertama, kita udah liat, kan, kita selalu ada survey bulanan, survey kios, survey pembaca. Tiap hari, tuh, ada, ‘Pak, bagaimana HL hari ini?’... ‘Berita hari ini, apa yang kurang?... minimal dua puluh pembaca. Dan Pemilu pada sama sekali enggak. Makanya kita paling, Pemilu pada itu untuk kita manfaatkan untuk menarik iklan. Gak ada hebohnya Pemilu pada menaikkan oplah menjadi sekian.’<sup>199</sup>*

Dan tambahan pernyataan redaksi di bawah ini semakin menegaskan bahwa media massa lokal mengikuti *trend* pengiklan:

*“Memang kita akui, misalnya, ada undangan dari mereka. Misalnya si A lagi ada di mana, gitu. Biasanya, kebijakan si A itu, kita naikin di atas, sisanya si B, si C. Tapi, tetap kita menghadirkan semuanya.”<sup>200</sup>*

Demikian juga terjadi untuk wilayah Depok. Penjelasan dari *Radar Depok*, misalnya, yang bertahan pada argumen bahwa mereka tetap menghadirkan berita-berita *cover both side*, mereka tetap mengakui bahwa untuk mengapresiasi kinerja pemerintah yang positif, *Radar Depok* menerima pemuatan berita yang bersifat advertorial.<sup>201</sup> Sama halnya yang terjadi pada *Monitor Depok*, yang

secara lebih eksplisit menyatakan bahwa berita pesanan cukup berperan dalam peningkatan oplah:

*“Itu di luar order, ya... jadi, kan ada order... pesanan dari si narasumber yang kita wawancarai... misalkan, mereka membikin kegiatan berbenah kampung, bersih-bersih. Saya, misalkan, mau pesan koran, dong 50 eksemplar... nah, itu di luar 3500. Berarti ada tambahan lagi. Dan itu... nggak setiap hari seperti itu, kadang-kadang saja.”<sup>202</sup>*

Selain itu, bagi *Monitor Depok*, berbeda dengan penjelasan *Warta Kota* dan *Berita Kota*, justru berita-berita yang berhubungan dengan tema Pilkada memberi pengaruh pada efek penjualan. Sebagaimana yang mereka nyatakan:

*“...yang berita terkait Pilkada, kisruh Pilkada Depok, itu jam 5 udah habis. Dicari-cari di mana-mana, nggak ada. Laporan orang sirkulasi ke saya, koran bukannya nggak ada, tapi abis. Mereka lapor pada berisik, nanyain masih ada nggak Monde? Gitu.”<sup>203</sup>*

Dan *Monitor Depok* menyatakan pula bahwa penempatan artikel berita tersebut ialah di halaman depan: *“Halaman depan. Karena, kan emang etalase kita, kan, jualan kita, kan di halaman pertama.”<sup>204</sup>*

Dari beberapa sampel pernyataan redaksi media massa lokal yang berbeda-beda ini, meskipun tidak semua ketujuhbelas koran lokal yang jadi subjek penelitian, dapatlah kita sebuah gambaran bahwa mendominasinya isu *good governance*, mengalahkan proporsi isu yang lain, ternyata juga disebabkan oleh kepentingan komersil tersebut.

Penjelasan-penjelasan dari para redaksi media massa lokal ini, semakin diperkuat dengan keterangan dari sebuah komunitas di Lebak, yakni Saidjah Forum, yang menjelaskan bahwa para pelaku media massa lokal di Banten, memang lebih mengutamakan kepentingan komersil ketimbang tanggung jawab pekerjaannya.

Fuad Fauzi, salah seorang anggota Komunitas Saidjah Forum, yang sempat menjadi aktivis mahasiswa dan wartawan lokal, menceritakan pengalaman-pengalamannya mendapati kebiasaan para pelaku media massa lokal yang selalu

198. Data wawancara terhadap redaksi *Tangsel Pos*.

199. Data wawancara terhadap redaksi *Warta Kota* dan *Berita Kota*.

200. *Ibid.*

201. Data wawancara terhadap redaksi *Radar Depok*.

202. Data wawancara dengan redaksi *Monitor Depok*.

203. *Ibid.*

204. *Ibid.*

memanfaatkan kesempatan dalam kesempatan. Menurut Fuad, bahkan kehadiran Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Banten, secara struktural, justru melestarikan aktivitas KKN di lingkungan kewartawanan, yang menjadi semacam “*press room* tempat berkumpulnya penjabat pemerintah”, di mana para wartawan memanfaatkan akses tersebut justru untuk menarik keuntungan-keuntungan pribadi, bukan sebagai celah untuk mendapatkan informasi yang sehat bagi penyajian berita di media massa lokal mereka.<sup>205</sup>

Masih dalam pembahasan mengenai alasan kepentingan komersil, kita kembali kepada pengaruh kepemilikan terhadap kebijakan redaksi dalam memuat pemberitaan, khususnya isu *good governance*. Pada beberapa contoh, hasil wawancara AKUMASSA terhadap beberapa redaksi, diketahui bahwa karena alasan kepemilikan dan menjaga citra perusahaan, *owner* melakukan intervensi terhadap keputusan redaksi dalam mengemas isi beritanya.

Kita lihat contohnya pada media massa lokal di Depok. Kasus ini memang tidak masuk dalam data selama rentang waktu empat bulan yang menjadi bahan analisis kuantitatif, tetapi dapat dijadikan sebagai penjelasan tambahan mengenai kepemilikan sebuah media massa. Pantauan AKUMASSA dalam program Rekam Media terhadap isi berita tiga media massa lokal di Depok, pasca durasi empat bulan pertama, terlihat pertarungan informasi sehubungan dengan sebuah kasus lokal mengenai kisruh Pilkada Depok tahun 2010. Salah satu media massa, *Jurnal Depok* secara gencar dan terus-menerus memberitakan kecacatan Walikota Depok yang menduduki jabatan ‘haram’ karena kecurangan yang terjadi pada Pilkada tahun 2010 tersebut. Berbeda pada dua koran lainnya, *Monitor Depok* dan *Radar Depok*, intensitas pemberitaan mengenai kisruh ini, bisa dibilang, sangat sedikit. Isu-isu *good governance* yang muncul justru bukan terkait kehebohan kontroversi Pilkada tahun 2010. Menanggapi perkembangan ini, AKUMASSA melakukan wawancara kepada *Monitor Depok* dan *Radar Depok*. Berdasarkan jawaban tersebut, dapat diindikasikan adanya pengaruh *owner* dalam keputusan apakah harus memberitakan kasus kisruh Pilkada 2010 atau tidak.

*Monitor Depok*, yang mana pemiliknya adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerindra Kota Depok, yang juga pemilik perusahaan minyak kelapa sawit, PT Guna Bhakti Pertiwi, dan juga menduduki jabatan penting dalam beberapa organisasi kemasyarakatan lainnya di Depok, Pradi Supriatna, memiliki penjelasan tersendiri mengapa intensitas pemberitaan tentang kasus ini sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh posisi Pradi Supriatna sebagai mantan

calon walikota yang dicoret pada Pilkada Kota Depok tahun 2010, memunculkan semacam komitmen di jajaran redaksi *Monitor Depok* untuk tidak terlalu menyorotinya dan memilih lebih berhati-hati demi kepentingan citra *owner*, karena untuk Pilkada selanjutnya, Pradi Supriatna kembali maju ke pertarungan politik lokal di Depok. Sebagaimana redaksi *Monitor Depok* menyatakan:

*“Kita di redaksi punya komitmen, ini juga kita dari pemimpin redaksi... karena... saya ungkapin lagi... pemimpin umum kita ini, kan salah satu kandidatnya... salah satu kandidatnya...”*<sup>206</sup>

Lantas menjelaskan lebih jauh tentang sikap redaksi:

*“Kalau kita, Monde, sih menyesuaikan aja... istilahnya, kalau angin ke Timur, kita ke Timur, ke Barat kita ke Barat, Selatan kita ke Selatan. Jangan urusan pilkada ini... karena ini memang udah kelar gitu... jadi dengan ini kita gak setiap hari memunculkan... pembaca juga bosan lah... ini kapan diulangnya... judulnya ini-ini mulu... gitu... kapan diulangnya... kita kalau ada aksi aja... yang kayak kemarin yang ke Mendagri itu, kita muat.”*<sup>207</sup>

Sementara itu, pada *Radar Depok*, yang bagaimana pun telah menyatakan berdiri secara independen, tetapi kehadiran dan kemandiriannya sebagai salah satu surat kabar lokal di Depok tidak bisa lepas dari pengaruh terpilihnya Nur Mahmudi sebagai Walikota Depok di Pilkada 2010 itu, sikap yang mereka tunjukkan terjelaskan oleh pernyataan pihak redaksi, yakni:

*“...kita berhati-hati dalam memberitakan. Ketika ada kepastian hukum yang jelas, kita naikkan. Termasuk soal Pilkada ulang. Kita punya sikap. Kita punya sikap soal Pilkada ulang. Ketika nanti... kita berpatokan pada keputusan MK. Ketika MK menggugat hasil Pilkada, Pilkada ulang, baru kita naikkan jadi Pilkada Ulang. Kita kenapa tidak mengakomodir putusan MA menjadi Pilkada Ulang, buktinya mana sampai sekarang? Ada gak Pilkada Ulang?..”*<sup>208</sup>

205. Hasil wawancara dan FGD dengan Komunitas Saidjah Forum, di Lebak, Banten.

206. Data wawancara dengan redaksi *Monitor Depok*.

207. *Ibid.*

208. Data wawancara dengan redaksi *Radar Depok*.

Dan sikap ini, secara jelas dipengaruhi oleh peran *owner*, dinyatakan oleh pihak redaksi, sebagai berikut:

*“Owner ya... kalau sejauh ini, sih tidak begitu... ini ya... Pimred juga gak begitu ikut campur soal keredaksian. Karena dia... tapi, emm... dia lebih ke komunikasi yang... ke teman-teman redaksi ya... terutama isu-isu politik, jelas... dia punya... punya andil lah... tapi tetep brainstorming... kita semua kumpul, gimana sikap kita. Termasuk soal Pilkada ulang tadi. Kita punya sikap. Dia punya sikap soal menyikapi Pilkada ulang. Mungkin Jurnal (Jurnal Depok-ed) agak serampangan, karena mereka berada di oposisi. Kita punya sikap jelas... isu-isu politik, ya... isu-isu politik, jelas... Pimred punya porsi yang... emm... porsi yang sedikit ini, ya... punya... punya... punya ruang lah buat menyampaikan aspirasi dia. Tapi jelas, dia tidak punya kewenangan untuk merubah. Yang jelas, kita semua redaktur, masalah dapurnya. Dia hanya kasih saran.”<sup>209</sup>*

Meskipun intervensi langsung *owner* yang demikian hanya terjadi dalam konteks kasus-kasus tertentu, secara umum kepemilikan perusahaan media massa lokal oleh elit tertentu tetap mempengaruhi kebijakan-kebijakan redaksi; memang tidak secara langsung, melainkan lebih kepada hubungan yang bersifat hirarkis antara perusahaan cabang dengan perusahaan pusat.

Kita lihat contohnya pada wilayah Jakarta, di mana *Berita Kota* dan *Warta Kota* dimiliki oleh Kompas Gramedia. Awak media massa kedua surat kabar ini berpendirian bahwa sebagai perpanjangan bisnis dari Kompas Gramedia, yang memiliki segmentasi pembaca pada kelas menengah ke bawah, pengemasan konten dari terbitan surat kabar *Warta Kota* dan *Berita Kota* berbeda dengan kualitas konten Harian *Kompas*-nya sendiri. Permasalahannya, tafsir si media massa lokal atas kelas menengah ke bawah ini ditunjukkan dengan memandang sebelah mata kemampuan daya tangkap masyarakat pembacanya; redaksi, melalui terbitannya, menguatkan stereotip terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah sebagai kalangan berpendidikan rendah dan percaya pada hal-hal berbau klenik, lantasmengaplikasikannya dengan pemuatan berita-berita dengan narasumber yang tidak kredibel dan rasional, seperti paranormal.

Hal ini ter jelaskan sebagaimana pernyataan redaksi *Warta Kota* dan *Berita Kota*:

209. *Ibid.*

*“...kenapa pilih paranormal, bukan pengamat politik? Pengamat politik itu normatif. Masyarakat jenuh terhadap politik, paranormal itu terserah, mau jadi apa nggak. Justru itu yang naikin kita. Kita tetap cetak segitu, tapi lebih cepat habis. Jadi, kesimpulan kita, meski mungkin kebenaran masih dipertanyakan, tapi itu faktanya. Masyarakat, jika dicekoki berita politik benar secara ilmiah, tapi kenapa orang lebih percaya paranormal? Karena mereka memprediksi perdagangan, property yang menarik untuk pembaca pada tahun selanjutnya. Nah, orang, kesini, begitu kita turinin ramalan itu dari ahli tarot, atau indigo, malah ada orang yang nelpon redaksi minta nomor telpon paranormal itu. Jadi, kalau pengamat politik, biarlah itu porsi Kompas. Kalau kita ikut itu lagi, ya lebih bagus Kompas. Jadi, kita sadar diri. Kalau kita, misalkan, tentang politik yang seperti itu, kita gak akan sanggup.”*

Berdasarkan pernyataan redaksi tersebut, kita kembali melihat adanya kepentingan komersil yang berada dibalik motif penyajian sebuah informasi kepada masyarakat. Kita bisa menginterpretasikan bahwa *Warta Kota* dan *Berita Kota* menjadi mesin pengeruk uang (keuntungan dan akumulasi modal) dengan memanfaatkan label masyarakat kelas menengah ke bawah yang minim pendidikan dan wawasan. Tindakan dari media massa yang seperti ini justru menguatkan sugesti bagi masyarakat bahwa hal-hal berbau klenik adalah sesuatu yang perlu dikonsumsi. Alih-alih menyadarkan masyarakat, media massa lokal (*Warta Kota* dan *Berita Kota*) justru lepas tangan terhadap tanggung jawab sosialnya untuk memberikan informasi yang sehat karena menganggap bahwa sudah ada media massa yang lebih mapan (yakni Kompas) dan lebih layak menyajikan informasi yang sehat tersebut.<sup>210</sup>

Selain itu, yang lebih memprihatinkan, Kompas Gramedia Group terkesan tendensius untuk mendulang keuntungan yang lebih besar dengan membangun dua redaksi media massa lokal yang dikelola oleh satu jajaran kru yang sama. Layaknya prinsip ekonomi kapital, “pengorbanan sekecil-kecilnya demi keuntungan tertentu atau pengorbanan tertentu demi keuntungan yang maksimal”; Kompas Gramedia Group melalui kebijakan redaksi *Warta Kota* dan *Berita Kota*, menekan pengeluaran sekecil-kecilnya dengan memaksakan sumber daya jurnalis yang terbatas untuk mengelola dua keredaksian yang berbeda.

Sebagaimana penjelasan panjang lebar dari redaksi yang bersangkutan, yakni sebagai berikut:

210. Berdasarkan data wawancara dengan redaksi *Warta Kota* dan *Berita Kota*.

“Sekarang mungkin, kalo anda orang media juga ya, kan kita mungkin sependapat kalau berita, atau peristiwa segala macam, 70 persen yang tayang di televisi, online, print sama. Hanya 30 persen nya yang beda, menurut saya. Nah Warta Kota dan Berita Kota, itu satu kantor yang sama wartawannya juga sama. Memang duplikasi terhadap pemberitaan yang sama itu tidak bisa dihindari, karena apa, krunya juga sama. Cuma sekarang kita upayakan pelan-pelan, karena emang sih kita pengalaman mengelola koran dalam satu kantor baru sekarang, pertama kali. Dan sejarahnya Warta Kota dan Berita Kota berada di posisi kelas menengah. Dan tu sebelum kita akuisisi berita kota itu sama levelnya di tengah. Jadi kalo kita kelaskan di A atau C, kalo Kompas, kan kelas A. Nah sekarang kita coba bedakan, nah kita paham lah, bahwa kalo diluar kita kenal dengan namanya wts (wartawan tanpa sk) nah kalo di sini, berita kota itu stw (sk tanpa wartawan). Jadi wartawannya sama dengan WK. Tapi yang membedakan sekarang, BK kita arahkan kepada politik dengan kriminal dan olahraga. Sedangkan WK, peristiwa, olahraga, hiburan. Nah kalo kita lihat di halaman satunya, jelas akan beda. Bahwa BK lebih ke politik, WK lain. Tapi kalo halaman dalamnya belum kita bisa atasi, tapi bagaimanapun juga kita bersyukur nih, tapi kita survei sejauh mana duplikasi antara BK dan WK itu 20 persen. Berarti yang membaca Warta Kota da berita kota hanya 20 persen, yang lainnya belum. Jadi sisanya baca Warta Kota saja atau baca Warta Kota saja. Nah itu kita percaya bahwa masih lebih banyak orang yang baca korannya Berita Kota saja atau Warta Kota saja. Karena dari hasil survei itu kita tidak melihat adanya duplikasinya itu di atas 50 persen. Kalo di atas 50 persen kita tutup atau ubah beneran. Nah, sekarang tren Berita Kota trennya terus menaik. Kalo Warta Kota 150.000 berita kota itu udah 62.000. Pasarnya memang Berita Kota cuma Jakarta. Kalo Warta Kota menggunakan 150 sub agen, BK cuma 60 sengaja kita batasi. Kalo ini kan di los semua, kalo ini kan sedikit. Nah dari sisi pemberitaan kita akui banyakan sama, bahwa 70 persen berita yang terjadi itu kan sama. Misalnya di tv ada penjabretan, di BK ada, di WK ada, di poskota ada, nah hanya penyajiannya aja. Yang harus kerja di BK/WK itu editornya aja. Untuk merubah angel, segala macam. Sementara sumbernya sama, ya kita masih percayalah. Tapi tahun ini kita akan menggunakan Berita Kota itu dengan metode baru. Kita melihat di sebuah surat kabar di Korsel sekarang oplahnya menurun, itu karena terganggu oleh internet. Surat kabar ini maju, kenapa? Karena dia menggunakan 80 persennya itu bukan dari karya wartawan, tapi dari karya pembacanya. Nah sekarang kita lagi melatih 90 orang pembaca untuk dijadikan narasumber, jadi dia akan mengirim setiap hari informasi dari lokasinya, misalnya dari rumah ke sekolah, ke pasar, ke kantor, ada kejadian

apa. Kalo ada yang bagus, kita muat kita hargai itu. Nah kalo berita itu bagus dan segala macam, peristiwanya besar, baru kita kirim wartawan. Tahun depan akan dicoba di Berita Kota, 2013.”<sup>211</sup>

Dua contoh kasus pada dua wilayah lokal ini, memang, tidak dapat dijadikan dasar untuk menggeneralisir semua media massa lokal yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Namun begitu, pembahasan terkait dengan dua contoh ini, sedikit-banyak, memberikan kita gambaran tentang efek negatif dari perpanjangan tangan sebuah perusahaan ke wilayah-wilayah lokal. Bagaimana pun, dapat dilihat pula alasan lain terkait hal ini, yang menyatakan bahwa sinergi media juga cukup berperan dalam strategi efisiensi percepatan informasi dengan menekan pengeluaran yang terlalu berlebihan. Hal itu dilakukan oleh Radar Jember sebagai bagian dari Jawa Pos News Network (JPN) milik Dahlan Iskan. Redaksi Radar Jember menyatakan manfaat sinergi media dalam kerja media massa lokal untuk:

“Saling memberikan informasi yang bagus. Misalkan di Jember. Loh, ada ini... Ada ini... Kadang Jawa Pos meminta Radar untuk membuat liputan untuk Jawa Pos. Oh ada berita bagus, misalkan ada seseorang yang memegang jabatan banyak, oh di sana ada isu bom, misalnya bali. Jadi Jawa Pos menghubungi Radar Bali untuk minta liputan, kemudian hasil liputan yang di radar bisa ditayangkan juga di Jawa Pos.”<sup>212</sup>

Melalui kerja jaringan yang demikian, jaringan JPNN tetap memiliki kontrol terhadap jalannya arus informasi kepada masyarakat. Sebagaimana penjelasan lanjut dari redaksi Radar Jember:

“Kecepatan informasi. Jadi kalau kemudian Jawa Pos harus ke Bali, atau salah satu, jadi dengan dibentuknya jaringan JPNN untuk itu, kecepatan informasi. Jadi kalau Jawa Pos harus ke Bali butuh waktu, nanti kejadiannya sudah habis. Jadi kalau .... Di Bali-nya tinggal kirim saja. Itulah kegunaan JPNN namanya, Jawa Pos News Network.”<sup>213</sup>

211. *Ibid.*

212. Data wawancara dengan redaksi Radar Jember.

213. *Ibid.*

Strategi ini merupakan sebuah langkah untuk menekan biaya pengeluaran yang berlebihan yang seiring pula untuk menjaga kualitas yang diinginkan untuk masyarakat:

*“Ya bisa jadi efisiensi. Namanya perusahaan, butuh efisiensi. Kalau mengirim, biayanya berapa. Tapi terutama bagi saya sebagai redaksi, mempercepat informasi kepada masyarakat. Selain biaya, kalau biaya kan mesti ditanggung. Itu hubungannya lain, bidangnya bagian keuangan.”<sup>214</sup>*

Hubungan kerja jaringan seperti ini, dalam JPNN, tetap dijaga kesinambungannya. Meskipun bukan dalam bentuk intervensi langsung (dalam pengertian harfiahnya), kontrol terhadap media massa lokal-media massa lokal atau anak-anak perusahaan dilakukan melalui rapat evaluasi bersama. Hal itu dijelaskan oleh redaksi *Radar Jember*, yakni:

*“Kalau di Radar kita bikin kebijakan sendiri dalam redaksi sendiri. Tapi dalam rapat triwulan di redaksi, termasuk Jawa Pos. Jadi kita evaluasi semuanya. Jadi berita-berita yang ditayangkan di Radar, kita kumpul bersama di Jawa Pos. Kita ada rapat triwulan. Untuk evaluasi masalah perusahaan, evaluasi masalah keuangan, persoalan iklan, marketing koran, juga redaksi. Jadi kita ada rapat rutin di Jawa Pos untuk menyamakan, agar kualitas berita-berita di daerah kualitasnya tidak jauh beda dengan yang ada di Jawa Pos. Makanya gaya-gaya bahasanya itu kan hampir sama Radar dengan Jawa Pos. Jadi sama bahasanya, cuma memang butuh terus dilakukan pelatihan di tingkat daerah untuk menyamakan kualitas antara Radar dengan Jawa Pos.”<sup>215</sup>*

Melalui jabaran-jabaran ini, AKUMASSA melihat bahwa tingginya dominasi isu *good governance* di sajian informasi media massa lokal-media massa lokal tersebut bukanlah atas dasar kebutuhan masyarakat lokal yang sesungguhnya, melainkan atas dasar asumsi yang dibangun oleh media massa lokal yang bersangkutan, yang difaktori oleh kepentingan-kepentingannya sendiri: menarik profit, mempertahankan pengaruh, dan memapankan kontrol atas informasi itu.

Menanggapi ini, AKUMASSA memiliki *standpoint* bahwa kepentingan komersil adalah sesuatu yang harus ditolak dalam ranah kerja jurnalistik yang ideal. Kalaulah memang harus tetap ada, dia bukanlah menjadi tujuan yang utama.

---

214. *Ibid.*

215. *Ibid.*

Sebagai sebuah kekuatan keempat dalam lingkungan bernegara, media massa memiliki kewajiban mutlak sebagai wadah pencerdasan masyarakat. Dengan kata lain, media massa itu juga perlu mengedepankan semangat literasi media atau keaksaraan media. Dan pada titik inilah, seharusnya, media massa lokal harus mengutamakan perspektif warga sebagai ciri khas yang membedakannya dengan media massa nasional. Namun, hal ini tidak terlihat pada cara kerja tujuh belas media massa yang diteliti oleh AKUMASSA.

Ketimpangan proporsi ke lima isu menjadi penegasan bahwa media massa lokal cenderung abai terhadap visi sesungguhnya dari sebuah media massa, yakni mencerdaskan masyarakat dengan menyajikan informasi yang seimbang serta beragam kepada masyarakatnya itu. Bagaimana pun, ketika sebuah media massa berdiri, baik dalam ruang lingkup nasional maupun lokal, segala macam strategi perlu dilakukan demi terpenuhinya tuntutan ini.

Sebelum kita bahas lebih jauh mengenai tiga isu yang umumnya minim mendapat perhatian, yakni HAM, perempuan dan/atau anak, dan lingkungan hidup, selayaknya kita juga melihat isu kriminalitas yang tidak dominan, tetapi tidak pula minim perhatian dari media massa lokal. Dalam penelitian ini, AKUMASSA menemukan bahwa keberadaan isu kriminalitas dalam representasi data kuantitatif dan kualitatif (laporan narasi dan hasil wawancara dengan redaksi) menjadi semacam suatu bidang yang pembicaraannya memang sudah selayaknya ada dalam kepala media massa lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa redaksi di wilayah Depok, Tangerang Selatan, Jakarta, Jember, dan Banten, AKUMASSA mendapati bahwa fluktuasi frekuensi isu kriminalitas tersebut terjadi begitu saja tanpa adanya tendensi-tendensi yang berangkat dari keputusan atau kebijakan redaksi yang khusus. Isu kriminalitas seakan menjadi sebuah isu yang ‘memang sudah sepantasnya ada’ dalam sebuah sajian media massa. Terlebih lagi, pemuatan berita dengan isu kriminalitas hanya didasarkan pada kepentingan untuk menjaga stabilitas oplah penjualan dan jumlah pembaca setia. Selain itu, penyajiannya pun tidak dihadirkan secara mendalam. Umumnya, pada subjek penelitian ini, AKUMASSA menemukan bahwa berita dengan isu kriminalitas tersebut dikemas dalam bentuk *straight news*. Namun juga, dalam banyak kasus, kebijakan redaksi menghidrarkannya secara hiperbolis melalui dramatisasi berlebihan atas peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tak pelak lagi, hal ini terjadi di kalangan media massa lokal semata-mata untuk kepentingan komersil.<sup>216</sup>

---

216. Berdasarkan wawancara dengan redaksi-redaksi di beberapa lokasi pemantauan Rekam Media.

Meninggalkan isu *good governance* dan kriminalitas ini, kita sampai pada pertanyaan mengapa tiga isu sisanya mendapat perhatian yang sangat minim. Hal inilah yang akan dicoba untuk dijawab dalam pembahasan ini.

Tim AKUMASSA melakukan wawancara dengan Forum Lenteng, sebagai perwakilan komunitas di Jakarta, untuk melihat tanggapan mereka terhadap dua koran lokal *Warta Kota* dan *Berita Kota*. Akbar Yumni, salah seorang anggota Forum Lenteng yang juga merupakan seorang penulis dan mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Driyakara Jakarta, berpendapat bahwa kedua koran lokal tersebut umumnya hanya memberitakan peristiwa berdasarkan peristiwa yang terjadi saja, dengan sumber berita yang sama dan hanya menjadi turunan dari berita-berita nasional. Hal ini, menurutnya, menyebabkan isu-isu yang termarginalkan, seperti perempuan dan HAM menjadi jarang diangkat oleh koran lokal tersebut. Khusus untuk masalah-masalah terkait HAM dan lingkungan hidup, kedua koran ini bahkan tidak menggunakan gaya Surat Kabar *Kompas* yang merupakan produk utama dari Kompas Gramedia Group, perusahaan induk *Warta Kota* dan *Berita Kota*, yakni gaya jurnalisisme damai dan aspek *second opinion* yang menjadi cara cerdas dalam mengemas informasi sehat kepada masyarakat.<sup>217</sup>

Berdasarkan hasil wawancara AKUMASSA dengan beberapa redaksi yang diambil sebagai contoh kasus, persoalan kurangnya sumber daya manusia (SDM) jurnalis untuk menghimpun informasi secara seimbang dari ke lima isu tersebut, adalah salah satu penyebab utama mengapa proporsi isu HAM, perempuan dan/atau anak, serta lingkungan hidup terbilang minim. Contohnya, sebagaimana penjelasan dari *Monitor Depok* tentang kebijakan redaksi mereka yang hanya memuat berita dengan isu perempuan dan/atau anak, berdasarkan peristiwa saja:

*“Untuk meng-cover... sejauh ini, ya... kita mengawal dengan pemberitaan aja... mengawal dengan pemberitaan. Kalau untuk investigasi, kayak saya katakan tadi, belum ada yang seperti itu.”*<sup>218</sup>

Dengan kata lain, *Monitor Depok* sendiri memang belum menaruh perhatian yang besar terhadap isu tersebut:

*“Dan kami melihat, memang, sih Monitor Depok, kurang memperhatikan hal itu. Tapi, untuk saat ini, dengan adanya... ya kita mengikuti juga, mengikuti*

217. Hasil wawancara dan FGD dengan Forum Lenteng.

218. Data wawancara dengan *Monitor Depok*.

*perkembangan dari adanya seminar-seminar melalui dari pemerintah kota melalui Dinas Pendidikan itu, ya kita coba mengikuti bahwa isu-isu perempuan, isu-isu gender, di Kota Depok ini, sedang lagi... apa ya... dikembangkan lagi oleh pemerintah.”*<sup>219</sup>

Atau dalam pernyataan yang lain, tentang isu HAM:

*“Itu dia... itu dia... setiap redaksi mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda, ya... Mungkin Monde punya sudut pandang yang berbeda dengan Radar, dengan Jurnal... kenapa kita tidak memainkan HAM, ya... saya katakan tadi, kita menaikkan HAM itu ketika ada peristiwanya aja... ketika ada aksi kekerasan seperti marimir tadi, ketika ada ganti rugi hak-hak masyarakat yang tidak sesuai dengan seharusnya, nominalnya sekian toh Pemkot mempunyai sekian terkait pembangunan JPO dan segala macam, ya... masih sebatas sebatas dari hasil pendapatan pemberitaan dari wartawannya aja, gitu, mainkan isu HAM.”*<sup>220</sup>

Hal yang tak jauh bedanya, terjadi pula pada *Radar Depok*. Bagi surat kabar ini, isu perempuan dan/atau anak memang merupakan isu yang tak kalah penting untuk diperhatikan. Namun, mereka mengakui bahwa tidak tergarapnya isu tersebut secara optimal disebabkan karena kekurangan sumber daya, meskipun hingga sekarang ini Surat Kabar *Radar Depok* telah menyajikan dua rubrik, yakni tentang ibu dan anak, dan Rubrik Kartini, tentang perempuan-perempuan Depok yang inspiratif.<sup>221</sup>

Sementara untuk isu HAM, berbeda dengan *Monitor Depok* yang terkendala SDM, *Radar Depok* sendiri kembali pada alasannya tentang segmentasi pembaca. Misalnya pada contoh kasus demonstrasi buruh yang memperjuangkan hak upah minimum pekerja, *Radar Depok* mengaku bahwa tidak menaruh perhatian yang besar terhadap hal itu. Alasannya, sebagian besar perusahaan-perusahaan swasta yang beroperasi di Depok bukanlah dimiliki oleh orang-orang Depok. Atas pertimbangan inilah makanya isu HAM, terkait kesejahteraan buruh, kurang diperhatikan karena tidak akan diminati oleh pembaca lokal di Depok.<sup>222</sup> Sebagaimana terlihat pada penjelasan redaksi berikut ini:

219. *Ibid.*

220. *Ibid.*

221. Data wawancara dengan redaksi *Radar Depok*.

222. *Ibid.*

“Jelas, saya katakan, untuk soal buruh, kita tidak terlalu mengakomodir soal buruh. Pertama, buruh-buruh yang ada di Depok itu, persentasenya kecil warga Depoknya karena mereka itu warga luar... makanya kita... bukan menomorduakan, ya... mengesampingkan soal demo buruh di Depok... karena perusahaan-perusahaan yang ada di sini, itu sedikit warga Depoknya. Kalau kalian cari ke Dinaskersos, perusahaan-perusahaan di sini, hanya mengakomodir segelintir warga Depok. Jadi, nggak ngefek ke kita. Makanya, kita tidak terlalu... apa ya... mungkin koran kompetitor juga sama gitu... nggak begitu respect banget soal demo buruh. Paling kita beritakan UMP Depok naik sekian... untuk demo buruhnya ya... kita nyadar segmentasi pembaca kita. Kecuali, kita berada di, misalnya di Bogor... kalau Depok, jelas, nggak... kita nggak begitu... lebih menarik isu tadi: Dinas, PNS, pendidikan... jelas pembacanya. Untuk buruh, bukan kita tidak mengakomodir, kita melibatkan pengaruhnya seperti apa di Depok. UMP jelas berpengaruh ke setiap pekerja, cuma masalahnya pekerja Depok itu sedikit, walaupun ini banyak, pabrik di sini, cuma kecil persentasenya perusahaan yang mengakomodir warga Depok. warga Depok, kan... kerja kan di Jakarta, ya kan? Di sini, ya... kota singgah. Makanya itu pertimbangan kita kenapa tidak terlalu mempersir berita soal UMP, kecuali kalau nanti ada kebijakan radikal, boleh dinaikin.”<sup>223</sup>

Teruntuk isu lingkungan hidup, di wilayah lokal Depok sendiri, menjadi persoalan yang sangat penting. Bagi kedua redaksi *Radar Depok* dan *Monitor Depok*, yang sempat diwawancarai oleh AKUMASSA, perhatian mereka memang cukup tinggi, bahkan dengan menyajikan rubrik-rubrik dengan kemasan lokal, yang umumnya membahas tentang lingkungan hidup. Namun, lagi-lagi, keterbatasan SDM jurnalis yang kompeten dalam melaksanakan tugas investigatif, membuat masalah lingkungan hidup masih belum tergarap dengan baik.<sup>224</sup>

Yang terjadi di lokasi Banten tidak jauh berbeda. Tidak kompetennya SDM jurnalis ini terlihat dari pernyataan Fuad dari Saidjah Forum, bahwa dalam mengemas berita lingkungan hidup, misalnya kasus serangga tomcat, para wartawan hanya menunggu kesempatan atau panggilan dari oknum pemerintah lokal yang akan mengadakan penyuluhan tentang kasus tersebut. Fuad mengutarakan bahwa para pejabat yang ingin melakukan sosialisasi atau kunjungan melibatkan para wartawan untuk meliput, yang dengan kata lain, berita itu muncul atas permintaan pejabat sebagai strategi politik pencitraan, bukan atas

223. *Ibid.*

224. Data wawancara dengan redaksi *Radar Depok* dan *Monitor Depok*.

inisiatif wartawannya. Jika tidak ada panggilan dari pejabat yang bersangkutan, isu lingkungan hidup tak akan diangkat.<sup>225</sup>

Ketika SDM menjadi masalah, media massa lokal hanya bergantung pada isu-isu yang didapat berdasarkan peristiwa yang sedang terajadi. Hal ini seolah ditegaskan oleh penjelasan dari *Kabar Banten*, yakni:

“Sebenarnya, ya lingkungan hidup, ketika tidak ada peristiwa, ketika tidak ada... misalnya... ada apa... ada pencemaran, itu memang agak kurang menarik buat media itu. Tapi, ketika misalnya kan... ini juga lingkungan kan... ketika salah satu sungai misalnya sudah tercemar dan mengganggu masyarakat, emm... apa... Mengganggu masyarakat yang ada di hilir, sangat menarik juga. Memang, tidak segenar... apa namanya... pemberitaan soal hukum, dan good governance itu. Nah, tapi memang ketika ada peristiwa, kayak... apa... memang harus ada peristiwa, kita tetap menyoroti itu. Tapi kalau misalnya tidak ada... apa... katakanlah... sebenarnya, kan setiap hari juga lingkungan ini terganggu, apakah oleh knalpot motor, gitu kan, atau AC yang terlalu banyak, nah, itu ketika tidak ada peristiwa, kita agak... agak... kurang... kurang untuk memantau itu. Tetapi, ketika ada peristiwa, kita liput sampai habis. Kayak... apa namanya... pengerukan pasir di Pantura, itu... salah satunya karena mungkin didukung media, artinya media juga cukup proaktif terhadap masalah itu, akhirnya, emm... apa... penambangan yang melibatkan perusahaan besar, mungkin, ... berhenti. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin, penambangan pasir di Pabuaran, itu juga karena memang isu itu sangat besar, dan akhirnya dihentikan oleh pemerintah kabupaten.”

Hal yang lebih menyedihkan terjadi untuk wilayah Jakarta. Bukan karena alasan tertentu, seperti kekurangan SDM, misalnya, redaksi *Warta Kota* dan *Berita Kota* secara gamblang menyatakan bahwa mereka memang tidak menaruh perhatian terhadap isu perempuan dan/atau anak dan isu HAM. Sebagaimana penjelasan mereka yang dikutip berikut ini:

“Kita tuh tidak terlalu ini ya kalau soal HAM, kita hanya mengangkat persoalan yang memang hal itu sedang di bahas banget. Menurut saya sih persoalan ham di sini hampir sama lah, ya, dengan daerah lain, ada habib-habib yang di ini.... Sekarang paling tidak ada soal yang kita soroti soal kemerdekaan beragama atau beribadah bagi beberapa, yang sekarang seperti yang terjadi di

225. Hasil wawancara dan FGD dengan Saidjah Forum.

*Bogor, di Bekasi, paling itu yang kita angkat. Dan itu yang faktualnya ada. Tapi kalo yang tidak terlalu ini, kita enggak terlalu sampai di situ. Kita yang sedang in saja, yang sedang dibahas orang, sedang dbutuhkan orang, dan kita anggap itu menarik, dan itu penting, kemudian menurut kaca mata kita itu laku jual, itu kira-kira begitu. Ujung-ujungnya emang, kita kan namanya bisnis, habaha.... Jadi misalnya kita ada persoalan nih, soal parkir. Kita bahas dari mana, kita garap yang bener, supaya tulisan itu menjadi menarik, penting, kemudian laku dijual, udah gitu aja. Tapi kalo menarik aja, kemudian penting aja, dan gak laku dijual, percuma juga. Jadi akhirnya, kita kemas sedemikian rupa garapan-garapan kita sehingga kalau kita sajikan ke masyarakat itu bisa diterima begitu.”<sup>226</sup>*

Demikian pula untuk isu perempuan dan/atau anak. Dengan menyimak penjelasan di bawah ini, semakin terlihat jelaslah bahwa perhatian awak media massa lokal di Jakarta (Warta Kota dan Berita Kota) terhadap isu tersebut sangatlah kurang.

*“Gini ya, kita nih sebagai orang media, melihat wanita ini sebagai, selalu kita kaitkan dengan policy berita, bukan dari sisi peranan wanita di luar peranan itu ya, peranan wanita dari sisi gender, enggak begitu kita. Kita melihat bahwa, wanita ini, kalo sangat penting bagi kita untuk kita jadikan atau kita angkat sebagai bahan jualan kita. Sedikit tapi. Kenapa? Karena pembaca Warta Kota itu, dari hasil survei sebagian besar adalah wanita. Yang selanjutnya, kita pahami atau kita maklumi, bahwa yang megang duit itu adalah wanita, sehingga kita harus dalam kebijakan pemberitaan kita harus tidak boleh menyimpang dari, menyakiti hati merekalah (perempuan). Jadi kita harus mengangkat mereka, memberikan porsi yang besar terhadap apa yang mereka butuhkan. Misalnya begini, mengapa kita hmmm....kaya resep masakan, terus kemudian kisah sukses perempuan, terus kemudian kalau dalam sisi pemberitaan kriminal atau yang menyangkut apa kita gedein, itu karena kita memahami bahwa pembaca kita itu adalah terbanyak wanita di rumah-rumah, kan laki-laki paling liatnya cuma sport, olahraga, terus kemudian, tapi kalo wanita terutama yang tidak bekerja, banyak waktu dirumah selain masak, sinetron, dia juga baca koran. Nah itulah. Lalu kita fokuskan lagi, pilah-pilah lagi, ini apa nih yang dibutuhkan perempuan ini, selain resep masakan, selain fesyien, lalu ini... Ya mereka kan belanja, terus kita suguhkan ini loh, kita suguhkan pakaian yang*

*lagi tren tahun ini atau rambut yang lagi tren minggu ini. Terus kemudian, kita adakan interaktif dengan mereka, fokus grup, apakah berita yang kita sajikan itu sudah sesuai apa enggak.”<sup>227</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita lihat bahwa tidak ada keinginan yang kuat dari redaksi dalam menggarap isu perempuan dan/anak secara serius. Tenaga awak media massa, dalam hal ini jurnalis, tidak dikerahkan semaksimal mungkin untuk menghimpun informasi terkait isu tersebut secara layak untuk disajikan kepada pembaca.

Penjelasan dari Komunitas Saidjah Forum dapat menjadi contoh terkait hal ini. Menurut mereka, warga masyarakat Banten mendapat informasi tentang perempuan dan/atau anak bukan dari surat kabar lokal, melainkan dari televisi atau surat kabar nasional. Seperti pemahaman tentang Keluarga Berencana (KB), Rob, salah seorang anggota Saidjah Forum yang juga merupakan seorang dosen Bahasa Inggris, yang memiliki kesadaran melakukan vasektomi mengakui bahwa dirinya dan beberapa teman-teman di lingkungan tempat tinggalnya, mengetahui KB bukan dari koran lokal, tetapi dari Surat Kabar *Kompas*. Begitu juga dengan Kuni, anggota Saidjah Forum yang lain, dia memiliki kesadaran dan kesediaan menggunakan alat kontrasepsi karena mendapatkan informasi dari isterinya yang bekerja di salah satu lembaga advokasi perempuan. Kuni berpendapat bahwa ketidaktahuan masyarakat tentang KB, salah satunya, juga memang disebabkan karena tidak adanya program sosialisasi yang memadai dari lembaga terkait, serta tidak adanya inisiatif lembaga tersebut untuk mensosialisasikan program tersebut melalui media massa lokal. Dia mengaku bahwa jarang sekali menemukan artikel di koran lokal Banten yang memuat isu-isu seputar perempuan dan/atau anak, yang merupakan informasi, bukan sekedar hiburan.<sup>228</sup>

Di Jakarta, dalam mengklarifikasi bagaimana awak media massa lokal ini menghimpun beritanya seputar isu perempuan dan/atau anak, pernyataan dari redaksi berikut, sedikit-banyak, memberikan gambaran mengenai metode mereka untuk mendapatkan bahan berita, yakni:

*“Ya, karena gini. Di kita ini sekarang, ada kalo misalkan anda lihat di halaman empat itu ada yang namanya sms pembaca. Nah itu kita kumpulin database dari situ. Sms itu, sekarang sudah hampir 200.000-an. Ada nama orangnya segala macem. Nah dari situ kita pilih, ada perempuannya ada*

226. Data wawancara dengan redaksi *Warta Kota* dan *Berita Kota*.

227. *Ibid.*

228. Hasil wawancara dan FGD dengan Saidjah Forum.

*segala macam, mau gak kita kumpul. Di lantai tujuh sana. Kita tiap bulan, ada kita meskipun tidak banyak, 15 orang. Kita pilih misalnya dari ibu-ibu biasa, dari yang punya toko, terus guru, profesi, dokter, kita ajak, beda-beda pendapatnya. Nah kita tampung itu, apa yang dibutuhkan oleh mereka, apa yang diinginkan oleh mereka terhadap media, ada di kita. Nah itu kita jadikan bahan, ya saya gak bisa ngungkapin itu, karena rahasia kita. Hahaha!”<sup>229</sup>*

Berikut ini, ialah pernyataan terkait dengan isu anak, yang hanya berhenti sebatas panduan bagi pembaca, bukan dalam rangka membentuk pola pikir dan kesadaran akan kesejahteraan anak:

*“Kalo anak-anak, gini yab. Kita menyadari bahwa perkembangan internet segala macam terhadap anak-anak sekarang ini kan rentan ya. Nah kita memberikan porsi terhadap pemberitaan yang memberikan panduan atau kepada anak-anak terutama ABG panduan-panduan mengenai bagaimana cara belajar baik, cara menyikapi internet jaman sekarang, cara bergaul. Di Warta Kota ada tamu yaitu tabloid tiap bulan yang kita bagikan secara gratis ke sekolah-sekolah di Jakarta. Dan itu khusus untuk mereka. Mereka ngomong di situ, ada orang yang ngomong pengalaman kita begini-begini terhadap acara sekolahnya segala macam. Nah terus ada psikolog yang membahas. Nah, itulah, sebatas itu. Tapi, yab, itulah anak-anak metropolitan, secara umum dari sisi pergaulan segala macam, termasuk anak saya, sebagai orang tua juga ada khawatir lah. Nah, kita sebagai media memberi panduan, arahan, supaya mereka ini tidak berjalan sesuai dengan karakter mereka lah, seperti ABG.”<sup>230</sup>*

Tak jauh beda dengan pandangan dari redaksi *Radar Jember* berikut ini, perhatian terhadap isu HAM juga bukanlah hal yang utama. Berikut pernyataannya:

*“Semua jika menarik bagi pembaca ya kita muat. Kita tidak fokus pada HAM, misalnya ada berita HAM, kemudian HAM, terus ndak. Misalnya ada penganiayaan dan sebagainya kita muat, begitu juga jika ada pelecehan perempuan dan sebagainya, ya, kita muat. Kemudian ada persoalan kriminal, ya, kita muat. Jadi tidak ada pembagian isu harus condong ke sini, karena kita berita umum. Jadi kita tidak fokus seperti memorandum yang*

*khusus membuat berita kriminal. Kita bukan majalah khusus yang memuat berita ekonomi. Semuanya masuk.”<sup>231</sup>*

Meskipun demikian, redaksi *Radar Jember* bertahan pada alasan bahwa fokus isu yang diangkat tetap berdasarkan fakta di lapangan, yang kemudian dirapatkan dalam redaksi. Sebagaimana penjelasan mereka:

*“Di rapat redaksi. Kita lihat kejadiannya, kita lihat fakta di lapangan, enggak bisa kemudian memfokuskan tanpa melihat fakta di lapangan. Karena harus dilihat dulu, kejadiannya apa, maksudnya apa, beritanya gimana, itu kan gak bisa dilihat harus memutuskan isu, tapi di rapat redaksi kejadiannya apa, bentuknya gimana, atau bagaimana. Kita harus memahami dengan menayangkan berita dengan posisi jernih. Bagaimana bisa jernih, harus lihat fakta di lapangan. Makanya untuk wanti-wanti kita harus lihat kejadiannya di lapangan. Penting itu. Jangan kemudian harus menulis berita tanpa melihat kejadian di lapangan.”<sup>232</sup>*

Namun demikian, AKUMASSA melihat bahwa ada persoalan inisiatif para jurnalis yang sangat minim. Sebab, sudah seharusnya awak media massa lokal menghadirkan sebuah informasi bukan hanya bergantung pada peristiwa semata. Kekuatan media massa sesungguhnya memiliki potensi untuk membangun wacana tentang isu tertentu berdasarkan hasil pembacaan terhadap fenomena dalam rentang waktu tertentu. Apalagi berdasarkan Laporan Tahunan Komnas HAM di tahun 2010, Jawa Timur mendapat peringkat kedua laporan pelanggaran HAM terbanyak setelah Jakarta.<sup>233</sup> Dan dalam memandang hal ini tentu termasuk Jember yang masih rawan konflik agraria antara petani dan pemodal.<sup>234</sup> Akan tetapi, langkah ideal ini, seperti terjadi pada contoh kasus *Radar Depok*, *Monitor Depok* dan *Jurnal Depok*, hal itu belum dilakukan. Redaksi *Warta Kota* dan *Berita Kota* melakukan hal seperti ini, tetapi bukan untuk isu HAM dan isu perempuan dan/atau anak yang proporsinya kecil, melainkan pada isu kriminalitas.

Akan tetapi, masalahnya tidak berhenti pada keabaian redaksi media massa lokal. Berdasarkan temuan data yang dihimpun AKUMASSA pada sesi wawancara

229. Hasil wawancara dengan Warta Kota dan Berita Kota.

230. *Ibid.*

231. Data wawancara dengan redaksi *Radar Jember*.

232. *Ibid.*

233. Komnas HAM, Laporan Tahunan 2012, Jakarta.

234. <http://kissfmjember.com/2012/01/12/solidaritas-petani-jember-desak-pemerintah-tuntaskan-konflik-agraria.html>

dengan redaksi dan komunitas lokal, faktor ketiadaan kritisisme masyarakat terhadap media massa juga memiliki andil, yang akhirnya mempengaruhi cara pandang dan cara kerja media massa lokal tersebut dalam mengemas berita; media massa lokal mengikuti selera pembaca.

Sebagaimana kita dapat lihat contohnya pada wilayah lokal Banten, ketika ditanyai pendapatnya soal perkembangan HAM di wilayah Banten, redaksi *Banten Raya Post* menjelaskan:

*“Yah, kalo mau dipahami gimana, ya? Kadang-kadang ada yang dilanggar, yang kadang-kadang kita, medianya juga luput bahwa itu melanggar HAM. Wartawan, kan, kadang-kadang pemahamannya beda. Ada HAM yang dilanggar, tapi tidak terekspos. Yah makanya kadang pelanggaran HAM masih ada. Kayak di pasir laut itu, pertambangan pasir, itu dari Komnas HAM katanya juga ada pelanggaran HAM. Rame itu Komnas HAM kemarin ke sini, karena di sini dinilai ada pelanggaran HAM, dia ke sini ngecek kapalnya itu, menurut Komnas ham aparat tindakannya terlalu represif. Di sini kadang-kadang dalam masalah ham jarang yang ngomong. Nah makanya biasanya orang-orang di sini panggil Komnas HAM, mereka yang mengkaji apakah melanggar HAM atau tidak.”<sup>235</sup>*

Ketika ditanya lebih jauh terkait dengan inisiatif dari lingkungan masyarakat Banten sendiri, seperti misalnya keberadaan gerakan, aktivis atau organisasi masyarakat yang memperjuangkan HAM, yang idealnya dapat menjadi sumber informasi bagi media massa lokal untuk menghidupkan wacana HAM di wilayah lokalnya, redaksi *Banten Raya Post* menjelaskan:

*“Iya kadang-kadang kitanya luput, harusnya umpamanya konfirmasi kepada orang-orang HAM, tapi kita luput. Jadi beritanya kurang lengkap, padahal lebih menarik berita dengan banyak narasumber lebih baik, nah ada keterbatasan waktu itu kadang-kadang yang luput. Makanya wartawan, kan memang dituntut untuk serba tahu. Kalo berita tentang ham memang jarang, masih minim. Orang kadang-kadang... Gak paham juga sih, haha. Pemerintah juga kadang-kadang melanggar. Makanya, isu HAM diminati, gak, di sini? Jangan-jangan enggak.”<sup>236</sup>*

235. Data wawancara dengan redaksi *Banten Raya Post*.

236. *Ibid.*

Sedikit berbeda pada konteks isu perempuan dan/atau anak. Meskipun kekurangan informasi tentang aktivis, redaksi *Banten Raya Post* menyebutkan bahwa kesadaran tentang isu tersebut cukup baik di lingkungan masyarakat Banten. Penjelasan untuk isu perempuan dan/atau anak, ialah sebagai berikut:

*“Yang banyak muncul di koran kebanyakan sekarang ini perempuan yang ada di wakli rakyat, srikandi-srikandi yang ada di pemerintahan, DPR, yang aktifis siapa ya? Jarang. Untuk masalah kesetaraan di sini juga sudah baik, apalagi di Cilegon, di Serang, udah pada melek semua. Buktinya kalo ada kekerasan (KDR) mereka sudah lapor ke polisi.”<sup>237</sup>*

Ketiadaan aktivis, bagi amatan redaksi *Banten Raya Post* tergantikan dengan menjamurnya komunitas-komunitas di lingkungan masyarakat yang dijalankan oleh perempuan. Namun demikian, euforia kesadaran ini justru ditanggapi redaksi sebagai bahan komodifikasi yang jauh dari semangat kesadaran tentang gender itu sendiri.

*“Ya itu kan hanya salah satu indikator untuk kesetaraan gender, kalo laporan ke kepolisian meningkat atau tidak saya kurang tahu. Maksudnya masyarakat sudah sadar kesetaraan itu. Kegiatan perempuan sekarang juga sudah banyak, kaya gerakan wanita sudah mulai. Hijaber-hijaber di sini juga sudah banyak, nih, termasuk ini (menunjuk karyawan) salah satu pengurusnya, nih. Terus guru-guru sudah, komunitas-komunitas perempuan. Malah sekarang koran itu kalo menurut saya, setiap halaman diusahakan ada wanitanya, bukannya eksplotasi, ya, untuk pengimbang. Makanya di Jawa Pos, tuh, ada For Her, kalo sekarang di tahun 2013 Jawa Pos bikin komunitas perempuan. Nah itu juga bikin pembaca banyak. Malah ada orang bilang, sebuah koran itu untuk menentukan langganan koran nomor 1-nya ibu rumah tangga. Nah, untuk ibu tertarik itu harus ada laporan tentang wanita. Nah, biasanya si bapak terserah ibu, lah, mau langganan apa. Bisa jadi arahnya ke sana. Nah, Baraya sendiri di halaman depan ada sosok, itu mengangkat prestasi perempuan lokal. Apa itu model, bidan yang di pinggir kampung, guru. Rubrik itu tiap hari ada sejak awal kelahiran Baraya.”<sup>238</sup>*

237. *Ibid.*

238. *Ibid.*

Pernyataan dari redaksi tersebut seakan merepresentasikan bahwa pentingnya isu perempuan dan/atau anak bukan terletak pada esensinya tentang hak-hak perempuan dalam pandangan feminis. Perhatian terhadap isu perempuan dan/atau anak bagi redaksi ialah, secara implisit, justru memapankan pola patriarkal yang membudaya di lingkungan lokal Banten.

Minimnya media massa lokal memberitakan hal ini, di satu sisi juga disebabkan oleh kepekaan masyarakat lokal yang minim, yang juga tak lepas dari psikologi kultural di wilayah tersebut. Berdasarkan pengalaman Kuni, Banten merupakan wilayah yang cukup tinggi angka kekerasan terhadap perempuan, seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tetapi sedikit dari para korban yang melaporkan peristiwa tersebut sehingga media massa lokal mendapati sangat sedikit sumber berita yang bisa diangkat. Hal ini terjadi karena kultur masyarakat di Banten yang menganggap hal tersebut sebagai masalah pribadi, bukan masalah publik yang harus ditangani secara bersama-sama.

Lebih jauh, untuk memperkuat argumentasi AKUMASSA ini, kita dapat menyimak penjelasan dari *Kabar Banten*, terkait dengan isu HAM dan isu perempuan dan/atau anak, yakni sebagai berikut:

“...gini, kalau soal emm... apa... soal HAM... kekerasan terhadap anak, kita, tuh, ada kendala psikologi juga, ya, di Banten ini. Ya, di samping mungkin, emm... apa... isu itu kan kurang terbuka kepada... kepada publik, gitu kan? Jadi, lebih banyak isu kekerasan dalam rumah tangga, itu kan diselesaikan secara internal. Mungkin, hanya... hanya... mungkin... kalau isu kekerasan terhadap istri dan anak, sebenarnya itu kan banyak, tiap hari di Banten ada. Cuma persoalannya, ada nggak yang dilaporkan ke polisi atau ke KP AID. Nah, itu yang jadi masalah. Emm... kita akan kesulitan memberitakan itu ketika tidak ada pelaporan. Masa, tiba-tiba kita masuk ke privasi orang, kan kalau ketika sudah masuk ke KP AID, itu udah masuk ke wilayah publik dan berhak untuk diberitakan. Nah, itu... mungkin emm... kita juga belum emm... apa... mengedukasi masyarakat... itu... apa... masyarakat harus lebih aktif melaporkan ketika mengalami masalah itu sehingga pemberitaan kekerasan dalam rumah tangga semakin banyak. Nah, yang kedua tadi, kendala psikologi. Begini, emm... lembaga-lembaga yang eksis di bidang itu, misalnya... ada namanya P2TP2A, nah itu juga emm... apa... eksis di bidang masalah perempuan dan anak, kemudian ada... pokoknya ada beberapa lembaga yang eksis terhadap itu. Nah, ternyata, mereka itu kepengurusannya lebih emm... lebih dekat dengan kekuasaan. Misalnya, adiknya gubernur... adiknya iparnya gubernur... sehingga emm... ketika kita terlalu sering memberitakan soal itu, nah itu digunakan untuk... khawatir

*dibilangnya itu pencitraan dia... Makanya kita juga, kendala psikologi dari kita, sehingga... di samping tadi, masalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan peristiwa kekerasan.*<sup>239</sup>

Berhadapan dengan realitas sosiokultural masyarakat yang demikian, pemahaman dan reaksi *Kabar Banten* akhirnya berhenti pada pemberitaan yang berdasarkan momen-momen tertentu saja. Sebagaimana penjelasan lanjutnya, yakni:

“...isu gender tidak terlalu menjadi fokus, ya, kecuali kita hanya mengangkat isu itu, dalam momen-momen tertentu saja. Misalnya Hari Kartini, Hari Ibu... itu memang... dan ada lagi misalnya pada saat Pemilu legislatif... itu kan kita bisa libat bersama... misalnya berapa persen yang... perempuan yang menjadi anggota legislatif. Itu pasti jadi sorotan kita. Terutama ketika misalnya, emm... mengalami penurunan, nah, itu kalau yang sekarang emang mengalami peningkatan dari 5 menjadi 15, kalau nggak salah, di Banten, itu menjadi sorotan kita juga, yang bahkan dari mulai pencalonan legislatif, itu udah kita sorot. Ini, kan kadang-kadang yang jadi masalah itu, perempuan di angkat menjadi caleg, kemudian, emm... ditempatkan pada nomor-nomor tertentu, dan itu, pasti menjadi sorotan kita juga.”<sup>240</sup>

Minimnya partisipasi dan kritisisme masyarakat terhadap persoalan isu-isu marginal ini, khususnya jika mengacu pada contoh di Banten, seakan dimaklumi pula oleh masyarakat lokalnya sendiri. Hal ini kita ketahui dari penjelasan komunitas Saidjah Forum yang secara independen melakukan aktivitas *community development* bagi warga masyarakat di sekitar mereka. Menurut mereka, kurangnya inisiatif dari media massa lokal dalam mewacanakan isu-isu marginal, seperti lingkungan hidup, perempuan dan/atau anak, dan HAM, juga tak lepas dari faktor keapatisan masyarakat lokalnya sendiri.<sup>241</sup> Padahal, urgensi dari isu-isu ini secara nyata dirasakan oleh masyarakatnya. Hasil *focus group discussion* (FGD) dengan Saidjah Forum, memberikan semacam kesimpulan bagi situasi sosiokultural masyarakat Banten, bahwa terdapat tiga hal yang tidak bertemu dalam dinamika arus informasi dan lingkungan pers. Pertama, pemerintah lokal mengalami semacam ketakutan apabila kebobrokan mereka diketahui, dan oleh karenanya melakukan negosiasi-negosiasi kepada media massa lokal untuk memberitakan

239. Data wawancara dengan redaksi *Kabar Banten*.

240. *Ibid.*

241. Berdasarkan hasil FGD dengan Komunitas Saidjah Forum, Lebak, Banten.

hal-hal yang positif saja. Kedua, media massa lokal memahami bahwa oplah bukanlah aspek utama dalam mendulang keuntungan karena minimnya minat masyarakat dalam membaca koran lokal, dan oleh karenanya memanfaatkan negosiasi-negosiasi dengan korporasi dan pejabat lokal untuk menarik iklan dan *advertorial* yang menghasilkan keuntungan lebih besar. Ketiga, masyarakat lokal Banten, yang terbilang masih memiliki angka buta huruf tinggi, justru apatis terhadap media massa lokal dan kinerja pemerintah, dan mengkonsumsi informasi dan hiburan dari stasiun televisi nasional.<sup>242</sup> Situasi ini menjadi gambaran yang menjelaskan bahwa ketidakaktifan masyarakat dalam partisipasi lingkungan bermedia di wilayah lokalnya, juga menjadi salah satu sebab utama tidak sehatnya kerja para pelaku media massa tersebut.

Fenomena ini pun ternyata didukung oleh pengakuan-pengakuan anggota komunitas lokal di daerah lain, yakni Tangerang Selatan, komunitas yang bernama Komunitas Djuanda, tentang pengalaman-pengalaman mereka bersinggungan dengan peristiwa-peristiwa yang mana di dalamnya terjadi pelanggaran-pelanggaran atas nilai-nilai yang menjunjung tinggi HAM, kesetaraan gender, perlindungan anak dan kelestarian lingkungan. Persoalan sampah, misalnya, juga diakibatkan oleh tingkah laku masyarakat lokalnya sendiri, dan partisipasi untuk terlibat dalam pembangunan kesadaran tersebut ke wilayah kesadaran media, juga terbilang minim.<sup>243</sup> Hal yang sama juga terjadi di Surabaya, di mana melalui keseharian Komunitas Kinetik, memang diakui, kelompoknya pun masih kurang peka terhadap isu lingkungan hidup, HAM, dan perempuan dan/atau anak yang berlangsung di kota tempat mereka tinggal. Namun, setelah dilangsungkan *Focus Group Discussion* (FGD) antara AKUMASSA dan Komunitas Kinetik, barulah dapat dijelaskan bahwa kealpaan mereka dalam memperhatikan isu-isu tersebut juga kerap terjadi di lingkungan masyarakatnya. Hal ini dijelaskan dengan terjadinya saling tukar informasi tentang HAM, lingkungan hidup, dan perempuan dan/atau anak pada saat FGD berlangsung. Saling tukar informasi yang berlangsung saat itu, juga menjelaskan bahwa selama ini banyak peristiwa maupun informasi yang bersentuhan dengan ketiga isu tersebut telah mereka ketahui, namun karena minimnya kepekaan terhadap hal-hal itu maka nyaris tidak dibahas dalam keseharian mereka, belum lagi di tambah media massa yang hidup di tengah masyarakat Surabaya pun tidak hadir sebagai pemantik wacana tersebut.<sup>244</sup>

---

242. *Ibid.*

243. Berdasarkan FGD dengan Komunitas Djuanda, Tangerang Selatan.

244. Berdasarkan hasil FGD dengan Komunitas Kinetik di Surabaya.

Berbeda dengan tiga contoh lokasi sebelumnya, wacana HAM justru hadir melekat di tengah diskusi-diskusi Komunitas Tikungan di Jember, meskipun wacana lingkungan hidup dan perempuan dan/atau anak nyaris alpa juga dalam wacana keseharian mereka. Wacana HAM kerap diperhatikan komunitas ini karena, memang, panasnya konflik agraria yang berlangsung di Jember cukup menarik perhatian, khususnya para mahasiswa. Berdasarkan diskusi yang berlangsung waktu itu, ter jelaskan bagaimana situasi sosial kehidupan petani kopi di Jember yang kerap bersitengang dengan kelompok-kelompok berkepentingan di wilayahnya, dan media massa lokal di Jember dianggap minim dalam meng-*cover* konflik tersebut. Lebih ironis lagi, berdasarkan amatan Komunitas Tikungan, di kota tempat tinggalnya, *Radar Jember* berdiri sebagai media massa lokal tunggal. Jika pun ada yang lainnya, itu bersifat nasional dan regional.<sup>245</sup>

AKUMASSA mengajukan pandangan bahwa penyelesaian terhadap masalah lokal akan dapat terwujud jika ada saling partisipasi antara warga masyarakat lokal dengan media massa lokal di daerahnya masing-masing. Kritik masyarakat terhadap kinerja media massa lokal sangat dibutuhkan untuk menjadi kekuatan penyeimbang kekuatan konglomerasi media. Oleh sebab itu, peran komunitas sangat penting dalam mengkoordinir aksi-aksi intelektual, yang dapat membangkitkan kesadaran serta menggerakkan inisiatif warga masyarakat dalam membenahi kondisi bermedia di Indonesia dalam era kontemporer saat ini.

Sebagai sebuah argumentasi tambahan, keterlibatan komunitas lokal dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media, yang digagas oleh AKUMASSA merupakan salah satu bentuk reaksi sosial terhadap hal itu. Selain itu, bagi beberapa komunitasnya sendiri, di beberapa wilayah, fenomena kondisi bermedia ini ditanggapi dengan inisiatif-inisiatif membangun media tandingan yang mengusung tinggi semangat dan perspektif warga. Kita dapat ambil contoh, misalnya di Lebak, Saidjah Forum membangun media massa alternatif berbasis teknologi *online*, bernama [www.saidjahforum.org](http://www.saidjahforum.org); di Tangerang Selatan, Komunitas Djuanda membangun media massa alternatif berbasis teknologi, bernama [www.galeritangsel.com](http://www.galeritangsel.com); di Jakarta, Forum Lenteng melakukan aksi-aksi kritik media massa melalui riset dan pengelolaan media alternatif pula. Begitu juga dengan wilayah lokal di Lombok Utara, terdapat Komunitas Pasir Putih yang secara aktif melakukan kegiatan riset dan pesebaran informasi yang oleh dan untuk warga.

Kesemua aksi ini merupakan tanggapan komunitas lokal dalam mengimbangi pengaruh media massa lokal yang tidak sehat tersebut. Namun

---

245. Berdasarkan hasil FGD dengan Komunitas Tikungan di Jember.

begitu, beberapa di kota lain, hal yang serupa tidak atau belum terjadi. Pada wilayah lokal Surabaya, Jember, Depok, dan Aceh Besar, AKUMASSA belum menemukan kegiatan-kegiatan aktif dari komunitas lokalnya yang secara khusus melakukan perlawanan wacana terhadap aktivitas media massa lokalnya. Reaksi yang muncul baru berada pada tingkatan dikusi dan pendidikan alternatif terhadap warga masyarakat lokal (seperti yang terjadi di Jember, oleh Komunitas Tikungan) dalam rangka meningkatkan kepekaan dan kesadaran terhadap isu-isu yang berkembang di wilayah lokal, bukan dalam aksi konkret pembangunan sarana dan prasarana media alternatif yang dapat menyaingi pengaruh media massa lokal arus utama.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**



Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, atau disebut sebagai Rekam Media, yang dilakukan oleh AKUMASSA adalah salah satu cara untuk meningkatkan keterlibatan warga dalam aktifitas bermedia. Program ini melihat secara ringkas situasi bermedia di Indonesia pasca peristiwa Reformasi '98. Kondisi bermedia di era reformasi dapat dilihat dalam tiga aras utama, yakni penguasaan informasi yang cenderung monopolistis, limpahan informasi yang tak terbendung lagi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi sebagai konsekuensi logis dari semakin tingginya *traffic* arus informasi, dan iklim kompetisi di industri media yang tidak sehat karena bercampurnya kepentingan ekonomi dan politik.

Hal ini secara jelas masuk ke berbagai lini kehidupan bermedia di Indonesia termasuk pengaruhnya dapat kita lihat dari bagaimana media massa lokal menyajikan informasi yang didasari oleh motif bisnis dan politik. Program Rekam Media ini memiliki fokus perhatian kepada bagaimana lima kategori isu (*good governance*, HAM, Perempuan dan/atau Anak, Kriminalitas, dan Lingkungan Hidup) disajikan oleh media massa lokal kepada publik pembaca. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lima isu tersebut, di dalam terbitan-terbitan ketujuhbelas media massa yang menjadi subjek penelitian ini, disajikan dengan proporsi yang tidak seimbang. Isu *good governance* menjadi isu yang paling dominan, sedangkan isu perempuan dan/atau anak, HAM dan lingkungan hidup memiliki proporsi yang sangat sedikit. Padahal, tiga isu tersebut juga dibutuhkan oleh publik pembaca, namun isu tersebut tidak begitu terlalu diinformasikan dan bahkan sama sekali luput dari perhatian media massa lokal.

Kecenderungan isu *good governance* yang begitu dominan tak terlepas dari kepentingan media massa lokal dalam hubungannya dengan lingkungan pemerintahan setempat. Ada semacam kebutuhan di kedua belah pihak, antara kalangan pers dan pemerintah (pejabat) lokal, sebagaimana yang telah kami analisa dari temuan data yang diperoleh melalui verifikasi yang telah kami lakukan terhadap redaksi media massa lokal, bahwa ada semacam hubungan “mesra” antara redaksi media massa lokal dengan aparat pemerintah. Hemat kami, terlihat jelas bahwa alasan pemuatan berita yang berhubungan dengan *good governance* tak lebih dari kebutuhan media massa lokal untuk pemasukan laba melalui iklan dan liputannya, bukan didasari oleh pemahaman tentang kebutuhan masyarakat akan informasi yang semestinya.

AKUMASSA menyadari, bagaimanapun juga, bahwa media massa lokal perlu melakukan langkah-langkah untuk dapat bertahan (*survive*), dan adalah hak bagi perusahaan media massa lokal untuk menarik keuntungan profit atas usaha media massa yang mereka kelola. Namun, yang menjadi catatan di sini ialah apakah motivasi memperoleh keuntungan tersebut sesuai dan seimbang dengan

kewajiban dalam memenuhi hak-hak publik untuk mendapatkan informasi, yang tidak hanya akurat, melainkan juga diperoleh secara benar dan jujur.

Pertimbangan media massa lokal dalam menyajikan informasi tidak didasarkan kepada kecenderungan mencerdaskan dan mendorong keaksaraan media melainkan lebih berorientasi kepada akumulasi keuntungan (*profit-oriented*) dan memapankan pengaruhnya sebagai entitas bisnis dan politik. Kondisi ini semakin diperparah dengan tingkat pengetahuan pekerja media massa lokal yang tidak memadai dalam memuat informasi yang mereka sajikan. Acapkali, berita yang diinformasikan kurang memenuhi kaidah-kaidah jurnalistik, dibarengi dengan dangkalnya pemahaman terhadap sebuah persoalan yang hendak disajikan kepada pembaca. Hal ini disebabkan juga oleh keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki media massa lokal sehingga informasi-informasi yang disajikan oleh para jurnalisnya sering mengalami distorsi informasi. Rendahnya tingkat pemahaman terhadap obyek pemberitaan seperti isu-isu HAM, Perempuan dan/atau Anak, Kriminalitas dan Lingkungan Hidup mempengaruhi kualitas informasi yang dihadirkan di dalam terbitannya. Pada kasus ini, media massa lokal sering melakukan labelisasi dan stigmatisasi terhadap pemberitaan terutama yang menyangkut isu HAM, Perempuan dan/atau Anak, dan Kriminalitas. Patron paternalistik masih menjadi paradigma umum kalangan media massa lokal, ditambah minimnya wawasan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) di kalangan pekerja pers lokal dan pimpinan di atasnya.

Di samping itu, tidak sehatnya kinerja media massa lokal—menyangkut soal konten pemberitaan—ini juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami isu-isu yang media massa lokal sajikan. Keterlibatan masyarakat dalam menanggapi kelima isu tersebut masih terbilang sedikit di tengah-tengah krisis kesadaran media sehingga situasi dan kondisi bermedia di masyarakat dalam tataran lokal, masih jauh dari tataran ideal yang kita harapkan: lingkungan demokrasi, kesetaraan arus informasi, perspektif warga masyarakat lokal, dan keterlibatan aktif warga lokal itu sendiri.

Keterlibatan komunitas lokal dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media, merupakan satu usaha yang dilakukan untuk menjawab kondisi bermedia yang krisis tersebut. Melalui program Rekam Media, AKUMASSA mengajukan sebuah tesis bahwa keberpihakan media massa lokal terhadap warga sama sekali tidak kami temukan. Media massa lokal justru bergerak dan bekerja di atas kepentingan ekonomi dan politik. AKUMASSA mengajukan sebuah pandangan bahwa penyelesaian terhadap masalah lokal akan dapat berjalan dan terwujud apabila adanya partisipasi aktif masyarakat di daerahnya masing-masing. Kritik masyarakat perlu digalakkan untuk menjadi kesadaran kolektif akan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara di negara

demokrasi. Di samping itu, peran komunitas begitu penting bagi terciptanya lingkungan media massa yang sehat, dan Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media, yang digagas AKUMASSA dalam penelitian ini, kami ajukan sebagai salah satu rekomendasi untuk menjadi motor penggerak dalam menjemput aksi-aksi perubahan dan membangkitkan *interest* masyarakat bagi perbaikan kondisi bermedia di Indonesia. Inisiasi media alternatif adalah jawaban dari aksi bermedia, dan Program Rekam Media ini adalah usaha kecil yang kami lakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abrar, A. N. (1993). *Mengenal Jurnalisme Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Achmad, S. (2005). *Kejahatan Berbasis Gender serta Dampak Gender dari Peristiwa Pembantaian di Gujarat 2002*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Agus. (2006). *Majalah Ilmiah "Jurnal Kampus Tercinta"*. Jakarta: IISIP Jakarta.
- Ahmadi, A. (1989). *Ilmu Jiwa Anak*. Bandung: CV Armico.
- Anwar, R. (1974). *Ihwal Jurnalistik*. Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia.
- Atmakusumah. (1996). *Mengangkat Masalah Lingkungan ke Media Massa*. Jakarta: Lembaga Pers dr. Soetomo (LPDS) dan Yayasan Obor Indonesia.
- Bainar. (1998). *Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Modernitas*. Jakarta: PT Pustaka CIDESINDO dan UII.
- Bungin, B. (2003). *Pornomedia: Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*. Jakarta: Prenada Media.
- Creswell. (2006). *Chapter I Understanding Mixed Methods Research*. Retrieved November 18, 2012, from Sage Publication: [http://www.sagepub.com/upm-data/10981\\_Chapter\\_1.pdf](http://www.sagepub.com/upm-data/10981_Chapter_1.pdf)
- Davidson, S. (1994). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Pustaka Grafiti.

- DeFleur/Dennis. (1985). *Understanding Mass Communication* (2nd ed.). Hongtinton Mifflin Company.
- Efendi, M., & Evandri, T. S. (2010). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Effendy, O. U. (1986). *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Karya CV.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. Yogyakarta: LKiS.
- Foulger, D. (2010). *An Introduction to Media Criticism*. Retrieved October 20, 2012, from Evolutionary Media: <http://evolutionarymedia.com/cgi-bin/wiki.cgi?IntroductionToMediaCriticism>
- Glaser, M. (2006, September 27). *Your Guide to Citizen Journalism*. Retrieved October 18, 2012, from Public Broadcasting Service: Media Shift: <http://www.pbs.org/mediashift/2006/09/your-guide-to-citizen-journalism270.html>
- Guntarto, B. (2011, February 9). *Perkembangan Literasi Media di Indonesia*. Retrieved October 18, 2012, from Kidia!Media untuk Anak: <http://www.kidia.org/news/tahun/2011/bulan/02/tanggal/09/id/187/>
- Hidayat, D. N. (2001). Pengantar. In Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media* (pp. vii-viii). Yogyakarta: LKiS.
- Iqbal, M. (2010). *Analisis Trend Linear Dengan Metode Kuadrat Terkecil Untuk Meramalkan Perkembangan Banyaknya Siswa*. Retrieved February 20, 2013, from <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/04510038-m-iqbal.ps>,
- Iskandar, D. (2006). *Jurnal IISIP*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta.
- Kaloh, J. (2007). *Mencari Bentuk Otonomi Daerah: Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Khan, M. H. (2004). *State formation in Palestine: Viability and Governance During A Social Transformation: Volume 2 of Political Economy of The Middle East and North Africa*. Routledge.
- Kovach, B., & Rosentiel, T. (2006). *Sembilan Elemen Jurnalisme*. (Y. A. Pareanom, Trans.) Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Kusmindarti, N. A. (2006). *Pembentukan Budaya Konsumtif Terhadap Anak-anak Melalui Rubrik Toyz dalam Majalah XYKIDS!* Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta.
- Kusumaningati, I. F. (2012). *Jadi Jurnalis Itu Gampang!!!: Serba-serbi Ringkas Tentang Citizen Journalism dan Panduan Praktis Menjadi Citizen Journalist Untuk Pemula*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kusumaningrat, P., & Hikmat. (2006). *Jurnalistik: Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Lazarsfeld, P. K., & Merton, R. K. (2004). Mass Communication, Popular Taste, and Organized Social Action. In J. Durham, & P. Simonson, *Mass Communication and American Social Thought: Key Text, 1919-1968* (pp. 230-241). Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- LSPP, T. (2005). *Media Lokal Mewartakan Korupsi dan Pelayanan Publik*. Jakarta: LSPP.
- Mahayana, M. S. (2012). *Lokalitas Dalam Sastra Indonesia*. Retrieved September 4, 2012, from <http://kem.ami.or.id/2012/01/membangun-bangsa-melalui-pendidikan-multikultural/http://kem.ami.or.id/2012/01/membangun-bangsa-melalui-pendidikan-multikultural/>
- Mardiasmo. (2002). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Muktiyo, W. (2007). *Dinamika Media Lokal dalam Mengkonstruksi Realitas Budaya Lokal Sebagai Sebuah Komoditas*. Disertasi. Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Departemen Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana. Tidak Diterbitkan.
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku*

- Menyimpang dan Pelanggaran Hukum* (2nd ed.). Jakarta: Penerbit Sari Ilmu Pratam (SIP).
- Mutaqin, T. (2010). *Televisi Ramah Anak*. Jurnal Perencanaan Pembangunan, XVI (02).
- Nugroho, Y. (2012, August 7). *Media, Budaya, dan Upaya Merawat Cita-cita Hidup Bersama*. Retrieved October 31, 2012, from Slideshare.net: <http://www.slideshare.net/caruban/refleksi-yanuar-nugroho-pada-18-tahun-aji>
- Nugroho, Y., Putri, D. A., & Laksmi, S. (2012). *Mapping The Landscap of The Media Industry in Contemporary Indonesia*. Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Regional Office Southeast Asia. Jakarta: CIPG dan HIVS.
- Nugroho, Y., Siregar, M. F., & Laksi, S. (2012). *Mapping Media Policy in Indonesia*. Centre for Innovation Policy and Governance dan HIVOS Regional Office Southeast Asia. Jakarta: CIPG dan HIVOS.
- Nurudin. (2009). *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Oepen, M. (1988). Benarkah Kita Tahu Persis Apa yang Baik Bagi Rakyat?: Penggunaan Media Massa oleh Lembaga Pemerintah dan LSM. In M. Oepen (Ed.), *Media Rakyat: Komunikasi Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Peraturan Dewan Pers*. (n.d.). Retrieved October 31, 2012, from Dewan Pers: [http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com\\_content&view=article&id=675:standar-perusahaan-pers&catid=54:peraturan&Itemid=121](http://www.dewanpers.or.id/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=675:standar-perusahaan-pers&catid=54:peraturan&Itemid=121)
- Potter, W. J. (2005). *Media Literacy*. Prentice Hall.
- RG. (2011). *Peran Media Bagi Anak*. Retrieved September 7, 2012, from <http://www.kpi.go.id/component/content/article/14-dalam-negeri-umum/2930-peran-media-bagi-anak>
- Rockler-Gladen, N. (2008, May 9). *What is Media Criticism?* Retrieved October 20, 2012, from Suite101: <http://suite101.com/article/how-to-write-media-criticism-a53411>
- Romli, A., & M., S. (2008). *Kamus Jurnalistik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Romli, L. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat Di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ruedi, H. (1988). *Media Murah Oleh Rakyat, Bukan Untuk Rakyat*. In M. Oepen (Ed.), *Media Rakyat: Komunikasi Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Sachar, A. (2007). *Budaya Visual Indonesia*. Retrieved October 31, 2013, from Google Books: <http://books.google.co.id/>
- Sanes, K. (1997). *Principles of Media Criticism*. Retrieved October 20, 2012, from Transparency: <http://www.transparencynow.com/mediacrit.htm>
- Sanes, K. (n.d.). *The News Media's Effort to Hide from Significant Truth*. Retrieved October 20, 2012, from Transparency: <http://www.transparencynow.com/news/preface.htm>
- Santana, A. D., Livingstone, R., & Cho, Y. (2011, August 10). *Medium Matters: Newsreaders' Recall and Engagement with Online and Print Newspapers*. Retrieved November 7, 2012, from Slate: [http://www.slate.com/content/dam/slate/archive/media/2011/08/66\\_mediummatters.pdf](http://www.slate.com/content/dam/slate/archive/media/2011/08/66_mediummatters.pdf)
- Sari, N. K. (2009). *Representasi Kuasa Perempuan dalam Teks Pada Majalah Cosmopolitan*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta.
- Sen, K., & Hill, D. T. (2000). *Media, Culture, and Politics in Indonesia*. New York: Oxford University Press.
- Seri Bahan Bacaan Kursus H&A&M untuk Pengacara XI*. (2007). ELSAM.
- Severin, W. J., & Tankard, J. W. (2008). *Teori Komunikasi: Sejarah, Metode, &*

- Terapan di Dalam Media Massa* (5th ed.). Jakarta: Kencana.
- Shafer, J. (2011, August 19). *Print vs. Online*. Retrieved November 7, 2012, from Slate: [http://www.slate.com/articles/news\\_and\\_politics/press\\_box/2011/08/print\\_vs\\_online.html](http://www.slate.com/articles/news_and_politics/press_box/2011/08/print_vs_online.html)
- Siregar, A. (2003). *Membangun Reputasi Pemerintahan pada Era Otonomi Daerah Melalui Aspek Komunikasi, Manajemen dan Administrasi*. Seminar Nasional. Jakarta: Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama).
- Soehoet, H. (2002). *Manajemen Media Massa*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta.
- Strategi Komunikasi Politik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah*. (2012). Retrieved November 17, 2012, from <http://wapresri.go.id/index/preview/setpolitik/2037>
- Strudley, G. (2008). *The Media Literacy of Primary School Children: How far do Primary School children have the knowledge and skills to access media, make sense of the representations and images produced and to create their own?* Retrieved October 18, 2012, from <http://gdstrudley3.webs.com/>
- Subandy, I. I., & Susanto, H. (1998). *Wanita dan Media: Konstruksi Ideologi Gender dalam Ruang Publik Orde Baru*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sudomoningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan JPS*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Suhandang, K. (2004). *Pengantar Jurnalistik*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Sulhin, I. (2007). *Newsmaking Criminology: Sebuah Penafsiran Antara Kritik dan Aksi*. Retrieved November 17, 2012, from <http://kriminologi.files.wordpress.com/2007/03/newsmakingcriminologi.pdf>
- Sunusi, M. (2012). *Anak & Negara: Perspektif Indonesia Abad XXI*. Jakarta: Jasp Press.
- Suranto, H., & Lopulalan, D. (2002). *Menjadi Wartawan Lokal*. Jakarta: LSPP.
- Surya, W. (2004). *Berita Lingkungan Hidup Pada Surat kabar Media Indonesia Edisi Juli-September 2003 Dilihat Dari Jenis Masalah, Sumber Berita, dan Arah Isu Berita*. Jakarta: Yayasan Kampus Tercinta.
- Syukri, M. (n.d.). *Peran Pendidikan Nonformal untuk Masyarakat Literasi Media*. Retrieved October 18, 2012, from <http://jurnal.untan.ac.id/index.php/jgmm/article/download/319/325>
- Vergheze, V. (2010, October). *United They May Stand but Will Punters Pay?* Retrieved November 7, 2012, from Asian Conversation: <http://www.asianconversations.com/PrintVsWeb.php>
- Whitney, M. (2010, September 7). *Mixed Method Research in Social Science*. Retrieved November 18, 2012, from Suite101: <http://suite101.com/article/mixed-methods-research-in-the-social-sciences-a283411>
- Yusuf, I. A. (2010, May 27). Retrieved October 31, 2012, from Bincang Media: <http://bincangmedia.wordpress.com/2010/05/27/memotret-industri-majalah-bersegmen-di-indonesia/>

# PROFIL PENELITI & KONTRIBUTOR

## PROGRAM PEMANTAUAN MEDIA

### BERBASIS KOMUNITAS

### REKAM MEDIA-AKUMASSA

**Manshur Zikri** adalah seorang mahasiswa Program Studi Kriminologi, FISIP, Universitas Indonesia, merupakan koordinator Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media-AKUMASSA, Forum Lenteng, sekaligus menjadi pemantau Rekam Media untuk perwakilan lokasi Kota Depok, Jawa Barat. Selain aktif berkegiatan di Forum Lenteng, Zikri juga aktif dalam kegiatan jurnalisme warga bersama komunitas akumassa Depok, SUBURBIA, yang mengkaji persoalan sosial, budaya dan media di Kota Depok dan sekitarnya.

**Otty Widasari** adalah Koordinator Program AKUMASSA di Forum Lenteng dan Pemimpin Redaksi *akumassa.org*. Sebelumnya ia pernah menjadi wartawan di surat kabar dan tabloid, kemudian beralih menjadi *art director* TV komersial. Selain itu, ia satu anak ini yang memiliki pengalaman membuat film dokumenter sejak tahun 2001 ini, juga aktif memberi *workshop* video di berbagai macam daerah di Indonesia.

**Lulus Gita Samudra** adalah lulusan S1 Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta. Lulus aktif berkegiatan di Forum Lenteng, dan menjabat Sekretaris Redaksi *akumassa.org* tahun 2011-2012. Sebelumnya, ia pernah mengikuti *workshop* AKUMASSA Depok pada tahun 2011. Kini, selain menjadi pengelola perusahaan toko milik keluarga, ia sedang membangun sebuah komunitas berbasis media di Kota Depok, bernama SUBURBIA.

**Renal Rinoza** lahir di Jakarta, 8 Maret 1984. Tahun 2004 kuliah di Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan lulus tahun 2010. Tahun 2007 sempat kuliah di Program E.C Ilmu Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara Jakarta. Sehari-hari bergiat Komunitas Djuanda dan aktif menulis di Jurnal Footage, *akumassa.org*, dan Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media.

**Firmansyah**, seorang pria asli Lebak, Banten, kelahiran 7 Juni 1988 dengan panggilan akrab Aboy. Terakhir, ia menamatkan pendidikannya di SMAN 3 Rangkasbitung. Selain berwirausaha, sekarang ia aktif di kegiatan jurnalisme warga *akumassa.org* sebagai penulis aktif dan pemantau media lokal di Lebak, Banten dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media. Di wilayah tempat tinggalnya, ia juga aktif bersama Saidjah Forum.

**Lalu Maldi**, dilahirkan di Pemenang, Lombok Utara pada tanggal 31 Desember 1979. Ia adalah seorang wirausaha yang juga aktif berkegiatan di komunitas lokalnya, Komunitas Pasir Putih. Selain itu, ia juga ambil bagian dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media, sebagai pemantau media massa lokal di Lombok Utara.

**Maina Sari**, Lahir di Lambadeuk, Aceh Besar, 25 Agustus 1987. Lulusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN Ar-Raniry) Banda Aceh. Sekarang Aktif di Radio Flamboyant FM Banda Aceh dan Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media-AKUMASSA.

**Muhammad Qomarudin** lahir tahun 1988, sekarang ini aktif di KBT (Kelompok Belajar Tikungan) sambil kerja sampingan sebagai mahasiswa di Universitas Jember. Dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas, Rekam Media-AKUMASSA, dia berperan sebagai pemantau media massa lokal di Jember.

**Juventius Sandy Setyawan**, lahir di Wonosobo, Januari 1988, adalah kontributor perwakilan Surabaya, Jawa Timur dalam Program Pemantauan Media Berbasis Komunitas. Saat ini, dia masih menyanggah status sebagai mahasiswa di Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Ia juga merupakan anggota dari Komunitas Kinetik Surabaya yang didirikan pada tahun 2010 dan bekerjasama dengan Forum Lenteng dalam Program AKUMASSA.

Didukung oleh:



DOC FILES!

**FORUM LENTENG** adalah organisasi yang berbentuk perhimpunan dengan anggota individu yang didirikan oleh pekerja seni, peneliti budaya, mahasiswa komunikasi/jurnalistik pada tahun 2003, yang bekerja mengembangkan pengetahuan media melalui pendidikan alternatif berbasis komunitas. Forum ini bertujuan menjadikan pengetahuan media bagi masyarakat untuk hidup yang lebih baik, terbangunnya kesadaran bermedia, munculnya inisiatif, produksi pengetahuan, dan terdistribusikannya pengetahuan tersebut secara luas.

Salah satu program yang dijalankan oleh Forum Lenteng adalah Program Pendidikan dan Pemberdayaan Komunitas Melalui Media, **AKUMASSA**. Program ini merupakan kerja kolaborasi dan berjejaring dengan berbagai komunitas di daerah dengan melakukan pelatihan penggunaan media (video, teks, fotografi dan media online) sejak 2008. Hingga saat ini, Program akumassa telah dilaksanakan di 10 lokasi, yaitu; Rangkasbitung, Lebak-Banten, Ciputat, Tangerang Selatan-Banten, Cirebon-Jawa Barat, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Padang Panjang, Sumatera Barat, Serang-Banten, Surabaya-Jawa Timur, Randublatung, Blora-Jawa Tengah, Pemenang, Lombok Utara-Nusa Tenggara Barat dan Depok-Jawa Barat.